



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2025

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) BUPATI KAMPAR TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua dan dengan izin-Nya, kami telah selesai menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2024 dengan baik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar ini merupakan laporan atas pelaksanaan program kerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, tugas umum pemerintahan maupun tugas pembantuan, serta laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional Kepala Daerah kepada DPRD, maka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2024 ini merupakan suatu kewajiban konstitusional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat (1), sedangkan sistematika pelaporan dan waktu penyampaian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana substansi dari laporan ini merupakan progres report atas pelaksanaan tugas - tugas pokok pemerintahan yang dilaksanakan, dengan beberapa permasalahan yang dihadapi disertai solusi yang dilakukan, maupun tingkat kemajuan serta prestasi yang telah diraih.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan menuju masa depan Kabupaten Kampar demi **“Kabupaten Kampar yang Agamis, Berbudaya, Maju dan dan Berkelanjutan”**

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bangkinang, 24 Maret 2025

BUPATI KAMPAR,



H AHMAD YUZAR, S.Sos.,MT

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	3
1.2 Visi dan Misi Kabupaten Kampar	6
1.3 Data Umum Daerah	8
1. Data Geografis Wilayah	9
2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	14
3. Jumlah PNS	20
4. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	21
5. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	23
6. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	25
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	26
2.1 Kondisi dan Kebijakan Keuangan Daerah	26
2.2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024	43
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	46
3.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	46
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	313
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	323
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	369
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan	369
4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	378
BAB V PRESTASI DAN PENGHARGAAN	379
BAB VI PENUTUP	381

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Daerah diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, yang sesuai dengan tuntutan zaman yang tidak terhindarkan. Selain karena landasan filosofinya mengarah pada peningkatan demokrasi dan kinerja daerah, otonomi daerah juga dipandang akan mengurangi beban pemerintah pusat.

Secara umum Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat, merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk mengevaluasi

proses serta perkembangan penyelenggaraan kewenangan daerah dan juga sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan di daerah dan antara Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif di daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di daerah.

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah disebutkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Atas dasar tersebut, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kampar Tahun 2024 disusun untuk menjelaskan arah prioritas pembangunan daerah yang meliputi visi, misi, arah kebijakan, strategi dan prioritas serta program kerja, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan, sehingga secara terperinci nampak hasil - hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan masalah dan berbagai hal yang dianggap penting selama tahun 2024.

1.1 DASAR HUKUM

Peraturan perundang - undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kampar Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
15. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2007 Nomor 20);

- 16.** Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6);
- 17.** Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 2);
- 18.** Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2024 (Berita Dacrah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 9 tahun 2022).

1.2 VISI DAN MISI KABUPATEN KAMPAR

A. Visi Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan Visi Kabupaten Kampar, yaitu ;

TERWUJUDNYA KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA BERDAYA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS TAHUN 2025

Penjabaran Visi tersebut sebagai berikut :

PUSAT AGRIBISNIS

- a. Mewujudkan penataan kepemilikan lahan serta pengembangan SDM dan teknologi dalam pembangunan agro industri dan agro bisnis.
- b. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasana daerah sebagai pusat agribisnis.
- c. Terwujudnya manajemen pemerintahan daerah yang responsif, akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan profesional.

BERBUDAYA

- a. Menumbuhkembangkan nilai-nilai Kabupaten Kampar yang agamis ke dalam etika bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar.
- b. Meningkatkan etos kerja, kreativitas dan memberdayakan nilai-nilai gotong royong.
- c. Memasyarakatkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik.

SEJAHTERA

- a. Terpenuhinya hak dasar masyarakat
- b. Tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai.

- c. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, budaya yang berbasis kerakyatan.

➤ **AGAMIS**

- a. Terwujudnya kerukunan antar dan intern umat beragama.
- b. Terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama.
- c. Terwujudnya kehidupan beragama yang mampu menjadi katalisator pembangunan.

A. Misi Kabupaten Kampar

Misi Pembangunan Kabupaten Kampar sebagai upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan meliputi :

- 1) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang responsif, akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan profesional.
- 2) Membangun sumberdaya manusia yang handal mampu menguasai IPTEK yang berlandaskan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial, ekonomi dan budaya yang berbasis kerakyatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- 4) Memperkecil ketimpangan pembangunan antar wilayah, dan antar lapisan kelompok masyarakat.
- 5) Membangun masyarakat yang berbudaya, sejahtera dan agamis.
- 6) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
- 7) Meningkatkan pembangunan infrastruktur guna pengembangan potensi dan sumberdaya daerah
- 8) Mengembangkan pembangunan pedesaan sebagai basis pembangunan daerah.
- 9) Mengembangkan dan menggerakkan sumber investasi untuk pengelolaan potensi sumberdaya daerah.

- 10) Mengembangkan dan memberdayakan koperasi dan UKM sebagai basis ekonomi daerah.
- 11) Mengembangkan pariwisata yang bernuansa kultural dan agamis
- 12) Memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya dan keagamaan di masyarakat

1.3 DATA UMUM DAERAH

Kabupaten Kampar pada awalnya terbentuk melalui Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor 3/DC/STG/50 tanggal 6 Februari 1950 tentang Penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Kemudian pada tahun 1956 dikukuhkan kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Kampar sebagai Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah $\pm 30.569,56 \text{ Km}^2$ dengan pusat pemerintahan di Bangkinang.

Kabupaten Kampar awalnya merupakan daerah otonom dengan wilayah relatif sangat luas dan terbagi dalam 19 kecamatan dengan 2 Pembantu Bupati sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS.318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian yang mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan dan Tambusai dan Pembantu Bupati Wilayah II berkedudukan di Pangkalan Kerinci mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Penetapan pembagian wilayah pembantu Bupati tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor KPTS.318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987.

Pada Tahun 1999 Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu, Kabupaten Kampar (*induk*), Kabupaten Pelalawan (*pemekaran*), dan Kabupaten Rokan Hulu (*pemekaran*) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing dan Kota Batam. Hingga saat ini Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan dan 242 Desa serta 8 kelurahan.

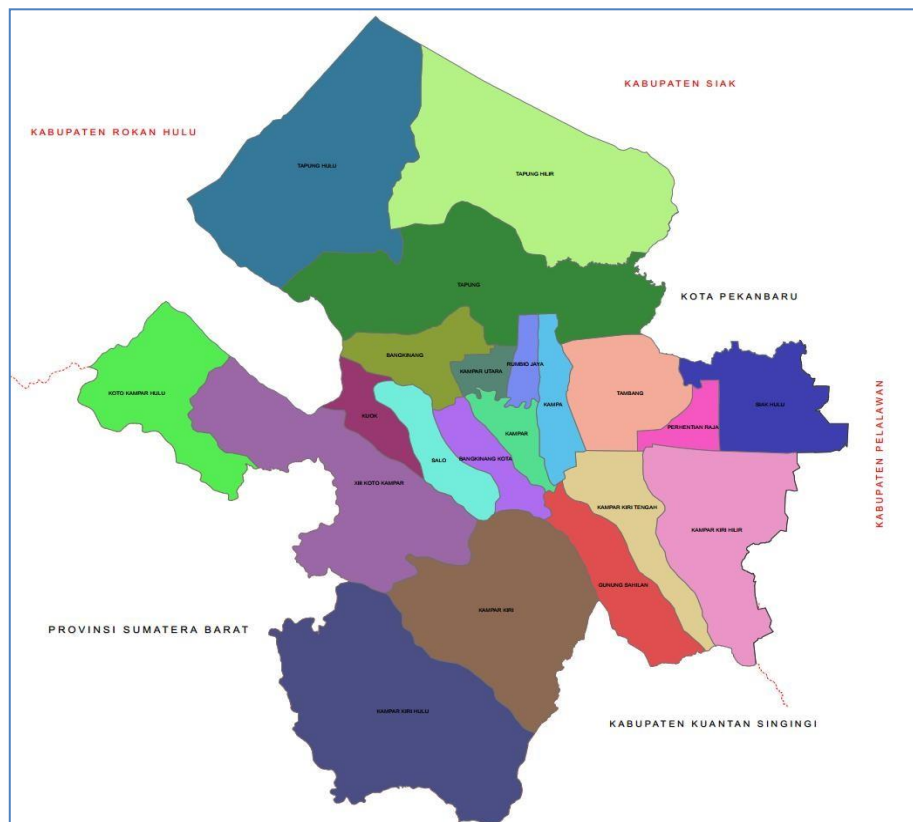
1. Data Geografis Wilayah

1] *Batas administrasi dan Luas wilayah*

Kabupaten Kampar terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai dengan 00° 27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" sampai dengan 101° 14'30" Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Prov Sumatera Barat;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru.

PETA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR



Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, alur, danau, dan rawa-rawa. Perairan umum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat, dan tempat penangkapan (fishing ground) berbagai jenis ikan perairan, sedangkan sungai-sungai besar (Sungai Kampar, Sungai Siak, dan Sungai Tapung) dimanfaatkan sebagai jalur perhubungan antar desa.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 2017 Skala 1 : 50.000 di Wilayah Kabupaten Kampar terdapat 4 (empat) batang sungai besar, yaitu :

- Sungai Kampar Kanan yang panjangnya $\pm 182,9$ km, dengan kedalaman rata-rata 7 – 10 m dan dengan lebar rata-rata 143 meter. Sungai kampar Kanan ini melewati Kecamatan Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Bangkinang Kota, Kampar, Kampa, Tambang dan Kecamatan Siak Hulu ;
- Sungai Kampar Kiri yang panjangnya $\pm 115,8$ km, dengan kedalaman rata-rata 2 - 6 m yang melewati Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan dan Kecamatan Kampar Kiri;
- Sungai Tapung Kanan yang panjangnya $\pm 94,5$ km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m, melintasi kecamatan Tapung Hulu, Tapung dan Kecamatan Tapung Hilir.
- Sungai Tapung Kiri yang panjangnya $\pm 115,5$ km dengan kedalaman rata-rata 2 – 8 m, melintasi kecamatan Tapung.

Empat sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, kegiatan budi daya perikanan, maupun sebagai sumber energi listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA Koto Panjang).

Berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS), Kabupaten Kampar terbagi atas dua Satuan Wilayah Sungai, yaitu SWS Kampar dan SWS Siak. Dari kedua SWS tersebut telah mengalami perubahan kondisi neraca air di wilayah tangkapan air di hulu sungai yang terletak di punggung timur Bukit

Barisan yang secara batasan administrasi berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terbagi menjadi tiga Sub Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sub DAS Tapung, Kampar Kanan, dan Kampar Kiri.

Luas wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih 11,289.28km² atau $\pm 11,62$ % dari luas wilayah Provinsi Riau [94.561,60 km²]. Dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 1.365,97 km² [12,10%], diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni 1.301,25 km² [11,53%] dan Kecamatan Tapung Hulu 1.169,15 km² [10,36%]. Sedangkan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Rumbio Jaya merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil yakni 76,92 km² [0,68%] diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 79,84 km² [0,71%] dan Kecamatan Perhentian Raja 111,54 km² [0,99%].

Tabel 1.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kampar

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah	
			Ha	(%)	Kelurahan	Desa
1	Kampar Kiri	Lipat Kain	91.533	8,1	1	19
2	Kampar Kiri Hulu	Gema	130.125	11,5	-	24
3	Kampar Kiri Hilir	Sungai Pagar	75.974	6,7	1	7
4	Kampar Kiri Tengah	Simalinyang	33.059	2,9	-	11
5	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan	59.797	5,3	-	9
6	XIII Koto Kampar	Batu Bersurat	73.240	6,5	1	12
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung	67.400	6,0	-	6
8	Kuok	Kuok	15.141	1,3	-	9
9	Salo	Salo	20.783	1,8	-	6
10	Tapung	Petapahan	136.597	12,1	-	25
11	Tapung Hulu	Senama Nenek	116.915	10,4	-	14
12	Tapung Hilir	Kota Garo	101.356	9,0	-	16
13	Bangkinang Kota	Bangkinang	17.718	1,6	2	2
14	Bangkinang	Muara Uwai	25.350	2,2	2	7
15	Kampar	Air Tiris	13.628	1,2	1	17
16	Kampar Timur	Kampar	17.308	1,5	-	9
17	Rumbio Jaya	Teratak	7.692	0,7	-	7
18	Kampar Utara	Sawah	7.984	0,7	-	8
19	Tambang	Sungai Pinang	37.194	3,3	-	17
20	Siak Hulu	Pangkalan Baru	68.980	6,1	-	12
21	Perhentian Raja	Pantai Raja	11.154	1,0	-	5
Jumlah			1.128.928	100,00	8	242

Sumber data : Kampar dalam Angka

2] *Topografi*

Topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0 – 500 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0 - 40%.

Secara umum Kabupaten Kampar beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 22°C – 33°C, kelembaban nisbi rata-rata 78 – 94 persen, dan curah hujan rata-rata 283 mili meter per tahun. Dengan kondisi lahan tanah yang relative subur dan pada umumnya struktur tanah bersifat arganosol, glei humus, alluvial, hidromorfik kelabu, podzolik merah kuning, litosol dan regosol. Jenis tanah arganosol tersebar luas di dataran rendah berawa-rawa dan berasosiasi dengan humus, semakin jauh dari pinggir sungai semakin tebal bahan gambutnya dan dikenal dengan gambut ombrogen.

Fisiografi lahan Kabupaten Kampar didominasi oleh grup kubah gambut, aluvial, dataran, dataran tufmasam, perbukitan, dan pegunungan. Kondisi fisiografi tersebut terdiri dari :

1. **Grup Kubah Gambut.** Satuan lahan ini berkembang di daerah cekungan rawa belakang pantai tua akibat penimbunan bahan organik dalam keadaan selalu jenuh air, sehingga proses dekomposisi minim terhadap bahan organik. Ketebalan gambut berangsur semakin tinggi ke bagian tengah sehingga permukaannya membentuk kubah dengan ketinggian tempat 10 - 20 meter di atas permukaan laut;
2. **Grup Aluvial.** Satuan lahan ini merupakan bentukan muda, oleh aktivitas danau, pelebaran sungai, dan koluviasi. Bahan pembentuknya berupa bahan endapan aluvial, koluvial, dan kadang ditutupi endapan bahan organik. Ketinggian tempat 15-475 meter di atas permukaan laut;

3. **Dataran Tuf Masam.** Merupakan dataran luas dan terbentuk dari bahan tuf vulkanik masam dan sedimen halus mempunyai ciri khas berupa punggung memanjang yang dipisahkan lembah dengan pola drainase dendritik dan aliran sungai satu arah lereng yang menyatu ke dalam sungai besar. Grup ini dijumpai berdekatan dengan grup dataran yang penyebarannya di sebelah timur laut jalur patahan utama Sumatera. Bahan tuf masam makin menipis ke arah utara dan sedikit menutupi dataran dan perbukitan. Ketinggian tempat adalah 40 – 250 meter di atas permukaan laut;
4. **Dataran.** Daerah yang tidak termasuk grup dataran tuf masam karena terbentuk dari sedimen halus sampai kasar dan telah mengalami lipatan, pengikisan dan penorehan merupakan grup tersendiri sebagai grup dataran. Umumnya lereng hampir seragam (lereng $< 16\%$ dan beda tinggi < 50 meter). Dataran memiliki sejarah yang cukup kompleks, yaitu telah mengalami berbagai proses geomorfik di permukaannya termasuk proses erosi dan sedimentasi serta pelipatan. Banyak sisa tanda proses pembentukan tanah yang dijumpai, seperti tutupan konkresi besi, lapisan plintit, dan lain-lain;
5. **Perbukitan,** terbentuk oleh proses orogenesis dan erosi terdiri atas bukit-bukit kecil dan besar masing-masing dengan perbedaan tinggi 10-50 m atau 50-300 m serta berkembang dari batuan sedimen dan metamorfik yang mengalami proses pengangkatan dan atau pelipatan serta perbukitan yang terbentuk oleh intrusi batuan plutonik masam;
6. **Pegunungan dan Plato.** Terbentuk dari batuan sedimen halus sampai kasar, granit dan batuan vulkanik yang telah mengalami lipatan/ patahan dan merupakan rangkaian Pegunungan Barisan. Puncak-puncak berada pada ketinggian > 1.000 m di atas permukaan laut.

Penggunaan Tanah di Kabupaten Kampar terbagi menjadi sebelas 11 (sebelas) jenis penggunaan yaitu lahan sawah, Lahan bukan pertanian, Tegal Kebun, Ladang Huma, padang rumput, Rawa, Kolam, Lahan sementara tidak digunakan, Hutan Negara dan Hutan Rakyat, Perkebunan dan Lahan Lain-lain. Jenis penggunaan tanah terbesar adalah lahan Perkebunan dengan luasan sebesar 708.885 ha atau 59,43 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar. Sedangkan luasan terkecil adalah lahan sawah dengan jumlah luasan sebesar 3.834 ha atau sekitar 0,32 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar.

Tabel 1.2
Luas Tanah Menurut Penggunaan Tahun 2024

No	JenisPenggunaanLahan	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
1	Lahan Sawah	3.834	0,32
2	Lahan Bukan Pertanian	209.751	17,59
3	Tegal Kebun	118.125	9,90
4	Ladang Huma	30.017	2,52
5	Padang Rumput	4.120	0,35
6	Rawa	-	0,00
7	Kolam	41.068	3,44
8	Sementara Tidak Diusahakan	76.955	6,45
9	Hutan Negara dan Hutan Rakyat	-	0,00
10	Perkebunan	708.885	59,43
11	Lain-lain	-	0,00
	Jumlah	1.192.755	100,00

Sumber : Kampar dalam Angka 2025

2. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, penduduk Kabupaten Kampar tahun 2024 sebanyak 898.973 jiwa, secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2024

No	URAIAN	TAHUN 2024	%
1	Jumlah penduduk	898.973	100
2	Kepala Keluarga	268.103	
3	Penduduk berdasarkan Jenis kelamin:		
	- Laki-laki	459.172	51.04
	- Perempuan	439.801	48.96

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar Tahun 2024

Tabel 2.2
Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		PENDUDUK	LUAS	KEPADATAN PENDUDUK	LAJU PERTUMBUHAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN				
		n(Jiwa)	n(Jiwa)	n(Jiwa)	(KM2)	n(Jiwa)	n(Jiwa)
1	BANGKINANG KOTA	20.268	20.183	40.451	177,18	228,30	1,01
2	KAMPAR	28.258	27.446	55.704	136,28	408,75	1,14
3	TAMBANG	49.666	48.137	97.803	371,94	262,95	2,19
4	XIII KOTO KAMPAR	13.175	12.375	25.550	732,40	34,89	1,08
5	KUOK	14.192	13.653	27.845	151,41	183,90	1,09
6	SIK HULU	51.664	49.517	101.181	689,80	146,68	1,62
7	KAMPAR KIRI	19.636	18.588	38.224	915,33	41,76	1,24
8	KAMPAR KIRI HILIR	7.863	7.449	15.312	759,74	20,15	1,55
9	KAMPAR KIRI HULU	6.159	5.674	11.833	1.301,25	9,09	0,79
10	TAPUNG	57.423	54.552	111.975	1.365,97	81,97	1,33
11	TAPUNG HILIR	31.406	29.991	61.397	1.013,56	60,58	0,93
12	TAPUNG HULU	43.658	41.203	84.861	1.169,15	72,58	0,92
13	SALO	14.527	13.803	28.330	207,83	136,31	0,89
14	RUMBIO JAYA	10.160	9.709	19.869	76,92	258,31	1,03
15	BANGKINANG	18.833	18.179	37.012	253,50	146,00	0,92
16	PERHENTIAN RAJA	10.955	10.546	21.501	111,54	192,76	1,35
17	KAMPA	13.216	12.766	25.982	173,08	150,12	0,96
18	KAMPAR UTARA	10.235	9.986	20.221	79,84	253,27	0,75
19	KAMPAR KIRI TENGAH	15.402	14.741	30.143	330,59	91,18	1,00
20	GUNUNG SAHILAN	11.682	11.033	22.715	597,97	37,99	1,23
21	KOTO KAMPAR HULU	10.794	10.270	21.064	674,00	31,25	0,65
	KAB. KAB. KAMPAR	459.172	439.801	898.973	11.289,28	79,63	1,25

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar Tahun 2025

- Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Kampar, dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2024 sebesar 79 jiwa/km², dimana kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Kampar yaitu 408 jiwa/ Km², diikuti dengan kecamatan Kecamatan Tambang 262 jiwa/ Km² dan Rumbio Jaya yaitu 258 jiwa/km² sedangkan kerapatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu 9 jiwa/ Km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hilir yaitu 20 jiwa/ Km² dan Koto Kampar Hulu yaitu 31 jiwa/ Km².
- Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tapung yaitu 111.975 jiwa (12,46 %) diikuti Kecamatan Siak Hulu yaitu 101.181 jiwa (11,26 %) dan Kecamatan Tambang yaitu 97.803 jiwa (10,88%), sementara itu penduduk yang paling sedikit berada di kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu 11.833 jiwa (1,32 %) diikuti oleh Kampar Kiri Hilir yaitu 15.312 (1,70%) dan Kecamatan Rumbio Jaya yaitu 19.869 jiwa (2,21 %). Sementara untuk laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2024 dari semester pertama ke semester ke 2 berada di Kecamatan Tambang yaitu sebesar 2,19%, diikuti oleh Kecamatan Siak Hulu 1,62% dan Kecamatan Kampar Kiri Hilir 1,55%.

Tabel 2.3
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	BANGKINANG KOTA	9.766	2.176	11.942
2	KAMPAR	13.476	3.235	16.711
3	TAMBANG	24.011	4.262	28.273
4	XIII KOTO KAMPAR	6.443	1.332	7.775
5	KUOK	6.803	1.631	8.434
6	SIAK HULU	25.065	4.713	29.778
7	KAMPAR KIRI	9.668	1.695	11.363
8	KAMPAR KIRI HILIR	3.992	600	4.592
9	KAMPAR KIRI HULU	2.994	601	3.595
10	TAPUNG	29.067	4.368	33.435
11	TAPUNG HILIR	16.048	2.228	18.276
12	TAPUNG HULU	21.732	3.085	24.817
13	SALO	7.028	1.342	8.370
14	RUMBIO JAYA	5.189	1.170	6.359
15	BANGKINANG	9.167	1.775	10.942
16	PERHENTIAN RAJA	5.653	892	6.545
17	KAMPA	6.426	1.389	7.815
18	KAMPAR UTARA	4.836	1.260	6.096
19	KAMPAR KIRI TENGAH	8.036	1.343	9.379
20	GUNUNG SAHILAN	5.975	913	6.888
21	KOTO KAMPAR HULU	5.691	1.027	6.718
TOTAL		227.066	41.037	268.103

Sumber : DISDUKPENCAPIL Kampar tahun 2024

Jumlah Kepala Keluarga terbanyak Tahun 2024 berada pada Kecamatan Tapung dan Siak Hulu, masing-masing 33.435 KK (12,47 %) dan 29.778 KK (11,11 %), sedangkan jumlah Kepala keluarga yang paling sedikit berada pada Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kampar Kiri Hilir masing-masing 3.595 KK (1,34 %) dan 4.592 (1,71 %).

Tabel 2.4
Perkembangan Pertambahan Penduduk Per Kecamatan
Tahun 2022- 2024

KODE	NAMA_KAB	2022	2023	2024
140101	BANGKINANG KOTA	39.024	39.085	40.451
140102	KAMPAR	53.199	53.630	55.704
140103	TAMBANG	86.359	90.797	97.803
140104	XIII KOTO KAMPAR	24.395	24.646	25.550
140105	KUOK	26.429	26.816	27.845
140106	SIAK HULU	93.898	95.789	101.181
140107	KAMPAR KIRI	35.564	36.252	38.224
140108	KAMPAR KIRI HILIR	14.099	14.566	15.312
140109	KAMPAR KIRI HULU	11.367	11.441	11.833
140110	TAPUNG	104.169	106.454	111.975
140111	TAPUNG HILIR	59.436	59.619	61.397
140112	TAPUNG HULU	81.418	82.051	84.861
140113	SALO	27.094	27.448	28.330
140114	RUMBIO JAYA	19.118	19.151	19.869
140115	BANGKINANG	35.708	35.867	37.012
140116	PERHENTIAN RAJA	20.268	20.507	21.501
140117	KAMPA	24.964	25.239	25.982
140118	KAMPAR UTARA	19.552	19.652	20.221
140119	KAMPAR KIRI TENGAH	28.857	29.081	30.143
140120	GUNUNG SAHILAN	21.565	21.752	22.715
140121	KOTO KAMPAR HULU	20.753	20.536	21.064
1401	KAB. KAMPAR	849.258	860.379	898.973

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.4 diatas dapat diketahui bahwa pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2024 sebanyak 38.594 jiwa (4,49%) dibanding jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2023. Pertambahan penduduk terbanyak pada tahun 2024 terdapat pada Kecamatan Tambang sebanyak 7.006 jiwa /tahun (18,15%), Kecamatan Kecamatan Tapung 5.521 jiwa /tahun (14,31%) dan Kecamatan Siak Hulu yaitu sebesar 5.392 jiwa/tahun (13,97%). Sementara itu penduduk yang paling sedikit pertambahan penduduknya yaitu di kecamatan kampar Kiri Hulu yaitu 392 Jiwa (1,02%).

Tinggi jumlah pertambahan penduduk pada Kecamatan Tambang, Siak Hulu dan Tapung disebabkan karena 3 kecamatan ini adalah kecamatan penyangga yang berbatas langsung dengan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, sebaliknya 3 kecamatan yang rendah pertambahan penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kecamatan Kota Kampar Hulu, merupakan kecamatan yang terluar dari Kabupaten Kampar yang berbatasan dengan Kabupaten lain dan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar
Menurut Kelompok Umur Usia Non Produktif dan Produktif Tahun 2024

NO.	USIA NON PRODUKTIF DAN PRODUKTIF	JENIS KELAMIN		PENDUDUK n(JIWA)	PERSEN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
		n(JIWA)	n(JIWA)		
1.	00-14 Tahun (Usia Muda/Non Produktif)	128.879	119.734	248.613	27,66
2.	15-64 Tahun (Usia Produktif)	311.649	301.460	613.109	68,20
3.	>=65 Tahun (Usia Tua/Non Produktif)	18.644	18.607	37.251	4,14
4.	JUMLAH	439.148	421.231	898.973	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025

Berdasarkan kelompok umur, penduduk terbanyak Kabupaten Kampar adalah penduduk berusia produktif 15-64 Tahun sebanyak sebanyak 613.109 jiwa (68,20%) diikuti oleh kelompok umur Usia Muda 00-14 Tahun sebanyak 248.613 (27,66%) dan Usia Tua /Non Produktif > 65 tahun sebanyak 37.251 jiwa(4,14%).

3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
Per 31 Desember 2024

No	Jabatan	Aparatur Sipil Negara		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	28	2	30
2	Administrator	132	35	167
3	Pengawas	140	73	213
4	Jabatan Fungsional Guru	1080	2370	3450
5	Jabatan Fungsional Medis	174	1073	1247
6	Jabatan Fungsional Teknis	264	181	445
7	Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana	713	422	1135
	JUMLAH	2531	4156	6687

Sedangkan Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja berdasarkan Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar per 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja
Per 31 Desember 2024

No	Jabatan	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional Guru	641	3010	3651
2	Jabatan Fungsional Medis	159	33	192
3	Jabatan Fungsional Teknis	96	47	143
4	Jabatan Fungsional Umum/ Pelaksana	13	3	16
	JUMLAH	909	3093	4002

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data dari tabel di atas jumlah total PNS di Kabupaten Kampar sebanyak 6.687 PNS dengan persentase jumlah PNS Perempuan sebesar 4.167 PNS (62,15 %) dan persentase jumlah PNS Laki-laki sebesar 2.531 PNS (37,85 %). Sedangkan untuk Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja sebanyak 4.002 orang.

4. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2023
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.174.719.555.451,00	3.009.589.472.794,00	94,80	2.734.805.625.683,08
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	462.827.600.519,00	437.822.575.404,00	95,60	298.626.546.420,08
1	Pajak Daerah	171.385.188.647,00	155.250.429.504,00	90,59	153.800.441.758,00
2	Retribusi Daerah	11.251.637.000,00	9.779.786.000,00	86,92	12.315.324.270,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	170.307.027.807,00	170.157.029.091,00	99,91	36.299.309.804,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	109.883.747.065,00	102.635.330.809,00	93,40	96.211.470.588,08
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.709.653.954.932,00	2.569.524.788.349,00	94,83	2.434.058.392.989,00
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.475.823.201.000,00	2.426.524.852.432,00	98,01	2.133.499.528.840,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	233.830.753.932,00	233.830.753.932,00	61,16	300.558.864.149,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.238.000.000,00	2.242.109.041,00	100,18	2.120.686.274,0
1	Pendapatan Hibah	2.238.000.000,00	2.242.109.041,00	100,18	2.120.686.274,0

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.009.589.472.794,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yaitu Rp. 2.734.805.625.683,08, terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 274.783.847.110,92 (10,05%).

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2024 dari target anggaran sebesar Rp. 462.827.600.519,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 437.822.575.404,00 (95,60%). Jika diperbandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 260.416.048.442,71, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 mengalami peningkatan

sebesar Rp. 139.196.028.983,92 (46,61%). Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar 14,55%.

Untuk Pendapatan Transfer Tahun 2024 terealisasi sebesar 94,83%, dari target anggaran sebesar Rp. 2.709.653.954.932,00 terealisasi Rp. 2.569.524.788.349,00. Jika diperbandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 2.434.058.392.989,00 realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 135.466.395.360,00 (5,57%). Persentase kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah sebesar 85,38 %.

Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar 100,18% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp. 2.238.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.242.109.041,00. Jika diperbandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 2.120.686.274,0 realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 121.422.767,00 (5,73%). Persentase kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 0,07 %.

5. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Adapun anggaran dan realisasi belanja menurut jenis belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 digambarkan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2023
5.	BELANJA DAERAH	3.312.217.677.835,00	3.075.163.143.617,77	92,84	2.619.084.986.875,00
5.1.	BELANJA OPERASI	2.380.877.607.216,22	2.217.879.416.855,77	93,15	1.900.788.191.664,50
5.1.01	Belanja Pegawai	1.222.827.236.111,73	1.179.168.395.817,82	96,43	936.576.698.454,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.013.545.084.429,49	898.445.370.026,92	88,64	849.561.732.279,45
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	22,18	122.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	128.264.705.317,00	126.774.443.761,0	98,84	102.176.510.903,05
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.240.581.358,0	13.491.207.250,00	83,07	12.351.250.028,00
5.2.	BELANJA MODAL	502.498.445.596,78	430.427.399.857,00	85,66	324.522.994.637,50
5.2.01	Belanja Modal Tanah	290.000.000,00	0,00	0,00	1.117.743.930,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.101.080.292,00	100.176.009.636,00	87,03	54.246.432.888,50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.490.683.598,00	105.190.158.943,00	83,82	55.491.835.674,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	248.514.115.306,78	212.269.367.655,00	85,42	200.185.637.334,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.295.566.400,00	12.241.947.582,00	99,56	13.242.462.641,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	807.000.000,00	549.916.041,00	68,14	238.882.170,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.486.084.358,00	122.578.409,00	8,25	66.645.582,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.486.084.358,00	122.578.409,00	8,25	66.645.582,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	427.355.540.664,00	426.733.748.496,00	99,85	393.707.154.991,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.263.682.565,00	17.824.295.997,00	97,59	16.808.319.340,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	409.091.858.099,00	408.909.452.499,00	99,96	376.898.835.651,00

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

Realisasi Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar 92,84 % yaitu Rp. 3.075.163.143.617,77 dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 3.312.217.677.835,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kampar tahun 2023 yaitu Rp. 2.619.084.986.875,00, realisasi belanja di Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 456.078.156.742,77 (17,41%).

Belanja Operasi pada tahun 2024 terealisasi 93,15%, dari anggaran sebesar Rp. 2.380.877.607.216,22, terealisasi sebesar Rp. 2.217.879.416.855,77. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2023 yaitu Rp. 1.900.788.191.664,50, realisasi belanja di Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 317.091.225.191,27 (16,68%).

Belanja Modal pada tahun 2024 terealisasi 85,66%, dari anggaran sebesar Rp. 502.498.445.596,78, terealisasi sebesar Rp. 430.427.399.857,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2023 yaitu Rp. 324.522.994.637,50, realisasi belanja di Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 105.904.405.219,50 (32,63%).

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2024 terealisasi 8,25%, dari anggaran sebesar Rp. 1.486.084.358,00, terealisasi sebesar Rp. 122.578.409,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2023 yaitu Rp. 66.645.582,00 realisasi belanja di Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 55.932.827,00 (83,93%). Belanja Tidak terduga digunakan untuk mengintervensi kegiatan yang sifatnya insidentil yang memerlukan penanganan secara khusus dan mendesak. Salah satunya adalah mengintervensi harga kebutuhan bahan pokok yang disebabkan

adanya inflasi, namun pada tahun 2024 fluktuasi harga kebutuhan barang pokok di Kabupaten Kampar cenderung stabil.

Belanja Transfer pada tahun 2024 terealisasi 99,85%, dari anggaran sebesar Rp. 427.355.540.664,00, terealisasi sebesar Rp. 426.733.748.496,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer tahun 2023 yaitu Rp. 393.707.154.991,00 realisasi belanja Transfer di Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 33.026.593.505,00 (8,39%).

6. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2024 dapat digambarkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI 2022
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	137.498.122.384,00	137.498.122.384,00	100	21.771.162.790,96
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	137.498.122.384,00	137.498.122.384,00	100	21.771.162.790,96
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	137.498.122.384,00	137.498.122.384,00	100	21.771.162.790,96
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, realisasi Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2024 sebesar 100%, dari anggaran pembiayaan yang ditetapkan sebesar Rp. 137.498.122.384,00 terealisasi sebesar Rp. 137.498.122.384,00. Bila dibandingkan dengan realisasi pembiayaan Tahun 2023 yaitu Rp. 21.771.162.790,96, realisasi Pembiayaan Daerah tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar 115.726.959.593,04.

2.1 Kondisi dan Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kampar memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian Provinsi Riau, nasional dan global yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Untuk Estimasi tahun 2023-2024 masih akan memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang mengarah pada upaya “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 juga tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021-2022 dan estimasi tahun 2023 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kampar selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan upaya memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yaitu peningkatan ekonomi berdaya saing dan kesejahteraan rakyat. Perkembangan perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah lain yang berada di sekitar Kabupaten Kampar. Oleh karena itu faktor internal yang diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian, peningkatan daya saing daerah yang berbasis keunggulan daerah dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat perkembangan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan politik, diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perkembangan perekonomian daerah.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan didalam RPD Kabupaten Kampar, kerangka pendanaan indikatif menjadi bagian sangat penting dalam memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2024. Kerangka pendanaan indikatif ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Rancangan kerangka ekonomi Tahun 2024 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Kampar dan harus mengacu pada pencapaian visi dan misi RPJPD yang juga sudah dituangkan dalam RPD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026. Adapun kerangka ekonomi daerah serta kebijakan pendapatan, belanja dan Pembiayaan yang disusun telah disesuaikan dengan kebijakan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.

Asumsi dasar APBN 2024 secara langsung berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Kampar Tahun 2024. Berdasarkan arah kebijakan ekonomi makrodaerah, sasaran pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,13 – 3,95%;
- 2) Menekan angka Tingkat Kemiskinan 6,89 -7,19 %
- 3) Menurunkan angka Tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,71- 2,95 %.
- 4) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia 74,54 – 74,89 %;
- 5) Rasio Gini sebesar 0,192 – 0,202.

Selanjutnya asumsi ini menjadikan APBD berpengaruh terhadap arah, tujuan dan prioritas pembangunan perekonomian daerah. Dampak APBD terhadap perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran utamanya akan dialokasikan untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat, dan kesejahteraan daerah akan berpengaruh terhadap kesejahteraan daerah.
- 2) Pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu fokus utama penyusunan APBD sehingga APBD diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
- 3) Mempengaruhi rencana-rencana sektor swasta. Asumsi dalam APBD merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi investor dalam menanamkan modal. Investor dapat lebih fokus dalam menanamkan modalnya pada sektor-sektor yang sesuai dengan program yang direncanakan dalam APBD.

2.1.1 Pendapatan Daerah

2.1.1.1 Kebijakan Umum Perubahan Pendapatan Daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah :

- a. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi, untuk semua jenis penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) Melakukan kajian dan penghitungan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial.
 - 3) Melakukan pembinaan dengan melaksanakan sosialisasi

kemasyarakat atau wajib pajak terkait pajak daerah dan retribusi daerah, untuk meningkatkan pemahaman pajak guna mengoptimalkan penerimaan daerah, serta melakukan himbauan baik secara langsung kepada Wajib Pajak, maupun melalui Spanduk, Baliho, Media Massa (Koran, Radio) dan Media Sosial.

- 4) Melakukan pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) secara Online, serta penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada Aplikasi SIMPAD.
- 5) Memberikan Stimulus kepada Wajib Pajak berupa pembebasan denda untuk pembayaran PBB – P2 masa pajak periode Tahun 1995 s/d 2022.
- 6) Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk pembayaran Pajak Daerah, melalui Teller Bank RiauKepri, ATM Bank RiauKepri, sedangkan untuk pembayaran PBB – P2 diberi tambahan kemudahan melalui Aplikasi Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, Indomaret, Alfamart, Gopay, Link Aja dan I-Saku serta pembayaran melalui layanan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
- 7) Mengembangkan Inovasi Pengelolaan Pajak Daerah untuk memudahkan masyarakat atau pelaku usaha dalam proses pengurusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 8) Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar.
- 9) Melakukan kajian terhadap jenis penerimaan baru sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha dan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Sehubungan telah terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kampar sedang melakukan proses

penyusunan revisi terkait Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengacu pada UU HKPD dimaksud, dimana Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun dalam 1 (satu) jenis Peraturan Daerah.

b. Memaksimalkan perolehan Pendapatan Transfer dengan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Ekstensifikasi dan Intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan, Perkebunan dan Pertambangan (PBB-P3), serta Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah di Kabupaten Kampar .
- 3) Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kampar selaku Daerah penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi (MIGAS) dan sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah/Kementerian terkait.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
- 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 6) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan penerimaan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.
- 7) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau terkait peningkatan penerimaan Transfer Antar Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok.
- 8) Melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Provinsi Riau

terkait Alokasi Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten Kampar.

- c. Mengoptimalkan perolehan Lain-lain Pendapatan yang Sah melalui kebijakan dan Melakukan koordinasi dengan Pemerintah/Instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

2.1.1.2 Kondisi Umum Perubahan Pendapatan Daerah.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekwensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dijadikan sebagai acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan restrukturisasi dasar pemungutan pendapatan daerah melalui beberapa perubahan atas Peraturan Daerah dan penerbitan Peraturan Daerah baru. Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka setiap daerah dituntut agar mampu melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan disegala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (Publik Services). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan serta pembiayaan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan banyak memberikan manfaat bagi daerah.

Memperhatikan hal tersebut diatas, kedepan diharapkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dapat terus

ditingkatkan, sehingga PAD dapat meningkat perannya untuk pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Estimasi penerimaan daerah pada APBD Perubahan Kabupaten Kampar tahun 2024 mengalami Peningkatan dari target APBD murni tahun 2024 yaitu dari Rp.2.835.696.253.723,00, menjadi Rp. 3.167.935.196.451,00 terjadi penambahan sebesar Rp.332.238.942.728,00 atau naik 11,72 persen.

Secara rinci perbandingan target penerimaan daerah Kabupaten Kampar pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	278.735.827.642	277.186.807.367	(1.549.020.275)	(0,56)
4.1.01	Pajak Daerah	154.143.211.242	156.820.690.967	2.677.479.725	1,74
4.1.02	Retribusi Daerah	13.989.450.000	11.505.450.000	(2.484.000.000)	(17,76)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.273.308.815	23.273.308.815	-	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	87.329.857.585	85.587.357.585	(1.742.500.000)	(2,00)
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.244.552.137.932	2.404.191.314.348	159.639.176.416	7,11
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.052.050.984.000	2.103.794.738.416	51.743.754.416	2,52
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	192.501.153.932	300.396.575.932	107.895.422.000	56,05
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.100.000.000	2.100.000.000	0	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.100.000.000	2.100.000.000	-	-
	Jumlah Pendapatan	2.525.387.965.574	2.683.478.121.715	158.090.156.141	6,26

Sumber : KUA PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar Tahun 2024

2.1.1.3 Permasalahan Utama Perubahan Pendapatan Daerah.

Masalah utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah.

❖ Permasalahannya :

- Potensi Sumber PAD sangat terbatas dan belum optimalnya upaya pengembangan strategi serta pemetaan potensi PAD.
- Masih belum optimalnya pendataan dan pemungutan seluruh potensi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

- c) Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi dalam membayar kewajibannya.
- d) Masih belum maksimalnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

2. Dana Perimbangan.

➤ Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA).

❖ Permasalahannya :

- a) Distribusi dan realisasi dana dari pemerintah pusat sering terlambat dari jadwal yang ditetapkan.
- b) Adanya perubahan kebijakan yang mendasar berupa perubahan peraturan dari Pemerintah Pusat, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan Kabupaten Kampar.
- c) Khusus penerimaan pendapatan dari Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas bumi sangat tergantung dari :
 - Jumlah sumur minyak yang beroperasi.
 - Realisasi penjualan hasil produksi atau lifting Migas.
 - Cost Recovery (Pengembalian biaya operasi).
 - Harga Minyak Mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP)
 - Nilai tukar Rupiah (Rp) terhadap US Dolar (US\$).
 - Faktor Pengurang Penerimaan Migas.

➤ Dana Alokasi Umum (DAU).

❖ Permasalahannya :

- a) Kurangnya akurasi data yang terkait dengan variabel-variabel dalam perhitungan dan perumusan antara lain :
 - Jumlah Penduduk tahun terakhir.
 - Luas Wilayah.
 - Jumlah Gaji Pegawai Sipil Daerah.
 - Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
 - Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

b) Belum terkoordinasinya penyampaian data ke Pemerintah pusat.

➤ Dana Alokasi Khusus (DAK).

❖ Permasalahannya :

Kriteria teknis program / kegiatan ditentukan oleh Kementerian teknis terkait, sehingga pemerintah daerah kesulitan dalam menyesuaikan dengan keadaan daerah.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

➤ Bagi Hasil Pajak Propinsi.

❖ Permasalahannya :

a) Lambatnya penyusunan jumlah estimasi target bagi hasil Provinsi untuk Kab/Kota, sehingga memperlambat dalam penyusunan target pendapatan.

b) Bagi hasil pajak tidak semuanya dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.

➤ Dana Penyesuaian.

❖ Permasalahannya :

a) Keterlambatan mempersiapkan Peraturan dan Penyaluran dana oleh Pemerintah Pusat.

b) Belum diperolehnya jumlah dana dan waktu yang pasti terkait penerimaan dana penyesuaian dari Pemerintah Pusat.

2.1.2 Belanja Daerah

2.1.2.1 Kebijakan Umum Perubahan Belanja Daerah.

Perencanaan Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang/pendukung yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, perubahan belanja daerah tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Secara umum kebijakan belanja daerah tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian target dengan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Sedangkan kebijakan alokasi belanja tidak langsung dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memelihara hasil-hasil pembangunan, serta untuk menciptakan tabungan pemerintah daerah melalui usaha penghematan dan efisiensi pengeluaran, dengan catatan bahwa efisiensi dan penghematan belanja tidak langsung tersebut tidak akan mengganggu kelancaran tugas satuan/unit kerja daerah. Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD 2024 antara lain dipengaruhi oleh;

- 1) Perubahan kebijakan belanja yang disebabkan oleh peraturan perundangan menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran belanja antar program,

kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran belanja antar kelompok belanja yang mengharuskan terpenuhinya mandatory yang merupakan kewajiban daerah;

- 2) Perubahan kebijakan belanja dengan melakukan rasionalisasi dan formulasi ulang terhadap kegiatan yang tidak prioritas.
- 3) Perubahan karena adanya perubahan SILPA;
- 4) Perubahan karena adanya pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran dapat terjadi dalam satu OPD, meskipun total alokasi untuk OPD yang bersangkutan tidak berubah;
- 5) Karena adanya perubahan dalam penerimaan, khususnya pendapatan. Perubahan target atas pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja perubahan pada tahun yang sama. Pada saat penyusunan APBD murni, target PAD ditetapkan di bawah potensi, lalu dilakukan adjustment pada saat melakukan perubahan APBD.

Kebijakan terkait dengan perubahan belanja daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pengalokasian belanja untuk menampung perubahan APBD pada pelaksanaan APBD tahun 2024 yang telah dilakukan melalui pergeseran mendahului perubahan APBD tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - 1) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan :
 - a. untuk penyesuaian belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum sesuai dengan petunjuk teknis bidang DAK;
 - b. untuk penyesuaian belanja bantuan keuangan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.26/I/2024 tentang Penetapan alokasi Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Propinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk belanja gaji guru bantu propinsi, untuk

anggaran belanja kecamatan, untuk belanja rumah layak huni, peningkatan jalan, pembangunan jalan dan jembatan;

2) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan untuk penyesuaian belanja kegiatan yang belum sesuai penempatan kode rekening pada setiap perangkat daerah.

3) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dilakukan untuk penyesuaian belanja kegiatan yang belum sesuai penempatan kode rekening pada setiap perangkat daerah.

2. Pengalokasian anggaran belanja untuk kegiatan yang belum cukup anggarannya prioritas lainnya;
3. Melakukan rasionalisasi dan pergeseran belanja pada kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan atau belum prioritas;
4. Pengalokasian anggaran untuk penyesuaian belanja yang terjadi karena perubahan SiLPA.

Perubahan atas alokasi anggaran belanja merupakan bagian terpenting dalam perubahan. Perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, setidaknya untuk mengoreksi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

SiLPA tahun berjalan merupakan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan) tahun lalu. Oleh karena itu, SiLPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Namun, besaran yang diakui pada saat penyusunan APBD masih bersifat taksiran, belum definitif, karena (a) pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh SKPD ke BUD dan (b) BPK belum menyatakan bahwa jumlah SiLPA sudah sesuai dengan yang sesungguhnya.

Selisih (variance) antara SILPA dalam APBD tahun berjalan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang (penerimaan sama dengan pengeluaran atau SILPA bernilai nol atau nihil), maka varian SILPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja.

2.1.2.2 Kondisi Umum Perubahan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah sebagai pagu tertinggi yang dialokasikan untuk menunjang setiap kegiatan yang telah direncanakan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penunjang/pendukung yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, perubahan belanja daerah tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan

Untuk menunjang pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam APBD, belanja daerah terbagi dalam klasifikasi belanja daerah sebagai berikut: 1) belanja operasi, 2) belanja modal, 3) belanja transfer dan 4) belanja tidak terduga. Gambaran selengkapnya tentang Perubahan APBD Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut :

Untuk menunjang pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam APBD, belanja daerah terbagi dalam klasifikasi belanja daerah sebagai berikut: 1) belanja operasi, 2) belanja modal, 3) belanja tidak terduga dan 4). belanja transfer. Total belanja daerah pada perubahan adalah sebesar Rp. 3.305.433.318.835,00,00 menjadi Rp. Rp. 2.899.838.280.550,00 bertambah Rp.405.595.038.085,00 dari sebelum perubahan. Perubahan belanja daerah tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.2 : Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SEELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
5.	BELANJA DAERAH	2.899.838.280.750	3.305.433.318.835	405.595.038.085
5.1.	BELANJA OPERASI	2.143.997.336.811	2.386.790.190.046	242.792.853.235
5.2.	BELANJA MODAL	346.041.654.975	495.651.303.766	149.609.648.791
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.200	1.821.084.358	(5.178.915.842)
5.4.	BELANJA TRANSFER	402.799.288.764	421.170.740.665	18.371.451.901

Sumber : KUA PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar Tahun 2024

Dari tabel dijelaskan terlihat perubahan belanja sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi bertambah sebesar Rp. 242.792.853.235,00. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari, yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

2) Belanja modal

Belanja modal secara total bertambah sebesar Rp. 149.609.648.791,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

3) *Belanja Tidak Terduga*

Belanja tidak terduga berkurang sebesar Rp. 5.178.915.842,00 Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Pada perubahan APBD tahun 2024 belanja transfer bertambah sebesar Rp. 18.371.451.901,00.

2.1.2.3 Permasalahan Utama Perubahan Belanja Daerah

Secara umum permasalahan belanja daerah adalah terbatasnya pendapatan yang bersumber dari PAD dan terjadinya pengurangan Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam yang sangat signifikan yang disebabkan oleh pemotongan lebih bayar oleh pemerintah pusat terhadap Dana Bagi Hasil sektor minyak bumi, sedangkan jumlah kebutuhan belanja dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, disamping itu masih terdapat kesalahan dalam penulisan/input kode rekening sehingga perlu adanya revisi/pergeseran kode rekening dalam rangka penyesuaian kode rekening yang berakibat pelaksanaan program dan kegiatan tertunda sampai ditetapkannya Peraturan Daerah Perubahan APBD.

2.1.3 Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan digunakan dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan pembiayaan pada APBD 2024 mengalami perubahan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK perwakilan Propinsi Riau terhadap Laporan Hasil Pertanggungjawaban APBD tahun 2023 terutama terhadap pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun 2023. Perubahan penerimaan ini mempengaruhi terhadap jumlah defisit anggaran yang harus ditutupi oleh SiLPA tahun 2023. Perencanaan Perubahan APBD tahun 2024 mengalami defisit disebabkan perencanaan belanja lebih besar dari pendapatan daerah. Untuk menutupi defisit digunakan penerimaan pembiayaan dengan kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan adalah sebagai dengan melakukan penyesuaian penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun 2023 untuk

mendanai belanja kegiatan dari semula dianggarkan Rp.64.142.026.827,00 pada perubahan terjadi koreksi berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap prttanggungjawaban APBD tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 137.498.122.384,00 atau bertambah Rp. 73.356.095.557,00

Penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD 2024 diarahkan untuk:

- 1) Penganggaran kembali sisa Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaannya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelurahan, dan pandanaan PPPK;
- 2) Penganggaran untuk kegiatan yang didanai dari sisa Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit;
- 3) Penganggaran kembali untuk sisa belanja BOS, DAK Fisik dan Non Fisik, Silpa BLUD yang belum teranggarkan, dan
- 4) Mendanai defisit anggaran belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2024.

2.1.3.1 Kondisi Umum Perubahan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

2.1.3.2 Perubahan Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Dalam APBD tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kampar tidak terjadi perubahan pengeluaran pembiayaan.

2.2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 disahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024, yang penjabarannya tertuang dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 semula berjumlah Rp. 2.899.838.280.550 bertambah sejumlah Rp. 405.595.038.285,- sehingga menjadi Rp. 3.305.433.318.835,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.	2.835.696.253.723,-
b. Bertambah	Rp.	332.238.942.728,-
c. Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	3.167.935.196.451,-

Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2024 secara rinci sebagai berikut :

1.1 Pendapatan asli daerah

a. semula	Rp.	292.266.876.791,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp.	170.560.723.728,-
c. Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	462.827.600.519,-

1.2 Pendapatan transfer

a. semula	Rp.	2.541.191.376.932,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp.	161.678.219.000,-
c. Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	2.702.869.595.932,-

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

a. semula	Rp.	2.238.000.000,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,-
c. Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	2.238.000.000,-

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp.	2.899.838.280.550,-
b. Bertambah	Rp.	405.595.038.285,-
c. Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	3.305.433.318.835,-

Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 secara rinci sebagai berikut :

1.1 Belanja operasi ;

a. semula	Rp.	2.143.997.336.811,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	236.031.981.405,22,-
c. Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	2.380.029.318.216,22,-

1.2 Belanja modal;

a. semula	Rp.	346.041.654.975,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp.	156.456.790.621,78,-
c. Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	502.498.445.596,78,-

1.3 Belanja tidak terduga;

a. semula	Rp.	7.000.000.200,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	(5.513.915.642,-)
c. Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.486.084.358,-

1.4 Belanja transfer;

a. semula	Rp.	402.799.288.764,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp.	18.620.181.900,-
c. Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	421.419.470.664,-

3. Pembiayaan daerah

(1) Penerimaan pembiayaan

a. semula	Rp.	64.142.026.827,-
b. bertambah	Rp.	73.356.095.557,-
c. Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	137.498.122.384,-

(2) Pengeluaran pembiayaan

a. semula	Rp.	0,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
c. Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,-
d. Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	0,-
e. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,-

**BAB
III****HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH****3.1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan**

Laporan ini menyajikan penilaian tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2024 sesuai dengan target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran. Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran didapatkan melalui perbandingan antara Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada tahun berjalan.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan selanjutnya dianalisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPD.

Nilai yang diperoleh dari pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Kinerja

NO	% CAPAIAN KINERJA	PERINGKAT	INTERPRETASI
1	≥ 85	AA	Memuaskan
2	≥ 75 – 85	A	Baik Sekali
3	≥ 65 – 75	B	Baik
4	≥ 50 – 65	CC	Cukup Baik
5	≥ 30 – 50	C	Agak Kurang
6	≥ 0 – 30	D	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

➤ **Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

➤ **Indikator Sasaran**

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.1.1 Evaluasi Pencapaian Sasaran Dan Pengukuran Kinerja

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kampar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026. 16 (enam belas) sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 dan mengacu kepada Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2024, memiliki indikator sasaran sebanyak 21 (dua puluh satu), terdiri dari 2 (dua) indikator untuk misi I, 4 (empat) indikator untuk misi II, 6 (enam) indikator untuk misi III, 6 (enam) indikator untuk misi IV dan 3 (tiga) indikator untuk misi V

Tabel 3.2
Pencapaian Target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian									
			Capaian indicator $\geq$ 100%		Capaian Indikator < 100%		Capaian Indikator < 100% Tetapi Lebih Tinggi Dibanding Tahun Lalu		Tidak Dapat Diukur (NA)		Rata-rata Capaian	Kategori Capaian
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	%	
1.	Misi Pertama	2	2	100	0	0	0	0	0	0	100	Memuaskan
2.	Misi Kedua	4	3	75	0	0	1	25	0	0	98,23	Memuaskan
3.	Misi Ketiga	6	3	50	0	0	2	33,33	1	16,66	95,03	Memuaskan
4.	Misi Keempat	6	3	50	2	33,33	0	0	1	16,67	72,04	Baik
5.	Misi Kelima	3	1	33,33	1	33,33	0	0	1	33,33	97,05	Memuaskan
Jumlah		21	12	57,13	3	14,29	3	14,29	3	14,29	92,47	Memuaskan

Selanjutnya analisis pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran untuk masing-masing indikator pada tahun 2024 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Mewujudkan Pembangunan Nilai Budaya Masyarakat
Misi Pertama : Kampar yang Menjamin Sistem Bermasyarakat dan
Bernegara untuk Menghadapi Tantangan Global.

Pada Misi Pertama terdapat 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan. Tingkat capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut mencapai atau melebihi target yang ditetapkan (100%).

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi pertama adalah:

Sasaran 1	Terwujudnya Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kampar Yang Agamis.

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Hasil 2024	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPD
					Tidak	
Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan	100	100	100	100	V	100
	Rata-rata capaian Tahun 2024			100	Memuaskan	

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

N/A = Tidak tersedia data

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran 1 (satu) dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 100%.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Persentase Nilai Budaya Agamis Yang Dikembangkan dan Diamalkan

Indikator persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk tahun 2024 terealisasi 100% dari target 100% dengan nilai capaian 100% dengan kategori Memuaskan (AA).

Nilai budaya adalah seperangkat nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi atau lingkungan masyarakat yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan (believe), dan simbol- simbol, dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai budaya merupakan konsep yang mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya memainkan peran sentral dalam membentuk identitas, norma dan perilaku individu serta kelompok dalam suatu masyarakat.

Agama adalah salah satu elemen fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya. Hubungan antara agama dan budaya menciptakan interaksi yang saling mempengaruhi, dimana agama dapat membentuk dan memodifikasi budaya, sementara budaya juga dapat mempengaruhi bagaimana agama dipraktikan dalam masyarakat.

Meskipun agama dan budaya sering kali dapat berinteraksi secara harmonis, ada juga tantangan yang muncul. Beberapa praktik budaya yang tidak sejalan dengan ajaran agama bisa menimbulkan ketegangan. Kurang banyaknya orang yang terjangkau dalam sosialisasi penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis menjadi hambatan/kendala dalam mencapai sasaran indikator ini. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan ini adalah dengan memperbanyak target sosialisasi. Indikator persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan tahun 2024 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 131.818.300,- dengan realisasi sebesar 95,27% atau terealisasi sebesar Rp. 125.585.900,-

Sasaran 2	Terciptanya Toleransi Antar Multikultur

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Hasil 2024	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPD
					Tidak	
Indeks toleransi	B	B	B	100	V	B
	Rata-rata capaian Tahun 2024			100	Memuaskan	

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran 2 (dua) dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 100%.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

Indeks Toleransi

Indikator kinerja Indeks Toleransi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk tahun 2024 masuk kategori B dengan target B juga. Indikator kinerja ini terealisasi 100% dari target atau dengan nilai capaian 100% dengan kategori Memuaskan (AA). Capaian indikator ini melalui program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama.

Toleransi merupakan prinsip utama dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan mempraktekan prinsip-prinsip toleransi kepada sesama, kehidupan bermasyarakat akan terasa lebih terjamin damai dan aman dengan minimnya potensi konflik yang dipicu oleh perbedaan dikalangan masyarakat. Toleransi menjadi penting mengingat bahwa Indonesia merupakan negara multikultural dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Nilai-nilai toleransi sangat dibutuhkan sebagai landasan sosial dan jaminan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Isu intoleransi berkembang seiring dengan berjalannya proses demokratisasi di Indonesia.

Masyarakat Kabupaten Kampar mayoritas bersuku Melayu dan beragama Islam, walaupun kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Kampar cukup harmonis tetapi tetap saja sering terjadi fanatisme aliran agama tertentu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat. Rentannya konflik antar umat beragama di masyarakat diakibatkan oleh fanatisme keagamaan dan kurangnya pengetahuan serta sikap toleransi antar umat beragama.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) disusun berdasarkan indikator penilaian seperti Toleransi, Kerjasama, dan Kesenjangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000, atau terealisasi sebesar 100%

Misi Kedua :	Meningkatkan Manajemen Dan Kemampuan Aparatur Dalam Mengelola Aset Daerah Dan Pelayanan Masyarakat

Pada misi kedua terdapat 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran (75%) mencapai atau melebihi target;
2. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (25%) masih dibawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi kedua adalah:

Sasaran 1	Meningkatnya Efektifitas Dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Hasil 2024	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPD
SAKIP	Nilai BB	Nilai BB	B	90	^	Nilai BB
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	V	WTP
	Rata-rata capaian Tahun 2024			95	Memuaskan	

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 95%.

Penjelasan untuk indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

SAKIP

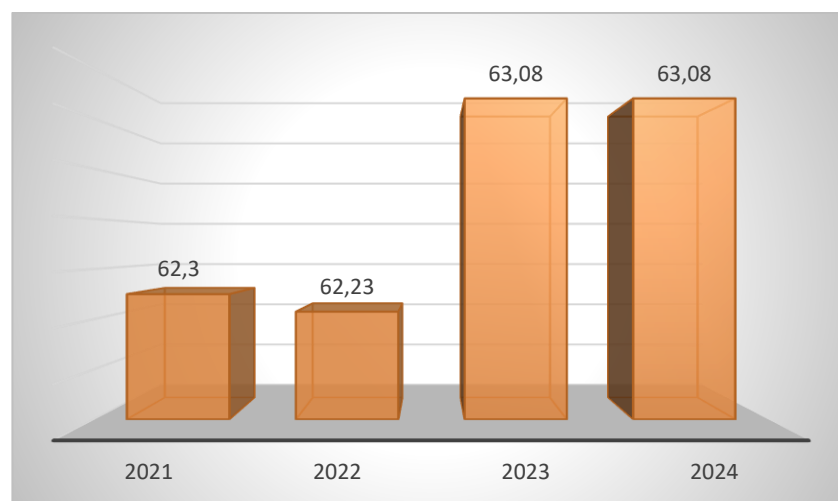
Indikator kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2024 belum terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar memperoleh predikat B dengan nilai 63,08. Hal tersebut menunjukan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu Implementasi SAKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Meskipun indikator kinerja ini belum terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, namun mengalami kenaikan pada nilai hasil evaluasi. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,09	23,27
2.	Pengukuran Kinerja	30	17,56	17,64
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,61	9,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,29	12,37
	Nilai Hasil Evaluasi	100	62,55	63,08
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui Tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Penyajian Laporan Kinerja perlu ditingkatkan kualitas dengan analisis yang mendalam dan komprehensif serta memberikan informasi yang memadai tentang strategi perbaikan kinerja kedepan.

Capaian nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kampar dari tahun 2021 hingga 2024 secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.1
Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021-2024



OPINI BPK

Indikator kinerja Opini BPK terealisasi dengan capaian 100%. Sama dengan tahun sebelumnya, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Kampar. Capaian opini tersebut diperoleh melalui meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah setiap tahun Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan data, Pemerintah Kabupaten Kampar sejak tahun 2017 menunjukkan prestasi yang baik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan Pemerintah Daerah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan Pemerintah Daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan Keputusan. Pencapaian pelaksanaan indikator kinerja ini didukung oleh program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Hasil 2024	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPJMD
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,44	88,10	90,68	102,93	V	89,45
Indeks SPBE	C	C	B	100	V	
	Rata-rata capaian Tahun 2024			101,46	Memuaskan	

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 101,46%.

Penjelasan untuk indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Kampar Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan selama satu periode mulai Januari hingga November 2024, sebanyak 43 OPD telah menyampaikan laporannya. Namun terdapat 10 OPD yang belum dapat menyampaikan laporan SKM pada tahun ini.

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kampar Tahun 2024 terealisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu 88,10 poin dengan realisasi 90,68 poin atau tercapai sebanyak 102,93%. Pada perencanaan lima tahunan, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kampar tahun 2024 sudah melebihi target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar yaitu sebesar 90,68 poin dari target RPD sebesar 89,45 point.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel.

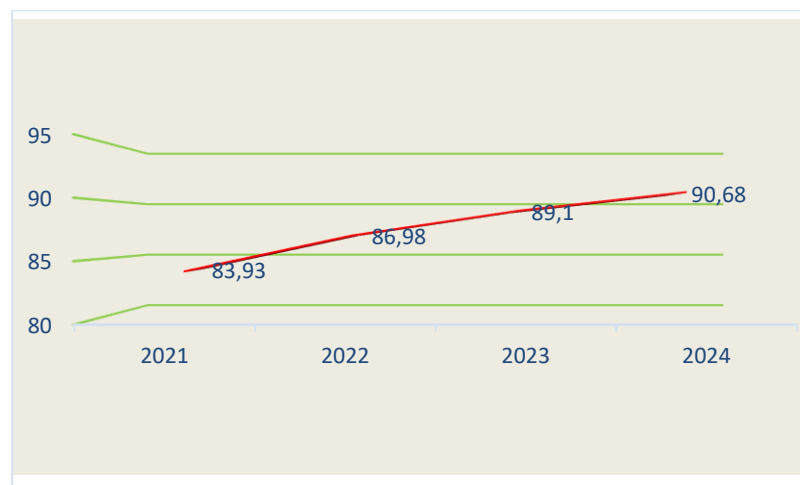
Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga November 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 90,68. Nilai IKM di lingkup Kabupaten Kampar menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2024.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 43 OPD telah menyampaikan laporannya. Namun terdapat 10 OPD yang belum dapat menyampaikan laporan SKM pada tahun ini.
3. dari seluruh OPD yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi

pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Pemerintah Kampar dapat dilihat melalui grafik berikut:

Grafik 3.2
Nilai SKM Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2024 di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar.

Indeks SPBE

Realisasi Indikator kinerja indeks SPBE tahun 2024 memperoleh predikat B dengan nilai 2,96. Bila dibandingkan dengan target, capaian indikator kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu predikat C. Capaian tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi Pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdampak pada integrasi sistem. implementasi SPBE yang

terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar, sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar memiliki beberapa kekuatan utama dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan manajemen data yang diatur melalui Keputusan Bupati Kampar No. 555-650/XI/2022 telah mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, referensi, basis data, kualitas data, hingga interoperabilitas data. Tim Koordinasi SPBE juga menjadi keunggulan, karena telah terbentuk, melaksanakan tugasnya, dan berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah. Selain itu, layanan pusat data tersedia dan sudah dimanfaatkan oleh perangkat daerah, meskipun SOP penggunaannya belum disahkan. Dalam aspek layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menunjukkan kekuatan melalui penerapan berbagai aplikasi seperti SIPD, SPSE, SIASN, SATU DATA, SIMPAD, dan aplikasi layanan perizinan terpadu berbasis cloud. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan layanan berbasis elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

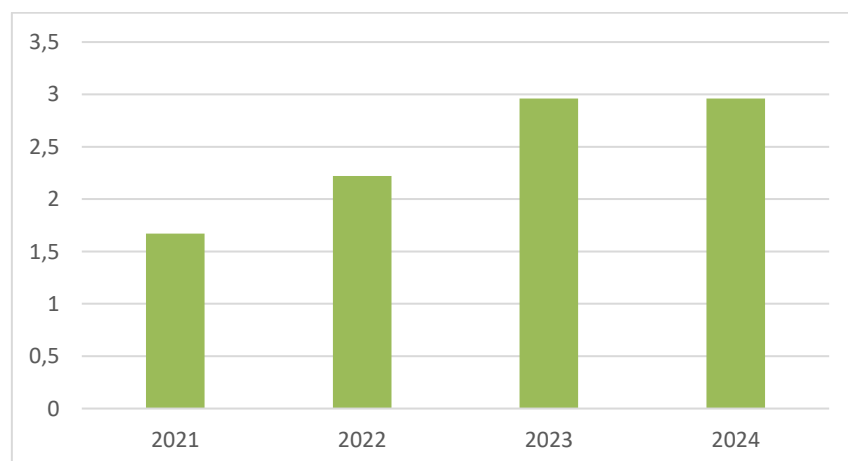
Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar masih menghadapi beberapa kelemahan dalam penerapan SPBE meskipun telah menunjukkan berbagai pencapaian. Dokumen Arsitektur SPBE yang dimiliki hanya mencakup sebagian domain, sementara domain keamanan SPBE belum terintegrasi, dan Peta Rencana SPBE yang telah disahkan belum tersedia. Dalam hal inovasi proses bisnis, belum ditemukan bukti adanya perbaikan proses bisnis yang signifikan. Sistem Penghubung Layanan juga baru diterapkan di sebagian unit kerja, menunjukkan keterbatasan dalam cakupan implementasi. Selain itu, manajemen risiko, keamanan informasi, data, SDM SPBE, aset TIK, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE masih belum sepenuhnya diterapkan. Audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE juga belum dilaksanakan. Dengan kelemahan-

kelemahan ini, terdapat ruang besar untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan manajemen SPBE agar tercapai integrasi layanan yang lebih baik di seluruh perangkat daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar patut diapresiasi atas pencapaian dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terutama melalui kebijakan manajemen data yang diatur dalam Keputusan Bupati Kampar No. 555-650/XI/2022, yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, referensi, hingga interoperabilitas data. Keberadaan Tim Koordinasi SPBE yang aktif dan layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah menunjukkan langkah positif dalam mendukung integrasi dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Selain itu, penerapan berbagai aplikasi seperti SIPD, SPSE, SIASN, SATU DATA, SIMPAD, dan layanan perizinan berbasis cloud mencerminkan komitmen terhadap digitalisasi layanan publik dan administrasi pemerintahan. Namun, untuk lebih meningkatkan penerapan SPBE, disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar segera melengkapi Peta Rencana SPBE yang terintegrasi dan disahkan, serta memastikan domain keamanan SPBE tercakup dalam dokumen Arsitektur SPBE. Selain itu, perlu dilakukan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE secara rutin untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan sistem. Implementasi manajemen risiko, manajemen aset TIK,

Capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kampar 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.3
Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021-2024



Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Taat Hukum, Menguasai Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Beriman, Bertakwa Yang Berwawasan Ke Depan

Pada misi ketiga terdapat 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 6 (enam) indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran (50%) mencapai atau melebihi target.
2. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran (33,33%) masih dibawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.
3. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (16,67%) tidak dapat dinilai karena tidak tersedia data (N/A)

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi ketiga adalah:

Sasaran 1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Hasil 2024	% Capaian	Tercapai /	Target Akhir RPD
					Tidak	
Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,04%	71,19%	89,19	125,28	V	71,49
	Rata-Rata Capaian Tahun 2024				125,28%	Memuaskan

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

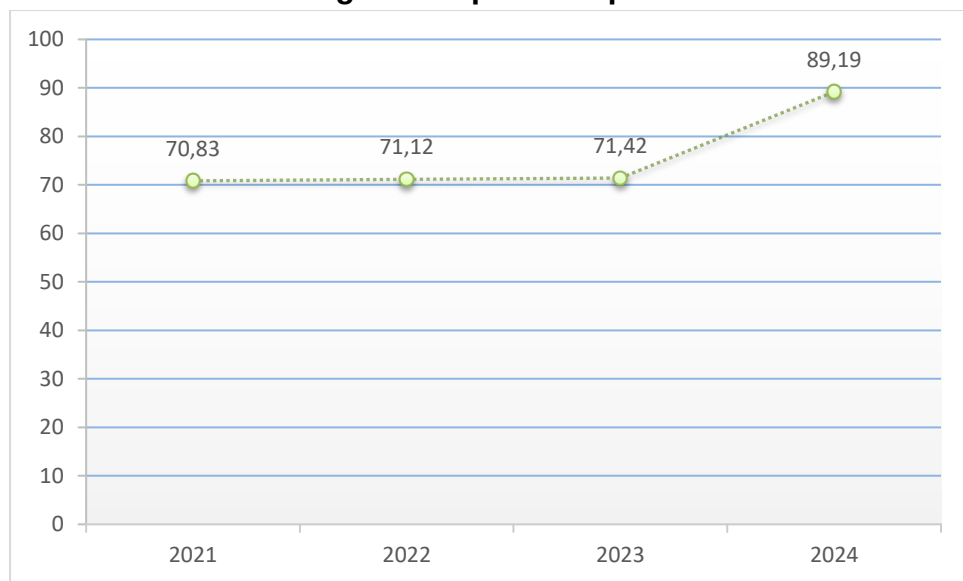
Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran 1 (satu) dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 125,28%.

Penjelasan untuk indicator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH)

Indikator kinerja angka harapan hidup untuk tahun 2024 terealisasi 89,19% dari target 71,19% dengan nilai capaian 125,28% dengan kategori Memuaskan (AA). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja ini mengalami kenaikan. Capaian angka harapan hidup dari tahun 2021-2024 berturut-turut yaitu 70,83%, 71,12%, 71,42%, dan 89,19. Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik 3.4
Angka Harapan Hidup



Dalam mencapai sasaran angka harapan hidup mendapat hambatan/kendala sebagai berikut:

1. Pemerataan sumber daya dan pendistribusian tenaga kesehatan yang belum merata.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, terutama Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti Kec. Kampar Kiri Hulu, serta buruknya sarana jalan menuju fasilitas kesehatan.
4. Kerjasama dan koordinasi lintas program dan lintas sektor yang masih belum maksimal.

Dari hambatan/kendala yang ada diupayakan solusi untuk mengatasinya antara lain:

1. Pendistribusian tenaga kesehatan secara merata sekaligus peningkatan kompetensi SDM Kesehatan
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil
3. Melakukan kampanye kesehatan berbasis teknologi informasi serta edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dengan melibatkan kelompok masyarakat, komunitas dan peran keluarga
4. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan, meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan. Pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya.

Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Dan Tingkat Pendidikan

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.8
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Hasil 2024	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPD
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,53	9,63	9,58	99,48	^	9,82
Harapan lama sekolah (tahun)	14,02%	14,14	13,61	96,25	^	14,40
Rata-Rata Capaian Tahun 2024					97,86%	Memuaskan

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran 2 (dua) dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 97,86%.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Diperoleh data bahwa angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kampar tahun 2024 adalah 9,58 Tahun, artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Kampar bersekolah tahun atau setara tamat kelas 9 SMP. Rumus Angka Rata-rata lama sekolah adalah:

$$ARLS \text{ selama } 9,58 \\ = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas sedang sekolah atau sudah berijazah}}{\text{Jumlah penduduk x lama pendidikan yang dihabiskan}}$$

Angka rata-rata lama sekolah adalah kombinasi antara partisipasi isekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, angka rata-rata lama sekolah belum mencapai target yang telah ditetapkan, dari target sebesar 9,63 tahun terealisasi sebesar 9,48 tahun dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,48%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi capaian kinerja indikator angka rata-rata lama sekolah ini mengalami peningkatan.

HARAPAN LAMA SEKOLAH (HLS)

Realisasi harapan lama sekolah di Kabupaten Kampar pada tahun 2024 adalah 13,61% dari target sebesar 14,14% atau dengan capaian 97,00%. Ini berarti anak-anak Indonesia yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I.

Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi Harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan Harapan Lama Sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak

Sasaran 3	Berkurangnya Tingkat Kriminalitas

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.9
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Hasil 2024	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPJMD
Persentase pengurangan kriminalitas	-0,30%	0,25	0,38	152	V	3,09
Rata-Rata Capaian Tahun 2024					152	Memuaskan

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat diketahui realisasi dari sasaran berkurangnya tingkat kriminalitas berdasarkan data penyelesaian konflik mencapai target yang telah ditetapkan.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

PERSENTASE PENGURANGAN KRIMINALITAS

Indikator Persentase pengurangan kriminalitas terealisasi sebesar 38%. Tercapainya target ini karena adanya upaya untuk membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial meminta kepada pemimpin dari masing-masing pihak untuk tidak memperburuk situasi konflik dan saling berkomunikasi untuk mencegah konflik besar yang terjadi. Dari 24 konflik yang ada, termediasi sebanyak 9 konflik. Hambatan yang dialami adalah sulitnya membuat kesepakatan antar kelompok yang berkonflik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas antara lain: pendidikan, ekonomi, dan agama. Hambatan dalam penanganan tingkat kriminalitas ini adalah tidak terdeteksinya ancaman kriminalitas.

Sasaran 4	Meningkatnya Pengamalan Agama

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Hasil 2024	% Capaian	Tercapai/	Target Akhir RPJMD
					Tidak	
Persentase indeks melek AlQuran (Kitab Suci)	68,45%	69,81	N/A	N/A	N/A	72,53
		Rata-Rata Capaian Tahun 2024			N/A	

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

N/A = Tidak tersedia data

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat diketahui realisasi dari sasaran meningkatnya pengamalan agama tidak didapat data realisasinya.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

PERSENTASE INDEKS MELEK AL-QURAN

Indikator Persentase indeks melek Al-quran Tahun 2024 tidak didapat data realisasi capaiannya.

Sasaran 5	Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.11
Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 5

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Hasil 2024	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPJMD
Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana agama	100%	100%	100%	100	V	100
Rata-Rata Capaian Tahun 2024					100	Memuaskan

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat diketahui realisasi dari sasaran meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama mencapai target yang telah ditetapkan.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

PERSENTASE PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA AGAMA

Indikator Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana agama Tahun 2024 terealisasi sebesar 100%. Tercapainya target ini karena adanya upaya untuk selalu memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana rumah ibadah.

Misi Keempat :	Mengembangkan Ekonomi Rakyat Yang Berbasis Pada Sumber Daya Lokal Dengan Orientasi Pada Agribisnis, Argo Industri, Dan Pariwisata Serta Mendorong Pertumbuhan Investasi Secara Terpadu Dan Terkait Antara Swasta, Masyarakat Dan Pemerintah Yang Berskala Lokal, Regional, Nasional Maupun Internasional

Pada misi keempat terdapat 4 sasaran dengan 6 indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 6 indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran (50%) mencapai atau melebihi target;
2. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran (33,33%) tidak mencapai target;
3. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (16,67%) tidak dapat dinilai karena tidak tersedia data (N/A).

Pengukuran kinerja pencapaian sasaran terhadap misi keempat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah.

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.12
Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2023	Hasil 2024	% Capaian	Tercapai /Tidak	Target Akhir RPJMD
1. Kontribusi PDRB sektor pertanian	34.27	34,39	32,34	94%	V	
2. Kontribusi PDRB sektor industri	34.13%	32,37	30,83	95%	V	
3. Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	NA	0.96	0.09	9,4%	X	
Rata-Rata Capaian Tahun 2024					66,13%	Baik

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata capaian sasaran Meningkatnya peryumbuhan sektor unggulan daerah, ada yang tercapai dan masih ada yang belum terealisasi karna tidak ada data nilai capaian 66,13% dengan kategori Baik (B). Secara umum dari realisasi ke tiga indikator kinerja selama tahun 2024 menunjukkan bahwa ke dua indikator kinerja mencapai target.

KONTRIBUSI PDRB SEKTOR PERTANIAN

Indikator kinerja Kontribusi PDRB sektor Pertanian Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2024 terealisasi sebesar 32,34% dari target sebesar 34,39% atau dengan capaian 94%. Capaian indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan 5%.

Peranan sektor pertanian bukan saja terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan pemberantasan kemiskinan, sumber pendapatan, serta perekonomian Regional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hasil pendapatan disektor pertanian dapat di ukur dari nilai PDRB yang dihasilkan sektor tersebut.

Penurunan PDRB sektor pertanian terus terjadi akibat penurunan output dari berbagai lapangan usaha. Salah satu lapangan usaha yang mengalami penurunan berarti adalah sektor pertanian. Sektor pertanian, pada tahun 2004-2025, memberikan kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten Kampar.

Terjadinya penurunan PDRB sektor pertanian diakibatkan Tingkat alih fungsi lahan pertanian semakin tinggi Laju penggunaan lahan akan semakin meningkat seiring dengan pembangunan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya permintaan akan lahan mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Proses alih fungsi lahan secara langsung dan tidak langsung ditentukan oleh dua faktor, yaitu sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah dan sistem non kelembagaan yang berkembang secara alamiah dalam masyarakat.

Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi Terjadinya penurunan PDRB sektor pertanian Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Potensi Lahan sawah Berkelanjutan. Perlindungan lahan pertanian mencegah ahli fungsi lahan dengan menerapkan kebijakan ketat serta mendorong pertanian vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan.

KONTRIBUSI PDRB SEKTOR INDUSTRI

Indikator Kontribusi PDRB Sektor Industri tahun 2024 terealisasi sebanyak 30.83 dari target 32,37 atau dengan capaian 95%. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa indikator tersebut dicapai melalui pelaksanaan 3 (Tiga) kegiatan yaitu: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Adapun hambatan yang terjadi Kontribusi PDRB Sektor Industri tahun 2024:

1. Akurasi data tentang pelaku IKM Keterbatasan Infrastruktur
2. Ketergantungan Bahan baku Impor
3. Peraturan Regulasi yang Kompleks
4. rendahnya pertumbuhan industri berbasis sumber daya lokal
5. Belum optimalnya pembangunan perwilayahan industri

Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi Kontribusi PDRB Sektor Industri pemerintah berupa dalam pengembangan industri sesuai arah kebijakan RPIK 2020-2040 dan akan dilakukan pembinaan pelaku industri dalam hal produksi maupun pemasaran pengembangan sumber daya lokal dengan pelatihan-pelatihan untuk kebutuhan industri, berupa penigkatkan kualitas yang terampil, relevan sesuai dengan segmen pasar dan dunia Industri. Menyederhanakan aturan dan regulasi untuk lebih memudahkan pelaku IKM.

KONTRIBUSI PDRB SEKTOR PARIWISATA

Indikator Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata tahun 2024 terealisasi sebanyak 9,4% dari target 0.96%. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa indikator tersebut tidak mencapai target.

Tidak tercapai nya Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata karena Kurang Kesadaran Masyarakat terhadap Taat Pajak. Kesadaran pajak dapat didefinisikan sebagai pemahaman dan ketaatan warga negara terhadap kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun kesadaran ini penting dalam pembangunan daerah, sering kali terjadi rendahnya kesadaran pajak di kalangan masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang pentingnya pajak atau tingkat

kepercayaan yang rendah terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah. Kesadaran pajak sangat penting karena pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi daerah.

Oleh karena itu, Solusi untuk mengatasi tantangan dalam meningkatkan kesadaran pajak dan menemukan solusi yang efektif akan diadakan sosialisasi berkelanjutan mengenai ketaatan pajak. Edukasi dan sosialisasi perpajakan, transparansi penggunaan dana pajak, memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh, mengatasi hambatan dalam pembayaran pajak, dan penegakan hukum yang tegas adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

Sasaran 2	Meningkatnya Investasi Daerah.

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.13
Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Hasil 2024	% Capaian	Tercapai / Tidak	Target Akhir RPJMD
1. Pertumbuhan investasi	2,87	3,83	5,06	132%	V	
Rata-Rata Capaian Tahun 2024					132%	Memuaskan

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata capaian sasaran Meningkatkan Investasi Daerah dengan nilai capaian 132% dengan kategori Memuaskan (AA). Secara umum dari realisasi indikator kinerja selama tahun 2024 menunjukkan bahwa indikator kinerja mencapai target yang memuaskan.

Indikator kinerja pertumbuhan investasi Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2024 terealisasi sebesar 5,06% dari target sebesar 3,83% atau dengan capaian 132%. Capaian indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan, dimana realisasi tahun 2024 sebesar Rp.7.140.000.000.000 sedangkan 2023 hanya sebesar Rp. 10.853.507.220.000.

Berdasarkan hasil resmi DPM-PTSP Pemerintah Provinsi Riau grafik realisasi investasi di Kabupaten Kampar meningkat. Realisasi Investasi Kabupaten Kampar dibandingkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada tahun 2024 menduduki peringkat VI dan masih optimis untuk tahun 2025 dan seterusnya realisasi investasi akan tumbuh dan meningkat di Kabupaten Kampar. Meningkatkan Pengawasan Penanaman Modal dan Bimbingan Teknis ke pelaku usaha terkait Regulasi Penanaman Modal dan Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Kendala yang terjadi Pertumbuhan Investasi Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha Terkait Regulasi Penanaman Modal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan tidak patuhnya pelaku usaha terhadap Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Sasaran 3	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.14
Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Hasil 2024	% Capaian	Tercapai / Tidak	Target Akhir RPJMD
1. Persentase penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah	3.99%	- 1,69%	0,29%	18%	X	
Rata-Rata Capaian Tahun 2024					18%	Kurang

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat capaian sasaran Menurunnya TPT dengan kategori Kurang dengan rata-rata capaian 18%. Realisasi capaian sasaran menurunnya TPT tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Persentase penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah tersebut tidak tercapai karna Pembangunan ekonomi yang memerlukan

perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini terjadi Ketika seseorang yang siap dan ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Fenomena pengangguran terbuka berdampak langsung pada angka statistik tenaga kerja, yang menunjukkan kesehatan ekonomi suatu daerah.

Menurunkan tingkat pengangguran masih menjadi tantangan berat adapun berbagai faktor yang saling terkait, antara lain:

1. sulitnya mendapat informasi lowongan pekerjaan dari perusahaan.
2. Pelatihan Kerja belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan tenaga kerja untuk menjadi terampil dan/atau kompeten.
3. Penyerapan tenaga kerja disektor formal maupun Informal masih relatif terbatas.
4. Kasus Hubungan Industrial yang terus terjadi serta penyelesaian kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama masih belum optimal.
5. Belum adanya Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) belum dilaksanakan.

Dengan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya TPT langkah strategis untuk mengatasi TPT dapat dilakukan, Meningkatkan Kompetensi pencari kerja sesuai kebutuhan pasar kerja/lowongan kerja dan Melakukan pembinaan terhadap sistem dan kelembagaan hubungan Industrial. upaya penyediaan jejaring informasi pasar kerja dengan berbagai pihak yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja serta Melaksanakan program jaminan kerja, bertujuan memberi perlindungan finansial, meningkatkan kualitas hidup, persiapan menghadapi tantangan baru, bagi yang terdampak kehilangan pekerjaan serta Komitmen Pemerintah terhadap Program Perlindungan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), berupa Uang tunai, konsling, informasi pasar kerja, dan pelatihan bagi Pekerja atau Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sasaran 4	Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.15
Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 4

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Hasil 2024	% Capaian	Tercapai / Tidak	Target Akhir RPJMD
Persentase penurunan Tingkat Kemiskinan	-3,96	-3,42	N/A	N/A	N/A	
Rata-Rata Capaian Tahun 2024					N/A	Memuaskan

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, capaian indikator Persentase penurunan tingkat kemiskinan ini tidak bisa dihitung karena tidak ada data.

Misi Kelima :	Mewujudkan Pembangunan Kawasan Seimbang Yang Dapat Menjadi Kualitas Hidup Secara Berkesinambungan

Pada misi kelima terdapat 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 3 indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 1 indikator kinerja sasaran (33,33%) tidak mencapai target;
2. Sebanyak 1 indikator kinerja sasaran (33,33%) mencapai atau melebihi target;
3. Sebanyak 1 indikator kinerja sasaran (33,33%) tidak dapat dinilai karena tidak tersedia data (N/A)

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi kelima adalah:

Sasaran 1	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.16
Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Hasil 2024	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPD
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,42	85,31	73,12	85,71	X	95,10
	Rata-rata capaian Tahun 2024			85,71	Memuaskan	

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mencapai hasil 85,71% dengan kategori memuaskan (AA).

Penjelasan indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG

Dari data di atas dapat dilihat bahwa target indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2024 adalah 85,31% dengan realisasi yang hanya mencapai sebesar 73,12% atau mendapat capaian persentase sebesar 85,71%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi target indikator ini mengalami sedikit penurunan. Adanya beberapa hambatan dalam mencapai sasaran ini adalah pola ruang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak adanya anggaran yang tersedia, permasalahan sertifikat yang belum terbit, batas tanah yang belum jelas dengan tumpang tindih kepemilikan yang tidak memiliki legalitas, adanya Masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah yang menolak pengelolaan oleh pemerintah, tidak memiliki legalitas kepemilikan, dan kurangnya koordinasi antar Lembaga pemerintah daerah, KLHK, dan BPN terhadap data dan pemetaan sehingga sering terjadi tumpang tindih kepemilikan.

Beberapa Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan itu perlu adanya anggaran dana untuk bidang tata ruang dan adanya anggaran untuk Ganti kerugian. Selainnya itu perlu adanya koordinasi antar instansi terutama BPN dan Pemerintah Daerah dalam percepatan legalisasi tanah, adanya pendekatan social untuk menghindari konflik dengan Masyarakat dan mempercepat proses legalisasi melalui regulasi yang lebih fleksibel dan prosedur yang jelas.

Indikator kinerja Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan meliputi empat program, yaitu program penyelenggaraan penataan ruang, program penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, program pengelolaan tanah kosong dan program pengelolaan izin membuka tanah dengan anggaran total 5.890.903.200 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 21,45%

Sasaran 2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.17
Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 2

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Hasil 2024	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPD
Persentase peningkatan pelayanan transportasi	60,04	74,20	80,40	108,4	V	100
	Rata-rata capaian Tahun 2024			108,4	Memuaskan	

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase peningkatan pelayanan transportasi mencapai hasil 108,4% dengan kategori Memuaskan (AA).

Penjelasan indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

PERSENTASE PENINGKATAN PELAYANAN TRANSPORTASI

Dari data di atas dapat dilihat bahwa target indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2024 adalah 74,20% dengan realisasi mencapai sebesar 80,40% atau mendapat capaian persentase sebesar 108,4%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi target indikator ini mengalami kenaikan.

Dalam pelaksanaan tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar mengalami beberapa hambatan/ kendala dalam pencapaian target seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan transportasi dan kurangnya minat penggunaan angkutan umum. Walaupun demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar berusaha menyediakan sarana dan prasarana pendukung di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor dan memaksimalkan setiap pelayanan yang ada di terminal agar selalu tercapainya target kinerja. Selain itu akan memperbanyak kegiatan sosialisasi tentang keselamatan transportasi dan angkutan umum dan akan menyediakan sarana dan prasarana angkutan umum.

Dari data realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar berjalan dengan baik dengan penyerapan anggaran sebesar 89,49% atau senilai dengan Rp. 37.311.227.152.

Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.18
Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 3

Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Hasil 2024	% Capaian	Tercapai/ Tidak	Target Akhir RPD
Penurunan emisi GRK terhadap baseline (GgCO2-e)	35.940,55	34.102,87	N/A	N/A	N/A	100
	Rata-rata capaian Tahun 2024			N/A		N/A

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

N/A = Tidak tersedia data.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, capaian indikator Penurunan Emisi GRK terhadap baseline (GgCO₂-e) ini tidak bisa dihitung karena kegiatan ini belum pernah dilaksanakan dan juga belum adanya dana yang tersedia dari tahun sebelumnya.

3.1.2 Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Target kinerja keuangan secara keseluruhan mencakup unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Indikator pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2024, dengan uraian sebagai berikut:

1) Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Target Pendapatan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 3.174.719.555.451,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 3.008.917.736.831,00 atau mencapai 94,78 persen. Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.20.

Tabel 3.20

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024			REALISASI 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	
I	PENDAPATAN	2.805.811.127.502,00	3.008.917.736.831,00	94,78	2.734.805.625.683,08
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	462.827.600.519,00	437.120.839.441,00	94,45	298.626.546.420,08
	Pendapatan Pajak Daerah	171.385.188.647,00	155.125.662.992	90,51	153.800.441.758,00
	Pendapatan Retribusi Daerah	11.251.637.000,00	9.779.786.000,00	86,92	12.315.324.270,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	170.307.027.807,00	170.157.029.091,00	99,91	36.299.309.804,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109.883.747.065,00	102.058.361.358,00	92,88	96.211.470.588,08
2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.709.653.954.932,00	2.569.554.788.349,00	94,83	2.434.058.392.989,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.475.823.201.000,00	2.426.554.852.432,00	98,01	2.133.499.528.840,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	233.830.753.932,00	142.999.935.917,00	61,16	300.558.864.149,00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.238.000.000,00	2.242.109.041,00	100,18	2.120.686.274,00
	Pendapatan Hibah	2.238.000.000,00	2.242.109.041	100,18	2.120.686.274,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.174.719.555.451,00	3.008.917.736.831,00	94,78	2.734.805.625.683,08

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dari Anggaran sebesar Rp. **437.120.839.441,00** dari Rp. **462.827.600.519,00** atau mencapai **94,45%**, sementara realisasi yang tertinggi bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari anggaran sebesar Rp. 2.238.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.242.109.041,00 dengan persentase sebesar 100,18% selanjutnya realisasi terendah yaitu dari Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 233.830.753.932,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 142.999.935.917,00 dengan kata lain sebesar 61,16 %.

Permasalahan dan solusi

Perolehan target pendapatan daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Beberapa permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Secara umum pokok permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada pajak daerah;
- 2) Dana perimbangan yang masih bersifat Given dari Pemerintah Pusat;
- 3) Ekstensifikasi pendapatan daerah masih terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat;
- 4) Porsi PAD terhadap total pendapatan masih rendah dan belum optimal;
- 5) Adanya perubahan kewenangan terkait Pajak Asli Daerah;
- 6) Belum optimalnya penegakan peraturan tentang Pajak Asli Daerah;
- 7) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Asli Daerah;
- 8) Masih banyaknya potensi pendapatan yang belum dapat digali.

Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas, berikut upaya-upaya pemecahan masalah adalah:

- 1) Mengoptimalkan potensi dan realisasi pendapatan daerah;
- 2) Membangun program dan kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan pengelolaan pendapatan sebagai penunjang bagi pelaksanaan pengelolaan pendapatan yang tepat sasaran;
- 3) Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;
- 4) Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
- 5) Perlu dilaksanakan mapping potensi retribusi daerah secara komprehensif sesuai kondisi riil yang ada sehingga target yang ditetapkan mengacu data potensi yang ada;
- 6) Perlu dioptimalkan pengelolaan BUMD dengan meningkatkan modal BUMD melalui penyertaan modal dari pemerintah daerah yang besarnya berdasarkan kajian sesuai ketentuan yang ada;
- 7) Dilaksanakan penegakan Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah secara tegas dan konsisten terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Pemeriksaan terhadap wajib pajak, dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, disamping pengenaan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

2) Target dan Realisasi Belanja

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 3.075.185.723.117,71 atau 92,84 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 3.312.217.677.835,00 dimana terdapat sisa anggaran lebih sebesar Rp. 237.031.954.717,29. Realisasi belanja Tahun 2024 lebih besar bila dibanding dengan realisasi belanja pada tahun 2023. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.21.

Tabel 3.21
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

URAIAN REKENING	TAHUN ANGGARAN 2024			REALISASI 2023
	ANGGARAN	REALISASI	%	
BELANJA DAERAH	3.312.217.677.835,00	3.075.185.723.117,71	92,84	2.619.084.986.875,00
BELANJA OPERASI	2.380.877.607.216,22	2.217.901.996.355,71	93,15	1.900.788.191.664,50
Belanja Pegawai	1.222.827.236.111,73	1.179.156.395.317,68	96,43	936.576.698.454,00
Belanja Barang dan Jasa	1.013.545.084.429,49	898.449.950.027,00	88,64	849.561.732.279,45
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00
Belanja Hibah	128.264.705.317,00	126.804.443.761,03	98,86	102.176.510.903,05
Belanja Bantuan Sosial	16.240.581.358,00	13.491.207.250,00	83,07	12.351.250.028,00
BELANJA MODAL	502.498.445.596,78	430.427.399.857,00	85,66	324.522.994.637,50
Belanja Modal Tanah	290.000.000,00	0,00	0,00	1.117.743.930,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.101.080.292,00	100.176.009.636,00	87,03	54.246.432.888,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.490.683.598,00	105.190.158.943,00	83,82	55.491.835.674,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	248.514.115.306,78	212.269.367.655,00	85,42	200.185.637.334,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.295.566.400,00	12.241.947.582,00	99,56	13.242.462.641,00
Belanja Modal Aset Lainnya	807.000.000,00	549.916.041,00	68,14	238.882.170,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.486.084.358,00	122.578.409,00	8,25	66.645.582,00
Belanja Tidak Terduga	1.486.084.358,00	122.578.409,00	8,25	66.645.582,00
BELANJA TRANSFER	427.355.540.664,00	426.733.748.496,00	99,85	393.707.154.991,00
Belanja Bagi Hasil	18.263.682.565,00	17.824.295.997,00	97,59	16.808.319.340,00
Belanja Bantuan Keuangan	409.091.858.099,00	408.909.452.499,00	99,96	376.898.835.651,00
SURPLUS/DEFISIT	(137.498.122.384,00)	(66.267.986.286,71)	48,20	115.720.638.808,08
PEMBIAYAAN DAERAH	137.498.122.384,00	137.498.122.384,04	100,00	21.771.162.790,96
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	137.498.122.384,00	137.498.122.384,04	100,00	21.771.162.790,96
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	137.498.122.384,00	137.498.122.384,04	100,00	21.771.162.790,96
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	137.498.122.384,00	137.498.122.384,04	100,00	21.771.162.790,96
Pembiayaan Netto	137.498.122.384,00	137.498.122.384,04	100,00	21.771.162.790,96
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan	0,00	71.230.136.097,33	0,00	137.491.801.599,04
Koreksi	0,00	10.025.120,00	0,00	6.320.785,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	71.240.161.217,33	0,00	137.498.122.384,04

3) Pembiayaan

Pembiayaan Daerah diperlukan untuk menutupi defisit anggaran dan atau untuk menampung surplus anggaran. Terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sepenuhnya masih mengandalkan saldo lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran pembiayaan selain untuk mengangsur beban utang yang masih ada, dialokasikan juga untuk menumbuh kembangkan perusahaan daerah melalui penyertaan modal.

Anggaran pembiayaan daerah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 137.498.122.384,00 dengan realisasi sebesar Rp. 137.498.122.384,04 (100,00%), dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 137.498.122.384,00 dengan realisasi Rp. 137.498.122.384,04 (100,00%), perolehan penerimaan pembiayaan ini didapat dari Pembiayaan Netto.

Permasalahan dan Solusi

Walaupun Realisasi belanja daerah telah mencapai 92,84% akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja pemerintah daerah sepanjang tahun 2024, antara lain:

- 1) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terutama tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bimtek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan asset daerah;
- 2) Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas bulan). Hal ini disebabkan masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan perencanaan anggaran, program kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan pola pikir sumber daya aparatur, secara

periodik dilakukan rekonsiliasi dan pendampingan kepala pengelola keuangan daerah;

- 3) Realisasi keuangan daerah yang mengalami defisit anggaran sehingga mengakibatkan penundaan atau pembatalan beberapa kegiatan. Oleh karena itu, di prioritaskan kegiatan dengan skala layanan dan manfaat yang besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- 4) Tidak terserapnya seluruh anggaran tersebut terutama pada belanja barang dan jasa serta belanja modal disebabkan terdapat beberapa kegiatan yang proses pengerjaannya terlambat karena Proses administrasi pelelangan, kondisi iklim/cuaca dan kondisi geografis sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian beberapa kegiatan.

3.1.3 Capaian Kinerja Keluaran masing- masing kegiatan pada setiap Urusan Pemerintahan/ Urusan Penunjang/ Urusan Pendukung Pemerintahan sesuai dengan target dalam Dokumen Anggaran dan Masalah yang dihadapi serta Solusi Pemecahannya

A Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase Guru SD Berkualifikasi	90,00%
		2. Persentase Guru SMP Berkualifikasi	97,00%
		3. Persentase Guru PAUD Berkualifikasi	65,50%
		4. Persentase Guru SD Bersertifikasi	50,00%
		5. Persentase Guru SMP Bersertifikasi	70,00%
		6. Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru SD	73
		7. Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru SMP	73
		8. Rasio Guru terhadap Siswa SD	1 : 16 Orang
		9. Rasio Guru terhadap Siswa SMP	1 : 10 Orang
II	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan kualitas layanan pendidikan	1. Persentase SMP Berakreditasi	100%
		2. Persentase Peningkatan Sistem Informasi Layanan Pendidikan	100%
		3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	88%
III	Meningkatnya Kualitas lulusan SD/SMP	1. Rata-rata Nilai UN SD	80,5
		2. Rata-rata Nilai UN SMP	80,5
		3. Angka Putus Sekolah SD	0,34%
		4. Angka Putus Sekolah SMP	1,00%
		5. Persentase Kelulusan SD	100,00%
		6. Persentase Kelulusan SMP	100,00%
		7. APM SD	98,00%
		8. APM SMP	85,00%
IV		1. Persentase PKBM Berakreditasi	99,00%

	Meningkatnya Pendidikan Kesetaraan	2. Persentase Guru Tutor PKBM Berkualifikasi	86,00%
V	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berstandar	1. Persentase SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas	86,00%
		2. Persentase Ruang Kelas SD dengan kondisi Baik	67,00%
		3. Persentase Ruang Kelas SMP dengan kondisi Baik	73,00%
VI	Meningkatnya taraf Pendidikan Masyarakat	1. APK SD	99,00%
		2. APK SMP	90,00%
		3. APK PAUD	91,00%
		4. Rata-rata Lama Sekolah	9,85 Tahun
		5. Persentase Anak Usia Sekolah dari Keluarga Prasejahtera yang Sekolah lulus sampai SMP	90,00%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	524.518.634.170,00	DANA APBD
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	291.119.005.172,00	DANA APBD/ APBN(DAK)
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	716.316.800,00	DANA APBD
4	PROGRAM PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN	150.999.000,00	DANA APBD
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	600.000.000,00	DANA APBD
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	8.585.904.850,00	DANA APBD
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	335.000.000,00	DANA APBD
JUMLAH		826.025.859.992,00	

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Cakupan fasilitas kesehatan yang terstandarisasi	100%
2	Menurunkan angka kematian dan kesakitan	Angka kematian ibu	10/100000 kelahiran hidup
		Angka kematian bayi	20/1000 kelahiran hidup
		Cakupan kesakitan yang disebabkan penyakit tidak menular (DM, Hipertensi, ODGJ)	100%
		Cakupan Kesakitan Yang Disebabkan Penyakit Menular (TB dan HIV)	100%
		Persentase Pendudukan Dengan Akses Sanitasi Layak	90%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN(Rp)	KET
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp. 1.494.786.200	APBD
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 136.651.318.647	APBD
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp. 95.149.200	APBD
4	Administrasi umum perangkat daerah	Rp. 1.541.681.883	APBD
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 659.136.000	APBD
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 5.990.148.800	APBD
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 1.356.170.650	APBD
8	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 25.962.594.700	APBD dan APBN
9	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp. 77.311.816.984	APBD dan APBN
10	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Rp. 150.000.000	APBD
11	Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp. 298.784.000	APBD
12	Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah Kabupaten/Kota	Rp. 33.140.000	APBD
13	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota	Rp. 7.529.905.000	APBD
14	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.854.696.400	APBD
15	Pemberian izin apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Rp. 63.696.400	APBD
16	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Rp. 246.364.500	APBD
17	Penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Rp. 23.030.000	APBD
18	Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	Rp. 171.246.900	APBD
19	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp. 172.258.250	APBD
20	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 74.985.900	APBD
21	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp. 159.869.550	APBD
22	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 34.001.182.709	BLUD
23	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota (BOK Puskesmas)	Rp. 27.596.695.000	APBN

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Penataan Ruang

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Proporsi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantab (%)	80,28

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 125.844.159.958,00
	Jumlah Anggaran	Rp. 125.844.159.958,00

➤ Permasalahan

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar dalam menjalankan program kinerjanya antara lain :

- 1) Anggaran untuk infrastruktur masih terbatas apabila dibandingkan dengan banyaknya cakupan wilayah kerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur baik jalan maupun jembatan.
- 2) Belum Lengkapnya Data dan Informasi Terkait Tata Ruang Wilayah.
- 3) Terbatasnya Forum-Forum Diskusi, Seminar, Workshop terkait Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Daerah sehingga Sulit Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Pengadaan Tanah.
- 4) Banyaknya jumlah alat berat yang sudah tidak layak jalan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar.
- 5) Kurangnya jumlah sumber daya manusia (pegawai) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

□ **Solusi**

- 1) Penambahan anggaran infrastruktur
- 2) Perlu adanya pemutakhiran data dan informasi terkait Tata Ruang Wilayah
- 3) Perlu digalakkannya Terbatasnya Forum-Forum Diskusi, Seminar, Workshop terkait Pengadaan Tanah oleh Pemerintah Daerah sehingga Sulit Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Pengadaan Tanah.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Lingkungan Sehat Kawasan Permukiman	Presentase Lingkungan Permukiman Kumuh (dibawah 10 Ha)	0,53%
2	Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	Rasio Rumah Layak Huni	0,68%
		Cakupan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	49,70%
3	Meningkatnya Penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Cakupan Lingkungann yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	48,13%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.586.465.834
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	925.323.900
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	650.000.000
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	22.065.772.350
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	46.040.303.034,28
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	149.795.250
	JUMLAH	76.417.660.368,28

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	Persentase Nilai SAKIP	100%
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota	100%
3	Meningkatkan penanganan Kasus Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Persentase kasus K3 yang tertangani	100%
4	Menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	100%
5	Meningkatnya Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	100%
6	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.230.487.029
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.153.380.000
	JUMLAH	24.383.867.029

Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan	Nilai Sakip	B
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota	100%
3	Terwujudnya Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana	Persentase Kapasitas Kesiapsiagaan di Daerah Rawan Bencana	85%
4	Tertanganinya bencana secara cepat, tepat dan sesuai sasaran	Persentase Penanganan Desa yang Terdampak Bencana	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.069.529.870	
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
	JUMLAH		

**Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mewujudkan respons time rate (tingkat waktu tanggap) bencana kebakaran bangunan 15 menit di Kabupaten Kampar	Tingkat waktu tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	100 %
		Persentase peningkatan respon penanganan bencana kebakaran dan penyelamatan	100%
		Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan penyelamatan	100 %
2	Meningkatnya Administrasi Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar	Persentase penyusunan program dan Perencanaan Penganggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilaporkan tepat waktu	100 %
		Persentase Laporan Keuangan yang dilaporkan Tepat Waktu	100%
		Persentase Tingkat Kedisiplinan Pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	100 %

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	
		URAIAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dokumen Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Kampar	Tersedianya Dokumen Dokumen Perencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Kampar	7 Dokumen
2	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya SDM dan Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Kampar	21 Orang TSKS dan 1 Orang Korda
3	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya SDM dan Kinerja Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kabupaten Kampar	57 Orang di 21 Kecamatan
4	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya SDM dan Kinerja Korkab, Korcam, Pendamping dan Operator Program Keluarga Harapan (PKH)	105 Orang Pendamping dan Operator PKH
5	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya Kinerja Lembaga Lembaga Sosial yang Menangani PMKS di Kabupaten Kampar (PPI, Wredatama, veteran, Perlansia, LKKS dan Pepabri)	8 Lembaga Sosial
6	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Tersedianya Peralatan Alat Bantu Gerak bagi Penyandang Disabilitas dan Ekstrauma di Kabupaten Kampar (Kaki Palsu, Tangan Palsu, Kursi Roda, dan Hearing Head)	29 Orang Penyandang Disabilitas
7	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Terlaksananya Sosialisasi Tentang Kenakalan Anak dibawah Umumr	200 Orang
8	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Kesiagaan dan Penanganan Sosial terkait dengan PMKS di wilayah Kabupaten Kampar (ODGJ, Orang Terlantar, Mayat Terlantar, Gepeng, Pengemis, Gelandangan, Warga Binaan, Napza, dan PMKS Lainnya	50 Orang PPKS
9	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Terkelolanya Data DTKS Skala Kabupaten dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang valid	35.000 KK

10	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Terlaksananya Pemberian Bantuan Sosial Uang kepada Masyarakat Kemiskinan Ekstrem	1002 orang dan 4 Kube
11	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kampar melalui Bantuan Kelompok Usaha Bersama bagi Fakir Miskin (KUBE-FM), Usaha Ekonomi Produktif bagi Lansia Produktif (UEP Lansia) dan Usaha Ekonomi Produktif bagi Penyandang Disabilitas (UEP Penyandang Disabilitas)	33 Orang UEP Lansia Produktif
12	Relawan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Pelayanan Sosial bagi Korban Bencana Alam dan	65 Orang Relawan
13	Korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Sosial bagi korban bencana	100 Orang
14	Makam Pahlawan Eka Kusuma Bhakti Bangkinang	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan Eka Kusuma Bhakti Bangkinang, Makam Bahagia dan Makam Panglima Khatib Simpang Kubu	1 Lokasi Pemakaman

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / KABUPATEN / KOTA	6.734.550.931
a	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	316917100
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4087575291
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.460000
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	537.414.300
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.050.000
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1178367062
g	Pemeliharaan Ba rang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	413.767.178
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.343.180.125
a	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	3.343.180.125

3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.028.315.221
a	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	1.028.315.221
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.833.149.226
a	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	1.833.149.226
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	695.455.736
a	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	97.843.700
b	Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	597.612.036
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	77.900.600
a	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional / Kabupaten / Kota	77.900.600
	JUMLAH	13.712.551.839

B Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Kontribusi PDRB Sektor industri	35,35 %
2	Menurunya TPT dengan Indikator Sasaran	Presentase Penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah	3,51 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	756.701.900
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	303.084.400
3	Program Hubungan Industrial	1.834.170.000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	7.237.823.530
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	584.505.700
6	Program Pengendalian izin Usaha Industri Kab/Kota	55.706.000
7	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	106.172.400

Permasalahan dan Solusi

□ Masalah :

1. Sarana dan Prasarana Peruntukan Industri belum terbangun seluruhnya;
2. Kemampuan dan Kompetensi Sumber Daya manusia di Sektor Industri Masih terbatas;
3. Kurangnya pemanfaatan sumber daya alam;
4. Tingkat angka pengangguran;
5. Rendahnya keterampilan Tenaga Kerja;
6. Kurangnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan;
7. Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

□ Solusi :

1. Perlu adanya ketersediaan anggaran yang memadai untuk memenuhi fasilitas sarana dan prasarana;
2. Perlu adanya ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan pencari kerja sehingga pencari kerja mendapatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan yang baik.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Perlindungan perempuan dan Perlindungan Anak.

Penja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Terjaganya generasi dari bahaya dari penggunaan NAPZA, pergaulan bebas dan Radikalisme	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.	

		1.	Advokasi program bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja	21 Kecamatan
		2.	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	21 Kecamatan
		3.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (<i>DAK Non Fisik</i>)	21 Kecamatan
		4.	Pengendalian Program KKBPK	21 kecamatan
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
		1.	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (<i>DAK Fisik</i>)	21 Balai
		2.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). (<i>DAK Non Fisik</i>)	250 Desa
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		
		1.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (<i>DAK Non Fisik</i>)	1 Kegiatan
		2.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1 Kegiatan
		3.	Penyediaan Sarana penunjang Pelayanan KB	1 Kegiatan
		4.	Peningkatan Kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan Reproduksi	1 Kegiatan
		5.	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Kegiatan
		6.	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	1 Kegiatan
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		

		1.	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	21 Kecamatan
		2.	Pembinaan Terpadu Kampung KB (<i>DAK Non Fisik</i>)	21 Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga		
		1.	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	21 Kecamatan
		2.	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peranserta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (<i>DAK Non Fisik</i>)	21 Kecamatan
		3.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	21 Kecamatan
		Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga		
		1.	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	21 Kecamatan
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
		1	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Kegiatan
B.	Meningkatnya kesetaraan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		

	gender dalam pembangunan	Pelebagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota	
		1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	36 Orang
		Pemberdayaan Perempuan Bidang politik, Hukum, sosialisasi, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		1. Advokasi Kebijakan dan pendamping Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50 Orang
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lembaga Penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Orang
		2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 FAN
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
		Penyedia layanan Rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan kabupten/kota	
		1. Penyedia layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Desa
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (<i>DAK Non Fisik</i>)	1 Kegiatan
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kestaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

		1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
		1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6 Desa
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
		Pengumpulan, pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah kabupaten/Kota		
		1.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan kabupaten/Kota	1 Kegiatan
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan kabupaten/Kota		
		1.	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan kabupaten/Kota	5 FAN
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Usaha Kewenangan kabupaten/Kota		
		1.	Penyedia layanan Peningkatan Kulaitas Hidup Anak Kewenangan kabupaten/Kota	21 FAN
		2.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan edukasi Hak Anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15 Orang dan FAN
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		

		1.	Advokasi dan Penfndampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/ Kegiatan Pencegahan KTA (<i>DAK Non Fisik</i>)	1 Kegiatan
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota (<i>DAK Non Fisik</i>)	40 Orang
			Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan Khusus Tingkat Daerah kabupaten/Kota	
		1.	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan

PROGRAM		ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,242,750,762
2.	Program Pengendalian Penduduk	85,755,000
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4,933,623,000
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4,476,581,400
5.	Program pengarusutamaan Gender & pemberdayaan Perempuan	3,413,020,900
6.	Program Perlindungan Perempuan	144,417,200
7.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	246,521,200
8.	Program Pengendalian Sistem Data Gender dan Anak	52,243,200
9.	Program Pemenuhan hak Anak (PHA)	356,228,800
10.	Program perlindungan Khusus Anak	865,010,000
J U M L A H		22,816,151,462

Permasalahan yang ditemukan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak antara lain :

1. Belum maksimalnya pelaksanaan Perencanaan berorientasi pada pengarus utamaan gender;
2. Belum optimalnya peran perempuan baik di bidang politik, ketenagakerjaan maupun teknologi;

3. Belum maksimalnya program pemberdayaan perempuan, bidang peningkatan SDM, ekonomi dan kelembagaan;
4. Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak negatif pada psikologi anak. Produksi media cetak dan elektronik yang tidak sensitif anak, seperti iklan rokok, sinetron berkualitas rendah dan mengabaikan nilai-nilai luhur budaya bangsa telah melahirkan fenomena sosial baru; berupa sikap konsumerisme dan tindakan yang tidak rasional; kekerasan dan eksploitasi anak; pornografi dan pornoaksi; geng-geng remaja, bullying; pola hidup yang tidak sehat dan maraknya kasus-kasus trafiking anak. Semakin meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak dari tahun Tahun 2019 Kekerasan pada Anak Sebanyak 20 Orang, Tahun 2020 Kekerasan pada Perempuan dan Anak Sebanyak 24 Kasus, sedangkan pada Tahun 2021 Kekerasan pada Anak sebanyak 120 Orang dan Kasus Kekerasan pada Perempuan pada Tahun 2021 sebanyak 11 Orang, kasus Tahun 2022 kekerasan pada anak 128 orang dan kasus kekerasan perempuan 165 orang serta tahun 2024 kekerasan pada anak dan kasus kekerasan perempuan 139 orang;
5. Belum terbentuknya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar namun Kabupaten Kampar sudah menuju Kabupaten Kota Layak Anak dengan peringkat Madya pada tahun 2024.

➤ **Solusi Permasalahan yang lain**

1. Langkah-langkah untuk merealisasikan hak perempuan dengan menghapus perbedaan, disparitas, atau keadaan yang merugikan perempuan misalnya keharusan adanya perubahan pola pikir dan tingkah laku sosial budaya terhadap perempuan, menghapuskan

prasangka serta kebiasaan dan praktek yang bersifat deskriminatif melalui kegiatan pembinaan organisasi perempuan, pendidikan dan pelatihan (membuat ku dan kursus menjahit, membordir dan magang tata rias pengantin) bagi perempuan putus sekolah dan perempuan sebagai Kepala Keluarga.

2. Melakukan sosialisasi pada anak dan orang tua baik disekolah-sekolah, wirid pengajian dsb tentang Undang-Undang Kekerasan pada Perempuan dan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2013 tentang Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji di Kabupaten Kampar minimal 4 kali dalam sebulan.
3. Menjalin kerjasama dan komunikasi antara orang tua dengan sekolah, Mitra kerja dan Instansi terkait tentang pengawasan kegiatan anak di rumah, di sekolah dan di lingkungan masyarakat untuk mengarahkan kegiatan yang positif seperti olahraga, ketrampilan pengajian dsb minimal 1 bulan sekali.
4. Mengadakan pendekatan dan komunikasi baik secara eksternal maupun internal dengan instansi terkait tentang penganggaran minimal 4 kali dalam setahun;
5. Perlu diadakan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang layak bagi anak, yaitu kebijakan pembangunan yang didasarkan pada, hak-hak dan kewajiban anak, kepentingan dan kebutuhan anak, yang dilaksanakan dengan seksama, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hak-hak tersebut antara lain hak di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur dan

lingkungan hidup, Anak memerlukan tempat aman dan layak untuk bermain, anak-anak di kota memerlukan ruang terbuka hijau dan rute aman menuju sekolah, dan lain-lain;

6. Membentuk gugus tugas pada tahun 2016 agar terbentuk Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dengan cara mengikut sertakan intansi terkait dalam membangun dan menciptakan sarana dan prasarana sesuai dengan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Pendirian Rumah Aman untuk anak yang sedang menghadapi masalah baik anak sebagai pelaku dan korban serta perempuan yang mengalami gangguan perkembangan. Rumah Aman juga di fungsikan sebagai Lembaga Per masyarakatan untuk anak-anak dan pada Tahun 2024 Kampar sudah Menuju Kota Layak Anak dengan Peringkat Madya.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
MENINGKATNYA PENGANEKARAGAMAN PANGAN MASYARAKAT YANG BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,498,954,829
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,759,185,465
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 orang/ bulan	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,759,185,465
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	916,798,500
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 Paket	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,379,500

	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	462,804,000
	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33,520,000
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19,147,000
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Media	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,764,000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374,184,000
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340,825,464
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi (Wifi id)	12 Bulan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20,988,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	17 Orang	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319,837,464
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	482,145,400
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	109,090,800
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111,584,600
	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,470,000
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	222,000,000

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
MENINGKATNYA PENGANEKARAGAMAN PANGAN MASYARAKAT YANG BERAGAM, BERGIZI, SEIMBANG DAN AMAN	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81,372,800
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81,372,800
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	4 Dokumen	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76,696,400
	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	Sud Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,676,400

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
meningkatkan penganeekaragaman pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,182,400
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,182,400
	Jumlah laporan keuangan akhir SKPD yang disusun	1 Laporan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11,182,400

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya Penganekaragaman Pangan Masyarakat Yang Beragam, Bergizi Seimbang Dan Aman	Angka Pola Pangan Harapan		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	342,590,100
	Tercapainya Target Konsumsi Per Kapita Per Tahun		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	342,590,100
	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	92.44	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	245,590,000
	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Kelompok Wanita Tani (Inflasi)	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	97,000,100

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya Penganekaragaman Pangan Masyarakat Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Angka Pola Pangan Harapan		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	97,000,100
	Tercapainya Target Konsumsi Per Kapita Per Tahun		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	97,000,100
	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Kelompok Wanita Tani (Inflasi)	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	97,000,100

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya Penganekaragaman Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang Dan Aman	Angka Pola Pangan Harapan		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	230,030,360
	Tercapainya Target Konsumsi Per Kapita Per Tahun		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	230,030,360
	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	92.44	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	230,030,360

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya Penganekaragaman Pangan Masyarakat Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Angka Pola Pangan Harapan		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1,290,605,600
	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	270,415,800
	Informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	21 Kecamatan	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	136,216,000
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	21 Kecamatan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	134,199,800
	Cadangan Pangan Pemerintah daerah		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1,020,189,800
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70.000 Kg	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1,020,189,800

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya Penganekaragaman Pangan Masyarakat Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Angka Pola Pangan Harapan		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1,020,189,800
	Cadangan Pangan Pemerintah daerah		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1,020,189,800
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70.000 Kg	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1,020,189,800

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya Penganekaragaman Pangan Masyarakat Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	388,360,900
	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	297,388,600
	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 KWT Desa Mandiri Pangan dan 10 Lokus Stunting	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	297,388,600
Meningkatnya Penganekaragaman Pangan Masyarakat Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	90,972,300
	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	90,972,300
	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	21 Kecamatan	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	90,972,300

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya Penganekaragaman Pangan Masyarakat Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	297,388,600
	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	297,388,600
	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 KWT Desa Mandiri Pangan dan 10 Lokus Stunting	Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	297,388,600

Program Penanganan Kerawanan Pangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya Penganekaragaman Pangan Masyarakat Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	90,972,300
	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	90,972,300
	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	21 Kecamatan	Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	90,972,300

Program Pengawasan Keamanan Pangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya Penganekaragaman Pangan Masyarakat Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Terpantaunya Mutu dan Keamanan Pangan		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	83,414,400
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	83,414,400
	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	8 Sampel	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	83,414,400

Program Pengawasan Keamanan Pangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Meningkatnya Penganekaragaman Pangan Masyarakat Yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	Terpantaunya Mutu dan Keamanan Pangan		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	83,414,400
	Terlaksananya Uji Laboratorium Pangan Segar dan Pangan Olahan		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	83,414,400
	Terlaksananya uji laboratorium pangan segar	8 Sampel	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	83,414,400

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Proporsi jalan dalam kondisi mantap	65,28
		Presentase Penduduk Berakses Air Bersih	58,75
		Rasio Irigasi dalam kondisi baik	75,45
2	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pemerintah	Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi layak	86,75
3	Pemanfaatan Lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Presentase Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kondisi layak	87,77

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	19.768.989.478
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3.838.863.900
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.315.83.535
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	6.317.740.979
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	8.055.624.757
6	Program Penataan Bangunan Gedung	48.308.825.373
7	Program Penyelenggara Jalan	125.844.159.958
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	259.618.700
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.131.538.850
10	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	129.188.500
11	Program Pengelolaan Tanah Kosong	168.372.000
12	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	75.120.350
	Jumlah	220.213.875.380

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Rumus / Penjelasan	Satuan	Target
1	Terlaksananya urusan kesekretariatan kepegawaian, keuangan dan perencanaan	Persentase cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Penilaian inspektorat kabupaten kampar	Dokumen	100 %
2	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di kab. kampar	Persentase kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terlaksana	Pengelolaan data dari kerawanan pencemaran dan kerusakan lingkungan air	Titik Sungai dan perusahaan	100 %
3	Tersedianya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kab. Kampar	Persentase kegiatsn perencanaan lingkungan hidup terlaksana	Data Perusahaan di kabupaten Kampar	Dokumen	100 %
4	Terlaksananya penyelesaian pengaduan Masyarakat di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup terlaksana	Tingkat pengaduan Masyarakat dan jumlah masalah teratasi	Tahun	100 %

5	Terlaksanannya pengelolaan sampah di kabupaten Kampar	Persentase program pengelolaan sampah terlaksanan	Penanganan sampah di kabupaten Kampar	Tahun	100 %

Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Bidang	Anggaran
1	Sekretariat Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 19.812.530.571
2	Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 2.239.915.550
3	Bidang Tata Lingkungan	Rp. 304.687.500
4	Bidang Pnaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Rp. 779.851.600
5	Bidang Pengelolaan Persampahan Dan Pertamanan	Rp. 5.925.044.700
No	Program/Kegiatan	Anggaran
A. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten Kampar		Rp. 19.812.530.571,00
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 175.400.000,00
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp. 6.022.976.435,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 41.758.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.186.289.600,00
5	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 11.638.114.286,00
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 547.992.250,00
Total		Rp. 19.812.530.571,00
No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Pengelola Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 2.657.188.900,00
2	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 3.267.855.800,00
Total		Rp. 5.925.044.700,00
No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 157.194.900
2	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 71.267.300,00
3	Program Pengakuan keberadaan msyarakat hukum adat (MAH) kearifan local dan hak Mah yang terkait dengan PPLH	Rp. 499.388.000,00
4	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 52.001.400,00
Total		Rp. 779.851.600,00
No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Rp. 2.239.915,550,00
Total		Rp. 2.239.851.600,000
No	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 304.687.500,00

Total		Rp. 304.687.500,00
No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
A. Administrasi umum perangkat daerah		Rp. 1.186.289,600,00
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp. 19.713.500,00
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 339.218.600,00
3	Penyedia peralatan rumah tangga	Rp. 30.128.500,00
4	Penyedia bahan logistik kantor	Rp. 109.520.000,00
5	Penyedia barang cetakan dan penggandaan	Rp. 118.672.200,00
6	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Rp. 4.960.800,00
7	Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 564.076.000,00
No	Program/Kegiatan	Anggaran
A. Administrasi keuangan perangkat daerah		Rp. 6.022.976.435,00
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 6.013.229.035,00
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp. 9.747.400,00
No	Program/Kegiatan	Anggaran
B. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan		Rp. 200.000.000,00
1	Pengadaan Mebel	Rp. 200.000.000,00
C. Penyedia dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD		Rp. 11.638,114,286,00
1	Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Rp. 226.499,500,00
2	Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 35.906.000,00
3	Penyedia Jasa Pelayanan umum kantor	Rp. 11.375.708,786,00
D. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Rp. 490.000,00
1	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan	Rp. 324.992.250,00
2	Pemeliharaan rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp. 223.000.000,00
Total		Rp. 18.409.082.971,00

Permasalahan Dan Solusi

❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Lamanya penyusunan dokumen perencanaan	1. Pengumpulan data dari setiap bidang harus dipercepat
2. Ketidakhadiran yang tidak jelas dari THL yang gajinya di potong	2. Evaluasi kehadiran dari seluruh pekerja dinas lingkungan hidup
3. Masih terdapatnya aparatur yang tidak profesional	3. Pemberian tugas dan tanggung jawab terhadap aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

➤ Program Perencanaan Lingkungan Hidup

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Masih terdapat perusahaan di kabupaten kampar yang belum memiliki izin PPLH	1. Menyurati perusahaan yang belum memiliki izin PPLH untuk segera membuat izin PPLH

➤ Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Limbah pabrik yang mencemari lingkungan hidup masyarakat dan berakibat terhadap rusaknya ekosistem	1. Penanganan limbah yang baik dan tertangani dengan baik serta tidak mencemari lingkungan hidup
2. Tidak terawasinya seluruh wilayah yang terjadinya kerusakan lingkungan	2. Pengawasan terhadap lahan yang sering terjadi kerawanan kerusakan lingkungan

➤ Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Pembangunan RTH yang tidak berpotensi baik	1. Penetapan RTH yang objektif dan berpotensi baik
2. Pengelolaan RTH yang tidak berjalan dengan baik	2. Pemantauan dan pengawasan terhadap pembangunan RTH
3. Terjadinya kerusakan lampu taman dan bunga pada RTH oleh masyarakat	3. Pengadaan lampu taman dan bunga

➤ **Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Masih terdapatnya pelanggaran terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup PPLH oleh perusahaan	1. Pembinaan dan pengawasan yang objektif terhadap seluruh perusahaan yang telah memiliki izin PPLH

➤ **Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Masih terdapatnya masyarakat yang tidak menjaga kelestarian lingkungan dan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang terkait dengan PPLH	1. Melestarikan dan menjaga kelestarian lingkungan dan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal yang terkait dengan PPLH

➤ **Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Banyaknya dari masyarakat/ lembaga ,masyarakat / usaha , pendidikan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	1. Memberikan penghargaan terhadap masyarakat/ lembaga , masyarakat / usaha , pendidikan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

➤ **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap PPLH di Kabupaten Kampar	Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi terhadap pelanggar yang tidak menaati peraturan

➤ **Program Pengelolaan Persampahan**

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah di lingkungan masyarakat	1. Pembuatan tempat pembuangan sampah pada daerah yang sering tertumpuk sampah
2. Terbatasnya fasilitas untuk penanganan dan pengolahan sampah	2. Melengkapi fasilitas dan pemanfaatan limbah sampah menjadi bahan daur ulang
3. Terdapat banyaknya kerusakan pada alat pengelolaan persampahan	3. Perbaikan peralatan persampahan

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan penerbitan KTP – el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Identitas Kependudukan Digital, Penggunaan DKB untuk pelayanan di Kabupaten Kampar	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten Kampar meliputi:	
		Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	99,72%
		Penerapan Identitas Kependudukan Digital	Menerapkan Identitas Kependudukan Digital
		Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	99,05%
		Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	39,65 %
		Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	Tidak perjanjian Kerjasama pemanfaatan data
		Integrasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD	-
		Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan	Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT
		Pelanggaran terhadap Permendagri Nomor 60 Tahun 2021	Tidak ada pelanggaran
2.	Capaian Keluaran / Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya	Keluaran / Output hasil Pelayanan Dokumen Lainnya	Output 24 (dua puluh empat) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat.
3.	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pelayanan Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	3 (tiga) jenis inovasi
		Pelayanan terintegrasi administrasi kependudukan	3 (tiga) pelayanan terintegrasi

4.	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten Kampar	Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten Kampar	- Ketersediaan Blanko KTP-el - Aset BMN di daerah
5.	Penyediaan Data Kependudukan	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten	Tersusunnya profil data

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Pengelolaan Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan permasalahan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Permasalahan Teknis

Kesalahan teknis sering terjadi dan menjadi kendala dalam melaksanakan manajemen keuangan secara paripurna. Manajemen keuangan yang bersih harus terhindar dari kesalahan sekecil apapun yang dapat menjadi temuan dari pihak pemeriksa. Kesalahan dari tahun ke tahun dapat diperkecil namun tetap tidak dapat dihindarkan untuk tetap ada. Solusi yang diusulkan adalah bagaimana pengawasan dari atasan terhadap bawahan dapat dilaksanakan dengan lebih ketat sehingga permasalahan teknis dapat diminimalisir.

b. Permasalahan Sumber Daya Manusia

Kesalahan teknis juga menyangkut kecakapan sumber daya manusia yang mengelola keuangan. Beberapa tenaga teknis keuangan telah tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar namun belum cukup untuk mengurangi kesalahan. Upaya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia telah dilakukan namun perlu didukung oleh sumber daya keuangan yang memadai. Solusi yang diharapkan adalah dengan merekrut tenaga profesional keuangan seperti Sarjana Akuntansi dan Sarjana Komputer.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Akuntailitas yang disusun	5 Dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	6 Orang
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
		Jumlah paket komponen Listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	7 laporan
		Jumlah dokumen penata usaha arsip dinamis pada SKPD	3 dokumen
		Jumlah dokumen pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5 dokumen

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit
		Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan, Penghapusan, dan Perubahan Status Desa	12 Desa
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	242 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	242 Dokumen
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	120 Orang
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	200 Orang

		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen
3	Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi di Desa menuju Desa Mandiri yang berkelanjutan	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen
		Jumlah laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	1 laporan

Program	Kegiatan	Anggaran	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 237.327.500	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 3.617.698.523	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 72.685.500	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 881.248.300	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 52.199.000	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 601.805.920	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 62.886.000	APBD

Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp 324.635.000	APBD
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Rp 83.481.700	APBD
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 4.374.699.500	APBD
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 364.313.600	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 10.872.980.543	

➤ **Permasalahan :**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar Tahun 2024 tidak terdapat permasalahan yang berarti sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar berupaya semaksimal mungkin melaksanakan kegiatan dengan Anggaran yang masih terbatas di beberapa leading sektor kegiatan.

Permasalahan dan upaya yang telah ditempuh :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
2. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan Program / Kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelaksanaan beban kerja yang diamanatkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.

4. Terjadinya Refocussing Anggaran sehingga menyebabkan terbatasnya dana untuk pelaksanaan kegiatan.

➤ **Solusi**

Demi kelancaran pelaksanaan beban kerja yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dibutuhkan sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Daerah mohon untuk memenuhi kekurangan Sumber Daya Manusia dalam rangka kelancaran tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
2. Untuk memenuhi ketersediaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan tugas rutin dan kegiatan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.
3. Demi kenyamanan dalam bertugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar, dapat kiranya Pemerintah Daerah melengkapi Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Terjaganya Generasi dan	A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		1. Perencanaan dan Penganggaran	12 Bulan
		2. Perencanaan dan Penganggaran	12 Bulan
		3. Perencanaan dan Penganggaran	12 Bulan
		4. Gaji dan Tunjangan	12 Bulan
		5. Peningkatan SDM	12 Bulan
		6. Sinkronisasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
		7. Sinkronisasi Umum Perangkat Daerah	3 Bulan
		8. Sinkronisasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
		9. Sinkronisasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
		10. Sinkronisasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
		11. Sinkronisasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan
		12. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan
		13. Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12 Bulan
		14. Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas	12 Bulan
		15. Tersedianya Jasa Tenaga Harian Lepas	12 Bulan
		16. Mobil Operasional	12 Bulan
		17. Mobil Operasional	12 Bulan
		18. Mobil Operasional	12 Bulan
		19. Mobil Operasional	12 Bulan
		B. Program Pengendalian Penduduk	
		1. Terlaksananya Program Bangga Kencana	12 Bulan
		C. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
		1. Terlaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB Manajemen dan KIE	21 Kecamatan
		2. Terlaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB Manajemen dan KIE	21 Kecamatan
		3. Terlaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB Manajemen dan KIE	21 Kecamatan
		4. Terlaksananya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB Manajemen dan KIE	21 Kecamatan
		5. PLKB/PKB	21 Balai
		6. PLKB/PKB	21 Balai
		7. Wawasan Kompeten Terlaksananya Tenaga Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil	1 Kegiatan

			8. Wawasan Kompeten Terlaksananya Tenaga Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil	1 Kegiatan
			9. Wawasan Kompeten Terlaksananya Tenaga Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil	1 Kegiatan
			10. Wawasan Kompeten Terlaksananya Tenaga Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil	1 Kegiatan
			11. Wawasan Kompeten Terlaksananya Tenaga Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil	1 Kegiatan
			12. Wawasan Kompeten Terlaksananya Tenaga Pelayanan KB dan KR yang terlatih dan terampil	1 Kegiatan
			13. Tercapainya Peran Kader PKK sebagai penggerak untuk meningkatkan kesertaan ber- KB bagi masyarakat	21 Kecamatan
			14. Tercapainya Peran Kader PKK sebagai penggerak untuk meningkatkan kesertaan ber- KB bagi masyarakat	21 Kecamatan
		D. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		
			1. Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan TRIAD Gendre, dan menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR), Menurunnya Angka Pernikahan Usia Muda Melalui PIK remaja dan ajang kreatifitas remaja.	10 Keluarga
			2. Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan TRIAD Gendre, dan menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR), Menurunnya Angka Pernikahan Usia Muda Melalui PIK remaja dan ajang kreatifitas remaja.	10 Keluarga
			3. Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan TRIAD Gendre, dan menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR), Menurunnya Angka Pernikahan Usia Muda Melalui PIK remaja dan ajang kreatifitas remaja.	10 Keluarga
			4. Meningkatnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dan TRIAD Gendre, dan menurunnya angka kelahiran pada remaja (ASFR), Menurunnya Angka Pernikahan Usia Muda Melalui PIK remaja dan ajang kreatifitas remaja.	21 Kecamatan

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Penunjukkan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.730.847.702	APBD
2.	Program PengendalianPenduduk	110.577.350	APBD
3.	Program PembinaanKeluargaBerencana (KB)	4.747.311.350	APBD
4.	Program PemberdayaanDan PeningkatanKeluargaSejahtera (KS)	4.582.716.550	APBD
	JUMLAH	16.171.452.952	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

✓ **Masalah :**

- a. Pencapaian peserta KB baru (PB) untuk akseptor yang menggunakan MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) yang belum mencapai target yang mana sasaran PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat) tahun 2024 (lampiran 7) sebesar 2.891 dan pencapaian 3.697 atau 78.00% sedangkan untuk PPM Tahun 2024 untuk seluruh alkon untuk Kab.Kampar PPMnya 27.821 akseptor dan pencapaian sebesar 14.261 akseptor atau 51.26 (lampiran 8).
- b. Kurangnya pembinaan kesertaan Ber-KB Jalur wilayah di daerah tertinggal,terpencil, perbatasan (Calcitas) sehingga tingkat kesertaan KB masih rendah yang menyebabkan masih tingginya Unmet Need. Di Provinsi Riau pada tahun 2024 Unmet Need sebesar 25.86% dengan target tahun 2024 14,45% sedangkan di Kabupaten Kampar 17.00 %.
- c. Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan KB yang belum merata seperti masih tingginya CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE (CPR) CPR, (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE (ASFR) dan kesertaan KB Pria masih rendah sebanyak 0 % serta kurang optimalnya pemanfaatan tenaga medis setelah melakukan pelatihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya Intra Uterine Devise (IUD) dan Implant.

- d. Masih tingginya ASFR (Age Spacific Fertilitas Rate) usia (15-19 tahun) untuk Kabupaten Kampar sebesar 96.92%.
- e. Belum terlayannya calon Akseptor MKJP karena Menurut Perpres NO 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ditanggung BPJS, tetapi BPJS belum siap maka pembiayaan pelayanan KB terutama Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP) masih dalam proses pembiayaan dan administrasi pertanggung jawaban, pada BKKBN Provinsi Riau.
- f. Kurangnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak, remaja dan lansia dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok kegiatan BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia).
- g. Belum tersosialisasinya program (Generasi Berencana) yakni program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja dengan meningkatkan kemampuan dan kemauan positif remaja.
- h. Kurangnya pembinaan terhadap usaha kelompok yang merupakan kegiatan ekonomi produktif yang harus memberika keuntungan yang akan meningkatkan pendapatan keluarga anggota kelompok.
- i. Masih banyaknya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 sebanyak 375.716KK atau 8,38 % berdasarkan Kabupaten Kampar dalam angka tahun 2024.
- j. Masih rendahnya rasio PLKB dengan desa binaan lebih kurang 2.9 yang idealnya 1 petugas 2 memegang $\frac{1}{2}$ desa.
- k. Persentase penggunaan Inform Consent atas pelayanan KB Baru MKJP sampai bulan Desember 2022 mencapai 2498 (4,3%) masih jauh dari angka ideal 100%. Dari hasil telaah laporan F/II/KB terlihat masih banyak klinik yang belum menggunakan/melaporkan penggunaan inform concent dalam pelayanan KB baru MKJP dan juga banyak yang belum mengetahui bahwa pelayanan KB suntik harus

menggunakan inform consent, padahal salah satu pelayanan KB MKJP dan suntik yang sesuai SOP adalah dengan pemberian inform consent.

- l. Mekanisme operasional lini lapangan tidak berjalan secara optimal karena keterbatasan SDM dan dukungan dana.
- m. Kurangnya sarana dan prasarana untuk lini lapangan seperti PLKB kit, IUD kit, KIE kit dsb.
- n. Alat kontrasepsi yang masih kurang belum sesuai dengan permintaan dan realisasi yang diminta.

✓ **Solusi :**

- a. Menggerakkan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu, bidan praktek dsb untuk lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang manfaat dari Metode Kontrasepsi Jangka Panjang setiap melakukan pelayanan baik di fasilitas kesehatan maupun di praktek swasta.
- b. Meningkatkan pergerakan lini lapangan dengan memberdayakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) terutama petugas PLKB/PKB minimal 4 kali dalam sebulan, menyiapkan bahan-bahan KIE yang bersifat edukasi interpersonal dan konseling untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat sehingga apa yang menjadi pilihan masyarakat dalam ber-KB benar-benar mantap dan lestari.
- c. Lebih mengoptimalkan penggunaan Mobil Pelayanan (Muyan) terutama untuk daerah calcitas, daerah terpencil dan daerah tertinggal dalam pelayanan KB dari satu (1) kali dalam sebulan menjadi 3 tiga kali dalam sebulan.
- d. Memberdayakan stakeholder, mitra kerja dan seluruh masyarakat untuk lebih cerdas memilih alat kontrasepsi dengan melakukan intensitas KIE kepada masyarakat tentang Keluarga Berencana sebanyak 2 kali dalam sebulan.

- e. Menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Daerah maupun Swasta dalam meningkatkan capaian MKJP untuk ibu Pasca Persalinan dan Keguguran dengan membuat kerjasama atau MOU.
- f. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan khususnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang Balita, anak, remaja serta peningkatan kualitas hidup Lansia, melalui kegiatan BKB, BKR dan BKL dengan cara mengikutsertakan para kader mengikuti pelatihan, orientasi serta mengadakan lomba kader.
- g. Membentuk dan Membina PIK-R/Mahasiswa baik jalur masyarakat ataupun jalur sekolah menjadi 50 PIK-R, sebagai wadah memfasilitasi remaja belajar memahami dan mempraktekan hidup sehat serta berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari Remaja, dan terhindar dari resiko TRIAD KRR (Seksualitas, NAPZA, HIV dan AIDS), menunda usia perkawinan, mempunyai perencanaan berkeluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera serta menjadi contoh, model dan Idola bagi teman sebaya.
- h. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah lain seperti Dinas Perindustrian dan Pasar, Dinas Kesehatan untuk izin industri Rumah Tangga, mengemaskan dan memasarkan hasil industri rumah tangga sehingga dapat bernilai jual tinggi yang nantinya akan meningkatkan tahap hidup masyarakat dari Keluarga Pra KS menjadi KS 1 ataupun KS 1 menjadi KS II.
- i. Menambah jumlah PLKB/ PKB dengan cara mengadakan tenaga THL ataupun TKS agar program KB dapat sukses di masyarakat sejumlah ± 40 Orang.
- j. Agar angka penggunaan inform concent meningkat, diharapkan untuk melakukan sosialisasi diberbagai kesempatan tentang penggunaan inform concent untuk pelayanan KB dengan metode suntik kepada

klitik KB yang ada di Kab.Kampar dan melaporkannya pada laporan F/II/KB.

- k. Memberikan reward kepada mitra kerja, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kader baik kader di tingkat desa maupun tingkat RW atau RT dengan cara mengadakan berbagai kegiatan perlomba .
- l. Meningkatkan kerjasama dengan cara sosialisasi program KB ke Stake Holder, Lembaga Legislatif dan Bappeda serta BKKBN Perwakilan Riau agar penambahan anggaran bisa terealisasi.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat	1. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	7150
		2. Jumlah Terminal/Bandara/Stasiun yang dikelola	2
		3. Persentase Layanan Angkutan Darat	75%
		4. Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan	500
		5. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	0,5
		6. Jumlah Arus Penumpang Umum	278775
		7. Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal/ Bandara/Stasiun	273000
II	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Perairan	1. Jumlah Pelabuhan/Dermaga yang dibangun	1
		2. Jumlah Orang/Barang Melalui Pelabuhan /Dermaga	990
III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB

Program Dinas Perhubungan Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 10.371.148.581	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 23.795.441.655	APBD
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 486.000.000	APBD
	JUMLAH	Rp 34.652.590.236	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

✓ **Masalah :**

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis permasalahan yang melingkupi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1. Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Bidang Transportasi	Kurangnya Manajemen transportasi	Belum Optimalnya Pengembangan Operasional Angkutan
		Kurangnya Manajemen Aparatur	Kompetensi Teknis Pegawai
2	Bidang Sistem Informasi Teknologi Transportasi	Sistem Informasi Teknologi Transportasi masih terbatas	Sistem Jaringan SI IT yang belum memadai

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, dan Informatika

**Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	96.07
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	97.34
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	97.43
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	98.98
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99.39
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	91.54
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	96.50

2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	99.34
3	Program Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan nama Domain yang Telah di Tetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100% 100%	98.49 99.84
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	99.03
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	91.75

Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.289.654.757
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	7.764.191.250
3	Program Aplikasi Informatika	3.670.242.510
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	126.397.000
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	237.724.700
	JUMLAH	21.088.120.217

➤ Permasalahan Dan Solusi

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar, menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan program sebagai berikut :
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikatornya Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100%, realisasinya sebesar 96.67 %.

3. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator Persentase Informasi Publik yang disediakan dengan target 100%, realisasi sebesar 99.34 %.
4. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan indikator Persentase Jumlah OPD yang Terintegrasi dengan target 100%, realisasi sebesar 99.17 %.
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, dengan indikator Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi dengan target 100%, realisasi sebesar 99.03 %.
6. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan indikator index Keamanan Informasi dengan target 100%, realisasi sebesar 91.75 %.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Koperasi Aktif	Jumlah Peningkatan Koperasi Aktif	320 Koperasi
2	Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro Kecil	Jumlah Usaha Mikro Kecil Terlatih	318 K

Program Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	237.333.850	APBD
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasian	36.751.050	APBD
3	Program Pendidikan & Latihan Perkoperasian	-	APBD
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil & Usaha Mikro (UMKM)	1.639.515.627	APBD
5	Program Pengembangan UMKM	396.967.650	APBD
	JUMLAH	2.310.568.177	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

1. Masih adanya koperasi yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
2. Masih banyaknya Koperasi yang belum memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
3. Kurangnya pemahaman pengurus koperasi tentang Pelaporan Keuangan Koperasi
4. Kurang berminatnya Koperasi dalam Kerja Sama Pembiayaan, Kemitraan, Penyertaan Modal dari Pemerintah
5. Adanya pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya, sehingga mengganggu pengguna jalan seperti : pasar tambang, pasar kuok, pasar teratak buluh (siak hulu), pasar air tiris dan pasar Bangkinang (pasar inpres).

➤ **Solusi :**

1. Melakukan Pembinaan dan penyuluhan terkait pentingnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi jalannya roda organisasi Koperasi
2. Menyurati dan memberikan Sanksi bagi Koperasi yang belum melaksanakan RAT
3. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
4. Memberikan sosialisasi tentang pentingnya memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
5. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan (BIMTEK) tentang Perkoperasian dan Pelaporan Keuangan Koperasi
6. Melakukan Monitoring Pelaporan Keuangan Koperasi
7. Melakukan Sosialisasi tentang Program Pembiayaan, Kemitraan, Penyertaan Modal Pemerintah kepada Koperasi
8. Dinas Perdagangan, Koperasi & UMK Kab. Kampar bersama dengan Satpol PP dan Dishub secara berkala melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya.
9. Melakukan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana pasar sehingga dapat meningkatkan PAD.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkankualitas pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat(IKM)	90%
		Persentase penyelesaian perizinan yang tepat waktu	100%
2	Meningkatkan kemudahan investasi	Persentase peningkatan fasilitasi investasi	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	BB

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN (Rp)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	I	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.700.000,-
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.813.000,-
	II	Administrasi keuangan perangkat daerah	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	5.835.583.175,-
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.516.000,-
	III	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.400.000,-
	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.630.000,-
	IV	Administrasi umum perangkat daerah	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.596.000,-
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.970.000,-

	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146.149.000,-
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	179.162.150,-
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.600.000,-
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	701.977.000,-
	V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.295.000,-
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292.883.000,-
	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	316.610.000,-
	VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	242.248.740,-
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.753.782.184,-
	VII	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.236.950,-
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.130.900,-
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	434.840.000,-
B	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
	I	Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	
	1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	167.642.000,-
C	Program Promosi Penanaman Modal		
	I	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten / kota	
	1	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kab / kota	40.245.000,-
D	Program Pelayanan Penanaman Modal		
	I	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	
	1	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal	270.800.000,-
	2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	137.847.200,-
	3	Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	319.121.500,-

E	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
	I	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	
	1	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	372.366.000,-
	2	Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	312.050.050,-
	3	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	73.949.950,-
F	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
	I	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada Tingkat daerah kabupaten/kota	
	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	219.711.000,-
		JUMLAH	12.717.855.799,-

➤ **Permasalahan dan Solusi**

✓ **Masalah :**

Pada tahun 2024 DPMPTSP Kab. Kampar mendapatkan target untuk investasi PMA dan PMDN senilai 3. 240.000.000.000,- dalam pencapaiannya target PMA dan PMDN tersebut DPMPTSP Kab. Kampar melebihi target pencapaian sebesar Rp. 10.853.507.220.000,- dengan persentase 334,98 %, namun ada beberapa permasalahan yang ditemui dilapangan antara lain:

1. Pelaku usaha masih banyak yang belum melakukan migrasi data dari OSS 1,1 ke online single submission risk based approve (OSS RBA).
2. Banyak pelaku usaha yang belum memahami tatacara pengisian LKPM di OSS RBA

✓ **Solusi :**

1. DPMPTSP Kab. Kampar melalui bidang Penanaman Modal melakukan pengawasan terkait LKPM ke pelaku usaha.

2. DPMPTSP Kab. Kampar juga melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada pelaku usaha mikro sampai usaha besar. Kemudian DPMPTSP juga memfasilitasi berupa tempat, akomodasi dan lainnya kepada pelaku usaha dalam bentuk bimtek.
3. DPMPTSP Kab. Kampar melalui bidang penanaman modal mendirikan sebuah klinik LKPM yang bertujuan untuk menampung kendala dan memberikan Solusi terkait LKPM kepada pelaku usaha.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Berkaitan Dengan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Prestasi Olahraga	1 Persentase Sarana Olahraga Masyarakat dengan kondisi baik	68,00%
		2 Jumlah Pelatih Bersertifikat	125 Orang
		3 Jumlah Wasit Bersertifikat	80 Orang
II	Meningkatnya Kualitas Organisasi Kepemudaan	1 Persentase Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	55,00%
		2 Persentase Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)	25,00%
III	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Bidang Keagamaan	1 Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda di Bidang Keagamaan	45,00%

Program Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Berkaitan Dengan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	131.810.500,00	DANA APBD
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.510.725.240,00	DANA APBD
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	617.944.950,00	DANA APBD
JUMLAH		6.260.480.	

➤ **Permasalahan :**

Anggaran untuk Program Kepemudaan dan Olahraga masih dikategorikan rendah baik dari segi pengembangan Atlit dan pemuda beserta Sarana Prasarana Penunjangnya, sebab jika dilihat dari anggaran yang tersedia memang cukup besar namun anggaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada anggran yang tercantum hanya 50% selebihnya ke Pihak Hibah Organisasi seperti KONI, NPC, PRAMUKA DLL.

➤ **Solusi :**

1. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap judgement yang terkait dengan penetapan target indicator kinerja dapat didukung dengan data yang lebih lengkap dan akurat.
2. Lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
3. Berupaya untuk lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus sebagai pelayan masyarakat, melalui berbagai pelatihan atau short course terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Melakukan Pendekatan bersama dengan Mitra OPD yaitu komisi I DPRD Kampar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kampar, dalam hal penyampaian Usulan Anggaran Untuk Urusan Pemuda dan Olahraga Baik Dari Segi Sumber daya Manusia atau Sarana Prasarananya.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya layanan akses data statistik sektoral	-Tersedianya sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada

Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	117.047.000,-	
	JUMLAH	117.047.000,-	

➤ Permasalahan dan Solusi

❖ Masalah :

1. Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM bidang statistik.
2. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai.
3. Pelaksanaan sosialisasi yang kurang di bidang statistik.
4. Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data statistik sektoral yang belum optimal.

❖ Solusi :

1. Penambahan sumber daya manusia yang berkualitas
Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai
2. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang statistik.
3. Meningkatkan validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data statistik sektoral yang optimal.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan

Bidang Persandian Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Sistem Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	75%

Program Urusan pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	287.790.700	APBD
	JUMLAH	287.790.700	

➤ Permasalahan dan Solusi

❖ Masalah :

1. Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM Bidang
2. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai
3. Pelaksanaan sosialisasi yang kurang di Bidang
4. Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian.
5. Pengembangan Sistem Informasi yang belum keseluruhan terintegrasi (Sertifikat Elektronik, kontra penginderaan dll)

❖ Solusi :

1. SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi TIK, bagaimanapun baiknya Teknologi Informasi bila tidak didukung oleh SDM yang cukup maka Implementasinya kurang maksimal.
2. Sosialisasi system Informasi dan Teknologi Informasi seperti: (CSIRT, siber security, dll)

3. Penguasaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
4. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Pengembangan Sistem Informasi yang belum keseluruhan terintegrasi perlu adanya langkah langkah strategis yaitu mengembangkan Sistem Informasi yang dapat diakses secara interaktif dengan mudah oleh masyarakat. Seperti Sistem Informasi yang berbasis tanda tangan digital.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, dan Informatika

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100% 100% 100% 100% 100% 100%	85.71 90.30 98.78 99.11 92.86 92.29
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	99.29
3	Program Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan nama Domain yang Telah di Tetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100% 100%	98.68 95.95
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	1. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	91.75
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	83.94

Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.185.570.920
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	12.027.611.000
3	Program Aplikasi Informatika	1.661.202.844
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	58.740.000
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	23.604.800
	JUMLAH	21.956.729.564

➤ Permasalahan Dan Solusi

Pada tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar pada Triwulan III melaksanakan 5 (lima) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan Anggaran sebesar Rp. 21.956.729.564,- , dengan realisasi Keuangan sebesar Rp. 21.226.965.943,11,- atau sekitar 96,68%.

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikatornya Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan target 100%, realisasi sebesar 92,58%.
- Program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator Persentase Informasi Publik yang disediakan dengan target 100%, terealisasi 99,29 %.
- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, dengan indikator Persentase Jumlah OPD yang Terintegritas dengan target 100%, terealisasi 98,30%.
- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan indikator Jumlah Ketersediaan Data dan Informasi dengan target 100%, terealisasi 91,75%

- Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan indikator Index Keamanan Informasi dengan target 100%, terealisasi 83,94%.

Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

- Untuk target RKPD tahun 2024 seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan memenuhi target RKPD 2024.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan.

- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target RKPD :
- Keterbatasan anggaran kegiatan.

Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi danantisipasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja.

- Melakukan reviu/evaluasi target yang telah ditetapkan terhadap hasil yang telah dicapai.
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule.
- Menyesuaikan target dengan kondisi keuangan tahun 2024 pada APBD tahun 2024.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	2	3	4
1	Meningkatkan Koperasi Aktif	Jumlah Peningkatan Koperasi Aktif	320 Koperasi
2	Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro Kecil	Jumlah Usaha Mikro Kecil Terlatih	318 UMK

Program Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	160.311.500	APBD
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasian	72.578.300	APBD
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		APBD
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.697.739.075	APBD
5	Program Pengembangan UMKM	279.791.300	APBD
	JUMLAH	2.210.420.175	

➤ Permasalahan dan Solusi

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) masih terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas terutama yang memiliki keterampilan teknis baik di bidang Koperasi terkait dengan pengelolaan keuangan koperasi (akuntansi Koperasi), perdagangan dan pasar maupun bidang kemetrollogian, ini disadari menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan kegiatan

yang sudah dirumuskan sebelumnya. Selain itu pendistribusian SDM yang tidak merata sehingga terjadi penumpukan SDM di satu bidang dan tentunya berdampak pada efektivitas dan efisiensi hasil yang dicapai.

2. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar, seperti kondisi gedung atau bangunan yang sudah tua karena bangunan berdiri sejak masa Departemen Koperasi, dengan ruangan yang terbatas dan kurang memadai bahkan adanya bidang yang masih menumpang di aula dinas, kemudian kurangnya kendaraan operasional untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di lapangan menjadi kendala dalam optimalisasi pencapaian tujuan dan fungsi dinas terkait dengan perdagangan, koperasi dan UMK.

3. Dana

Alokasi dana untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan diakui masih kurang, sehingga pembinaan yang dilaksanakan belum mencapai hasil yang maksimal apalagi untuk menjangkau objek-objek pembinaan itu sendiri baik Koperasi, UMK ataupun konsumen perdagangan yang tersebar di daerah-daerah yang jauh di wilayah Kabupaten Kampar sehingga baru sebagian saja yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari dinas.

➤ Solusi :

1. Memberikan kesempatan kepada pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar untuk mengikuti diklat-diklat yang bersifat teknis guna meningkatkan keterampilan teknis dan kompetensi pegawai di dalam melaksanakan tugasnya ke depan. Termasuk untuk mengisi jabatan fungsional yang sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang dimiliki dengan mengikuti ujian kompetensi.

2. Mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai dengan mengajukan anggaran pengadaan sarana prasarana kantor serta rehab bangunan kantor secara bertahap guna menciptakan suasana kerja yang nyaman dan menyenangkan agar kinerja dapat ditingkatkan, termasuk mengajukan pinjaman atau pemakaian kendaraan dinas operasional yang ada ke bagian perlengkapan Sekretariat Daerah Kampar.
3. Mengajukan atau mengupayakan penambahan alokasi dana untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan secara lebih intensif di lapangan agar target atau kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK dapat ditingkatkan dan adanya pemerataan pembinaan ataupun pengawasan ke daerah-daerah yang jauh di wilayah Kabupaten Kampar yang selama ini belum mendapatkan pembinaan.
4. Membangun komitmen dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan dengan penuh tanggung jawab, seperti menyusun rencana kerja secara tepat dan terperinci, serta senantiasa mematuhi kerangka kerja operasional yang sudah ditetapkan agar kerja lebih teratur, terarah dan sistematis yang nantinya dapat mempermudah dalam pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK untuk tahun anggaran 2024.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85
		Persentase penyelesaian perizinan yang tepat waktu	100%
2	Meningkatkan kemudahan investasi	Persentase peningkatan fasilitasi investasi	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	BB

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN (Rp)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	I	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.036.800,-
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.190.300,-
	II	Administrasi keuangan perangkat daerah	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	6.131.609.107,-
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	72.061.100,-
	III	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74.542.050,-
	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	62.727.300,-
	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	297.612.000,-

	IV	Administrasi umum perangkat daerah	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.215.600,-
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	376.516.000,-
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	184.314.930,-
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	203.376.300,-
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.001.000,-
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.039.111.200,-
	V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	
	1	Pengadaan Mebel	224.064.600,-
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.671.019.860,-
	3	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	200.000.000,-
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	651.632.000,-
	VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	351.212.660,-
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.902.019.684,-
	VII	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	330.120.000,-
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.970.000,-
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	450.851.200,-
	4	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	496.040.700,-
B	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
	I	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	167.802.500,-

	II	Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota	
	1	Penyusunan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota	168.194.100,-
C	Program Promosi Penanaman Modal		
	I	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten / kota	
	1	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kabupaten / kota	41.820.600,-
D	Program Pelayanan Penanaman Modal		
	I	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	
	1	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	333.423.100,-
	2	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	123.837.700,-
	3	Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	318.719.300,-
E	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
	I	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	
	1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	92.132.000,-
	2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	337.820.000,-
	3	Pengawasan Penanaman Modal	184.263.000,-
F	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
	I	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada Tingkat daerah kabupaten/kota	
	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	498.319.500,-
		JUMLAH	17.099.567.191,-

➤ **Permasalahan dan Solusi**

✓ **Masalah :**

Pada tahun 2024 DPMPTSP Kab. Kampar mempunyai target untuk investasi PMA dan PMDN senilai Rp. 6.000.000.000.000,- dalam pencapaiannya target PMA dan PMDN tersebut DPMPTSP Kab. Kampar melebihi target pencapaian sebesar Rp. 7.149.427.943.578,- dengan persentase 119,16 % namun ada beberapa permasalahan yang ditemui dilapangan antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha terkait Regulasi Penanaman Modal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
2. Tidak patuhnya pelaku usaha terhadap Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

✓ **Solusi :**

1. DPMPTSP Kab. Kampar meningkatkan pengawasan penanaman modal kepada pelaku usaha.
2. DPMPTSP kab. Kampar juga melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada pelaku usaha terkait regulasi penanaman modal dan Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. DPMPTSP Kab. Kampar melalui bidang penanaman modal mendirikan sebuah klinik LKPM yang bertujuan untuk menampung kendala dan memberikan Solusi terkait LKPM kepada pelaku usaha.

19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
I	Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase Guru SD Berkualifikasi	90,00%
		2. Persentase Guru SMP Berkualifikasi	97,00%
		3. Persentase Guru PAUD Berkualifikasi	65,50%
		4. Persentase Guru SD Bersertifikasi	50,00%
		5. Persentase Guru SMP Bersertifikasi	70,00%
		6. Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru SD	73
		7. Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru SMP	73
		8. Rasio Guru terhadap Siswa SD	1 : 16 Orang
		9. Rasio Guru terhadap Siswa SMP	1 : 10 Orang
II	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan kualitas layanan pendidikan	1. Persentase SMP Berakreditasi	100%
		2. Persentase Peningkatan Sistem Informasi Layanan Pendidikan	100%
		3. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	88%
III	Meningkatnya Kualitas lulusan SD/SMP	1. Rata-rata Nilai UN SD	80,5
		2. Rata-rata Nilai UN SMP	80,5
		3. Angka Putus Sekolah SD	0,34%
		4. Angka Putus Sekolah SMP	1,00%
		5. Persentase Kelulusan SD	100,00%
		6. Persentase Kelulusan SMP	100,00%
		7. APM SD	98,00%
		8. APM SMP	85,00%
IV	Meningkatnya Pendidikan Kesenjangan	1. Persentase PKBM Berakreditasi	99,00%
		2. Persentase Guru Tutor PKBM Berkualifikasi	86,00%
V	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berstandar	1. Persentase SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas	86,00%
		2. Persentase Ruang Kelas SD dengan kondisi Baik	67,00%
		3. Persentase Ruang Kelas SMP dengan kondisi Baik	73,00%
VI	Meningkatnya taraf Pendidikan Masyarakat	1. APK SD	99,00%
		2. APK SMP	90,00%
		3. APK PAUD	91,00%
		4. Rata-rata Lama Sekolah	9,85 Tahun
		5. Persentase Anak Usia Sekolah dari Keluarga Prasejahtera yang Sekolah lulus sampai SMP	90,00%

	Meningkatnya Prestasi Olahraga	1. Persentase Sarana Olahraga Masyarakat dengan kondisi baik	70,00%
		2. Jumlah Pelatih Bersertifikat	140 Orang
		3. Jumlah Wasit Bersertifikat	100 Orang
VIII	Meningkatnya Kualitas Organisasi Kepemudaan	1. Persentase Peningkatan Kegiatan Kepemudaan	55,00%
		2. Persentase Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)	35,00%
IX	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Bidang Keagamaan	1. Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda di Bidang Keagamaan	55,00%

Program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	524.518.634.170,00	DANA APBD/ APBN(DAK)
2	Program Pengelolaan Pendidikan	291.119.005.172,00	DANA APBD/ APBN(DAK)
3	Program Pengembangan Kurikulum	716.316.800,00	DANA APBD/ APBN(DAK)
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	150.999.000,00	DANA APBD/ APBN(DAK)
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	600.000.000,00	DANA APBD
6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	8.585.904.850,00	DANA APBD
7	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	335.000.000,00	DANA APBD
JUMLAH		826.025.859.992,00	

➤ Permasalahan :

1. Masih terdapatnya anak putus sekolah khususnya tingkat pendidikan menengah.
2. Masih kurangnya aparatur yang Profesional
3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan.
4. Masih lemahnya sistem manajemen dan pengawasan pendidikan.
5. Masih kurangnya inventarisasi peninggalan situs-situs budaya dan belum optimalnya promosi nilai-nilai budaya.

6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana sekolah di setiap jenjang pendidikan dan pendidikan luar biasa.

➤ **Solusi :**

1. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik yang melanjutkan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri melalui pendidikan gratis secara menyeluruh dan pemerataan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang Kegiatan belajar mengajar.
2. Pegawai Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan administrasi baik dari segi penyelenggaraan kegiatan, keuangan dan perencanaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ingin di targetkan.
3. Memberikan kesempatan kepada Tenaga Pendidik untuk mengikuti Pelatihan-pelatihan, bimtek Peningkatan mutu sesuai dengan perkembangan teknologi.
4. Perlunya peningkatan sistem manajemen yang berbasis IT dan lebih menintensifkan sistem pengawasan di Sekolah.
5. Perlunya inventarisasi secara detail peninggalan situs budaya dan promosi kepariwisataan.
6. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber dari pendapatan sah lainnya yang tidak mengikuti.

20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya layanan akses data statistik sektoral	Tersedianya sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Ada

Program Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	117.047.000,-	
	JUMLAH	117.047.000,-	

➤ Permasalahan dan Solusi

❖ Masalah :

1. Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM bidang statistik.
2. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai.
3. Pelaksanaan sosialisasi yang kurang di bidang statistik.
4. Validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data statistik sektoral yang belum optimal.

❖ Solusi :

1. Penambahan sumber daya manusia yang berkualitas
2. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai
3. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang statistik.
4. Meningkatkan validasi, pemanfaatan, pengelolaan dan up dating data statistik sektoral yang optimal.

21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan

Bidang Persandian Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Sistem Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	75%

Program Urusan pemerintahan Bidang Persandian Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	287.790.700	APBD
	JUMLAH	287.790.700	

➤ Permasalahan dan Solusi

❖ Masalah :

1. Kurangnya kualitas serta kuantitas SDM Bidang
2. Sarana dan Prasarana pendukung yang kurang memadai
3. Pelaksanaan sosialisasi yang kurang di Bidang
4. Keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian.
5. Pengembangan Sistem Informasi yang belum keseluruhan terintegrasi (Sertifikat Elektronik, kontra penginderaan dll)

❖ Solusi :

1. SDM merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi TIK, bagaimanapun baiknya Teknologi Informasi bila tidak didukung oleh SDM yang cukup maka Implementasinya kurang maksimal.
2. Sosialisasi system Informasi dan Teknologi Informasi seperti: (CSIRT, siber security, dll)

3. Penguasaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
- Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
4. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Pengembangan Sistem Informasi yang belum keseluruhan terintegrasi perlu adanya langkah langkah strategis yaitu mengembangkan Sistem Informasi yang dapat diakses secara interaktif dengan mudah oleh masyarakat. Seperti Sistem Informasi yang berbasis tanda tangan digital.

22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGE T
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melestarikan dan Memfalitasi Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat yang dilestarikan dan difasilitasi	2 Lembaga
2	Terinventarisasinya benda situs cagar budaya	Jumlah benda situs cagar budaya yang dilestarikan	12 Unit

Program Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	Program Pengembangan Kebudayaan	4.358.980.800	APBD
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	961.805.750	APBD
	JUMLAH	5.320.786.550	

➤ Permasalahan :

1. Terbatasnya SDM aparatur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan baik Kuantitas maupun Kualitas.

2. Masih minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang Objek wisata dan budaya
3. Rendahnya pelaksanaan koordinasi pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan.
4. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati perundang–undangan bidang pariwisata dan kebudayaan sehingga tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.

➤ **Solusi :**

1. Mengirimkan aparaturnya untuk mengikuti Diklat Kepariwisata dan Kebudayaan di tingkat Provinsi maupun Pusat.
2. Mengoptimalkan pembinaan dan Penataan Objek serta dayaTarik wisata secara efektif dan memadai.
3. Secara bertahap mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana penunjang objek wisata, kebudayaan.
4. Meningkatkan koordinasi pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan dengan pihak-pihak terkait.
5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata dan kebudayaan.
6. Melakukan Pendataan usaha kepariwisataan dan kebudayaan yang ada di kecamatan- kecamatan.

23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Perjanjian Kerja (PENJA) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(	(3)	(4)
1	Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Jumlah Pustaka Binaan (Pustaka Umum)	109 Pustaka
		Jumlah Koleksi Pustaka Daerah dan Kecamatan	91.218
		Jumlah Pemustaka Perpustakaan Daerah dan Kecamatan	43.790 Pemustaka
		Jumlah Promosi Budaya Baca	224 Kegiatan
2	Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang Baik	Pendataan dan Penataan Arsip SKPD dan Kecamatan	5 OPD dan 5 Kecamatan
		Jumlah SDM Kearsipan	3 Orang
		Jumlah SKPD yang Tertata Arsip Dinamis dan Arsip Statis	5 OPD dan 5 Kecamatan

Program Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN APBD (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.541.464.244
2	Program Pembinaan Perpustakaan	1.565.630.950
3	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	115.767.850
	JUMLAH	10.222.863.044

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Perjanjian Kerja (PENJA) Urusan Pemerintahan

Bidang Kearsipan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya penataan dan pengelolaan arsip daerah	Lancarnya pengelolaan arsip	1800 Berkas
2	Terlaksananya penataan dan pengelolaan arsip daerah	Lancarnya pengelolaan arsip Statis daerah	200 Arsip
3	Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) tahun	Tercapainya jumlah Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	50 Berkas
4	Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Tercapainya jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	70 Arsip
5	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Jumlah Arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	1000 Arsip
6	Terlaksananya Pencarian Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Tercapainya jumlah pencarian Arsip Statis yang dinyatakan	300 Arsip

Program Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	119.795.090	APBD
2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	33.469.000	APBD
3	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	41.341.300	APBD
4	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	115.371.100	APBD
5	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	70.593.400	APBD

6	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang dinyatakan Hilang	70.405.100	APBD
	JUMLAH	450.974.990	

➤ **Permasalahan dan Solusi**

✓ **Masalah :**

1. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Pustakawan dengan kualifikasi pendidikan S1 Ilmu Perpustakaan dan S1 Kearsipan yang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar.
2. Masih minimnya anggaran yang disediakan untuk penyelenggaraan operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar.
3. Masih minimnya sarana dan prasarana pendukung layanan perpustakaan (Ruang Layanan Anak yang tidak memadai, ruang dan buku Disabilitas belum ada dan belum adanya ruang rapat yang memadai,
4. Tingkat Kegemaran membaca dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kampar masih belum merata khususnya untuk diwilayah pinggiran.
5. Masih belum maksimalnya kesadaran Pengelola Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Sekolah dalam mendaftarkan Perpustakannya ke Perpustakaan Nasional sesuai standart Nasional dan mengajukan Akreditasi Perpustakaannya.
6. Belum adanya sarana pendukung untuk penyelamatan dan penyimpanan naskah kuno.
7. Belum tersusunnya regulasi penyelamatan naskah kuno yang ada dimasyarakat.
8. Masih kurangnya kesadaran Instansi Pemerintah dalam Menyusun dan terselamatkannya arsip-arsip vital Pemerintah Daerah yang berada di setiap instansi nya masing-masing.

9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar belum mempunyai Arsip Digital yang sesuai dengan standar nasional.
10. Masih belum tersusunnya Peraturan Tata Kearsipan dan Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

✓ **Solusi :**

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dengan penambahan jumlah ASN atau PPPK yang memiliki kualifikasi minimal mempunyai Pendidikan S1 Ilmu Perpustakaan, S1 Ilmu Kearsipan dan S1 Ilmu Komputer.
2. Menambahkan anggaran untuk biaya operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar.
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung layanan perpustakaan (Ruang Layanan Anak, ruang dan buku Disabilitas dan ruang rapat yang memadai,
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar melakukan terobosan-terobosan melalui inovasi-inovasi dalam Upaya memberikan pelayanan untuk peningkatan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) antara lain Inovasi Geliat Kamu, One Village One Library dll serta membuat Surat Edaran Bupati Kampar tentang Percepatan membangun Perpustakaan Desa.
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar terus melakukan sosialisasi dan Pembinaan kepada Pengelola Perpustakaan untuk dapat mendaftarkan Perpustakannya ke Perpustakaan Nasional sesuai standart Nasional dan mengajukan Akreditasi Perpustakaannya
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupaya mengajukan anggaran untuk penyediaan bahan dan alat dalam penyelamatan

naskah kuno antara lain, camera dengan kualitas tinggi, tissue jepang, scanner dll serta mengajukan Kerjasama dengan Perpustakaan Nasional dalam penyelamatan naskah kuno.

7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar akan mengajukan draf usulan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Penyelamatan Naskah Kuno.
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar akan membuat Surat Edaran Bupati kepada OPD yang berada di Kabupaten Kampar untuk dapat menyimpan arsip-arsip tersebut di Depot Arsip Kabupaten Kampar.
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar akan berupaya mempersiapkan SDM dan saran prasarana pendukung untuk kelengkapan arsip digital.
10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar akan mengajukan draf Peraturan Bupati tentang Tata Kearsipan dan Pedoman Tata Naskah Dinas

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Perjanjian Kerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produksi Sektor Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	2.600 ton
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	59.885 ton
		Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	8.000 ton
2	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90-100%

Program Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.626.604.051
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.897.602.600
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.490.709.600
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	481.240.000
5	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	464.994.600
	JUMLAH	17.961.150.851

➤ Permasalahan dan Solusi

❖ Masalah :

1. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia sehingga sulit mengadopsi teknologi sesuai perkembangan sehingga belum optimalnya penerapan teknologi perikanan tepat guna di masyarakat.
2. Kesenjangan antara jumlah nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan yang membutuhkan penyuluhan dengan jumlah tenaga penyuluh serta sarana dan sarana penunjang penyuluhan.

3. Kemampuan modal yang dimiliki oleh nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan sangat kecil sehingga sangat sulit untuk memasarkan dan mengembangkan usaha.
4. Kurangnya minat investor menanamkan modalnya di bidang kelautan dan perikanan akibat belum adanya informasi paket investasi menguntungkan.
5. Masih lemahnya dukungan dari lembaga keuangan bank dan non bank dalam hal akses permodalan kepada nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan dalam rangka pengembangan usaha.
6. Masih adanya penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bahan terlarang seperti racun dan bom.
7. Terbatasnya sarana produksi seperti induk dan benih unggul, pakan, pupuk dan obat-obatan yang standar.
8. Masih rendahnya penanganan pasca panen.
9. Terbatasnya infrastruktur dasar, seperti kelistrikan, modal transportasi dan prasarana jalan.
10. Organisasi pembudidaya dan nelayan belum berfungsi secara optimal.
11. Belum ada zonasi yang jelas bagi kawasan budidaya serta pembukaan kawasan tanpa mengikuti aturan yang berlaku.
12. Kepemilikan lahan seringkali tidak jelas, adanya status tanah sengketa atau konflik antar hak adat, perseorangan dan perusahaan.
13. Tata letak (lay out) dan konstruksi petak budidaya tidak kokoh, terlalu dangkal dan luas.
14. Masih tingginya ancaman penyakit ikan.

❖ **Solusi :**

1. Peningkatan Pemanfaatan sumber daya alam/ perikanan.
2. Peningkatan skala usaha dan produksi perikanan, yang diikuti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha.
3. Peningkatan Fasilitas permodalan dan pemasaran.
4. Dapat dikendalikannya keberadaan penyakit ikan menular.
5. Adanya peningkatan kontribusi dari bidang perikanan untuk mengentaskan kemiskinan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Destinasi Wisata	Jumlah daya tarik wisata	110 DTW
2	Meningkatnya pemasaran dan Provinsi Pariwisata	Persentase publikasi dan event wisata	13 event 3 kegiatan
3	Meningkatnya pelaku industry ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	7 kelompok
4	Meningkatkan kelompok/ sanggar seni budaya	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan	100 kelompok
5	Melestraikan dan memfasilitasi Lembaga adat	Jumlah Lembaga adat yang dilestarikan dan difasilitasi	2 lembaga
6	Terinventarisasi benda situs cagar budaya	Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan	15 unit

Program Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.017.710.176
2	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.227.651.900
3	Pemasaran Pariwisata	638,084,400
4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1,163,092,800
5	Pengembangan Kebudayaan	193,000,400
6	Pengembangan Kesenian Tradisional	821,766,500
7	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	100,000,000
	JUMLAH	10,161,306,176

➤ **Permasalahan dan Solusi**

❖ **Masalah :**

1. Terbatasnya SDM aparatur Bidang Pariwisata dan kebudayaan baik kuantitas maupun kualitas
2. Terbatasnya sarana dan prasarana Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dimiliki
3. Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik usaha kepariwisataan untuk mendaftarkan usaha kepariwisataan dan Kebudayaan.
4. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek – objek wisata, kebudayaan.
5. Rendahnya pelaksanaan koordinasi pembangunan bidang pariwisata, dan Kebudayaan baik secara vertikal maupun horizontal.
6. Rendahnya Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati perundang-undangan bidang Pariwisata dan kebudayaan sehingga tingkat partisipasi masyarakat masih rendah.

❖ **Solusi:**

1. Mengirimkan Aparatur untuk mengikuti Diklat Kepariwisata dan Kebudayaan ditingkatkan Provinsi maupun Pusat.
2. Mengupayakan agar Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dapat memiliki fasilitas ruangan dan perlengkapan yang cukup dan memadai.
3. Mengoptimalkan Pembinaan dan Penataan Objek serta daya tarik wisata secara efektif dan memadai.
4. Melakukan sosialisasi kepada pemilik usaha kepariwisataan agar dapat mendaftarkan usaha kepariwisataannya.

5. Secara bertahap mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana penunjang objek wisata, kebudayaan.
6. Meningkatkan koordinasi pembangunan bidang pariwisata dan kebudayaan dengan pihak – pihak terkait.
7. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Perjanjian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura :	
		Padi	33.696 Ton
		Jagung	9.359 Ton
		Cabe	1.619 Ton
		Jeruk	1.7442 Ton
		Persentase Petani yang menerapkan teknologi tepat guna	64,91 %
		Persentase peningkatan KK Petani yang bergerak di Bidang Pertanian	44,419 KK

Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	25.929.395.519
2	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	1.018.708.300
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.155.400.456
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	300.486.600
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	156.771.900
6	Program Penyuluhan Pertanian	1.733.056.800
	JUMLAH	33.293.819.575

➤ Permasalahan dan Solusi

❖ Masalah :

1. Sosial budaya masyarakat yang masih lemah.
2. Rendahnya tingkat penerapan teknologi ditingkat petani.

3. Masih terbatasnya penggunaan benih bermutu.
4. Adanya alih fungsi lahan.

❖ **Solusi :**

1. Dalam melaksanakan pembangunan pertanian perlu menyatukan persepsi, bahwa sub sektor pertanian pada umumnya merupakan sub sektor yang penting dan strategis dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Kampar untuk menuju visi Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai wilayah swasembada pangan dan Hortikultura berbasis industry pertanian tahun 2022.
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan semua Stakeholder dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam sub sektor pertanian.
3. Untuk mewujudkan visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kampar tahun 2022 mendapat dukungan baik dalam hal kebijakan dan pendanaan dari Pemerintah Daerah serta dari stakeholder lainnya dalam pembangunan pertanian.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

**Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1	Terbinanya Pasar Rakyat	Jumlah Pasar Kelurahan	4 Pasar
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Jumlah Ketersediaan Bahan Pokok dan Bahan Penting lainnya	21 Kec
3	Meningkatkan Koperasi Aktif	Jumlah peningkatan Kopersi Aktif	320 Kop
4	Meningkatkan kualitas usaha mikro kecil	Jumlah usaha mikro kecil terlatih	318 UMK

Program Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	8.146.120.294
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	209.555.600
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	75.886.700
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	741.148.100
5	Program Pengembangan UMKM	897.044.390
6	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	102.374.700
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	41.370.300
8	Program Stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	176.801.050
9	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	355.030.300
10	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	69.789.200
	JUMLAH	10.815.120.634

➤ Permasalahan dan Solusi Masalah :

Pemasalahan yang menjadi kendala dalam capaian optimalisasi kinerja yang dihadapi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan SDM terutama ASN baik kuantitas maupun kualitas yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar sampai saat ini masih menjadi masalah klise, ditambah dengan kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan tuntutan jabatan, sehingga tidak mengherankan jika capaian sasaran kinerja kurang optimal akibat kurangnya penguasaan teknis dan kemampuan untuk berinovasi dalam peningkatan program- program kerja yang telah ditetapkan.
2. Belum terbentuknya data tunggal mengenai perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar sehingga ini menjadi kendala dalam pengelolaan data dan informasi yang dibutuhkan secara efektif dan

efisien. Di sisi lain teknik pengumpulan data masih dilakukan secara manual, belum menggunakan aplikasi.

3. Fasilitas kerja yang dimiliki Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar saat ini belum lengkap dan memadai meskipun secara jumlah sudah mulai mencukupi, sehingga turut berpengaruh terhadap pelaksanaan program-program kerja atau kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

➤ **Solusi :**

Menyikapi beberapa persoalan yang dihadapi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK di atas, maka solusi yang dapat ditawarkan antara lain :

1. Mengupayakan bimbingan teknis dan diklat-diklat bagi ASN terutama yang berkaitan dengan teknis bidang perdagangan, koperasi dan UMK dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk melaksanakan tugas secara optimal dan mampu berinovasi guna mendukung pengembangan program dan kegiatan yang ada.
2. Perlunya koordinasi aktif dan terbuka antar setiap unit kerja yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK dalam hal informasi dan data yang dibutuhkan, sehingga adanya walidata yang dapat diakses secara mudah guna kepentingan pencapaian sasaran dan kinerja yang lebih baik.
3. Mengupayakan ketersediaan fasilitas kerja yang lengkap dan memadai secara bertahap agar program-program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan kinerja yang optimal

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kampar Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pembangunan Industri	% Pertumbuhan Industri	5,87 %

Program Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.154.440.534
2	Pengendalian Izin Usaha Industri Kab/Kota	129.162.322
3	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	112.751.896
	JUMLAH	3.396.354.752

➤ Permasalahan dan Solusi

❖ Masalah :

1. Sarana dan prasarana peruntukan industri belum terbangun seluruhnya.
2. Kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia di sektor industri masih terbatas
3. Kurangnya pemanfaatan sumber daya alam
4. Tingginya angka pengangguran
5. Rendahnya keterampilan tenaga kerja
6. Kurangnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan
7. Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja

❖ Solusi :

1. Perlu adanya ketersediaan anggaran yang memadai untuk memenuhi fasilitas sarana dan prasarana industri.
2. Perlu adanya ketersediaan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan pencari kerja sehingga pencari kerja mendapatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan yang baik.

D. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Program Sekretariat Daerah Tahun 2024

BAGIAN HUKUM			
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A	Meningkatnya Penataan Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Hukum, Kerjasama dan Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100 %

Program Bagian Hukum Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 791.472.000
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp. 208.010.000
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp. 328.356.900
		Pendokumentasian Produk	
		Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp. 255.105.100

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Meningkatnya Penataan Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Hukum, Kerjasama dan Kesejahteraan Rakyat	1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 %
B.	Meningkatnya Penatan Kebijakan Kewilayahan di Perbatasan Wilayah	2. Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	100 %

Program Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :	Penataan Adm pemerintahan	Rp. 2.775.936.300
		Pengelolaan Adm Kewilayahan	Rp. 1.252.604.800
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 1.126.365.600
B	Program Pengelolaan Perbatasan	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Rp. 212.770.400

BAGIAN KERJASAMA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Meningkatnya Penataan Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Hukum, Kerjasama dan Kesejahteraan Rakyat	1. Fasilitasi Kerjasama Daerah	100 %

Program Bagian Kerjasama Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp. 1.382.974.550
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp. 1.000.338.650
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Rp. 144.261.200
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp. 238.374.700

BAGIAN KESRA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Meningkatnya Penataan Kebijakan di Bidang Pemerintahan, Hukum, Kerjasama dan Kesejahteraan Rakyat	1. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 %

Program Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 16.434.576.150
		1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Rp. 10.649.008.300
		1. pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Rp. 3.724.394.550
		2. pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Rp. 1.833.607.150
		3. peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Rp. 227.566.150

BAGIAN PEREKONOMIAN			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Meningkatnya Penataan Kebijakan di Bidang Ekonomi, Pembangunan, Pengadaan Barang / Jasa dan Sumber Daya Alam	1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100 %

Program Bagian Perekonomian Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
A.	Program Perekonomian dan Pembangunan :	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp.	960.002.150
		1. koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan bumd dan BLUD	Rp.	422.039.200
		2. pengendalian dan distribusi perekonomian	Rp.	358.779.550
		3. perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Rp.	179.183.400

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Meningkatnya Penataan Kebijakan di Bidang Ekonomi, Pembangunan, Pengadaan Barang / Jasa dan Sumber Daya Alam	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 %

Program Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	
A.	Program Perekonomian dan Pembangunan :	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp.	813.055.350
		1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp.	437.176.200
		2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp.	130.732.100
		3. pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Rp.	245.147.050

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Meningkatkan Penataan Kebijakan di Bidang Ekonomi, Pembangunan, Pengadaan Barang / Jasa dan Sumber Daya Alam	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 %

Program Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A	Program Perekonomian dan Pembangunan :	1. pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Rp. 1.713.976.200
		2. pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Rp. 708.179.500
		3.pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Rp. 684.006.000
		4.pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Rp. 321.790.700

BAGIAN SUMBER DAYA ALAM			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Meningkatkan Penataan Kebijakan di Bidang Ekonomi, Pembangunan, Pengadaan Barang / Jasa dan Sumber Daya Alam	1. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 %

Program Bagian Sumber Daya Alam Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Perekonomian dan Pembangunan :	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp. 845.116.650
		1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Rp. 525.539.550
		2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rp. 154.217.600
		3. koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	Rp. 165.359.500

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Meningkatkan penataan kebijakan di bidang kepegawaian, aset, pelayanan publik dan keprotokolan	1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %
		4. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %

Program Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp. 1.740.391.700
		1. penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp. 983.454.500
		2. koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd	Rp. 153.814.800
		3. koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd	Rp. 117.254.700
		4. koordinasi dan penyusunan dpa-skpd	Rp. 89.317.000,
		5. koordinasi dan penyusunan perubahan dpa-skpd	Rp. 110.376.100
		6. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Rp. 286.174.600
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp. 25.022.679.192
		1. penyediaan gaji dan tunjangan asn	Rp. 24.636.842.892
		2. pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd	Rp. 99.096.800
		3. koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd	Rp. 120.041.900
		4. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Rp. 106.747.000
		5. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd	Rp. 59.950.600
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Rp. 3.544.682.200
		1. penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah skpd	Rp. 124.987.100

	2. rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada skpd	Rp. 92.264.300
	3. penatausahaan barang milik daerah pada skpd	Rp. 3.327.430.800
	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Rp. 1.281.163.636
	1. penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Rp. 179.456.136
	2. penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Rp. 444.862.800
	3. pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	Rp. 56.844.700
	4. penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Rp. 600.000.000

BAGIAN ORGANISASI TATA LAKSANA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
A.	Meningkatkan Penataan Kebijakan di Bidang Kepegawaian, Aset, Pelayanan Publik dan Keprotokolan	1. Penataan Organisasi	100%

Program Bagian Organisasi Tata Laksana Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :	Penataan Organisasi	Rp. 1.512.652.800
		1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 521.998.800
		2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 271.370.200
		3. peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Rp. 210.619.300
		4. monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Rp. 354.517.200
		5. koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Rp. 154.147.300

BAGIAN PROTOKOL			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A.	Meningkatkan Penataan Kebijakan di Bidang Kepegawaian, Aset, Pelayanan Publik dan Keprotokolan	1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%

Program Bagian Protokol Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A	Terselenggaranya tertib administrasi bidang kepegawaian, aset, pelayanan publik dan keprotokolan	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Rp. 7.921.818.200
		Fasilitasi keprotokolan	Rp. 5.653.789.900
		Fasilitasi komunikasi pimpinan	Rp. 1.008.526.900
		Pendokumentasian tugas pimpinan	Rp. 1.259.501.400

BAGIAN UMUM			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A	Meningkatkan Penataan Kebijakan di Bidang Kepegawaian, Aset, Pelayanan Publik dan Keprotokolan	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
		3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100 %
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		6. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100 %
		7. Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	100 %

Program Bagian Umum Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 592.011.300
		1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp. 49.045.100
		2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 17.711.900
		3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 459.977.500
		4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp. 65.276.800

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 725.524.200
	1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 630.276.800
	2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 95.247.400
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 12.324.504.951
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 369.579.500
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 3.404.889.095
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 8.550.036.356
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 56.844.700
	1. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 56.844.700
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 12.487.266.900
	1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 673.911.700
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 7.686.416.300
	3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 4.126.938.900
	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Rp. 2.182.720.800
	1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp. 1.563.339.00
	2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp. 77.000
	3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp. 619.304.800
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.202.598.600

	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 1.202.598.600
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.138.190.950
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 605.159.800
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 948.970.250
	3. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 584.060.900
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 10.794.868.750
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 3.524.263.400
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 2.200.745.400
	3. Pengadaan Mebel	Rp. 1.603.220.250
	4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 962.523.500
	5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 695.342.050
	6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Rp. 1.808.774.150
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.768.800.000
	1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 3.768.800.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 17.144.194.190
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 1.656.844.400
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Rp. 2.418.240.140

		Operasional atau Lapangan	
		3. Pemeliharaan Mebel	Rp. 413.631.100
		4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 2.038.080.000
		5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 4.914.567.150
		6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Rp. 5.702.831.400
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 444.862.800
		1. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp. 444.862.800

➤ **Permasalahan :**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Schedule* dari anggaran kas yang telah direncanakan, sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal;
2. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban pada perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;
3. Kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBDP dengan waktu pelaksanaan singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan.

D Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat DPRD

Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya layanan tugas dan fungsi	Persentase Capaian Layanan	91%
2	Meningkatnya layanan Hak-Hak Keuangan, Administratif, dan Keprotokolan DPRD	Persentase Capaian Layanan Hak- Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan	92 %
3	Meningkatnya layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Capaian Layanan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	92 %

Program Sekretariat Dewan Tahun 2024

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	53.352.824.890	APBD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	51.588.676.400	APBD
JUMLAH		104.941.501.290	

3. Perencanaan

Perjanjian Kinerja dan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Tingkat Konsistensi Perencanaan	100%
		Persentase Capaian Pelaksanaan Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi	100%
2.	Meningkatnya Kreativitas, Inovasi dan Peran Litbang Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah.	Persentase Hasil Litbang Yang Menjadi Kebijakan.	100%
		Indek Inovasi Daerah	70%

**Program Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2024**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	14.949.348.387
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Rp.	3.505.904.350
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	Rp.	2.693.438.250
4.	Program Penelitian dan Pengembangan.	Rp.	1.966.413.800
	JUMLAH	Rp	23.115.104.587

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Secara keseluruhan tujuan dan sasaran seluruh kegiatan untuk Tahun 2024 sudah direalisasikan sesuai dengan rencana tidak mengalami hambatan yang berarti.

Adanya beberapa alternatif solusi yang dilakukan agar pencapaian target realisasi keuangan Bappeda Kabupaten Kampar lebih optimal, yaitu:

- a) Merencanakan dengan optimal penganggaran tiap program dan kegiatan agar target keuangan tercapai.
- b) Meningkatkan pelaksanaan Anggaran secara teratur sesuai scedul yang telah direncanakan.
- c) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta disiplin aparatur untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional' dalam menjalankan tugas.
- d) diperlukan peningkatan kinerja, disiplin, dan kerjasama seluruh aparatur baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan perencanaan pembangunan daerah

4. Keuangan

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkannya pengelolaan perencanaan penganggaran Daerah	Jumlah Ranperda APBD/P-APBD tepat waktu	Tepat Waktu
		Jumlah Ranperbup APBD/P-APBD tepat waktu	Tepat Waktu
2	Meningkatnya pelayanan panatausahaan pengelolaan keuangan	Persentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	0%
3	Meningkatnya kualitas Pelaporan pertanggung jawaban sesuai SAP	Penyampaian Pertanggungjawaban	Tepat Waktu
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
4	Meningkatnya tertib pengelolaan aset Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terinput sampai selesai pada SIPKD BMD	90%

No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.402.114.990	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	412.655.234.414,00	
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.703.312.950	
	Total	424.760.662.354,00	

**Perjanjian Kinerja dan Program
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pengelola Pajak Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Pajak Daerah	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.949.705.180
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.577.780.601
JUMLAH		25.527.485.781

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Adapun permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar adalah:

1. Pendapatan Asli daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah.
2. Dana Perimbangan yang masih bersifat Given dari Pemerintah Pusat.
3. Ekstensifikasi pendapatan daerah masih terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat.
4. Masih diperlukan cara penentuan Potensi Pendapatan Daerah yang lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada untuk 5 Tahun kedepan.

Adapun solusi yang dapat disarankan dalam menghadapi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan aparatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui kegiatan Bimtek Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Fasilitas Dana Perimbangan dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

5. Kepegawaian

Perjanjian Kinerja dan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya aparatur Sipil negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	±2% dari jumlah ASN Kabupaten Kampar
2.	Meningkatnya pelayanan Kepegawaian yang terlayani	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	4 (Sangat Baik) 100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.552.347.161	APBD
2.	Program Kepegawaian Daerah	2.856.952.200	APBD
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.329.149.300	APBD
TOTAL		12.738.448.661	APBD

➤ Permasalahan dan Solusi

Hambatan/permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024

1. Tidak terlaksananya kegiatan Dilat Pelatihan Sistem Informasi Geospasial (SIG) Tingkat Dasar, karena adanya Surat dari Surat Badan Informasi Geospasial Nomor: B-30.21/ PKIG/DL.01.02/9/2024 tentang Pelatihan Sistem Informasi Geografis Tingkat Dasar
2. Tidak terlaksananya Diklat Fungsional Analisis SDM Aparatur, karena sudah terpenuhinya kuota diklat Fungsional Analisis SDM Aparatur

3. Tidak terlaksananya T.O.T Pengisian Anjab/ABK Layanan Perencanaan SIASN, karena telah selainya pengisian Anjab/ABK Layanan Perencanaan SIASN pada Aplikasi tersebut
4. Kegiatan Evaluasi Kinerja/ Uji Kompetensi pada TA 2024, hanya dilaksanakan sekali kegiatan, yang awalnya direncanakan untuk tiga kali kegiatan

Solusi

1. Untuk Bintek dapat dilaksanakan tahun 2025

6. Inspektorat Daerah

Perjanjian Kinerja dan Program Inspektorat Kabupaten Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindakan Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI	87%
		Persentase Penyelesaian Tindakan Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	70%
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	85%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP Minimal Baik	80%
		Jumlah Perangkat Daerah yang Diusulkan Mendapat Predikat WBK/WBBM	1
		Nilai SAKIP Inspektorat	77
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.876.928.628,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.625.381.000,00
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.383.116.000,00

7. Kesatuan Bangsa dan Politik

Perjanjian Kinerja dan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	Opini BPK	WTP
1.	Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesatuan bangsa dan politik.	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisai/ pembinaan kesatuan bangsa dan politik di Kab. Kampar	500 Orang
2.	Meningkatkan penyelesaian konflik yang di tangani	Jumlah konflik yang terselesaikan.	25 Konflik

URAIAN	JUMLAH
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	71.968.305.671
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.505.481.521
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.960.715.800
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	55.987.160.550
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	271.990.600
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	2.490.074.250
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.752.882.950

Dari 6 Program. 11 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar, untuk mewujudkan capaian sasarannya sudah mencapai 98.62 %, dengan realisasi anggaran 91.59 %, yaitu dari anggaran sebesar Rp.21,380,775,748 dan terealisasi sebesar Rp. 19,902,453,172 Dari hasil capaian diatas menunjukkan bahwa komitmen aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dengan Langkah dan upaya yang akan dilakukan sebagai berikut :

- 1) Memperkuat fungsi koordinasi, Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target- target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
- 2) Meningkatkan kompetensi aparatur sesuai dengan tupoksi dan keahlian sehingga pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas kerja, waktu dan efisiensi anggaran.
- 3) Melengkapi sarana dan prasarana pendukung, dalam rangka meminimalisasi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- 4) Meningkatkan mekanisme manajemen internal organisasi dalam rangka

Tabel 3.1.1

Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Lokalitas sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5				6	7	8
1	PENDIDIKAN									
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA								
				I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH			1.089.471.900,00	801.055.892,00	73,53
					1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH		298.667.200,00	215.904.677,00	72,29
					2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		708.499.989.259,73	692.176.640.487,00	97,70
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN		708.382.399.059,73	692.059.770.512,00	97,70
					2	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD		100.000.000,00	99.469.000,00	99,47
					3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD		8.795.200,00	8.617.875,00	97,98
					4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD		8.795.000,00	8.783.100,00	99,86
					3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		456.306.200,00	303.306.200,00	66,47
					1	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI		456.306.200,00	303.306.200,00	66,47
					4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		2.166.911.500,00	2.010.551.269,00	92,78
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR		220.951.500,00	217.424.000,00	98,40
					2	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR		51.228.000,00	25.844.000,00	50,45
					3	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		101.682.000,00	91.245.400,00	89,74
					4	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		838.000.000,00	831.520.000,00	99,23
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD		351.985.000,00	279.522.369,00	79,41
					6	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD		603.065.000,00	564.995.500,00	93,69

					5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	600.000.000,00	548.300.000,00	
					1	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	600.000.000,00	548.300.000,00	
					6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.443.656.394,00	5.515.946.121,00	85,60
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	329.930.440,00	283.104.739,00	85,81
					2	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.921.216.100,00	1.898.512.100,00	98,82
					3	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	4.192.509.854,00	3.334.329.282,00	
					7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	494.650.000,00	343.676.650,00	69,48
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	494.650.000,00	343.676.650,00	69,48
2	KESEHATAN								
		DINKES							
						PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.595.150.900,00	1.075.412.553,00	67,42
					1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	957.283.100,00	695.960.453,00	72,70
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	39.918.900,00	18.939.000,00	47,44
					3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	44.530.700,00	26.229.500,00	58,90
					4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	231.748.900,00	105.793.600,00	45,65
					5	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	321.669.300,00	228.490.000,00	71,03
						ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	154.676.549.715,00	151.052.873.157,00	97,66
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	154.397.145.715,00	150.920.369.157,00	97,75
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	279.404.000,00	132.504.000,00	
						ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	228.149.200,00	196.809.200,00	86,26
					1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	76.900.000,00	76.710.000,00	99,75
					2	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	151.249.200,00	120.099.200,00	79,40
						ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.526.676.333,00	3.140.548.290,00	89,05
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.113.000,00	19.875.000,00	98,82

					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.037.434.333,00	1.930.715.615,00	94,76
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	162.238.000,00	150.220.000,00	
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	61.150.000,00	15.000.000,00	24,53
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.245.741.000,00	1.024.737.675,00	82,26
						PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	659.136.000,00	571.500.000,00	86,70
					1	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	659.136.000,00	571.500.000,00	86,70
						PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.121.938.800,00	6.501.782.500,00	
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	370.802.800,00	330.154.500,00	89,04
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.751.136.000,00	6.171.628.000,00	91,42
						PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.322.866.600,00	2.264.521.439,00	97,49
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	294.651.500,00	291.684.909,00	98,99
					2	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	772.091.500,00	742.666.530,00	96,19
					3	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	60.100.000,00	38.185.000,00	63,54
					4	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.196.023.600,00	1.191.985.000,00	99,66
						PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	36.258.431.836,00	32.174.392.986,00	88,74
					1	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	36.258.431.836,00	32.174.392.986,00	
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG							
						PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	45.600.000,00	0,00	0,00
					1	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	11.400.000,00	0,00	0,00
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	11.400.000,00	0,00	0,00
					3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	11.400.000,00	0,00	0,00
					4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	11.400.000,00	0,00	0,00

						ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	45.960.994.267,00	43.518.308.361,00	94,69
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	45.960.994.267,00	43.518.308.361,00	94,69
						ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	549.070.000,00	546.894.840,00	99,60
					1	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	199.320.000,00	199.320.000,00	100,00
					2	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	349.750.000,00	347.574.840,00	99,38
						ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	7.972.727.168,00	7.308.152.467,00	91,66
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	150.018.800,00	140.705.000,00	93,79
						PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.868.816.800,00	2.813.789.000,00	98,08
					2	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.104.298.336,00	1.889.368.936,00	89,79
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1.583.512.160,00	1.306.543.275,00	82,51
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	608.295.072,00	505.165.515,00	83,05
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	657.786.000,00	652.580.741,00	99,21
						PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.202.085.764,00	7.899.820.184,00	96,31
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.049.155.460,00	1.980.819.544,00	96,67
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.152.930.304,00	5.919.000.640,00	96,20
						PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.652.670.000,00	1.458.541.350,00	88,25
					1	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.652.670.000,00	1.458.541.350,00	88,25
						PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	77.204.224.003,00	68.526.040.603,00	88,76
					1	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	77.204.224.003,00	68.526.040.603,00	88,76
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
						PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	865.891.000,00	841.915.499,00	97,23
					1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	522.205.000,00	516.865.000,00	98,98
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	83.425.500,00	78.790.000,00	94,44
					3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	104.760.500,00	103.230.499,00	98,54

					4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	155.500.000,00	143.030.000,00	91,98
						ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.089.952.917,00	12.517.456.037,00	95,63
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	13.019.695.417,00	12.447.198.537,00	95,60
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	70.257.500,00	70.257.500,00	100,00
						ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	227.030.500,00	158.715.498,00	69,91
					1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	132.030.500,00	125.865.000,00	95,33
					2	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	95.000.000,00	32.850.498,00	34,58
						ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.788.151.600,00	2.739.254.502,00	98,25
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	23.082.000,00	23.082.000,00	100,00
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	770.731.600,00	756.921.600,00	98,21
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	220.964.000,00	219.465.000,00	99,32
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	145.729.000,00	142.008.000,00	97,45
					5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	37.895.000,00	9.561.200,00	25,23
					6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.589.750.000,00	1.588.216.702,00	99,90
						PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.370.961.152,00	8.552.000.000,00	82,46
					1	PENGADAAN ALAT BESAR	10.370.961.152,00	8.552.000.000,00	82,46
						PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.786.381.600,00	2.469.503.553,00	88,63
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	316.056.000,00	273.563.578,00	86,56
					2	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	193.430.000,00	181.251.875,00	93,70
					3	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.276.895.600,00	2.014.688.100,00	88,48
						PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.343.544.000,00	867.560.316,00	64,57
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	224.994.000,00	107.307.790,00	47,69
					2	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	388.550.000,00	299.761.201,00	77,15

						3	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	730.000.000,00	460.491.325,00	63,08
4	UNSUR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
							PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	46.788.250,00	46.469.260,00	99,32
						1	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	15.483.100,00	15.406.410,00	99,50
						2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	20.711.500,00	20.653.000,00	99,72
						3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.393.900,00	3.327.600,00	98,05
						4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.423.000,00	3.364.600,00	98,29
						5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.776.750,00	3.717.650,00	98,44
							ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.066.910.669,00	4.023.876.757,00	98,94
						1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.011.883.769,00	3.969.001.717,00	98,93
						2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	14.275.900,00	14.203.640,00	99,49
						3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	40.751.000,00	40.671.400,00	99,80
							ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	35.688.900,00	13.618.640,00	38,16
						1	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	35.688.900,00	13.618.640,00	38,16
							ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	794.576.400,00	776.093.466,00	97,67
						1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.924.500,00	10.924.500,00	100,00
						2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	226.201.800,00	211.027.000,00	93,29
						3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	59.257.500,00	59.257.500,00	100,00
						4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	33.635.600,00	30.328.460,00	90,17
						5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.392.000,00	7.392.000,00	100,00
						6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	457.165.000,00	457.164.006,00	100,00
							PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	982.058.000,00	926.135.400,00	94,31

						1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	46.728.000,00	42.890.400,00	91,79
						2	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	63.910.000,00	63.890.000,00	99,97
						3	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	871.420.000,00	819.355.000,00	
							PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	660.443.615,00	613.539.617,00	92,90
						1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	196.689.600,00	181.333.222,00	92,19
						2	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	262.348.315,00	230.950.225,00	88,03
						3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	201.405.700,00	201.256.170,00	99,93
5	URUSAN KETENTRAMAN UMUM, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
							PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	343.316.000,00	339.871.000,00	99,00
						1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	95.003.000,00	94.373.000,00	99,34
						2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	228.913.000,00	228.727.000,00	99,92
							ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.989.303.769,00	4.874.657.079,00	97,70
						1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.983.094.769,00	4.868.448.079,00	97,70
						2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.209.000,00	6.209.000,00	100,00
							ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.294.291.000,00	1.215.609.729,00	93,92
						1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	1.151.595.000,00	1.114.793.000,00	96,80
						2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	142.696.000,00	100.816.729,00	70,65
							ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.361.811.400,00	3.287.399.441,00	97,79
						1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	31.740.000,00	31.500.018,00	99,24
						2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	235.675.200,00	193.480.875,00	82,10

					3	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	142.810.700,00	130.317.500,00	91,25
					4	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.461.469.500,00	1.457.660.000,00	99,74
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.138.602.000,00	1.127.332.048,00	99,01
						PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	343.304.600,00	340.743.000,00	99,25
					1	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	343.304.600,00	340.743.000,00	99,25
						PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.871.820.840,00	10.773.269.402,00	99,09
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	34.370.100,00	30.532.100,00	88,83
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	10.837.450.740,00	10.742.737.302,00	99,13
						PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.550.101.250,00	1.474.187.496,00	95,10
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	84.290.000,00	81.240.000,00	96,38
					2	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	659.661.250,00	621.163.900,00	94,16
					3	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	263.750.000,00	261.591.000,00	99,18
					4	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	542.400.000,00	510.192.596,00	94,06
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
						PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	131.577.200,00	101.925.200,00	77,46
					1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	97.718.200,00	68.066.200,00	69,66
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	10.063.000,00	10.063.000,00	100,00
					3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	7.932.000,00	7.932.000,00	100,00
					4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	7.932.000,00	7.932.000,00	100,00
					5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	7.932.000,00	7.932.000,00	100,00
						ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.746.137.113,00	4.423.373.736,00	93,20
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.743.792.053,00	4.421.077.736,00	93,20

					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.345.060,00	2.296.000,00	97,91
						ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.082.517.473,00	637.051.084,00	58,85
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	227.242.888,00	150.672.179,00	66,30
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	60.384.000,00	14.955.000,00	24,77
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	38.731.785,00	36.465.442,00	94,15
					5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.432.800,00	0,00	0,00
					6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	739.726.000,00	424.958.463,00	57,45
						PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	238.431.300,00	226.200.000,00	94,87
					1	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	238.431.300,00	226.200.000,00	94,87
						PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.299.287.948,00	1.928.688.988,00	83,88
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	260.336.000,00	118.694.587,00	45,59
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.038.951.948,00	1.809.994.401,00	88,77
						PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.038.320.100,00	671.763.914,00	64,70
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	799.142.100,00	512.988.914,00	64,19
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	121.878.000,00	41.625.000,00	34,15
					3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	117.300.000,00	117.150.000,00	99,87
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							
				I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
						PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	75.220.000,00	73.490.171,00	97,70
					1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	50.273.750,00	48.706.250,00	96,88
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.941.500,00	2.940.000,00	99,95
					3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	13.180.250,00	13.020.921,00	98,79
					4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.941.500,00	2.940.000,00	99,95

					5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	5.883.000,00	5.883.000,00	100,00
						ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.787.441.723,00	4.488.181.605,00	93,75
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.757.264.573,00	4.458.255.655,00	93,71
					2	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	24.000.000,00	23.750.000,00	98,96
					3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.823.950,00	3.823.950,00	100,00
					4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	2.353.200,00	2.352.000,00	99,95
						ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.353.200,00	2.352.000,00	99,95
					1	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	2.353.200,00	2.352.000,00	99,95
						ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	361.621.350,00	359.621.146,00	
					1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	361.621.350,00	359.621.146,00	
						ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.133.872.128,00	1.114.911.217,00	
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.247.410,00	9.228.000,00	
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	223.950.048,00	223.591.932,00	99,84
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	401.000.000,00	383.871.900,00	95,73
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	76.845.670,00	76.799.299,00	99,94
					5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	99.900.000,00	99.000.000,00	100
					6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	322.929.000,00	322.420.086,00	99,84
						PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.090.487.564,00	1.086.600.000,00	99,64
					1	PENGADAAN MEDEL	167.086.200,00	166.765.000,00	99,81
					2	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	123.401.364,00	121.955.000,00	98,83
					3	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	800.000.000,00	797.880.000,00	99,74
						PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.294.320.868,00	7.084.047.023,00	97,12
					1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.020.000,00	7.020.000,00	100,00
					2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	86.232.060,00	86.232.060,00	100,00
					3	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.547.000,00	8.540.000,00	99,92

					4	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	7.192.521.808,00	6.982.254.963,00	97,08
						PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.276.916.024,00	1.228.919.700,00	96,24
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	186.446.824,00	164.226.500,00	88,08
					2	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	887.719.200,00	862.830.800,00	97,20
					3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	175.000.000,00	174.960.000,00	99,98
					4	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	27.750.000,00	26.902.400,00	96,95
6	URUSAN SOSIAL								
		DINAS SOSIAL							
						PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	361.496.600,00	320.631.820,00	88,70
					1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	299.021.600,00	285.065.020,00	95,33
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	39.529.500,00	14.523.900,00	36,74
					3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.712.300,00	4.689.800,00	99,52
					4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.205.600,00	2.058.600,00	93,34
					5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.070.100,00	2.064.500,00	99,73
					6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	13.957.500,00	12.230.000,00	87,62
						ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.140.380.605,00	3.976.757.133,00	96,05
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.128.148.105,00	3.964.527.133,00	96,04
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	12.232.500,00	12.230.000,00	99,98
						ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	19.784.000,00	0,00	0,00
					1	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.784.000,00	0,00	0,00
						ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	907.938.260,00	886.345.153,00	97,62
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.698.600,00	12.004.000,00	87,63

					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	446.138.160,00	434.707.400,00	97,44
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	58.350.000,00	58.350.000,00	100,00
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	50.674.000,00	50.674.000,00	100,00
					5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	10.800.000,00	10.404.000,00	96,33
					6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	308.840.000,00	302.295.753,00	97,88
					7	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	19.437.500,00	17.910.000,00	92,14
						PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	90.015.000,00	89.490.000,00	99,42
					1	PENGADAAN MEBEL	90.015.000,00	89.490.000,00	99,42
						PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.116.845.672,00	1.026.394.861,00	91,90
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	156.084.540,00	145.194.852,00	93,02
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	960.761.132,00	881.200.009,00	91,72
						PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	454.916.558,00	421.952.360,00	92,75
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	112.982.800,00	109.141.400,00	96,60
					2	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	290.150.358,00	266.173.960,00	91,74
					3	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	51.783.400,00	46.637.000,00	90,06

7	URUSAN PENDIDIKAN								
		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		1		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1,089,471,900.00	801,055,892.00	73.53
						KEGIATAN :			
					1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	298,667,200.00	215,904,677.00	72.29
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD	91,846,300.00	74,011,900.00	80.58
					3	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	698,958,400.00	511,139,315.00	73.13

				2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	708,499,989,259.73	692,176,640,487.00	97.70
					KEGIATAN :			
				1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	708,382,399,059.73	692,059,770,512.00	97.06
				2	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	100,000,000.00	99,469,000.00	99.47
				3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8,795,200.00	8,617,875.00	97.98
				4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	8,795,000.00	8,783,100.00	99.86
				3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	456,306,200.00	303,306,200.00	66.47
					SUB KEGIATAN :			
				1	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	456,306,200.00	303,306,200.00	66.47
				4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2,166,911,500.00	2,010,551,269.00	92.78
					SUB KEGIATAN :			
				1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	220,951,500.00	217,424,000.00	98.40
				2	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	51,228,000.00	25,844,000.00	50.45
				3	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	101,682,000.00	91,245,400.00	89.74
				4	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	838,000,000.00	279,522,369.00	79.41
				5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	351,985,000.00	205.383.803,00	67,04
				6	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA	603,065,000.00	564,995,500.00	93.69
				5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6,443,656,394.00	5,515,946,121.00	79.53
					SUB KEGIATAN :			
				1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	329,930,440.00	283,104,739.00	85.81
				2	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1,921,216,100.00	1,898,512,100.00	98.82
				3	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	4,192,509,854.00	3,334,329,282.00	93,94
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	494,650,000.00	343,676,650.00	69.48

					SUB KEGIATAN :			
				1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	494,650,000.00	343,676,650.00	69.48
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					9,289,564,757	8,980,647,576	96.67
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	98,535,950.00	84,455,250.00	85.71
					SUBKEGIATANNYAMELIPUTI:			
				1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	32,683,500.00	31,959,500.00	97.78
				2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	6,630,700.00	4,775,250.00	72.02
				3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5,459,500.00	3,566,250.00	65.32
				4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	53,762,250.00	44,154,250.00	82.13
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	160,863,400.00	158,899,009.00	98.78
					SUBKEGIATANNYAMELIPUTI:			
				1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4,453,887,116.00	4,021,182,168.00	90.28
				2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6,385,000.00	6,385,000.00	100.00
					ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	193,019,850	188,055,607	97.43
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:			
				1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	98,247,400.00	97,866,480.00	99.61
				2	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	62,616,000.00	61,032,529.00	97.47
					ADMISTRASIUMUMPERANGKATDAERAH	1,484,816,454.00	1,471,537,918.00	99.11
					SUBKEGIATANNYAMELIPUTI:			
				1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	28,157,000.00	27,822,000.00	98.81
				2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN	312,895,254.00	303,647,900.00	97.04

				3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	85,200,000.00	84,961,250.00	99.72
				4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	103,118,200.00	102,534,295.00	99.43
				5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASISKPD	955,446,000.00	952,572,473.00	99.70
				PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1,339,417,500.00	1,243,767,706.00	92.86
				SUBKEGIATANNYAMELIPUTI:				
				1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	194,652,000.00	161,338,074.00	82.89
				2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1,144,765,500.00	1,082,429,632.00	94.4
				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH		641,665,500.00	592,225,168.00	92.29
				SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:				
				1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK	199,003,000.00	154,716,868.00	77.75
				2	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	205,802,500.00	200,790,500.00	97.56
				3	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	27,860,000.00	27,860,000.00	100.00
				4	PEMELIHARAAN/ REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	209,000,000.00	208,857,800.00	99.93
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					8,808,092,175	8,364,553,999	94.96
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH		37,227,100.00	35,721,000.00	95.95
				SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:				
				1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	20,036,800.00	19,057,000.00	95.11
				2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	17,190,300.00	16,664,000.00	96.94
				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		6,203,670,207.00	5,597,369,870.00	90.23
				SUBKEGIATANNYAMELIPUTI:				
				1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6,131,609,107.00	5,526,259,870.00	90.13

				2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	72,061,100.00	71,110,000.00	98.68
					ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	434,881,350.00	414,497,810.00	95.31
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:			
				1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	74,542,050.00	74,492,100.00	99.93
				2	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	62,727,300.00	52,727,300.00	84.06
				2	BIMBINGAN TEKNISI MPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	297,612,000.00	287,278,410.00	96.53
					ADMISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1,822,535,030.00	1,435,734,021.00	78.78
					SUBKEGIATANNYAMELIPUTI:			
				1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6,215,600.00	5,870,000.00	94.44
				2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	376,516,000.00	333,392,500.00	88.55
				3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	184,314,930.00	147,879,431.00	80.23
				4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	203,376,300.00	174,610,000.00	8
				5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-	13,001,000.00	13,001,000.00	100.00
				6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1,039,111,200.00	760,981,090.00	73
					PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	2,746,707,460.00	2,735,250,300.00	99.58
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:			
				1	PENGADAAN MEDEL	224,064,600.00	222,300,000.00	99.21
				2	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1,671,019,860.00	1,663,200,000.00	99.53
				3	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	200,000,000.00	199,689,000.00	99.84
				4	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	651,623,000.00	650,061,300.00	99.76
					PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2,253,232,344.00	2,177,167,149.00	96.62
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:			
				1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	351,212,660.00	279,806,821.00	79.67
				2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1,902,019,684.00	1,897,360,328.00	99.76
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN MILIK DAERAH	1,334,981,900.00	1,269,952,074.00	95.13
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:			

				1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	330,120,000.00	282,021,559.00	96.35
				2.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	57,970,000.00	43,450,000.00	74.95
				3.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	450,851,200.00	450,087,765.00	99.83
				3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	496,040,700.00	494,392,750.00	99.67
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					8.541.464.244	8.152.215.354	95,44
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA	41,722,400.00	41,722,400.00	100.00
					SUB KEGIATAN :			
				1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	17,823,400.00	17,823,400.00	100.00
				2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5,497,200.00	5,497,200.00	100.00
				3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5,565,400.00	5,565,400.00	100.00
				4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	5,518,000.00	5,518,000.00	100.00
				5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	5,709,200.00	5,709,200.00	100.00
				6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN	1,609,200.00	1,609,200.00	100.00
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.479.503.568	3.289.467.209	94,54
					SUB KEGIATAN :			
				1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4,868,613,625.00	4,655,249,710.00	95.62
				2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN	4,891,200.00	4,891,200.00	100.00
					ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	9,389,800.00	9,389,800.00	100.0
					SUB KEGIATAN :			
				1	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA	9,389,800.00	9,389,800.00	1
					ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	64.200.000	63.284.000	98,57
					SUB KEGIATAN :			
				1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	36.000.000	36.000.000	100,00
				2	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	28.200.000	27.284.000	96,75
					ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	620,345,700.00	598,944,593.00	96.55
					SUB KEGIATAN :			
				1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN	30.925.000	30.925.000	100,00
				2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	392,220,300.00	371,448,300.00	94.70
				3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	24,408,000.00	24,342,000.00	99.73

			4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	21,231,400.00	21,160,250.00	99.66
			5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	6,996,000.00	6,996,000.00	100.00
			6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	175,490,000.00	174,998,043.00	99.72
				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	4,560,000,000.00	4,112,647,641.00	99.19
				SUB KEGIATAN :			
			1	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	4,560,000,000.00	4,112,647,641.00	90.19
			2	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	4,460,000,000.00	4,013,000,000.00	89.98
				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1,161,433,176.00	1,157,974,043.00	99.70
				KEGIATAN :			
			1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	242,808,000.00	240,713,385.00	99.14
			2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	918,625,176.00	917,260,658.00	99.85
				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN			
				SUB KEGIATAN :			
			1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK	143.757.000	142.957.000	99.44
			2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	23.106.000	22.956.000	99.35
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	5.949.669.284	5.647.861.193	94.93
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	157,889,900.00	154,270,301.00	97.71
				SUB KEGIATAN :			
			1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	133,817,900.00	131,492,801.00	98.26
			2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	24,072,000.00	22,777,500.00	94.62
				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4,151,019,720.00	3,942,655,636.00	94.98
				SUB KEGIATAN :			
			1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4,146,019,720.00	3,937,655,636.00	94.97
			2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00
				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1,059,656,350.00	1,011,560,463.00	95.46
				SUB KEGIATAN :			
			1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN	5,934,100.00	5,934,100.00	100.00
			2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	336,274,850.00	333,973,300.00	99.32
			3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	135,164,000.00	132,980,300.00	98.38
			4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	127,516,600.00	126,458,001.00	99.17
			5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	56,025,000.00	55,944,000.00	99.86

			6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	398,741,800.00	356,270,762.00	89.35
				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG			
				SUB KEGIATAN :			
			1	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU	336,068,800.00	330,172,256.00	98.25
				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	962.089.205	885.277.909	92,02
				SUB KEGIATAN :			
				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	336,068,800.00	336,068,800.00	92,02
			1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	91,613,645.00	43,473,565.00	95.66
			2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	857,794,517.00	820,590,113.00	96,90
				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN			
				SUB KEGIATAN :			
			1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK	118,457,526.00	100,036,000.00	84.45
				PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK,			
			3	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20,700,000.00	20,700,000.00	100,00
12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL				6.603.892.187	6.354.640.600	96,23
				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT	331,133,500.00	310,674,000.00	93.82
				SUB KEGIATAN :			
			1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	278,177,850.00	262,828,750.00	9
			2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	37,651,150.00	32,843,225.00	8
			3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI	15,304,500.00	15,002,025.00	98.02
				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5,493,745,338.00	5,293,171,744.00	96.35
				SUB KEGIATAN :			
			1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5,443,179,738.00	5,242,606,544.00	96.32
			2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	50,565,600.00	50,565,200.00	100,00
				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	914,296,184.00	776,739,596.00	84.95
				SUB KEGIATAN :			
			1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9,634,200.00	9,580,800.00	99.45
			2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	233,279,384.00	225,841,175.00	96.81
			3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	66,510,000.00	66,510,000.00	100,00
			4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	116,309,600.00	73,406,200.00	63.11
			5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN	13,848,000.00	13,848,000.00	100,00
			6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	474,715,000.00	387,553,421.00	81.64

					PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	1.008.594.400	88,022,200.00	98.28
					SUB KEGIATAN :			
				1	PENGADAAN MEDEL	89,560,128.00	88,022,200.00	98.28
					PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	985,142,424.00	954,414,593.00	96.88
					SUB KEGIATAN :			
				1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	162,457,080.00	156,557,161.00	96.37
				2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	822,685,344.00	797,857,432.00	96.98
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN			
					SUB KEGIATAN :			
					PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK			
				2	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR	102,500,000.00	96,860,580.00	94.50
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN		I	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	400.964.800	367.793.900	91,73
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	377.884.800	347.733.900	92,02
				2.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	23.080.000	20.060.000	86,92
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
				1.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.654.296.141	5.081.617.957	89,87
				2.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
					ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
				1.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	59.265.000	59.000.000	99,55
					ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.168.500	12.503.500	94,95
				2.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	385.726.400	379.006.300	98,26
				3.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	12.014.000	12.014.000	100,00
				4.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	15.080.000	4.930.000	32,69
				5.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.735.000	19.135.000	74,35
				6.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000	9.360.000	62,40

				7.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	771.890.000	567.974.220	73,58
					PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	105.000.000	103.382.400	98,46
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	25.000.000	23.495.000	93,98
				2.	PENGADAAN MEBEL	80.000.000	79.887.400	99,86
					PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.900.057.138	1.794.583.064	94,45
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	212 379 230	202.687.476	95,44
				2.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.687.677.908	1.591.895.588	94,32
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.843.268.012	1.734.901.079	94,12
				1.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	231.268.012	137.366.379	59,40
				2.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12.000.000	4.800.000	40,00
				3.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.600.000.000	1.592.734.700	99,55
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	157.889.900	154.270.301	98,26
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	133.817.900	131.492.801	98,26
				2.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	24.072.000	22.777.500	94,62
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.146.019.720	3.937.655.636	94,97
				2.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
					ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.059.656.350	1.011.560.463	95,46
				1.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.934.100	5.934.100	100,00
				2.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	336.274.850	333.973.300	99,32
				3.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	135.164.000	132.980.300	98,38
				4.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	127.516.600	126.458.001	99,17
				5.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	56.025.000	55.944.000	99,86

				6.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	398.741.800	356.270.762	89,35
					PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	336.068.800	330.172.256	98,25
				1.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	336.068.800	330.172.256	98,25
					PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	949.408.162	864.063678	91,01
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	91.613.645	43.473.565	47,45
				2.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	857.794.517	820.590.113	95,66
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	277.285.552	185.641.000	66,95
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	118.457.526	100.036.000	99,48
				2.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	138.128.026	85.605.000	61,98
				3.	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.700.000	20.700.000	100,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.235.600	7.235.600	100,00
		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA			SUB KEGIATAN :			
				1.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.235.600	7.235.600	100,00
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	20.732.326.014	19.298.326.911	93,08
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	20.725.894.214	19.291.895.111	93,08
				2.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	6.431.800	6.431.800	100,00
					ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.578.137.800	1.504.619.059	95,34
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.243.500	7.243.500	100,00
				2.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	378.510.800	376.159.000	99,38
				3.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	199.508.000	199.420.000	99,96
				4.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	150.921.500	150.921.500	100,00
				5.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	320.400.000	320.400.000	100,00
				6.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	521.554.000	450.478.759	86,37

					PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.551.386.400	1.425.014.100	91,85
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.551.386.400	1.425.014.100	91,85
					PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.653.233.305	1.533.123.915	92,73
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	75.363.905	57.561.462	76,38
				2.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	41.139.000	40.672.953	98,87
				3.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.536.730.400	1.434.889.500	93,37
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	407.076.400	401.525.050	98,64
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	85.017.200	82.017.200	96,47
				2.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	105.209.200	102.699.150	97,61
				3.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	216.850.000	216.808.700	99,98
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	315.829.000	310.674.000	98,37
		DINAS PERDAGANGAN			SUB KEGIATAN :			
				1.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	278.177.850	262.828.750	94,48
				2.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	37.651.150	32.843.225	87,23
				3.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.304.500	15.002.025	98,02
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.493.745.338	5.293.171.744	96,35
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	5.443.179.738	5.242.606.544	96,32
				2.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	50.565.600	50.565.600	100,00
					ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	914.296.184	776.739.596	84,95
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.634.200	9.580.800	99,45
				2.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	233.279.384	225.841.175	96,81
				3.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	66.510.000	66.510.000	100,00
				4.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	116.309.600	73.406.200	63,11
				5.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13.848.000	13.848.000	100,00
				6.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	474.715.000	387.553.421	81,64

					PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	89.560.128	88.022.200	98,28
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENGADAAN MEBEL	89.560.128	88.022.200	98,28
					PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	985.142.424	954.414.593	96,88
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	162.457.080	156.557.161	96,37
				2.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	822.685.344	797.857.432	96,98
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	394.950.500	373.739.107	94,63
					SUB KEGIATAN :			
				1.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	251.950.000	240.027.027	95,27
				2.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	102.500.000	96.860.580	94,50
				3.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	40.500.500	36.851.500	90,99
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	181.017.400	170.164.610	94,00
		DINAS PERINDUSTRIAN		1.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	149.095.500	138.280.710	92,75
				2.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.729.400	2.729.400	100,00
				3.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.924.300	2.924.300	100,00
				4.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.868.300	2.868.300	100,00
				5.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.897.900	4.897.900	100,00
				6.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	2.983.700	2.983.700	100,00
				7.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.518.300	15.480.300	99,76
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.740.791.072	4.247.152.287	89,59
				1.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	4.260.150.776	3.766.511.991	88,41
				2.	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	476.455.496	476.455.496	100,00
				3.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.002.200	2.002.200	100,00
				4.	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	2.182.600	2.182.600	100,00
					ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	676.661.300	653.355.552	96,56
				1.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	176.940.400	175.610.030	99,25
				2.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	36.384.300	36.088.500	99,19
				3.	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	66.412.000	65.832.000	99,13
				4.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	92.709.600	92.104.000	99,35

				5.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.250.000	5.250.000	100,00
				6.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	298.965.000	278.471.022	93,15
					PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.492.901.700	1.487.939.154	99,67
				1.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	1.492.901.700	1.487.939.154	99,67
					PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.471.286.554	1.333.025.143	90,60
				1.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	230.311.650	172.156.443	74,75
				2.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.240.974.904	1.160.868.700	93,54
					PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	253.711.500	210.567.628	82,99
				1.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	213.211.500	170.067.628	79,76
				2.	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	40.500.000	40.500.000	100,00
6	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH				PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.740.391.700	1.578.909.819	90,72
	SEKRETARIAT DAERAH				SUB KEGIATAN :			
				1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	983.454.500	924.770.450	94,03
				2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	153.814.800	139.554.800	
				3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	117.254.700	113.460.100	96,76
				4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	89.317.000	79.978.100	89,54
				5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	110.376.100	96.772.068	87,67
				6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	286.174.60	224.374.301	78,40
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	25.022.679.192	23.442.344.400	93,68
					SUB KEGIATAN :			
				1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	24.636.842.892	23.189.034.200	94,12
				2	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	99.096.800	64.098.600	64,68
				3	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	120.041.900	62.160.700	51,78
				4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	106.747.000	92.608.300	86,75
				5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	59.950.600	34.442.600	57,45
					ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	3.544.682.200	2.742.767.430	77,38

					SUB KEGIATAN :			
				1	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	124.987.100	46,88	46,88
				2	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	92.264.300	62,46	62,46
				3	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.327.430.800	78,94	78,94
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.794.609.900	1.736.278.400	96,75
					SUB KEGIATAN :			
				1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	49.045.100	47.841.900	97,55
				2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.202.598.600	1.199.369.800	99,73
				3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.711.900	16.784.500	94,76
				4	koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	65.276.800	64.504.000	98,82
				5	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	459.977.500	407.778.200	88,65
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.350.982.050	11.254.085.917	73,31
					SUB KEGIATAN :			
				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	605.159.800	553.003.000	91,38
				2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	948.970.250	932.026.850	98,21
				3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	673.911.700	666.066.300	98,84
				4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.686.416.300	4.858.972.800	63,22
				5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	630.276.800	611.276.880	96,99
				6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	95.247.400	77.475.000	81,34
				7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	584.060.900	583.219.400	99,86
				8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.126.938.900	2.972.045.687	72,02
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.794.868.750,00	10.630.498.132,68	98,48
					SUB KEGIATAN :			
				1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.524.263.400	3.474.563.400	98,59
				2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.200.745.400	2.137.163.400	97,11
				3	pengadaan mebel	1.603.220.250	1.589.057.650	99,12
				4	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	962.523.500	955.272.500	99,25
				5	pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	695.342.050	687.811.000	98,92
				6	pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1.808.774.150,00	1.786.630.182,68	98,78
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.093.304.951	14.966.477.731	93,00
					SUB KEGIATAN :			

					1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	369.579.500	364.894.000	98,73
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.404.889.095	3.252.831.066	95,53
					3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.768.800.000	3.748.067.052	99,45
					4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.550.036.356	7.600.685.613	88,90
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		17.144.194.190	15.608.766.540	91,04
					SUB KEGIATAN :				
					1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.656.844.400	1.489.558.944	89,90
					2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.418.240.140	2.131.233.581	88,13
					3	Pemeliharaan Mebel	413.631.100	340.605.800	82,35
					4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.038.080.000	1.954.097.200	95,88
					5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.914.567.150,00	4.754.292.773,85	96,74
					6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.702.831.400,00	4.938.978.241,15	86,61
					Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1.281.163.636,00	1.039.641.066,00	81,15
					SUB KEGIATAN :				
					1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	179.456.136	0,00	0,00
					2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	444.862.800	444.520.000	99,92
					3	pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	56.844.700	55.121.066	96,97
					4	penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	600.000.000	540.000.000	90,00
					Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		2.182.720.800	2.140.208.550	98,05
					SUB KEGIATAN :				
					1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.563.339.000	1.521.928.250	97,35
					2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	77.000	0,00	0,00
					3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	619.304.800	618.280.300	99,83
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							
				I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	87.396.000,00	31.937.000,00	
					1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	11.400.000,00	0,00	0,00
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	15.240.000,00	5.979.000,00	
					3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	15.240.000,00	5.958.000,00	39,09
					4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	15.240.000,00	6.462.000,00	42,40
					5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	15.240.000,00	3.297.000,00	21,63
					6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.036.000,00	10.241.000,00	68,11
					2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.294.067.788,00	6.072.042.058,00	96,47
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.271.050.788,00	6.056.759.058,00	
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	23.017.000,00	15.283.000,00	66,40
					3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.721.073.800,00	1.247.067.501,00	72,46
					1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	451.820.000,00	443.317.000,00	98,12
					2	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.269.253.800,00	803.750.501,00	63,32
					4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	9.105.995.218,00	8.813.629.300,00	96,79
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	31.420.000,00	23.565.000,00	75,00
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	8.085.307.950,00	7.946.346.700,00	
					3	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	8.362.068,00	3.680.000,00	44,01
					4	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	56.656.500,00	22.787.000,00	40,22
					5	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	924.248.700,00	817.250.600,00	88,42
					6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.510.850.000,00	1.410.202.000,00	93,34
					7	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.175.000.000,00	1.175.000.000,00	
					8	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	105.000.000,00	104.000.000,00	99,05
					9	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.819.253.864,00	2.652.689.642,00	94,09
					10	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12.870.000,00	12.800.000,00	99,46
					11	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	688.068.000,00	539.178.808,00	78,36
					12	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	198.000.000,00	197.662.994,00	99,83

					13	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	1.920.315.864,00	1.903.047.840,00	99,10
					5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.114.124.000,00	2.502.758.948,00	80,37
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	446.230.000,00	200.683.350,00	
					2	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	921.360.000,00	578.733.198,00	62,81
					3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.407.894.000,00	1.391.771.100,00	98,85
					4	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	156.370.000,00	151.106.300,00	
					5	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	182.270.000,00	180.465.000,00	
					6	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	35.274.540.622,00	33.911.848.265,00	96,14
					1	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	33.718.802.122,00	32.411.443.265,00	96,12
					2	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	1.524.238.500,00	1.500.405.000,00	98,44
					3	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	31.500.000,00	0,00	
					7	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	1.730.489.500,00	1.417.387.682,00	
					1	FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	1.412.286.000,00	1.163.176.700,00	82,36
					2	PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	318.203.500,00	254.210.982,00	79,89
					II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
					1	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	4.484.748.608,00	2.173.560.196,00	48,47
					1	PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	1.175.532.162,00	557.097.060,00	47,39
					2	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	3.178.661.343,00	1.562.012.536,00	49,14
					3	FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK	130.555.103,00	54.450.600,00	41,71
					2	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	1.961.163.300,00	1.519.542.039,00	77,48
					1	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	337.440.600,00	282.983.890,00	83,86
					2	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	435.193.800,00	399.311.600,00	91,75
					3	PEMBAHASAN APBD	432.480.500,00	276.367.000,00	63,90
					4	PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	432.585.800,00	288.342.900,00	66,66
					5	PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	323.462.600,00	272.536.649,00	84,26

					3	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	17.880.295.077,00	12.786.181.976,00	71,51
					1	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM	4.169.906.200,00	2.988.465.068,00	
					2	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	4.759.217.714,00	3.674.370.875,00	77,21
					3	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.218.577.763,00	2.977.483.129,00	70,58
					4	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	4.367.817.400,00	2.815.026.904,00	64,45
					5	PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	364.776.000,00	330.836.000,00	90,70
	PERENCANAAN								
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
				I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.077.711.337	15.560.171.601	96,78
					1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	203.050.400,00	202.946.321,00	99,95
					1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	106.657.700,00	106.635.921,00	99,98
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.555.250,00	7.555.250,00	100,00
					3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	7.244.400,00	7.244.400,00	100,00
					4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	8.999.450,00	8.999.450,00	100,00
					5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	9.166.600,00	9.161.300,00	99,94
					6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	48.360.500,00	48.287.500,00	99,85
					7	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.066.500,00	15.062.500,00	99,97
					2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.710.559.437,00	7.470.784.382,00	96,89
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.663.110.987,00	7.423.425.932,00	96,87
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	47.448.450,00	47.358.450,00	99,81
					3	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	416.535.800,00	399.975.604,00	96,02
					1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	385.193.800,00	370.147.000,00	96,09
					2	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	31.342.000,00	29.828.604,00	95,17
					4	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	4.229.012.380,00	4.194.791.266,00	99,19
					1	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	2.830.752.380,00	2.803.317.400,00	99,03

					2	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	331.750.000,00	331.740.000,00	100,00
					3	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	66.940.000,00	60.390.000,00	90,22
					4	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	999.570.000,00	999.343.866,00	99,98
					5	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	660.000.000,00	585.742.000,00	88,75
					1	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	660.000.000,00	585.742.000,00	88,75
					6	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.004.059.120,00	892.859.881,00	88,93
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	32.298.000,00	28.488.902,00	88,21
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	971.761.120,00	864.370.979,00	88,95
					7	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.854.494.200,00	1.813.072.147,00	97,77
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	311.814.200,00	282.195.323,00	90,50
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	345.680.000,00	345.625.000,00	99,98
					3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	1.197.000.000,00	1.185.251.824,00	99,02
	KEUANGAN								
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							
					1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	174.006.371,00	169.762.000,00	97,56
					1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	134.608.900,00	133.167.900,00	98,93
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	39.397.471,00	36.594.100,00	92,88
					2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.112.737.862,00	6.496.295.686,00	91,33
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	7.102.886.022,00	6.487.851.186,00	91,34
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	9.851.840,00	8.444.500,00	85,71
					3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	39.196.850,00	21.965.050,00	56,04
					1	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	39.196.850,00	21.965.050,00	56,04
					4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.785.667.208,00	1.452.100.130,00	81,32
					1	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	498.246.408,00	489.083.408,00	98,16

					2	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	199.980.000,00	198.653.000,00	99,34
					3	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	185.079.800,00	178.828.400,00	96,62
					4	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17.490.000,00	10.260.400,00	58,66
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	884.871.000,00	575.274.922,00	65,01
					5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	273.300.000,00	268.275.002,00	98,16
					1	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	273.300.000,00	268.275.002,00	98,16
					6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.192.971.071,00	1.094.035.316,00	91,71
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	287.452.875,00	250.018.136,00	86,98
					2	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	164.282.000,00	161.628.000,00	98,38
					3	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	741.236.196,00	682.389.180,00	92,06
					7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	431.036.500,00	351.262.577,00	81,49
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	286.636.500,00	228.436.216,00	79,70
					2	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	144.400.000,00	122.826.361,00	85,06
					8	PENATAAN ORGANISASI	32.920.150,00	30.041.750,00	91,26
					1	MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	32.920.150,00	30.041.750,00	91,26
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							
					1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	77.652.800,00	77.195.800,00	99,41
					1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	23.204.700,00	23.170.700,00	99,85
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	11.510.300,00	11.448.300,00	99,46
					3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	7.719.900,00	7.719.900,00	100,00
					4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	10.922.700,00	10.860.700,00	99,43
					5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	7.548.000,00	7.486.000,00	99,18
					6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.535.400,00	7.463.400,00	

					7	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.211.800,00	9.046.800,00	98,21
				2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		13.604.278.782,00	11.376.951.722,00	83,63
				1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN		13.568.907.382,00	11.342.010.422,00	83,59
				2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD		11.941.300,00	11.941.300,00	100,00
				3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD		23.430.100,00	23.000.000,00	100,00
				3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		228.920.000,00	202.894.493,00	88,63
				1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA		38.000.000,00	37.601.000,00	98,95
				2	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		190.920.000,00	165.293.493,00	86,58
				4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		2.849.772.800,00	2.773.028.315,00	97,31
				1	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		737.165.200,00	726.714.500,00	
				2	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR		225.000.000,00	221.560.480,00	
				3	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN		628.737.600,00	620.275.620,00	98,65
				4	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		44.217.000,00	44.217.000,00	100,00
				5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD		1.214.653.000,00	1.160.260.715,00	95,52
				5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		1.243.720.000,00	1.160.141.200,00	93,28
				1	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN		778.440.000,00	696.700.000,00	89,50
				2	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA		465.280.000,00	463.441.200,00	
				6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.416.428.398,00	1.293.081.672,00	91,29
				1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK		384.397.630,00	356.959.123,00	92,86
				2	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		136.780.000,00	136.780.000,00	100,00
				3	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR		895.250.768,00	799.342.549,00	89,29
				7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		528.932.400,00	518.938.881,00	98,11
				1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN		379.082.400,00	369.219.381,00	97,40
				2	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA		149.850.000,00	149.719.500,00	99,91
	KEPEGAWAIAN								

		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							
					1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	165.477.400,00	123.970.974,00	74,92
					1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	158.750.700,00	118.373.974,00	74,57
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.726.700,00	5.597.000,00	83,21
					2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.056.217.913,00	5.881.155.955,00	97,11
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	6.052.508.713,00	5.877.928.855,00	97,12
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.709.200,00	3.227.100,00	87,00
					3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	356.339.300,00	324.597.000,00	91,09
					1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	109.847.700,00	109.843.000,00	100,00
					2	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	124.617.100,00	99.139.000,00	79,55
					4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.110.795.300,00	862.506.467,00	77,65
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.536.000,00	20.536.000,00	100,00
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	477.506.000,00	452.680.000,00	94,80
					3	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	15.075.800,00	10.825.800,00	71,81
					4	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	47.000.000,00	35.124.000,00	74,73
					5	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	46.749.000,00	43.751.750,00	93,59
					6	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	4.647.500,00	3.449.300,00	74,22
					7	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	499.281.000,00	296.139.617,00	59,31
					5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	309.600.000,00	294.194.000,00	95,02
					1	PENGADAAN MEBEL	154.600.000,00	140.200.000,00	90,69
					2	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	155.000.000,00	153.994.000,00	99,35
					6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	380.593.848,00	331.365.074,00	87,07
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	127.853.000,00	113.313.258,00	88,63
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	252.740.848,00	218.051.816,00	86,27

					7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	173.323.400,00	154.593.457,00	89,19
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	65.996.000,00	52.492.057,00	79,54
					2	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	11.513.000,00	11.513.000,00	100,00
					3	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	40.814.400,00	36.044.400,00	88,31
					4	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	55.000.000,00	54.544.000,00	99,17
	INSPEKTORAT								
		INSPEKTORAT KABUPATEN							
					1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	58.340.000,00	7.250.000,00	12,43
					1	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	14.060.000,00	4.050.000,00	28,81
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	44.280.000,00	3.200.000,00	7,23
					2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.980.551.224,00	13.584.203.867,00	97,17
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	13.975.891.224,00	13.581.949.867,00	97,18
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	4.660.000,00	2.254.000,00	48,37
					3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2.995.124.000,00	1.599.549.950,00	53,41
					1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	2.904.924.000,00	1.589.849.950,00	54,73
					2	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	90.200.000,00	9.700.000,00	10,75
					4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.707.882.900,00	1.423.944.065,00	83,37
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	52.301.200,00	52.130.000,00	99,67
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	221.114.100,00	210.919.693,00	95,39
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	169.425.000,00	167.312.500,00	98,75
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	133.713.600,00	133.683.646,00	99,98
					5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	31.200.000,00	30.970.000,00	99,26

					6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1.100.129.000,00	828.928.226,00	75,35
				5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		2.596.865.400,00	1.659.513.000,00	63,90
					1	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	596.022.000,00	568.578.000,00	95,40
					2	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.441.000.400,00	545.130.000,00	37,83
					3	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	559.843.000,00	545.805.000,00	97,49
				6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		640.571.604,00	582.593.658,00	90,95
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	188.236.440,00	160.898.388,00	85,48
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	452.335.164,00	421.695.270,00	93,23
				7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		897.593.500,00	892.100.616,00	99,39
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	88.650.000,00	87.754.810,00	98,99
					2	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	370.232.000,00	366.399.806,00	98,96
					3	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	86.734.000,00	86.490.000,00	99,72
					4	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	351.977.500,00	351.456.000,00	99,85
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
				I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	334.948.100,00	333.085.300,00	99,44
					1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	150.605.700,00	149.164.700,00	99,04
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	9.860.900,00	9.860.500,00	100,00
					3	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	9.860.900,00	9.860.500,00	100,00
					4	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	9.860.900,00	9.860.500,00	100,00
					5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	9.860.900,00	9.860.500,00	100,00
					6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	11.180.900,00	11.180.500,00	100,00
					7	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	133.717.900,00	133.298.100,00	99,69

					2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.293.220.897,00	3.232.002.187,00	98,14
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.285.831.797,00	3.224.778.087,00	98,14
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.389.100,00	7.224.100,00	97,77
					3	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.120.458.650,00	1.114.374.047,00	99,46
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	13.641.000,00	13.604.100,00	99,73
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	237.877.050,00	232.296.550,00	97,65
					3	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	237.877.050,00	232.296.550,00	97,65
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	124.968.600,00	124.930.600,00	99,97
					5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	4.095.000,00	4.083.800,00	99,73
					6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	710.277.000,00	710.173.997,00	99,99
					4	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.677.009.050,00	1.646.311.214,00	98,17
					1	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	494.840.000,00	481.740.000,00	97,35
					2	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	520.397.100,00	503.604.400,00	96,77
					3	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	661.771.950,00	660.966.814,00	99,88
					5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	751.880.468,00	671.814.106,00	89,35
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	161.184.000,00	137.287.706,00	85,17
					2	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	24.822.500,00	24.822.500,00	100,00
					3	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	565.873.968,00	509.703.900,00	90,07
					6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	315.675.000,00	304.909.346,00	96,59
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	144.375.000,00	133.716.051,00	92,62
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	21.300.000,00	21.300.000,00	100,00
						PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	150.000.000,00	149.893.295,00	99,93
	URUSAN KEWILAYAHAN								
		KAMPAR KIRI							
				I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.323.405.127,00	1.998.779.167,00	86,03
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.323.405.127,00	1.998.779.167,00	86,03
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	456.137.600,00	453.400.680,00	99,40
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.873.000,00	3.873.000,00	100,00
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	83.893.000,00	83.892.400,00	100,00
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	200.687.600,00	200.586.500,00	99,95
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.135.000,00	18.135.000,00	100,00
					4	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	149.549.000,00	146.913.780,00	98,24
					3	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
					1	PENGADAAN MEBEL	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
					4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	282.964.916,00	280.840.866,00	99,25
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	33.798.000,00	33.798.000,00	100,00
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	249.166.916,00	247.042.866,00	99,15
					5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	58.440.632,00	58.440.632,00	100,00
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	52.600.632,00	52.600.632,00	100,00
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.840.000,00	5.840.000,00	100,00
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	161.820.900,00	36.620.900,00	22,63
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	161.820.900,00	36.620.900,00	22,63
		KAMPAR KIRI HULU							
				I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.855.800.654,00	1.799.746.321,00	96,98
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.855.800.654,00	1.799.746.321,00	96,98
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	524.579.300,00	514.757.886,00	98,13

					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.230.000,00	4.230.000,00	100,00
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	177.299.000,00	177.299.000,00	100,00
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	149.886.300,00	149.886.300,00	100,00
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	31.484.000,00	31.484.000,00	100,00
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	161.680.000,00	151.858.586,00	93,93
				3	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		81.500.000,00	81.500.000,00	
					1	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	20.000.000,00	20.000.000,00	
				4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		135.555.402,00	134.034.640,00	98,88
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	7.800.110,00	6.671.848,00	85,54
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	127.755.292,00	127.362.792,00	99,69
				5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		70.005.500,00	69.560.802,00	99,36
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	59.166.800,00	58.722.102,00	99,25
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.838.700,00	10.838.700,00	100,00
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	151.467.400,00	51.467.400,00	33,98
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	151.467.400,00	51.467.400,00	33,98
		KAMPAR KIRI HILIR							
				I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.769.558.728,00	1.511.127.097,00	85,40
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.769.558.728,00	1.511.127.097,00	85,40
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	413.009.750,00	317.831.150,00	76,95
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	6.745.200,00	6.744.900,00	100,00
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	33.554.600,00	32.997.700,00	98,34
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	147.609.150,00	116.870.150,00	79,18

					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	22.221.400,00	19.969.500,00	89,87
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	122.248.000,00	80.105.900,00	65,53
				3	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		80.631.400,00	61.143.000,00	
					1	PENGADAAN MEDEL	51.643.000,00	37.143.000,00	
					2	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	28.988.400,00	24.000.000,00	
					3	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	326.796.305,00	317.574.784,00	97,18
					4	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	40.371.305,00	39.149.784,00	96,97
					5	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	286.425.000,00	278.425.000,00	97,21
				4	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		6.731.500,00	5.828.000,00	86,58
					1	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.731.500,00	5.828.000,00	86,58
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
						PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	109.301.750,00	9.302.200,00	8,51
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	109.301.750,00	9.302.200,00	8,51
				III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
					1	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	596.500.300,00	569.520.850,00	95,48
					1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	488.000.200,00	486.020.850,00	99,59
					2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	108.500.100,00	83.500.000,00	76,96
		GUNUNG SAHILAN							
				I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.435.583.567,00	1.180.765.302,00	82,25
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.435.583.567,00	1.180.765.302,00	82,25
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	359.665.500,00	305.445.700,00	84,92
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.342.600,00	3.967.300,00	74,26
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	70.796.700,00	63.231.900,00	89,31
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	183.386.600,00	163.994.400,00	89,43
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	23.552.600,00	13.101.100,00	55,62

					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	76.587.000,00	61.151.000,00	79,85
					6	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	12.000.000,00	12.000.000,00	99,97
				3	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		162.932.920,00	156.070.950,00	95,79
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.598.920,00	19.837.950,00	91,85
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	141.334.000,00	136.233.000,00	96,39
				4	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		70.922.000,00	63.989.300,00	90,22
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	43.892.000,00	38.379.300,00	87,44
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.030.000,00	8.610.000,00	85,84
					3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	106.631.200,00	5.400.000,00	
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	106.631.200,00	5.400.000,00	
		KAMPAR KIRI TENGAH							
				I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.143.894.480,00	2.071.888.522,00	96,64
						PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.143.894.480,00	2.071.888.522,00	96,64
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	518.183.425,00	488.149.500,00	
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.650.800,00	8.650.000,00	
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	112.753.325,00	110.839.500,00	98,30
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	186.113.000,00	185.768.000,00	99,81
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	32.426.300,00	30.242.000,00	
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	178.240.000,00	152.650.000,00	85,64
				3	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		52.276.000,00	42.550.000,00	81,39
					1	PENGADAAN MEBEL	36.726.000,00	27.200.000,00	74,06

					2	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	15.550.000,00	15.350.000,00	98,71
				4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		116.785.400,00	106.343.644,00	91,06
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.140.400,00	18.658.644,00	77,29
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	92.645.000,00	87.685.000,00	94,65
				5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		48.465.788,00	38.681.800,00	79,81
						PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	48.465.788,00	38.681.800,00	
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	108.780.000,00	8.780.000,00	8,07
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	108.780.000,00	8.780.000,00	0,00
				III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
					1	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.678.650,00	13.314.000,00	79,83
					1	FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	16.678.650,00	13.314.000,00	79,83
		XIII KOTO KAMPAR							
				I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.684.554.238,00	1.458.602.556,00	86,59
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.684.554.238,00	1.458.602.556,00	86,59
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	477.325.450,00	446.088.170,00	93,46
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.013.000,00	14.013.000,00	100,00
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	193.967.700,00	187.265.400,00	96,54
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	197.813.550,00	178.385.300,00	90,18
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.218.200,00	6.218.200,00	100,00
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	65.313.000,00	60.206.270,00	92,18
					3	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	53.500.000,00	53.500.000,00	100,00
					1	PENGADAAN MEBEL	53.500.000,00	53.500.000,00	100,00

					4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	289.221.200,00	286.368.638,00	99,01
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.391.200,00	12.538.638,00	81,47
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	273.830.000,00	273.830.000,00	100,00
					5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	64.272.600,00	60.018.600,00	93,38
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	47.072.000,00	42.818.000,00	90,96
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	17.200.600,00	17.200.600,00	100,00
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	133.784.000,00	9.379.000,00	7,01
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	133.784.000,00	9.379.000,00	7,01
				III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
					1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	321.283.746,00	321.283.746,00	100,00
					2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	195.200.000,00	195.200.000,00	100,00
		KOTO KAMPAR HULU							
				I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.410.555.763,00	1.293.945.158,00	91,73
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.410.555.763,00	1.293.945.158,00	91,73
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	376.313.700,00	372.040.100,00	98,86
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.927.000,00	3.927.000,00	100,00
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	143.405.200,00	142.908.000,00	99,65
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	146.039.500,00	146.037.100,00	100,00
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	18.566.000,00	18.566.000,00	100,00
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	64.376.000,00	60.602.000,00	94,14
					3	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	224.647.000,00	223.772.000,00	99,61
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.042.000,00	24.042.000,00	100,00
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	200.605.000,00	199.730.000,00	99,56

					4	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53.092.200,00	53.092.200,00	100,00
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	42.984.200,00	42.984.200,00	100,00
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	10.108.000,00	10.108.000,00	100,00
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	106.328.000,00	0,00	0,00
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	106.328.000,00	0,00	0,00
				II	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		1.476.400,00	1.476.400,00	100,00
					1	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.476.400,00	1.476.400,00	100,00
					1	FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	1.476.400,00	1.476.400,00	100,00
		Kuok		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.665.853.031,00	1.508.906.633,00	90,58
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.665.853.031,00	1.508.906.633,00	90,58
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	670.063.600,00	655.157.350,00	97,78
					1	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	106.374.500,00	106.350.700,00	99,98
					2	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	421.714.000,00	421.714.000,00	100
					3	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.561.100,00	26.561.100,00	100
					4	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	115.414.000,00	100.531.550,00	87,11
					3	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	182.578.250,00	178.355.350,00	97,69
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	23.613.250,00	23.090.350,00	97,79
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	158.965.000,00	155.265.000,00	97,67
					4	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	57.772.300,00	57.135.200,00	98,9
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	49.663.300,00	49.029.700,00	98,72
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	8.109.000,00	8.105.500,00	99,96

				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	103.880.000,00	3.880.000,00	3,74
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	103.880.000,00	3.880.000,00	3,74
				III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
					1	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.652.000,00	2.652.000,00	100
					1	FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	2.652.000,00	2.652.000,00	100
		Salo							
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.159.460.116,00	902.941.611,00	77,88
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.159.460.116,00	902.941.611,00	77,88
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	376.638.100,00	342.545.200,00	90,95
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.680.000,00	2.680.000,00	100
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	131.266.100,00	131.245.500,00	99,98
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	132.799.000,00	113.096.000,00	85,16
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.729.000,00	13.729.000,00	100
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	96.164.000,00	81.794.700,00	85,06
					3	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	11.920.000,00	11.920.000,00	100
					1	PENGADAAN MEDEL	11.920.000,00	11.920.000,00	100
					4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	179.651.324,00	174.267.050,00	97
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.556.600,00	10.126.030,00	95,92
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	169.094.724,00	164.141.020,00	
					5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	39.089.363,00	34.513.363,00	
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	31.723.863,00	27.147.863,00	
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.365.500,00	7.365.500,00	
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	100.000.000,00	0	

					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	100.000.000,00	0	
		TAPUNG		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.825.004.307,00	1.811.181.124,00	99,24
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.825.004.307,00	1.811.181.124,00	99,24
					2	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	28.224.000,00	26.939.500,00	95,45
					1	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	28.224.000,00	26.939.500,00	95,45
					3	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	386.109.300,00	350.666.306,00	90,82
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.510.100,00	5.510.100,00	100
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	94.393.100,00	91.355.601,00	96,78
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	158.307.900,00	156.441.900,00	98,82
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	24.071.200,00	22.639.000,00	94,05
					5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.888.000,00	3.888.000,00	100
					6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	99.939.000,00	70.831.705,00	70,87
					1	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	80.598.400,00	80.448.700,00	99,81
					1	PENGADAAN MEDEL	10.240.000,00	10.217.700,00	99,78
					2	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	70.358.400,00	70.231.000,00	99,82
					2	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	249.424.000,00	242.808.206,00	97,35
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.024.000,00	17.408.206,00	72,46
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	225.400.000,00	225.400.000,00	100
					3	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	197.145.000,00	193.119.425,00	97,96
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	50.260.000,00	46.399.675,00	92,32
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	16.885.000,00	16.885.000,00	100
					3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	130.000.000,00	129.834.750,00	99,87
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				

					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	165.182.800,00	65.182.800,00	100
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	165.182.800,00	65.182.800,00	100
		TAPUNG HULU							
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.540.967.332,00	1.275.508.062,00	82,77
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.540.967.332,00	1.275.508.062,00	82,77
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	648.081.100,00	641.265.200,00	98,95
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	20.371.200,00	20.371.200,00	100
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	165.012.900,00	164.972.200,00	99,98
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	272.369.400,00	272.369.400,00	100
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	59.799.600,00	59.799.600,00	100
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	130.528.000,00	123.752.800,00	94,81
					3	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	104.233.780,00	101.396.500,00	97,28
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.633.780,00	18.436.500,00	98,94
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	85.600.000,00	82.960.000,00	96,92
					4	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.425.800,00	68.425.800,00	100
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	55.635.800,00	55.635.800,00	100
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	12.790.000,00	12.790.000,00	100
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	108.224.000,00	8.224.000,00	7,6
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	108.224.000,00	8.224.000,00	7,6
		TAPUNG HILIR		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.043.495.041,00	1.772.715.821,00	86,75
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.043.495.041,00	1.772.715.821,00	86,75
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	739.707.500,00	708.531.400,00	95,79

					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.664.000,00	4.664.000,00	100
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	182.438.700,00	180.164.600,00	98,75
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	375.288.000,00	375.288.000,00	100
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.947.800,00	25.947.800,00	100
					5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.268.000,00	2.268.000,00	100
					6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	149.101.000,00	120.199.000,00	80,62
				3	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		202.399.900,00	196.354.900,00	97,01
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.344.900,00	16.344.900,00	100
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	186.055.000,00	180.010.000,00	96,75
				4	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		55.830.400,00	51.671.200,00	92,55
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	46.257.400,00	42.098.200,00	91,01
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	9.573.000,00	9.573.000,00	100
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	104.080.000,00	4.080.000,00	3,92
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	104.080.000,00	4.080.000,00	3,92
				III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
					1	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.900.000,00	3.900.000,00	100
					1	FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	3.900.000,00	3.900.000,00	100
		BANGKINANG KOTA		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.704.390.490,00	2.261.072.100,00	83,61
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.703.226.790,00	2.259.908.400,00	83,6
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.163.700,00	1.163.700,00	100
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	586.392.500,00	566.707.496,00	96,64

					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	14.900.800,00	14.900.800,00	100
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	121.018.200,00	121.018.000,00	100
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	230.439.100,00	230.439.100,00	100
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.372.400,00	36.372.400,00	100
					5	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	48.696.000,00	48.402.000,00	99,4
					6	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	134.966.000,00	115.575.196,00	85,63
				3	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		49.168.600,00	49.168.600,00	100
					1	PENGADAAN MEDEL	13.300.000,00	13.300.000,00	100
					2	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	35.868.600,00	35.868.600,00	100
				4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		291.625.284,00	275.683.989,00	94,53
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	75.042.000,00	64.478.205,00	85,92
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	216.583.284,00	211.205.784,00	97,52
				5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		125.689.800,00	123.451.060,00	98,22
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	42.787.800,00	40.560.900,00	94,8
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	45.902.000,00	45.890.160,00	99,97
					3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	37.000.000,00	37.000.000,00	100
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	276.553.300,00	176.553.300,00	63,84
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	276.553.300,00	176.553.300,00	63,84
				III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
					1	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.612.696.600,00	1.531.696.600,00	94,98
					1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	923.047.000,00	895.047.000,00	96,97
					2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	689.649.600,00	636.649.600,00	92,31
		BANGKINANG		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				

					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.571.325.125,00	2.242.814.778,00	87,22
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.571.325.125,00	2.242.814.778,00	87,22
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	484.302.600,00	446.772.300,00	92,25
					1	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	75.923.400,00	75.913.000,00	99,99
					2	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	254.172.600,00	233.363.600,00	91,81
					3	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.226.600,00	34.171.700,00	94,33
					4	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	117.980.000,00	103.324.000,00	87,58
					3	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	115.148.000,00	114.308.000,00	99,27
					1	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	115.148.000,00	114.308.000,00	99,27
					4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	288.544.688,00	278.439.870,00	96,5
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.664.688,00	10.634.870,00	56,98
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	269.880.000,00	267.805.000,00	99,23
					5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.198.600,00	33.198.000,00	100
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	33.198.600,00	33.198.000,00	100
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	154.978.000,00	4.978.000,00	3,21
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	154.978.000,00	4.978.000,00	3,21
				III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
					1	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.123.510.396,00	1.123.510.396,00	100
					1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	891.610.396,00	891.610.396,00	100
					2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	231.900.000,00	231.900.000,00	100
		KAMPAR		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.171.256.505,00	2.921.112.363,00	
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.171.256.505,00	2.921.112.363,00	
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	760.385.700,00	756.506.311,00	
					1	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	156.976.300,00	156.840.100,00	

					2	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	309.824.800,00	309.154.300,00	
					3	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	64.235.600,00	64.235.600,00	
					4	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.000.000,00	9.000.000,00	
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	220.349.000,00	217.276.311,00	
				3	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		19.200.000,00	18.800.000,00	
					1	PENGADAAN MEDEL	19.200.000,00	18.800.000,00	
				4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		233.112.200,00	233.112.200,00	
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	20.882.200,00	20.882.200,00	
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	212.230.000,00	212.230.000,00	
				5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		92.690.600,00	92.690.600,00	
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	64.270.600,00	64.270.600,00	
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	28.420.000,00	28.420.000,00	
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	100.000.000,00	0	
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	100.000.000,00	0	
				III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
					1	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN			
					1	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	613.629.611,00	588.629.611,00	
					2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN	194.750.000,00	169.750.000,00	
				IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
					1	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.754.000,00	19.754.000,00	
					1	FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	19.754.000,00	19.754.000,00	
		KAMPA		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.261.874.500,00	1.111.875.830,00	88,11
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.261.874.500,00	1.111.875.830,00	88,11
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	582.935.000,00	582.935.000,00	100

					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.330.000,00	2.330.000,00	100
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	146.985.200,00	146.985.200,00	100
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	318.136.000,00	318.136.000,00	100
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.997.800,00	17.997.800,00	100
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	97.486.000,00	97.486.000,00	100
				3	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		187.566.396,00	187.281.096,00	100
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.521.100,00	24.235.800,00	98,84
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	163.045.296,00	163.045.296,00	100
				4	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		71.169.100,00	71.169.100,00	100
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	57.545.600,00	57.545.600,00	100
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.623.500,00	13.623.500,00	0
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	110.950.000,00	10.950.000,00	100
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	110.950.000,00	10.950.000,00	100
		RUMBIO JAYA		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.338.636.067,00	1.244.283.773,00	92,95
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.338.636.067,00	1.244.283.773,00	92,95
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	546.866.500,00	544.485.500,00	99,56
					1	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	159.372.300,00	157.536.300,00	98,85
					2	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	185.176.200,00	184.771.200,00	99,78
					3	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	77.872.000,00	77.872.000,00	100
					4	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	124.446.000,00	124.306.000,00	99,89
				3	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		143.033.500,00	140.760.191,00	98,41
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	31.648.500,00	30.495.191,00	96,36
					2	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	15.660.000,00	15.660.000,00	100

					3	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	95.725.000,00	94.605.000,00	98,83
					4	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	39.618.000,00	39.618.000,00	100
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	34.508.000,00	34.508.000,00	100
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	5.110.000,00	5.110.000,00	100
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	116.600.000,00	16.600.000,00	14,24
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	116.600.000,00	16.600.000,00	14,24
				III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
					1	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.770.500,00	3.745.600,00	99,34
					1	FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	3.770.500,00	3.745.600,00	99,34
		KAMPAR UTARA		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	972.960.742,00	743.405.351,00	76,41
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	972.960.742,00	743.405.351,00	76,41
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	538.894.050,00	526.486.298,00	97,7
					1	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	98.955.400,00	98.955.400,00	100
					2	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	238.451.050,00	234.705.050,00	98,43
					3	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	29.527.600,00	29.527.600,00	100
					4	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6.804.000,00	6.804.000,00	100
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	165.156.000,00	156.494.248,00	94,76
					3	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	197.385.500,00	191.849.402,00	97,2
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.781.500,00	18.761.402,00	94,84
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	177.604.000,00	173.088.000,00	97,46
					4	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	106.185.200,00	106.185.200,00	100

					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	49.325.200,00	49.325.200,00	100
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	26.080.000,00	26.080.000,00	100
					3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	30.780.000,00	30.780.000,00	100
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	117.228.150,00	17.228.150,00	100
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	117.228.150,00	17.228.150,00	100
		TAMBANG		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.644.834.213,00	2.526.597.636,00	95,53
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.644.834.213,00	2.526.597.636,00	95,53
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	561.186.700,00	561.156.400,00	99,99
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	9.450.300,00	9.450.000,00	100
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	113.487.400,00	113.487.400,00	100
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	306.399.000,00	306.399.000,00	100
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	26.728.000,00	26.728.000,00	100
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	105.122.000,00	105.092.000,00	99,97
					3	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	49.142.500,00	49.142.500,00	100
					1	PENGADAAN MEBEL	49.142.500,00	49.142.500,00	100
					4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	189.685.000,00	187.049.600,00	98,61
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	33.945.000,00	33.919.600,00	99,93
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	155.740.000,00	153.130.000,00	98,32
					5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	45.017.000,00	45.015.000,00	100
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	27.215.000,00	27.215.000,00	100
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	17.802.000,00	17.800.000,00	99,99

				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	109.000.000,00	9.000.000,00	8,26
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	109.000.000,00	9.000.000,00	8,26
		SIK HULU		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.769.764.010,00	2.719.884.410,00	98,2
					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.769.764.010,00	2.719.884.410,00	98,2
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	655.910.400,00	379.905.000,00	57,92
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	11.019.400,00	10.670.000,00	96,83
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	79.572.200,00	79.572.200,00	100
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	305.533.000,00	167.116.000,00	54,7
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	36.830.800,00	36.830.800,00	100
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	222.955.000,00	85.716.000,00	38,45
					3	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	142.896.660,00	139.605.352,00	97,7
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	26.256.660,00	22.965.352,00	87,46
					2	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	116.640.000,00	116.640.000,00	100
					4	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	73.938.800,00	56.360.000,00	76,23
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	45.758.800,00	39.670.000,00	86,69
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	28.180.000,00	16.690.000,00	59,23
				II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	109.600.000,00	9.600.000,00	8,76
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	109.600.000,00	9.600.000,00	8,76
							2.500.935.575,00	2.454.925.681,00	98,16
		PERHENTIAN RAJA		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.766.097.907,00	1.754.051.802,00	99,32

					1	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.766.097.907,00	1.754.051.802,00	99,32
					2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	473.002.132,00	449.192.458,00	94,97
					1	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.774.000,00	5.774.000,00	100
					2	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	39.887.832,00	39.887.788,00	100
					3	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	318.285.000,00	318.285.000,00	100
					4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	14.746.300,00	14.618.300,00	99,13
					5	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	94.309.000,00	70.627.370,00	74,89
					3	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	48.000.000,00	48.000.000,00	100
					1	PENGADAAN MEBEL	23.000.000,00	23.000.000,00	100
					2	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	25.000.000,00	25.000.000,00	100
					4	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	155.222.136,00	145.068.391,00	93,46
					1	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	19.926.000,00	13.282.255,00	66,66
					1	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	135.296.136,00	131.786.136,00	97,41
					5	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	58.613.400,00	58.613.030,00	100
					1	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	41.645.400,00	41.645.030,00	100
					2	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.776.000,00	2.776.000,00	100
					3	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	14.192.000,00	14.192.000,00	100
				II		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	104.385.000,00	4.385.000,00	4,2
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	104.385.000,00	4.385.000,00	4,2
					1	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	104.385.000,00	4.385.000,00	4,2
				III		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.560.000,00	4.560.000,00	100
					1	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.560.000,00	4.560.000,00	100
					1	FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA	4.560.000,00	4.560.000,00	100

Tabel 3.1.2

Capaian Kinerja Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

NO	URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN				ANGGARAN	REALISASI	%	KELUARAN/ HASIL		%
								Rp	Rp		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5					7	8	9	10	11
1	PENDIDIKAN												
		DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA											
				I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								
					1	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR		196.818.041.379,00	187.406.547.128,0 0	95,22			
						1	PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	2.056.320.000,00	1.962.003.648,00	95,41	9 Ruang	9 Ruang	100
						2	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH	2.513.280.000,00	2.407.737.480,00	95,80	11 Ruang	11 Ruang	100
						3	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	22.321.678.980,00	20.377.914.600,00	91,29	144 Sekolah	131 Sekolah	90,97
						4	REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	256.390.000,00	245.561.360,00	95,78	2 Ruang	2 Ruang	100
						5	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	8.470.511.000,00	5.887.656.600,00	69,51	229 Ruang	168 Ruang	73,36
						6	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	3.143.132.800,00	3.118.282.460,00	99,21	10 Paket	10 Paket	100
						7	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	737.760.200,00	588.631.088,00	79,79	252 Siswa	252 Siswa	100
						8	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	22.482.643.656,00	20.241.253.902,00	90,03	12 Bulan	12 Bulan	100
						9	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	1.528.055.300,00	1.364.715.900,00	89,31	350 Orang	350 Orang	100
						10	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	2.996.779.250,00	2.974.447.410,00	99,25	527 Sekolah	527 Sekolah	100
						11	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	93.265.586.193,00	93.226.484.526,00	99,96	12 Bulan	12 Bulan	100
						12	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	499.999.500,00	495.131.850,00	99,03	12 Bulan	12 Bulan	100
						13	PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR	4.341.120.000,00	4.170.305.860,00	96,07	20 Orang	20 Orang	100

						14	FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	567.482.700,00	563.212.200,00		523 Komunitas	523 Komunitas	100
						15	PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	3.349.770.800,00	2.906.118.184,00	86,76	7 Paket	7 Paket	100
						16	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	9.988.862.400,00	9.505.770.165,00	95,16	31 Ruangan	4 Ruangan	77,42
						17	BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	398.575.400,00	356.948.300,00		100 Orang	100 Orang	100
						18	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	404.259.100,00	384.728.121,00	95,17	17511 Siswa	17511 Siswa	100
						19	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	17.495.834.100,00	16.629.643.474,00	95,05	94 Ruangan	94 Ruangan	100
					2	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		100.404.181.426,00	94.029.443.334,00	93,65			
						1	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	11.301.270.240,00	10.898.084.000,00	96,43	78 Sekolah	55 Sekolah	70,51
						2	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	5.037.689.000,00	2.583.718.760,00	51,29	52 Sekolah	46 Sekolah	88,46
						3	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	3.082.184.400,00	2.461.356.407,00	79,86	19 Paket	19 Paket	100
						4	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	703.414.750,00	598.706.005,00	85,11	325 Siswa	325 Siswa	100
						5	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	23.868.356.486,00	22.539.575.756,00	94,43	12 Bulan	12 Bulan	100
						6	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	2.004.305.600,00	1.790.071.514,00	89,31	785 Peserta	785 Peserta	100
						7	PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	38.265.300.000,00	38.252.360.860,00	99,97	12 Bulan	12 Bulan	100
						8	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	74.999.650,00	74.282.700,00	99,04	12 Bulan	12 Bulan	100
						9	FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.109.528.400,00	912.922.041,00		135 Komunitas	135 Komunitas	100
						10	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	194.661.100,00	185.303.931,00	95,19	14424 Siswa	14424 Siswa	100
						11	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	5.164.166.000,00	4.850.954.740,00	93,93	13 Ruangan	13 Ruangan	100
					3	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)		23.184.977.920,00	21.986.849.960,00	94,83			
						1	REHABILITASI SEDANG/BERAT PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	3.056.716.420,00	2.788.139.950,00	91,21	24 Ruangan	24 Ruangan	100

					2	PENGADAAN MEBEL PAUD	196.110.000,00	176.005.000,00	89,75	6 Ruangan	6 Ruangan	100
					3	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD	2.795.000.000,00	2.789.553.000,00	99,81	14 Paket	14 Paket	100
					4	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD	973.122.800,00	508.690.800,00	52,27	12 Bulan	12 Bulan	100
					5	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PAUD	1.695.949.500,00	1.695.939.000,00		12 Bulan	12 Bulan	100
					6	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	155.000.200,00	137.118.400,00	88,46	11 Lembaga	11 Lembaga	100
					7	PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	11.002.800.000,00	10.915.131.000,00	99,20	12 Bulan	12 Bulan	100
					8	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	74.999.500,00	72.425.900,00	96,57	12 Bulan	12 Bulan	100
					9	FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	760.517.500,00	692.777.850,00	91,09	22 Komunitas	22 Komunitas	100
					10	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	2.474.762.000,00	2.211.069.060,00	89,34	15 Ruang	15 Ruang	100
				4	PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN		4.668.062.800,00	4.411.325.174,00	94,50			
					1	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	149.942.000,00	145.570.900,00	97,08	240 Peserta	240 Peserta	100
					2	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	94.942.100,00	93.973.500,00	98,98	80 Lembaga	80 Lembaga	100
					3	PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	3.708.300.000,00	3.597.800.000,00	97,02	12 Bulan	12 Bulan	100
					4	PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	251.140.800,00	160.396.604,00	63,87	175 Peserta	175 Peserta	100
					5	FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	149.979.600,00	149.343.220,00	99,58	22 Komunitas	22 Komunitas	100
					6	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	313.758.300,00	264.240.950,00		1500 Peserta	1500 Peserta	100
				II	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							
				1	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR		604.671.100,00	603.558.200,00	99,82			
					1	PENYUSUNAN SILABUS MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	238.298.000,00	238.234.200,00	99,97	4 Dokumen	4 Dokumen	100
					2	PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	366.373.100,00	365.324.000,00	99,71	100 Orang	100 Orang	100
				2	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL		74.825.700,00	71.560.100,00	95,64			

					1	PENYUSUNAN SILABUS MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL	74.825.700,00	71.560.100,00	95,64	95 Guru	95 Guru	100
				III	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN							
					1	PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	150.999.000,00	73.767.100,00	48,85			
					1	PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	75.999.100,00	73.767.100,00	97,06	2500 Guru	2500 Guru	100
					2	PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	74.999.900,00	0,00	0,00	21 Laporan	-	-
2	KESEHATAN											
		DINKES										
				I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA							
					1	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.614.186.010,00	25.859.980.024,00	93,65			
					1	PEMBANGUNAN PUSKESMAS	5.926.855.000,00	5.541.999.000,00	93,51	10 Unit	10 Unit	100
					2	PENGEMBANGAN PUSKESMAS	7.661.405.000,00	7.553.302.050,00	98,59	31 unit	31 unit	100
					3	PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	197.349.000,00	562.552.000,00	285,05	1 unit	1unit	100
					4	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS	4.252.801.500,00	4.137.878.500,00	97,30	10 Unit	10 Unit	100
					5	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.627.647.700,00	816.616.600,00	50,17	100	50,17	50,17
					6	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	2.963.260.000,00	2.861.000.000,00	96,55	31 unit	31 unit	100
					7	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI	13.500.000,00	0,00		-	-	-
					8	PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	266.000.400,00	183.303.624,00	68,91	300		
					9	PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	4.545.127.410,00	4.047.947.250,00	89,06	1 Paket	1 Paket	100

						10	DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN	160.240.000,00	155.381.000,00	96,97	100		
				II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
					1	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA		100.386.602.984,00	91.245.588.198,89	90,89			
					1	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL		1.359.722.650,00	1.276.949.600,00	93,91	100	100	100
					2	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN		432.434.000,00	308.675.644,00	71,38	100	100	100
					3	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR		202.374.200,00	201.842.100,00	99,74	100	100	100
					4	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA		236.536.300,00	234.771.300,00	99,25	100	100	100
					5	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR		1.922.811.300,00	1.833.840.550,00	95,37	100	100	100
					6	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF		208.837.200,00	206.501.154,00		100	100	100
					7	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT		19.998.800,00	19.950.000,00		100	100	100
					8	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI		43.710.000,00	43.110.000,00	98,63	100	100	100
					9	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS		1.487.077.900,00	1.443.248.550,00	97,05	100	100	100
					10	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT		13.030.000,00	12.621.741,00	96,87	100	100	100
					11	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS		3.453.301.500,00	3.396.416.250,00	98,35	100	100	100
					12	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFeksi HIV		144.975.000,00	121.720.000,00	83,96	100	100	100
					13	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)		39.270.000,00	36.070.000,00	91,85	100	100	100
					14	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA		90.312.200,00	60.152.200,00	66,60	100	100	100
					15	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT		7.322.336.240,00	5.832.343.743,00	79,65	100	100	100

					16	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA	201.325.700,00	200.991.500,00	99,83	100	100	100
					17	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	1.274.653.000,00	1.244.568.000,00	97,64	100	100	100
					18	PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	1.342.483.800,00	1.251.594.500,00	93,23	100	100	100
					19	PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	1.473.976.000,00	1.217.609.124,00	82,61	100	100	100
					20	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN MASALAH KESEHATAN JIWA (ODMK)	3.960.000,00	3.960.000,00	100,00	100	100	100
					21	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA	80.240.000,00	74.890.000,00	93,33	100	100	100
					22	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	5.393.019.950,00	4.818.339.282,00	89,34	100	100	100
					23	PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	61.625.867.444,00	56.631.151.708,00	91,90	100	100	100
					24	DETEKSI DINI PENYALAHGUNAAN NAPZA DI FASYANKES DAN SEKOLAH	15.840.000,00	15.840.000,00	100,00	100	100	100
					25	PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	29.902.500,00	883.200,00	2,95	100	100	100
					26	OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	5.491.895.000,00	4.805.807.153,89	87,51	100	100	100
					27	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	1.310.702.000,00	1.235.634.330,00	94,27	100	100	100
					28	PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA	107.320.000,00	105.734.000,00	98,52	100	100	100
					29	INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	158.075.000,00	130.635.000,00	82,64	100	100	100
					30	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)	416.364.300,00	384.530.000,00		100	100	100
					31	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	259.755.000,00	250.805.000,00		100	100	100
					32	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	97.633.000,00	65.506.000,00	67,09	100	100	100
					33	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	45.000.000,00	37.999.085,00	84,44	100	100	100
					34	PENGELOLAAN KAWASAN TANPA ROKOK	184.560.000,00	184.560.000,00	100,00	100	100	100
					35	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	1.002.466.000,00	863.675.484,00	86,16	100	100	100

					36	PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	2.870.895.000,00	2.674.532.000,00		100	100	100
				2	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI		150.000.000,00	0,00		100	100	100
					1	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	150.000.000,00	0,00		100	100	100
				2	PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA		419.234.000,00	402.865.007,00	96,10	100	100	100
					1	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN	365.764.000,00	352.345.007,00	96,33	100	100	100
					2	PENYIAPAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	53.470.000,00	50.520.000,00	94,48	100	100	100
				iii	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
					1	PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	33.140.000,00	32.370.000,00	97,68	100	100	100
					1	PENGENDALIAN PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	16.680.000,00	16.200.000,00	97,12	100	100	100
					2	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	16.460.000,00	16.170.000,00	98,24	100	100	100
				2	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA		8.738.425.000,00	8.622.096.000,00	98,67	100	100	100
					1	PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	17.030.000,00	16.512.000,00	96,96	100	100	100
					2	PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	8.432.016.000,00	8.381.331.000,00	99,40	100	100	100
					3	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	289.379.000,00	224.253.000,00		100	100	100
					PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.854.686.400,00	1.785.704.200,00				
					1	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.854.686.400,00	1.785.704.200,00	96,28	100	100	100

				IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMA							
					1	PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	63.696.400,00	50.273.200,00	78,93			
					1	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	63.696.400,00	50.273.200,00	78,93	100	100	100
					2	PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	246.364.500,00	133.284.000,00	54,10	100	100	100
					1	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA	246.364.500,00	133.284.000,00	54,10	100		
					3	PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	23.030.000,00	23.030.000,00	100,00	100	100	100
					1	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	23.030.000,00	23.030.000,00	100,00	100	100	100
					4	PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	171.246.900,00	132.148.400,00	77,17	100	100	100
					1	PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN	171.246.900,00	132.148.400,00		100	100	100

							PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN							
				V			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							
					1		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	467.277.400,00	436.222.600,00					
					1		PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	467.277.400,00	436.222.600,00		100	100	100	
					2		PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.734.900,00	105.085.000,00		100	100	100	
					1		PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT	106.734.900,00	105.085.000,00		100	100		
					3		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	764.231.900,00	670.259.190,00		100	100	100	
					1		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	764.231.900,00	670.259.190,00		100	100	100	
							RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG							
					1		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.681.344.584,00	27.545.379.224,00	92,80				
					1		PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BESERTA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNGNYA	16.257.458.904,00	15.934.198.914,00	98,01	100	100	100	
					2		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT	929.000.000,00	708.472.000,00	76,26	100	100	100	
					3		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	6.055.420.076,00	5.921.238.756,00	97,78	100	100	100	
					4		PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI	899.414.474,00	764.478.020,00	85,00	100	100	100	
					5		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	5.540.051.130,00	4.216.991.534,00	76,12	100	100	100	

					2	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	94.287.000,00	93.797.775,00	99,48			
					1	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	94.287.000,00	93.797.775,00	99,48	100	100	100
					3	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	13.024.382.000,00	12.506.124.680,00	96,02			
					1	PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	13.024.382.000,00	12.506.124.680,00	96,02	100	100	100
					4	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	250.000.000,00	230.000.000,00	92,00			
					1	PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	250.000.000,00	230.000.000,00	92,00	100	100	100
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
				I	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
				1	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.349.363.900,00	2.524.174.306,00				
				1	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN		41.845.100,00	31.248.881,00		95,75	95,75	100
				2	REHABILITASI BENDUNG IRIGASI		1.503.845.100,00	1.228.769.333,00		97,09	97,09	100
				3	OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN		1.007.911.400,00	842.761.824,00		45,82	45,82	100
				4	OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNG IRIGASI		133.816.700,00	112.088.369,00		95,94	95,94	100
				5	PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA		661.945.600,00	309.305.899,00		0,33	0,33	100
				II	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
					PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA		7.130.964.535,00	6.643.131.496,00				

					1	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	923.151.270,00	907.059.800,00		94,40	94,40	100
					2	PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	6.207.813.265,00	5.736.071.696,00		95,33	95,33	100
				III	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
						PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.202.336.979,00	5.935.807.624,00				
					1	PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERMUKIMAN BERBASIS MASYARAKAT	5.639.119.979,00	5.383.373.724,00		100	100	100
					2	PEMBANGUNAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) TERPUSAT SKALA PERKOTAAN	563.217.000,00	552.433.900,00		99,73	99,73	100
				IV	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							
						PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.718.403.502,00	8.972.009.500,00				
					1	PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	8.983.267.217,00	8.546.577.600,00		100	100	100
					2	OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN	735.136.285,00	425.431.900,00		97,51	97,51	100
				V	PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							
						PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	66.401.814.673,00	42.871.481.127,00				
					1	PENGUBAHSUAIAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.065.900,00	18.987.000,00		100	100	100
					2	PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.413.154.643,00	10.368.171.006,00				
					3	PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG	19.997.500,00	18.987.000,00		100	100	100

					4	PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.295.101.630,00	31.879.376.621,00		83,38	83,38	100
					5	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG	19.997.500,00	18.987.000,00		100	100	100
					6	PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG	633.497.500,00	566.972.500,00		96,26	96,26	96,26
				VI	PENYELENGGARA JALAN							
						PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	198.489.835.584,00	161.311.585.244,00				
					1	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN	1.343.982.700,00	1.123.132.021,00		91,30	91,30	100
					2	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JALAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DAN DESA	6.045.573.500,00	3.147.291.015,00		100	100	100
					3	PEMBANGUNAN JALAN	70.994.733.600,50	60.049.274.997,00		99,33	99,33	100
					4	REKONSTRUKSI JALAN	91.532.796.290,00	78.077.936.557,00		99,56	99,56	100
					5	REHABILITASI JEMBATAN	3.003.371.100,00	1.072.768.450,00				
					6	PEMBANGUNAN JEMBATAN	20.613.049.900,00	12.930.183.479,00				
					7	SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	562.978.800,00	557.303.075,00				
					8	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN	4.393.349.693,50	4.353.695.650,00		50 Km	50 Km	100
						PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.454.500,00	35.584.500,00				
					1	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA	18.727.250,00	17.792.250,00		2 Dok	2 Dok	100
					2	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA SIPJAKI	18.727.250,00	17.792.250,00		1 thn	1 thn	100
						PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	35.227.300,00	33.412.980,00	94,85			

					1	PEMBINAAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN, DAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI	16.500.050,00	15.620.730,00	94,67	12 Lembaga	12 Lembaga	100
					2	PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA	18.727.250,00	17.792.250,00	95,01	2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	100
						PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	777.605.900,00	710.486.414,00	91,37	6 Dok	6 dok	100
					1	PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	777.605.900,00	710.486.414,00	91,37	6 Dok	6 dok	100
						KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	198.511.700,00	197.737.000,00	99,61	2 Dok	2 Dok	100
					1	PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	198.511.700,00	197.737.000,00	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100
						KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.345.250,00	154.322.600,00	99,34	2 Dok	2 Dok	100
					1	KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	155.345.250,00	154.322.600,00	99,34	2 Dok	2 Dok	100
4	UNSUR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
				I	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		925.323.900,00	841.626.510,00	90,95			
					1	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	170.015.800,00	151.336.235,00	89,01	1 Dokumen	1 Dokumen	100
					1	PENGUMPULAN DATA RUMAH KORBAN BENCANA KEJADIAN SEBELUMNYA YANG BELUM TERTANGANI	170.015.800,00	151.336.235,00	89,01	1 Dokumen	1 Dokumen	100
					2	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	755.308.100,00	690.290.275,00	91,39	1 Dokumen	1 Dokumen	100
					1	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	380.000.700,00	315.522.969,00	83,03	1 Dokumen	1 Dokumen	100
					2	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	375.307.400,00	374.767.306,00	99,86	50 Laporan	50 Laporan	100
				II	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		650.000.000,00	572.937.697,00	88,14			

					1	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	65.000.000,00	58.340.000,00	89,75	3 Dokumen	3 Dokumen	100
					1	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	65.000.000,00	58.340.000,00	89,75	3 Dokumen	3 Dokumen	100
					2	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	275.000.000,00	259.004.320,00	94,18	5 Dokumen	5 Dokumen	100
					1	PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG PKP	275.000.000,00	259.004.320,00	94,18	5 Dokumen	5 Dokumen	100
					3	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	310.000.000,00	255.593.377,00	82,45	12 Laporan	12 Laporan	100
					1	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMUGARAN/PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH	310.000.000,00	255.593.377,00	82,45	12 Laporan	12 Laporan	100
				III		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	22.065.772.350,00	22.044.430.660,00	99,90	756 Unit	756 Unit	100
					1	PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.065.772.350,00	22.044.430.660,00	99,90	756 Unit	756 Unit	100
					1	PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	22.065.772.350,00	22.044.430.660,00	99,90	756 Unit	756 Unit	100
				IV		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	46.040.303.034,28	41.615.818.096,00	90,39			
					1	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	46.040.303.034,28	41.615.818.096,00	90,39			
					1	PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN	170.929.200,00	70.525.100,00		2 Dokumen	2 Dokumen	100
					2	PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN	45.329.345.584,28	41.008.505.490,00	90,47	20 Lokasi	20 Lokasi	100
					3	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN	189.823.750,00	187.643.706,00	98,85	30 Laporan	30 Laporan	100
					4	VERIFIKASI DAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN DARI PENGEMBANG	350.204.500,00	349.143.800,00	99,70	10 Laporan	10 Laporan	100

				V	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		149.795.250,00	142.943.920,00	95,43	48 Laporan	48 Laporan	100
					1	SERTIFIKASI DAN REGISTRASI BAGI ORANG ATAU BADAN HUKUM YANG MELAKSANAKAN PERANCANGAN DAN PERENCANAAN RUMAH SERTA PERENCANAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU TINGKAT KEMAMPUAN KECIL	149.795.250,00	142.943.920,00	95,43	48 Laporan	48 Laporan	100
					1	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN KUALIFIKASI KECIL	149.795.250,00	142.943.920,00	95,43	48 Laporan	48 Laporan	100
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
				I	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
					1	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.588.448.900,00	3.282.377.284,00	91,47			
					1	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	40.852.000,00	25.030.000,00	61,27	5 Dokumen	5 Dokumen	100
					2	PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	119.818.000,00	69.031.200,00	57,61	1 Dokumen	1 Dokumen	100
					3	PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSIA HAK ASASI MANUSIA	1.103.708.900,00	1.041.346.500,00	94,35	369 Orang	369 Orang	100
					4	PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	1.421.728.000,00	1.366.896.840,00	96,14	15 Laporan	15 Laporan	100
					5	PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA	849.842.000,00	743.322.744,00	87,47	17 Laporan	17 Laporan	100

						MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA						
					6	PENYEDIAAN LAYANAN DASAR DALAM RANGKA DAMPAK PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERTURAN KEPALA DAERAH	15.000.000,00	-	0,00	1 Laporan	-	-
					7	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	37.500.000,00	36.750.000,00	98,00	150 Unit	150 Unit	100
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
				I	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
				1	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA		316.778.470,00	255.292.350,00	80,59	100	100	100
					1	PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA	44.940.550,00	40.836.550,00	90,87	25 Orang	25 Orang	100
					2	PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI	12.709.800,00	438.100,00	3,45	1 Dok	1 Dok	100
					3	GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	45.638.628,00	2.719.700,00	5,96	200 Orang		
					4	PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	213.489.492,00	211.298.000,00	98,97	80 Kawasan	80Kawasan	100
				2	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA		492.298.500,00	307.300.500,00	62,42	100	100	100
					1	RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA	209.386.500,00	200.342.500,00	95,68	2 Lap	2 Lap	100
					2	PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	79.350.000,00	53.308.000,00	67,18	250 orang		
					3	PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	203.562.000,00	53.650.000,00	26,36	250 orang		
				3	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA		354.649.900,00	284.361.700,00	80,18	100	100	100
					1	PENYUSUNAN REGULASI PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	111.353.900,00	107.950.700,00	96,94	1 dok	1 dok	100
					2	PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN	81.630.000,00	81.630.000,00	100,00	1 dok	1 dok	100
					3	KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA	161.666.000,00	94.781.000,00	58,63	3 keg	3 keg	100
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN										

				I	PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							
					1	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.134.856.750,00	745.079.976,00	65,65	100	100	100
					1	PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.676.100,00	50.124.620,00	97,00	1 DOK	1 DOK	100
					2	PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	48.070.700,00	45.071.500,00	93,76	1 LAP	1 LAP	100
					3	PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	44.874.900,00	41.893.500,00	93,36	1 DOK	1 DOK	100
					4	PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.017.150,00	56.719.186,00	94,50	1 DOK	1 DOK	100
					5	STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	22.872.700,00	18.442.600,00	80,63	1 DOK	1 DOK	100
					6	PEMBINAAN APARATUR PEMADAM KEBAKARAN	405.079.150,00	39.556.000,00	9,77	60 ORG	60 ORG	100
					7	PENGELOLAAN SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (SKIK)	17.859.400,00	15.307.700,00	85,71	30 Desa/Ke lurahan	30 Desa/Ke lurahan	100
					8	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	427.388.880,00	424.543.500,00	99,33	15 Unit	15 Unit	100
					9	PELATIHAN KELUARGA TANGGAP KEBAKARAN RUMAH TANGGA	57.017.770,00	53.421.370,00	93,69	40 Keluarga	40 Keluarga	100
					2	INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	52.824.900,00	46.496.722,00	88,02	100	100	100
					1	PENDATAAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN	31.163.800,00	28.100.422,00	90,17	1 DOK	1 DOK	100
					2	PENILAIAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN	21.661.100,00	18.396.300,00	84,93	1 DOK	1 DOK	100
						INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN	47.790.200,00	47.733.000,00	99,88	100	100	100
					1	INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN, MELIPUTI PENELITIAN DAN PENGUJIAN PENYEBAB KEJADIAN KEBAKARAN	47.790.200,00	47.733.000,00	99,88	1 DOK	1 DOK	100
						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	218.593.450,00	203.666.170,00	93,17	100	100	100
					1	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN	64.602.000,00	60.089.920,00	93,02	50 Orang	50 Orang	100

						KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT						
					2	PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN	96.985.450,00	88.636.030,00	91,39	6 Desa/Kel urahan	6 Desa/Kel urahan	100
					3	DUKUNGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN MELALUI PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA	57.006.000,00	54.940.220,00	96,38	1 DOK	1 DOK	100
						PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA	140.307.950,00	124.760.400,00	88,92	100	100	100
					1	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN PADA PERISTIWA YANG MENIMPA, MEMBAHAYAKAN, DAN/ATAU MENGANCAM KESELAMATAN MANUSIA	50.017.800,00	36.093.400,00	72,16	1 LAP	1 LAP	100
					2	STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	22.177.300,00	21.555.000,00	97,19	1 DOK	1 DOK	100
					3	PEMBINAAN APARATUR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	53.853.550,00	53.672.000,00	99,66	1 LAP	1 LAP	100
					4	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA/PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	14.259.300,00	13.440.000,00	94,25	10 Unit	10 Unit	100
6	URUSAN SOSIAL											
		DINAS SOSIAL										
				I		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
					1	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.763.327.100,00	3.408.697.378,00	90,58	223 Orang PSKS	223 Orang PSKS	100
					1	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	633.817.500,00	616.868.992,00	97,33	57 Orang	57 Orang	100,00
					2	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	277.452.600,00	264.654.202,00	95,39	21 Orang	21 Orang	100,00
					3	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.129.508.500,00	861.008.795,00	76,23	105 Orang	105 Orang	100,00

							KELUARGA KEMAMPUAN POTENSI KABUPATEN/KOTA KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA						
					4		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	1.722.548.500,00	1.666.165.389,00	96,73	8 Lembaga	8 Lembaga	100,00
				II	PROGRAM REHABILITASI SOSIA								
					1		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	964.879.236,00	873.243.696,00	90,50	100	100	100
					1		PENYEDIAAN PERMAKAMAN	25.000.000	24.997.250	99,99	25 orang	25 orang	100,00
					2		PENYEDIAAN SANDANG	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25 Orang	25 Orang	100,00
					3		PENYEDIAAN ALAT BANTU	370.662.836,00	339.446.426,00	91,58	29 Orang	29 Orang	100,00
					4		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	190.646.200,00	166.362.440,00	87,26	200 Orang	200 Orang	100,00
					5		PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	353.570.200,00	317.437.580,00	89,78	50 Orang	50 Orang	100,00
				II	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								
					1		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.045.845.226,00	1.217.526.460,00	30,09	100	100	100
					1		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.961.900,00	74.339.700,00	81,73	35000 KK	35000 KK	100,00
					2		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	3.748.086.358,00	944.502.660,00	25,20	857 Orang	857 Orang	100,00
					3		FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	206.796.968,00	198.684.100,00	96,08			
				III	PROGRAM PENANGANAN BENCANA								
					1		PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	111.639.700,00	92.213.060,00	82,60	100	100	100
					1		PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	111.639.700	92.213.060	82,60	100 Orang	100 Orang	100,00
					2		PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	583.815.856,00	571.069.962,00	97,82	100	100	100
					1		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	583.815.856,00	571.069.962,00	97,82	65 Orang	65 Orang	100,00
				IV	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			325.421.600,00	295.934.303,00	90,94	100	100	100
					5		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	325.421.600,00	295.934.303,00	90,94	100	100	100
					1		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	325.421.600,00	295.934.303,00	90,94	1 Makam	1 Makam	100,00

	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH											
				I	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			4.484.748.608,00	2.173.560.196,00	48,47			
				1	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD			4.484.748.608,00	2.173.560.196,00	48,47	3 dok	3 Dok	100
					1	PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH		1.175.532.162,00	557.097.060,00	47,39	1 Dok	1 Dok	100
					2	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH		3.178.661.343,00	1.562.012.536,00	49,14	1 Dok	1 Dok	100
					3	FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK		130.555.103,00	54.450.600,00	41,71	1 Dok	1 Dok	100
				2	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN			1.961.163.300,00	1.519.542.039,00	77,48	6 Dok	6 Dok	100
					1	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS		337.440.600,00	282.983.890,00	83,86	1 Dok	1 Dok	100
					2	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS		435.193.800,00	399.311.600,00	91,75	1 Dok	1 Dok	100
					3	PEMBAHASAN APBD		432.480.500,00	276.367.000,00	63,90	1 Dok	1 Dok	100
					4	PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN		432.585.800,00	288.342.900,00	66,66	1 Dok	1 Dok	100
					5	PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD		323.462.600,00	272.536.649,00	84,26	1 Dok	1 Dok	100
				3	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN			17.880.295.077,00	12.786.181.976,00	71,51	5 Lap	5 Lap	100
					1	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM		4.169.906.200,00	2.988.465.068,00	71,67	1 Lap	1 Lap	100
					2	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR		4.759.217.714,00	3.674.370.875,00	77,21	1 Lap	1 Lap	100
					3	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT		4.218.577.763,00	2.977.483.129,00	70,58	1 Lap	1 Lap	100
					4	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN		4.367.817.400,00	2.815.026.904,00	64,45	1 Lap	1 Lap	100
					5	PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH		364.776.000,00	330.836.000,00	90,70	1 Lap	1 Lap	100
				4	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD			11.845.441.900,00	10.611.799.442,00	89,59	100	100	100
					1	PENDALAMAN TUGAS DPRD		2.796.051.500,00	1.875.782.502,00	67,09	3 Dok	3 Dok	100
					2	PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI		437.370.000,00	365.370.000,00	83,54	15 Orang	15 Orang	100
					3	PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI		385.872.000,00	352.936.000,00	91,46	8 Orang	8 Orang	100
					4	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT		2.253.120.000,00	2.246.955.000,00	99,73	100 Dok	100 Dok	100
					5	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD		5.973.028.400,00	5.770.755.940,00	96,61	50 Dok	50 Dok	100
				5	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT			3.752.677.400,00	3.204.969.100,00	85,40			
					1	KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH		56.020.000,00	0,00	0,00	1 Lap	-	-

					2	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	11.980.000,00	0,00	0,00	1 Dok	-	-
					3	PELAKSANAAN RESES	3.684.677.400,00	3.204.969.100,00	86,98	3 Dok	3 Dok	100
					6	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	229.592.000,00	34.938.400,00	15,22	100		
					1	PENYUSUNAN KODE ETIK DPRD	117.513.500,00	14.188.800,00	12,07	1 Dok	1 Dok	100
					2	PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	112.078.500,00	20.749.600,00	18,51	3 Lap	3 Lap	80
					7	FASILITASI TUGAS DPRD	36.259.804.200,00	25.631.023.445,00	70,69	3 Dok	3 Dok	100
					1	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	28.227.047.800,00	20.556.854.322,00	72,83	1 Dok	1 Dok	100
					2	FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH	1.195.732.200,00	880.796.700,00	73,66	1 Dok	1 Dok	100
					3	FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD	6.837.024.200,00	4.193.372.423,00	61,33	1 Dok	1 Dok	100
	PERENCANAAN											
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
				I		PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.905.128.150,00	3.877.920.659,00	99,30	100	100	100
					1	KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	2.372.267.650,00	2.356.915.309,00	99,35	100	100	100
					1	ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	690.933.700,00	690.267.687,00	99,90	1 Dok	1 Dok	100
					2	PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	154.041.600,00	153.782.400,00	99,83	1 BA	1 BA	100
					3	KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	38.659.200,00	38.659.200,00	100,00	4 BA	4 BA	100
					4	PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	411.205.600,00	404.819.400,00	98,45	1 BA	1 BA	100
					5	PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN	129.998.500,00	124.868.500,00	96,05	21 Usulan	21 Usulan	100
					6	KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	947.429.050,00	944.518.122,00	99,69	5 Dok	5 Dok	100
					2	KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	780.743.600,00	776.494.764,00	99,46	100	100	100
					1	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	780.743.600,00	776.494.764,00	99,46	3 Dok	3 Dok	100
					3	KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	752.116.900,00	744.510.586,00	98,99	100	100	100
					1	KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA	424.284.150,00	416.829.612,00	98,24	4 Lap	4 Lap	100

					2	MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	327.832.750,00	327.680.974,00	99,95	1 Lap	1 Lap	100
				II	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		2.895.236.250,00	2.774.622.551,00	95,83	100	100	100
					1	KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	957.583.450,00	913.468.983,00	95,39	100	100	100
					1	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	207.631.500,00	197.941.387,00	95,33	1 Dok	1 Dok	100
					2	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	43.691.000,00	39.411.000,00	90,20	7 Lap	7 Lap	100
					3	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	24.684.500,00	19.581.700,00	79,33	1 Lap	1 Lap	100
					4	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	126.682.400,00	122.994.334,00	97,09	1 Lap	1 Lap	100
					5	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	73.115.200,00	72.218.675,00	98,77	1 Dok	1 Dok	100
					6	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	125.091.900,00	118.692.389,00	94,88	1 Lap	1 Lap	100
					7	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	65.502.150,00	59.491.550,00	90,82	1 Lap	1 Lap	100
					8	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	291.184.800,00	283.137.948,00	97,24	1 Lap	1 Lap	100
					2	KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	891.922.850,00	835.640.402,00	93,69	100	100	100
					1	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	65.469.910,00	64.628.516,00	98,71	1 Dok	1 Dok	100
					2	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	141.892.220,00	127.097.900,00	89,57	1 Lap	1 Lap	100

					3	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	82.480.300,00	80.263.600,00	97,31	1 Lap	1 Lap	100
					4	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	200.588.420,00	189.501.700,00	94,47	1 Dok	1 Dok	100
					5	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	76.931.400,00	70.866.247,00	92,12	1 Lap	1 Lap	100
					6	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	107.761.400,00	91.375.000,00	84,79	1 Lap	1 Lap	100
					7	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA	142.636.300,00	140.692.752,00	98,64	1 Lap	1 Lap	100
					8	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA	74.162.900,00	71.214.687,00	96,02	1 Lap	1 Lap	100
				3	KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		1.045.729.950,00	1.025.513.166,00	98,07	100	100	100
					1	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	175.078.450,00	174.695.492,00	99,78	1 Dok	1 Dok	100
					2	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	23.202.500,00	22.467.500,00	96,83	1 Lap	1 Lap	100
					3	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	55.178.700,00	51.806.700,00	93,89	1 Lap	1 Lap	100
					4	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	263.140.200,00	262.700.324,00	99,83	1 Lap	1 Lap	100
					5	KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	131.212.550,00	121.359.157,00	92,49	1 Dok	1 Dok	100
					6	ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	65.035.100,00	64.987.100,00	99,93	1 Lap	1 Lap	100
					7	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN	76.580.300,00	75.357.600,00	98,40	1 Lap	1 Lap	100

							PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN						
						8	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	256.302.150,00	252.139.293,00	98,38	1 Lap	1 Lap	100
					III	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		2.020.224.100,00	1.976.643.574,00	97,84	100	100	100
						1	KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	907.012.800,00	898.332.286,00	99,04	100	100	100
						1	FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI	189.486.000,00	182.824.400,00	96,48	1 Lap	1 Lap	100
						2	FASILITASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DATA DAN PENGKAJIAN PERATURAN	717.526.800,00	715.507.886,00	99,72	1 Lap	1 Lap	100
						2	KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	368.143.200,00	356.256.603,00	96,77	100	100	100
						1	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA	200.476.800,00	190.829.703,00	95,19	1 Dok	1 Dok	100
						2	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	167.666.400,00	165.426.900,00	98,66	1 Dok	1 Dok	100
						3	KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	179.516.750,00	175.537.175,00	97,78	100	100	100
						1	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	179.516.750,00	175.537.175,00	97,78	1 Dok	1 Dok	100
						4	KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	565.551.350,00	546.517.510,00	96,63	100	100	100
						1	SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN	565.551.350,00	546.517.510,00	96,63	1 Lap	1 Lap	100
	KEUANGAN												
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH											
					I	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							
						1	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	1.324.167.300,00	991.905.150,00	74,91	100	100	100
						1	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	103.709.900,00	83.366.900,00	80,38	53 Dok	53 Dok	100
						2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	77.724.900,00	69.107.900,00	88,91			
						3	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	25.818.700,00	9.826.800,00	38,06	53 Dok	53 Dok	100
						4	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	10.176.800,00	0,00	0,00			

					5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	352.990.700,00	192.332.400,00	54,49	53 Dok	53 Dok	100
					6	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	369.947.300,00	357.040.600,00	96,51	53 Dok	53 Dok	100
					7	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	112.527.000,00	97.784.040,00	86,90	53 Dok	53 Dok	100
					8	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	271.272.000,00	182.446.510,00	67,26	53 Dok	53 Dok	100
					2	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	721.715.500,00	604.782.370,00	83,80	100	100	100
					1	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	77.726.000,00	71.745.000,00	92,31	12 Dok	12 Dok	
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	128.296.400,00	113.849.900,00	88,74	12 lap	12 lap	100
					3	PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	515.693.100,00	419.187.470,00	81,29	56 Orang	56 Orang	100
					3	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	946.107.900,00	658.334.393,00	69,58	100		
					1	KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	124.775.800,00	96.309.900,00	77,19	80 Dok	80 Dok	100
					2	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	821.332.100,00	562.024.493,00	68,43	12 Laporan		
					4	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	428.841.625.022,00	426.856.326.905,00	99,54	100	100	100
					1	ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	409.091.858.099,00	408.909.452.499,00	99,96	242 Laporan	242 Laporan	100
					2	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	1.486.084.358,00	122.578.409,00	8,25	12 Laporan	3 Laporan	100
					3	PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	18.263.682.565,00	17.824.295.997,00	97,59	242 Laporan	242 Laporan	100
				II	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		1.702.859.650,00	1.441.550.600,00	84,65	100	100	100

					1	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.702.859.650,00	1.441.550.600,00	84,65	100	100	100
					1	PENYUSUNAN STANDAR HARGA	388.598.000,00	378.398.000,00	97,38	12 Laporan	12 Laporan	100
					2	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	471.984.800,00	376.917.490,00	79,86	12 Laporan	12 Laporan	100
					3	PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	105.895.200,00	99.072.200,00	93,56	12 Laporan	12 Laporan	100
					4	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	85.743.050,00	35.271.850,00	41,14	12 Laporan	5 Laporan	41,67
					5	OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	273.729.400,00	220.243.000,00	80,46	12 Dokumen	12 Dokumen	100
					6	REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	249.999.700,00	207.318.544,00	82,93	53 Laporan	53 Laporan	100
					7	PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	126.909.500,00	124.329.516,00	97,97	20 Orang	20 orang	100
		BADAN PENDAPATAN DAERAH										
				I		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.577.780.601,00	4.141.008.063,00	74,24	100	100	100
					1	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.577.780.601,00	4.141.008.063,00	74,24	100	100	100
					1	PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	47.119.500,00	26.119.500,00	55,43	1 Dok	1 Dok	100
					2	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	523.745.100,00	305.138.281,00	58,26	1 Dok	1 Dok	100
					3	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	223.540.300,00	120.275.700,00	53,80	6 Lap	6 Lap	100
					4	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	478.369.000,00	361.996.000,00	75,67	5 Unit	5 Unit	100
					5	PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	125.353.900,00	66.381.500,00	52,96	1 Lap	1 Lap	100
					6	PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	101.146.000,00	67.169.800,00	66,41	1 Lap	1 Lap	100
					7	PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	1.589.610.988,00	1.011.285.272,00	63,62	122.000 Obyek Pajak	122.000 Obyek Pajak	100
					8	PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	586.771.400,00	567.096.500,00		11 Dok	11 Dok	100
					9	PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	215.585.100,00	213.068.050,00	98,83	1 Layanan	1 Layanan	100
					10	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	52.074.600,00	33.774.600,00	64,86	1 dok	1 dok	100
					11	PENAGIHAN PAJAK DAERAH	895.378.913,00	740.775.260,00	82,73	1 dok	1 dok	100
					12	PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	145.476.300,00	108.516.300,00	74,59	1 dok	1 dok	100
					13	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	136.894.500,00	89.824.500,00	65,62	1 dok	1 dok	100

					14	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	333.650.400,00	326.150.400,00	97,75	1 Lap	1 Lap	100
					15	ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH	123.064.600,00	103.436.400,00	84,05	1 Lap	1 Lap	100
	KEPEGAWAIAN											
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
				I	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH							
				1	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN		802.890.500,00	677.412.212,00	84,37	100	100	100
					1	KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	481.756.400,00	394.102.883,00	81,81	1 dok	1 Dok	100
					2	KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	104.548.500,00	91.112.874,00	87,15	1 dok	1 Dok	100
					3	FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN	49.863.900,00	49.435.000,00	99,14	1 Lembaga	1 Lembaga	100
					4	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	49.244.700,00	48.432.500,00	98,35	1 dok	1 Dok	100
					5	PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	54.320.000,00	45.964.600,00	84,62	1 dok	1 Dok	100
					6	EVALUASI DATA, INFORMASI DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	63.157.000,00	48.364.355,00	76,58	1 dok	1 Dok	100
				2	MUTASI DAN PROMOSI ASN		987.141.600,00	504.621.483,00	51,12	100	100	100
					1	PENGELOLAAN MUTASI ASN	123.188.400,00	77.020.173,00	62,52	500	289	57,80
					2	PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	136.742.600,00	97.416.990,00	71,24	1.500	1.262	84,13
					3	PENGELOLAAN PROMOSI ASN	727.210.600,00	330.184.320,00	45,40	600	-	-
				3	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN		657.718.400,00	467.558.070,00	71,09			
					1	PENGELAAAN ADMINISTRASI DIKLAT DAN SERTIFIKASI ASN	97.153.100,00	73.731.000,00	75,89	1	1	100,00
					2	PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	560.565.300,00	393.827.070,00	70,26	5	5	100,00
					3	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	409.201.700,00	329.255.919,00	80,46	5.200	5.200	100,00
					4	EVALUASI HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	148.914.000,00	130.611.273,00	87,71	5.200	5.200	100,00
					5	PENGELOLAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI	69.409.300,00	58.686.616,00	84,55	300	241	80,33
					6	PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN	49.979.500,00	36.265.000,00	72,56	1	1	100,00
					7	PELAYANAN PROSES IZIN PERCERAIAN PEGAWAI	65.900.300,00	41.733.000,00	63,33	1	1	100,00
				4	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS		651.643.300,00	360.504.269,00	55,32	100	100	100
					1	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN,	651.643.300,00	360.504.269,00	55,32	15 Orang	15 Orang	100

						PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
					5	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	677.506.000,00	564.747.640,00	83,36	100	100	100
					1	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN FUNGSIONAL, KEPEMIMPINAN, DAN PRAJABATAN	677.506.000,00	564.747.640,00	83,36	1 Dok	1 Dok	100
	INSPEKTORAT											
		INSPEKTORAT KABUPATEN										
					I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
					1	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	4.003.941.000,00	1.311.937.000,00	32,77	25 %	25%	100
					1	PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	358.200.000,00	97.950.000,00	27,35	22 Lap	22 Lap	100
					2	PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1.411.920.000,00	315.933.000,00	22,38	31 Lap	31 Lap	100
					3	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	244.357.000,00	152.233.000,00	62,30	4 Dok	4 Dok	100
					2	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	621.440.000,00	210.164.050,00	33,82			
					1	PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	97.040.000,00	0,00	0,00	-	-	-
					2	PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	524.400.000,00	210.164.050,00	40,08	22 IAP	-	-
					II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
					1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	11.100.000,00	0,00	0,00	-	-	-
					1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN	11.100.000,00	0,00	0,00	-	-	-
						PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.372.016.000,00	662.817.000,00	48,31	25 %		
					1	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	393.013.000,00	50.578.500,00	12,87	32 opd	32 opd	100
					2	PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS	362.610.000,00	223.331.000,00	61,59	32 opd	32 opd	100
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						65.401.518.813,00	64.523.131.894,00	98,66	100	100	100
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					65.401.518.813,00	64.523.131.894,00	98,66	100	100	100
					I	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN ARAKTER KEBANGSAAN	2.967.681.300,00	2.773.329.245,00	93,45	100	100	100

					1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.967.681.300,00	2.773.329.245,00	93,45	100	100	100
					1	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	383.101.700,00	283.342.100,00	73,96	100 Orang	100 Orang	100
					2	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	449.807.000,00	393.791.400,00	87,55	100 Orang	100 Orang	100
					3	PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	250.000.000,00	248.554.145,00	99,42	1 Laporan	1 Laporan	100
					4	PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	1.884.772.600,00	1.847.641.600,00	98,03	30 Orang	30 Orang	100
				II	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		56.209.678.063,00	56.055.845.756,00	99,73	1 Keg 4 Sub Keg	1 Keg 4 Sub Keg	100
					1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	56.209.678.063,00	56.055.845.756,00	99,73	4 Sub Keg	4 Sub Keg	100
					1	PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	51.783.198.600,00	51.783.198.600,00	100,00	100 Orang	100 Orang	100
					2	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN	834.632.700,00	805.566.128,00	96,52	100 Orang	100 Orang	100

						UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH						
					3	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	3.591.846.763,00	3.467.081.028,00	96,53	1 Laporan	1 Laporan	100
				III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		909.618.400,00	895.652.400,00	98,46	1 Keg 3 Sub Keg	1 Keg 3 Sub Keg	100
					1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	909.618.400,00	895.652.400,00	98,46	3 sub keg	3 sub keg	100
					1	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	166.416.400,00	163.391.200,00	98,18	1 Dok	1 Dok	100
					2	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	100 Orang	100 Orang	100
					3	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH	143.202.000,00	132.261.200,00	92,36	1 Laporan	1 Laporan	100
				IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		2.583.238.100,00	2.412.682.771,00	93,40	1 Keg 3 Sub Keg	1 Keg 3 Sub Keg	100
					1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	2.583.238.100,00	2.412.682.771,00	93,40	3 sub keg	3 sub keg	100
					1	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	1.978.659.450,00	1.839.464.321,00	92,97	1 Dok	1 Dok	100

					2	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	222.760.350,00	197.632.550,00	88,72	100 Orang	100 Orang	100
					3	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	381.818.300,00	375.585.900,00	98,37	100 Orang	100 Orang	100
				V	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		2.731.302.950,00	2.385.621.722,00	87,34	1 Keg 4 Sub Keg	1 Keg 4 Sub Keg	100
				1	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		2.731.302.950,00	2.385.621.722,00	87,34	4 Sub Keg	4 Sub Keg	100
					1	PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	856.089.700,00	682.303.886,00	79,70	250 Orang	250 Orang	100
					2	PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	288.287.900,00	288.156.900,00	99,95	100 Orang	100 Orang	100
					3	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	719.343.400,00	604.386.560,00	84,02	1 Laporan	1 Laporan	100
					4	PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	867.581.950,00	810.774.376,00	93,45	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Tabel 3.1.3

Capaian Kinerja Program/Kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

NO	URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI	%	KELUARAN/HASIL		
							R	Rp		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5			8	9		10	11	12
7	URUSAN TENAGA KERJA									9 Kegiatan / 20 Sub Kegiatan	9 Kegiatan / 20 Sub Kegiatan	
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA										
				I	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI		2,704,284,000	2,621,720,630	96.95			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
					1	PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASSTER KOMPETENSI	2,150,313,100	2,077,136,530	96.60	174 orang	170 Orang	98
					2	PENGADAAN SARANA PELATIHAN KERJA KABUPATEN/KOTA	553,970,900	544,584,100	98.31	2 Workshop	2 Workshop	100
				II	KONSULTANSI PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN		81,274,000.00	66,619,475.0	81.97			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
					1	PELAKSANAAN KONSULTASI PRODUKTIVITAS KEPADA PERUSAHAAN KECIL	81,274,000.00	66,619,475.00	81.97	1 Dokumen	1 Dokumen	100
				III	PELAYANAN ANTARKERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA		41,383,350.00	31,023,350.00	74.97			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
					1.	PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	41,383,350.00	31,023,350.0	74.97	100 Orang	98 Orang	98
				IV	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA		369,427,000.00	270,924,800.	73.34			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
					1	PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	27,823,400.00	16,883,400.00	60.68	100 Orang	692 Orang	?
					2	PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	155,889,000.00	95,491,000.00	61.26	1 Dokumen	1 Dokumen	100
					3	JOB FAIR/BURSA KERJA	185,714,600.00	158,550,400.00	85.37	30 Orang	30 Orang	100

				V	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	297,583,700.00	292,140,542.00	98.17			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN	97,573,800.00	92,668,242.00	94.97	50 Perusahaan	50 Perusahaan	100
				2	PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJASAMA BAGI PERUSAHAAN	73,202,100.00	73,090,600.00	99.85	15 Perusahaan	15 Perusahaan	100
				3	PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	126,807,800.00	126,381,700.00	99.66	1 Laporan	1 Laporan	100
				VI	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,997,959,100.00	1,884,999,350.00	94.35			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1.	PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	47,338,000.00	45,768,000.00	96.68	10 Perkara	10 Perkara	100
				2.	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	49,858,500.00	48,441,300.00	97.16	50 Perkara	50 Perkara	100
				3.	PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REKAPITULASI KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PENGUSAHA, FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SERTA NON AFILIASI	51,807,400.00	51,801,950.00	99.99	15 Asosiasi & Serikat	15 Asosiasi & Serikat	100
				4.	PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA	22,064,300.00	22,024,400.00	99.82	5 Lembaga	8 Lembaga	

					5.	PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA	1,826,890,900.00	1,716,963,700.00	93.98	8.168 org	8.168 org	100
				VII	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		855,256,750.00	814,446,012.00	95.23			
					1	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	270,720,100.00	270,398,100.00	99.88	44 UNIT	44 UNIT	100
					2	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	584,536,650.00	544,047,912.00	93.07	2 BIMTEK, 1 PELATIHAN, 1 PELAKSANAAN EXPO MTQ PROVINSI, BAHAN BAHAN PROMOSI, CENDRA MATA/ SUVENIR EXPO MTQ PROVINSI, TERBINANYA CALON PELAKU IKM SEBANYAK 234, TERSOSIALISAS INYA PROGRAM KEGIATAN DINAS PERINAKER, DEKRANASDA, OVOP, SIKIM, OVOB DAN SIINAS IKM KE 109 DESA	2 BIMTEK, 1 PELATIHAN, 1 PELAKSANAAN EXPO MTQ PROVINSI, BAHAN BAHAN PROMOSI, CENDRA MATA/ SUVENIR EXPO MTQ PROVINSI, TERBINANYA CALON PELAKU IKM SEBANYAK 234, TERSOSIALISAS INYA PROGRAM KEGIATAN DINAS PERINAKER, DEKRANASDA, OVOP, SIKIM, OVOB DAN SIINAS IKM KE 109 DESA	
				VIII	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		76,286,000.00	59,312,500.00	77.75			

					1	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	76,286,000.00	59,312,500.00	77.75	60 Pelaku Usaha	57 Pelaku Usaha	95
				IX		PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	127,644,400.00	106,245,007.00	83.24			
					1	FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	55,482,400.00	46,847,400.00	84.44	1 Dokumen	1 Dokumen	100
					2	DISEMINASI, PUBLIKASI DATA INFORMASI DAN ANALISA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA MELALUI SIINAS	72,162,000.00	59,397,607.00	82.31	1 Kegiatan/ Bincang Industri	1 Kegiatan/ Bincang Industri	100
8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									12 Kegiatan/16 Sub Kegiatan	12 Kegiatan/16 Sub Kegiatan	
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
				I		PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN	44,798,100	43,006,050	96.00			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
					1	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG	44,798,100	43,006,050	96.00	36 org	36 org	100
				II		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	484,805,500	477,782,834	98.55			
					1	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	484,805,500	477,782,834	98.55	50 org	50 org	100
				III		PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	3,705,287,900	3,475,188,299	93.79			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
					1	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	3,385,588,000	3,157,646,099	93.27	21 org	21 org	100

					2	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	319,699,900	317,542,200	99.33	21 FAN	21 FAN	100
				IV	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		357,617,200	355,570,650	99.43			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
					1	PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	56,017,200	53,970,650	96.35	6 Desa	6 Desa	100
					2	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	301,600,000	301,600,000	100	40 org	40 org	100
				V	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		88,400,000	88,400,000	100			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
					1	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	88,400,000	88,400,000	100			100
				VI	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA		120,000,000	118,170,000	98.48			
					KEGIATAN MELIPUTI :							
					1	PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	120,000,000	118,170,000	98.48			100
				VII	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		70,000,000	69,695,640	99.57			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
					1	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	70,000,000	69,695,640	99.57			100

				VIII	PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA		153,292,700	143,259,120	93.45			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
					1	PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	153,292,700	143,259,120	93.45	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
				IX	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		37,896,000	37,694,000	99.47			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
					1	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	37,896,000	37,694,000	99.47	5 FAN	5 FAN	100
				X	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA		424,854,200	418,918,460	98.60			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
					1	PENYEDIAAN LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	189,987,100	188,006,500	98.96	21 FAN	21 FAN	100
					2	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	128,345,700	126,999,060	98.95	15 org dan FAN	15 org dan FAN	100
					3	PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	106,521,400	103,912,900	97.55	6 Desa	6 Desa	100
				XI	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA		130.000.000,00	129.078.000,00	99,29			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :							
					1	ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN /PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN KTA	130.000.000,00	129.078.000,00	99,29	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

				XII	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	482.447.400,00	469.547.354,00	97,33			
					SUB KEGIATAN MELIPUTI :						
				1	PENGEMBANGAN KIE (KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI) PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	482.447.400,00	469.547.354,00	97,33	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
9	KETAHANAN PANGAN								6 Kegiatan / 8 Sub Kegiatan	6 Kegiatan / 8 Sub Kegiatan	
		DINAS KETAHANAN PANGAN		I	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI	424.319.350,00	408.413.820,00	96,25			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
					PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA	424.319.350,00	408.413.820,00	96,25	1. 2 KWT Desa Mandiri Pangan; 2. 10 Lokus Stunting		
				II	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	501.700.600,00	479.883.480,00	95,65			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN DAN NERACA BAHAN MAKANAN	165.298.000,00	160.512.500,00	97,10	12 Laporan	12 Laporan	100
				2	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK STRATEGIS	336.402.600,00	319.370.980,00	94,94	12 Laporan	12 Laporan	100
				III	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	1.023.760.600,00	947.358.715,00	92,54			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
				1	PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	1.023.760.600,00	947.358.715,00	92,54	70.000 Kg (beras nulog)		
				IV	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	452.589.900,00	441.325.356,00	97,51			
					SUB.KEGIATAN MELIPUTI						

					1	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	452.589.900,00	441.325.356,00	97,51	92,44 (skor pola pangan harapan th 2024)		
					2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKA RAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	137.000.100,00	130.496.400,00	95,25	2 KWT Inflasi 1.Pengadaan benih sayuran dan perlengkapannya; 2.Pengadaan bibit kelor.		
					V	PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	119.972.300,00	117.573.480,00	98,00			
						SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
					1	PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	119.972.300,00	117.573.480,00	98,00	21 Kecamatan		
					VI	PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.540.400,00	132.535.900,00	100,00			
						SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
					1	SERTIFIKASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.540.400,00	132.535.900,00	100,00	8 sampel (uji laboratorium pangan segar)		
10	URUSAN PERTANAHAN									3 Kegiatan / 3	3 Kegiatan / 3	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			I	PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	327.938.500,00	0,00	0,00			
						SUB.KEGIATAN MELIPUTI						
					1	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	327.938.500,00	0,00	0,00	2 dokumrn	-	
					II	INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG	168.372.000,00	163.211.500,00	96,94			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
					1	PELAKSANAAN INVENTARISASI TANAH KOSONG	168.372.000,00	163.211.500,00	96,94	2 Laporan	2 Laporan	

					III	PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH	75.120.350,00	65.850.750,00	87,66			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI						
					1	PENGENDALIAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA	75.120.350,00	65.850.750,00	87,66	² Dokumen	¹ Dokumen	
11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									9 Kegiatan / 12 Sub Kegiatan	9 Kegiatan / 12 Sub Kegiatan	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP			I	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	304.687.500,00	303.548.300,00	99,63			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
					1	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPPLH KABUPATEN/KOTA	304.687.500,00	303.548.300,00	99,63	1 Dokumen	1 Dokumen	100
					II	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	946.634.350,00	918.114.636,00	96,99			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
					1	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	395.088.400,00	377.496.400,00	95,55	17 titik	17 titik	97,26
					2	PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	551.545.950,00	540.618.236,00	98,02			49
					III	PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	1.293.281.200,00	1.270.621.200,00	98,25			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
					1	PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	195.150.000,00	195.080.000,00	99,96	1 Tahun	1 Tahun	98,84
					2	PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.098.131.200,00	1.075.541.200,00	97,94	1 Tahun	1 Tahun	48,97
					IV	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	2.657.188.900,00	2.653.328.700,00	99,85			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
					1	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	2.657.188.900,00	2.653.328.700,00	99,85	1 Tahun	1 Tahun	99,11
					V	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN /ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.194.900,00	157.058.600,00	99,91			

						SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
					1	PENGAWASAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN HIDUP, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.194.900,00	157.058.600,00	99,91	50 Perusahaan	50 Perusahaan	97,62
					VI	PENINGKATAN KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	499.388.000,00	499.305.000,00	99,98			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
					1	PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENDAMPINGAN, DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MHA, KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH	499.388.000,00	499.305.000,00	99,98	100 Org	100 Org	82,13
					VII	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.001.400,00	52.001.400,00	100,00			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
					1	PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	52.001.400,00	52.001.400,00	100,00	1 Tahun	1 Tahun	100
					VII I	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	71.267.300,00	71.187.300,00	99,89			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
					1	PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PPLH KABUPATEN/KOTA	71.267.300,00	71.187.300,00	99,89	1 Tahun	1 Tahun	96,16
					IX	PENGELOLAAN SAMPAH	3.267.855.800,00	3.112.558.400,00	95,25			
						SUB KEGIATAN MELIPUTI:						
					1	PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	2.255.408.000,00	2.150.084.600,00	95,33	1 Tahun	1 Tahun	96,99
					2	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/ TPST/ SPA KABUPATEN/KOTA	1.012.447.800,00	962.473.800,00	95,06	1 Tahun	1 Tahun	97,53

12	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							3 Kegiatan /3Sub Kegiatan	3 Kegiatan /3Sub Kegiatan	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	I	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK		75,000,000.00	74,850,000.00	99.80		
				SUB KEGIATAN :						
				1	PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	75,000,000.00	74,850,000.00	99.80	1 Tahun	1 Tahun 100
			II	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL		7,500,000.00	7,200,000.00	96.00		
				1	PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	7,500,000.00	7,200,00	96.00	1 Tahun	1 Tahun 100
			III	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN		21,730,000.00	21,130,000.00	97.24		
				SUB KEGIATAN :						
				1	PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN	21,730,000.00	21,130,000.00	97.24	1 Tahun	1 Tahun 100
13	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								4 Kegiatan / 16 Sub Kegiatan	4 Kegiatan / 16 Sub Kegiatan
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	I	PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA		328.629.100,00	319.441.292,50	97,20		
				SUB KEGIATAN :						
				1	PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA	328.629.100,00	319.441.292,50	97,20	12 Desa	12 Desa 100
			II	FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA		85.883.700,00	55.842.996,00	65,02		
				SUB KEGIATAN :						
				1	FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	85.883.700,00	55.842.996,00	65,02	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN 76,50
			III	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		4.612.338.500,00	4.523.287.921,50	98,07		
				SUB KEGIATAN :						
				1	FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	118.812.800,00	118.313.800,00	99,58	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN 100
				2	FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	50.193.800,00	48.058.973,00	95,75	242 DOKUMEN	242 DOKUMEN 100
				3	FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	3.873.115.000,00	3.804.333.317,00	98,22		100
				4	PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	207.330.100,00	206.449.300,00	99,58	120 ORG	120 ORG 100
				5	PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA	155.604.000,00	147.485.534,00	94,78	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN 100

					6	FASILITASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA	35.501.000,00	35.372.000,00	99,64	12 LAPORAN	12 LAPORAN	100
					7	FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA	29.805.500,00	28.745.000,00	96,44	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	100
					8	FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA	95.458.500,00	90.889.500,00	95,21			
					9	FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN	46.517.800,00	43.640.497,50	93,81	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	100
				IV	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		645.135.200,00	602.779.529,00	93,43			
					SUB KEGIATAN :							
					1	IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI MASYARAKAT HUKUM ADAT	15.548.800,00	11.373.000,00	73,14	1 dokumen	1 dokumen	100
					2	FASILITASI PENATAAN, PEMBERDAYAAN DAN PENDAYAGUNAAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	339.437.600,00	325.00.200,00	95,75	1 dokumen	1 dokumen	100
					3	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	104.062.600,00	88.443.500,00	84,99	1 Lembaga	1 Lembaga	100
					4	FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA	130.064.900,00	123.002.682,00	94,57	1 Dokumen	1 Dokumen	100
					5	FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	56.021.300,00	54.960.147,00	98,11	1 Laporan	1 Laporan	100
14	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									7 Kegiatan/23 Sub Kegiatan	7 Kegiatan/23 Sub Kegiatan	

		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		I	PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		85.712.200,00	82.168.700,00	95,87			
					SUB KEGIATAN :							
					1	PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN DATA KEPENDUDUKAN	85.712.200,00	82.168.700,00	95,87	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100
				II	PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN		1.546.246.000,00	1.523.131.185,00	98,51			
					SUB KEGIATAN :							
					1	ADVOKASI PROGRAM KKBPK KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	47.518.900,00	45.939.560,00	96,68	21 KECAMATAN	21 KECAMATAN	100
					2	PROMOSI DAN KIE PROGRAM KKBPK MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	137.201.300,00	124.939.419,00	91,06	21 KECAMATAN	21 KECAMATAN	100
					3	PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN KKBPK	1.353.600.000,00	1.344.380.431,00	99,32	21 KECAMATAN	21 KECAMATAN	100
					4	PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK	7.925.800,00	7.871.775,00	99,32	21 KECAMATAN	21 KECAMATAN	100
				III	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)		1.261.775.400,00	1.257.042.500,00	99,62			
					SUB KEGIATAN :							
					1	PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNG OPERASIONAL PKB/PLKB	261.775.400,00	258.317.500,00	98,68	21 BALAI	21 BALAI	100
					2	PEMBINAAN IMP DAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI LINI LAPANGAN OLEH PKB/PLKB	1.000.000.000,00	998.725.000,00	99,87	250 DESA	250 DESA	100
				IV	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA		1.844.630.900,00	1.644.628.123,00	89,16			
					SUB KEGIATAN :							
					1	PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	202.800.000,00	177.104.281,00	87,33	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100
					2	PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	92.011.600,00	84.088.600,00	91,39	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100

					3	PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB	180.813.800,00	178.225.625,00	98,57	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100
					4	PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI	38.557.200,00	36.959.500,00	95,86	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100
					5	DUKUNGAN OPERASIONAL PELAYANAN KB BERGERAK	1.299.529.000,00	1.139.516.000,00	87,69	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100
					6	PROMOSI DAN KONSELING KB PASCA PERSALINAN DAN PASCA KEGUGURAN	30.919.300,00	28.734.117,00	92,93	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100
				V	Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan ber-KB		495.139.300,00	494.596.876,00	99,89			
					Sub Kegiatan :							
					1	PENGUATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN MITRA KERJA LAINNYA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	31.889.300,00	31.346.876,00	98,30	21 KECAMATAN	21 KECAMATAN	100
					2	PEMBINAAN TERPADU KAMPUNG KB	463.250.000,00	463.250.000,00	100,00	21 KECAMATAN	21 KECAMATAN	100
				VI	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA		279.801.400,00	276.435.900,00	98,80			
					SUB KEGIATAN :							
					1	ORIENTASI/PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	71.117.800,00	69.807.800,00	98,16	21 KECAMATAN	21 KECAMATAN	100
					2	PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA)	208.683.600,00	206.628.100,00	99,02	21 Kecamatan	21 Kecamatan	100
				VII	PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA		4.449.394.900,00	4.177.121.130,00	93,88			

					SUB KEGIATAN :							
					1	PENGUATAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN MITRA KERJA LAINNYA DALAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA/UPPKS)	3.900.900.000,00	3.646.159.500,00	93,47	21 KECAMATAN	21 KECAMATAN	98
					2	PROMOSI DAN SOSIALISASI PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BAGI MITRA KERJA	548.494.900,00	530.961.630,00	96,80	21 KECAMATAN	21 KECAMATAN	100
15	URUSAN PERHUBUNGAN									7 Kegiatan / 11 Sub Kegiatan	7 Kegiatan / 11 Sub Kegiatan	
		DINAS PERHUBUNGAN		I	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR		57.860.000,00	57.820.000,00	99,93			
					SUB KEGIATAN :							
					1	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	57.860.000,00	57.820.000,00	99,93			100
				II	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR		415.194.600,00	378.324.300,00	91,12			
					SUB KEGIATAN :							
					1	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	235.199.600,00	206.001.800,00	87,59			
					2	PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	96.360.000,00	95.850.000,00	99,47			
					3	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	83.635.000,00	76.472.500,00	91,44			
				III	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU		1.131.710.825,00	1.099.187.600,00	97,13			
					SUB KEGIATAN :							
					1	FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN/KOTA	370.099.600,00	367.209.600,00	99,22			
					2	PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	761.611.225,00	731.978.000,00	96,11			

				IV	PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS	77.401.000,00	68.950.490,00	89,08			
					SUB KEGIATAN :						
				1	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENILAIAN HASIL ANDALALIN	68.455.000,00	66.850.490,00	97,66			
				2	PENGAWASAN PELAKSANAAN REKOMENDASI ANDALALIN	8.946.000,00	2.100.000,00	23,47			
				V	AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	30.474.800,00	30.384.800,00	99,70			
					SUB KEGIATAN :						
				1	PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN TERMINAL	30.474.800,00	30.384.800,00	99,70			
				VI	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	717.976.609,99	620.603.267,00	86,44			
					SUB KEGIATAN :						
				1	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	717.976.609,99	620.603.267,00	86,44			
				VII	PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	1.746.050.000,00	1.250.805.219,00	71,64			
					SUB KEGIATAN :						
				1	PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	1.746.050.000	1.250.805.219	71,64			
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			I	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,764,191,250	7,712,666,062	99.34	12 Program , Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan	12 Program , Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan	
		DINASKOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN			SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	345,090,000	341,242,000	98.88	100	100	1.64
				2	PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	5,523,684,000	5,508,674,23	99.73	100	100	26.19
				3	PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	547,046,250	529,973,500	96.88	100	100	2.59
				4	MANAJEMEN KOMUNIKASI KRISIS	243,016,000	242,279,12	99.70	100	100	1.15
				5	PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA	10,680,000	7,380,000	69.10	100	100	0.05

					6	PENYEDIAAN/PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,094,675,000	1,083,117,200	98.94	100	100	5.19
				II	PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,185,007,560	3,123,167,700	98.06			
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:							
					1	PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	194,870,000	192,890,000	98.98	100	100	0.92
					2	PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	2,990,137,560	2,930,277,700	98.00	100	100	14.18
				III	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		485,234,950	484,404,380	99.83			
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:							
					1	PENGELOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH	154,720,000	154,300,500	99.73	100	100	0.73
					2	KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK	42,249,950	42,221,380.00	99.93	100	100	0.20
					3	PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	288,265,000	287,882,500	99.87	100	100	1.37
17	URUSAN PERDAGANGAN						2,310,568,177	2,229,380,000	96.48			
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL			IX	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA		160,311,500.00	159,431,500.00	99.45	252 Koperasi	21 Koperasi	8.33%
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:							

			1	PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	160,311,500.00	159,431,500.00	99.45	252 Koperasi	21 Koperasi	8.33%
			X	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	72,578,300.00	69,731,300.00	96.08	50 Koperasi	21 Koperasi	42%
				SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:						
			1	PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	35,087,300.00	33,040,300.00	94.17	50 Koperasi	21 Koperasi	42%
				PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	37,491,000.00	36,691,000.00	97.87	50 Koperasi	19 Koperasi	38%
			XI	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	1,697,739,075	1,622,173,187	95.55			
				KEGIATANNYA MELIPUTI:						
			1	FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO	289,862,300.00	268,511,900.00	92.63	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	100%
			2	PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO	705,245,425.00	671,673,857.00	95.24	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	100%
			3	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	277,499,400.00	261,377,480.00	94.19	15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	100%
			4	PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN USAHA MIKRO SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM USAHA MIKRO DAN KEWIRAUSAHAAN	425,131,950.00	420,609,950.00	98.94	36 Kop	36 Kop	100%
			XII	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	279,791,300.00	270,938,000.00	96.84			
				SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:						
			1	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO	279,791,300.00	270,938,000.00	96.84	20 UMK	20 UMK	100%
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		IV	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/ KOTA	168,194,100.00	137,022,068.00	81.47			
				SUBKEGIATANNYAMELIPUTI:						

		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN ERPADU SATU			1	PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA KABUPATEN/KOTA	168,194,100.00	137,022,068.00	81.47	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
				V	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		41,820,600.00	35,428,000.00	84.71			
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:							
					1	PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	41,820,600.00	35,428,000.00	84.71	1 Event	1 Event	100%
				VI	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		775,980,100.00	640,248,290.00	82.51			
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:							
					1	PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	333,423,100.00	245,804,264.00	73.72	1.500 Perizinan	16.966 Perizinan	113.11%
					2	PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	123,837,700.00	113,785,076.00	91.88	-20 Pengaduan -30 Layanan Informasi	-9 Pengaduan -14 Layanan Informasi	91.67%
					3	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH	318,719,300.00	280,658,950.00	88.06	2.400 Izin	2.472 Izin	103.00%
				VII	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		614,215,000.00	483,190,800.00	78.67			
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:							
					1	PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM	92,132,000.00	38,840,000.00	42.16	14 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	28.57%
					2	BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	337,820,000.00	337,524,800.00	99.91	384 Pelaku Usaha	384 Pelaku Usaha	100%
					3	PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	184,263,000.00	106,826,000.00	57.97	24 Pelaku Usaha	98 Pelaku Usaha	408.33%
				VIII	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA		498,319,500.00	481,409,484.00	96.61			
					SUBKEGIATANNYA MELIPUTI:							

				1	PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	498,319,500.00	481,409,484.00	96.61	352 Responden	352 Responden	100%
19	PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					863.811.315.141	841.682.432.951	97,44	3 Proghram, 7 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan	3 Proghram, 7 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan	98
		DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		196,818,041,379.	187,406,547,128	95.22	4 KEGIATAN, 49 SUB KEGIATAN	4 KEGIATAN, 49 SUB KEGIATAN	
			1	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR		196,818,041,379	187,406,547,128	95.22	1 KEGIATAN 17 SUB KEGIATAN	1 KEGIATAN 17 SUB KEGIATAN	
				SUB KEGIATAN :							
			1	PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU		9,988,862,400.0	9,505,770,165.	95.16	8 RUANG	8 RUANG	100
			2	BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN		398,575,400.00	356,948,300.00	89.56	4 RUANG	4 RUANG	100
			3	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA		404,259,100.00	384,728,121.00	95.17	9 RUANG	9 RUANG	100
			4	PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH		2,513,280,000.00	2,407,737,480.00	95.80	2 RUANG	2 RUANG	100
			5	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS		22,321,678,980.00	20,377,914,600.00	91.29	200 SEKOLAH	200 SEKOLAH	100
			6	REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN		256,390,000.00	245,561,360.00	95.78	119 RUANG	119 RUANG	100
			7	PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK		3,349,770,800.00	2,906,118,184.00	86.76	2 RUANG	2 RUANG	100
			8	PENGADAAN MEDEL SEKOLAH		8,470,511,000.0	5,887,656,600.0	69.51	79 RUANG	79 RUANG	100
			9	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA		3,143,132,800.0	3,118,282,460.0	99.21	27 PAKET	27 PAKET	100
			10	FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		567,482,700.00	563,212,200.00	99.25	17511 SISWA	17511 SISWA	100
			11	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH		1,528,055,300.00	431.563.000,00	99,92	550 SEKOLAH	550 SEKOLAH	100
			12	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA		1,364,715,900.00	1,364,715,900.00	89.31	252 SISWA	252 SISWA	100

					13	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGIA SATUAN PENDIDIK SEKOLAH DASAR	22,482,643,656.00	20,241,253,902.00	90.03	12 Bulan	12 Bulan	100
					14	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	2,996,779,250.00	2,974,447,410.00	99.25	250 Sekolah	250 Sekolah	100
						REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS	17,495,834,100.0	16,629,643,474.0	95.05			
					15	PENGLOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	93,265,586,193.00	93,226,484,526.00	99.96	12 sekolah	12 sekolah	100
					16	PENINGKATAN KAPASITAS PENGLOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	499,999,500.00	495,131,850.00	99.03	12 sekolah	12 sekolah	100
					17	PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR	4,341,120,000.	4,170,305,860.0	96.07	9 Ruang	9 Ruang	100
				2		PENGLOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	100,404,181,426	94,029,443,334.00	93.65	1 Kegiatan 16 Sub Kegiatan	1 Kegiatan 16 Sub Kegiatan	
						SUB KEGIATAN :						
					1	PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU	5,164,166,000.00	4,850,954,740.00	93.93	10 Ruang	10 Ruang	100
					2	PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	11,301,270,240.00	8,882,106,620.00	51.29	53 sekolah	53 sekolah	100
					3	REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	9,598,305,800.00	3.583.169.750,00	98,64	8 ruang	8 ruang	100
					4	PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	5,037,689,000.00	2,583,718,760.00	94,88	22 ruang	22 ruang	100
					5	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	3,082,184,400.00	2,461,356,407.00	79.86	4 paket	4 paket	100
					6	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	194,661,100.00	185,303,931.00	95.19	14713 siswa	14713 siswa	100
					7	FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1,109,528,400.00	912,922,041.00	82.28	145 Lembaga	145 Lem	100
					8	PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	703,414,750.00	598,706,005.00	85.11	210 siswa	210 siswa	100
					9	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	23,868,356,486.00	22,539,575,756.00	94.43	12 Bulan	12 Bulan	100
					10	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	2,004,305,600.00	1,790,071,514.00	89.31	60 peserta	60 peserta	80
					11	PENGLOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH	38,265,300,000.00	38,252,360,860.00	99.97	12 Bulan	12 Bulan	100

					12	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	74,999,650.00	74,282,700.00	99.04	12 Bulan	12 Bulan	100
				3	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)		23,184,977,920	21,986,849,960	94.83	1 Kegiatan 10 Sub Kegiatan	1 Kegiatan 10 Sub Kegiatan	
					SUB KEGIATAN :							
					1	PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	2,474,762,000.00	2,211,069,060.00	89.34	3 Lokal	3 Lokal	100
					2	REHABILITASI SEDANG/BERAT PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	3,056,716,420.00	2,788,139,950.00	91.21	14 Ruang	14 Ruang	100
					3	PENGADAAN MEDEL PAUD	196,110,00	176,005,00	89.75	1 Lokal	1 Lokal	100
					4	PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA	2,795,000,000.	2,789,553,000.	99.81	7 Paket	7 Paket	100
					5	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD	973,122,800.0	508,690,800.0	52.27	12 Bulan	12 Bulan	100
					6	FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	760,517,500.00	692,777,850.00	91.09	525 Orang	525 Orang	100
					7	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1,695,949,500.	1,695,939,000.	100.00	12 Bulan	12 Bulan	100
					8	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	155,000,200.00	137,118,400.00	88.46	11 Lembaga	11 Lembaga	100
					9	PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	11,002,800,000.	10,915,131,000.	99.20	12 Bulan	12 Bulan	100
					10	PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	74,999,500.00	72,425,900.00	96.57	12 Bulan	12 Bulan	79
			4		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN		4,668,062,800	4,411,325,174	94.50	1 Kegiatan 6 Sub Kegiatan	1 Kegiatan 6 Sub Kegiatan	
					SUB KEGIATAN :							
					1	PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	251,140,800	138.448.589	84.49	2500 Peserta	2500 Peserta	100
					2	FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	149,979,600.00	149,343,220.00	99.58	240 Lembaga	240 Lembaga	100
					3	PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	149,942,000.00	145,570,900.00	97.08	240 Orang	240 Orang	100
					4	PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	94,942,100.00	93,973,500.00	98.98	80 Lembaga	80 Lembaga	100
					5	PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	3,708,300,000.0	3,597,800,000.0	97.02	12 Bulan	12 Bulan	100

					6	PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK	313,758,300.00	264,240,950.00	84.22	17 Satuan Pendidikan	17 Satuan Pendidikan	100
				II	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		559.214.850	549.316.050	98,23	2 Kegiatan 3 Sub Kegiatan	2 Kegiatan 3 Sub Kegiatan	
				1	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR		604,671,100.00	603,558,200.00	99.82	2 Sub Kegiatan	2Sub Kegiatan	
					SUB KEGIATAN :							
					1	PENYUSUNAN SILABUS MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	238,298,000.00	238,234,200.00	99.97	4 Dokumen	4 Dokumen	100
					2	PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	366,373,100.00	365,324,000.00	99.71	100 Orang	100 Orang	100
				2	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL		74,825,700.00	71,560,100.00	95.64	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	
					SUB KEGIATAN :							
					1	PENYUSUNAN SILABUS MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL	74,825,700.00	71,560,100.00	95.64	95 GURU	95 GURU	100
				III	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		109.869.800,00	62.374.400,00	56,77	1 KEGIATAN 2 SUB	1 KEGIATAN 2 SUB KEGIATAN	
				1	PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN		150,999,000.00	73,767,100.00	48.85	2 SUB KEGIATAN	1 SUB KEGIATAN	
					SUB KEGIATAN :							
					1	PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	75,999,100.00	73,767,100.00	97.06	2500 GURU	2500 GURU	100
					2	PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	74,999,900.00	0.00	0,00	21 LAPORAN	0	0
20	STATISTIK						126.397.000,00	125.174.300,00	99,03	1 Program, 1 Kegiatan dfan 1 Sub Kegiatan	1 Program, 1 Kegiatan dfan 1 Sub Kegiatan	100%
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				I	PROGRAM STATISTIK	126.397.000,00	125.174.300,0	99,03	ADA	AD A	100%
						KEGITAN :						

					PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	58,740,000.00	53,895,000.00	91.75	ADA	AD A	100%
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL	58,740,000.00	53,895,000.00	99,03	ADA	ADA	100%
21	PERSANDIAN				PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	23,604,800.00	19,814,800.00	83.94	1 PROGRAM 1 KEGIATAN DAN 2	1 PROGRAM 1 KEGIATAN DAN	100%
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN				KEGIATAN :						
					PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	237.724.700,00	218.123.100,00		12 BULAN	12 BULAN	100%
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	10,050,000.00	9,860,000.00	98.11	12 BULAN	12 BULAN	100%
				2	PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	13,554,800.00	9,954,800.00	73.44	12 BULAN	12 BULAN	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				PELESTARIAN Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	58.087.700	49.378.600	85,01	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1.	PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN	58.087.700	4 9.378.600	85,01	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
					PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	222.000.400	117.385.400	52,88	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN LEMBAGA ADAT	222.000.400	117.385.400	52,88	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
					PEMBINAAN Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.068.894.800	1.017.214.700	95,17	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1.	PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA Kesenian Tradisional	1.068.894.800	1.017.214.700	95,17	28 event	27 event	99%

23		DINAS PEPUSTAKAAN DAN				1.681.398.800	1.612.475.202	95,90			
	PERPUSTAKAAN			i	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.565.630.950	1.511.146.252	96,52			
					PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	417,593,100.00	406,197,864.00	99,90			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK	165,936,400.00	156,659,252.00	94.41	3 LAYANAN	3 LAYANAN	100,00
				2	PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	106,238,500.00	106,038,500.00	99.81	5000 EKSEMPLAR	5000 EKSEMPLAR	100,00
				3	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	145,418,200.00	143,500,112.00	98.68	6000 EKSEMPLAR	6000 EKSEMPLAR	100,00
					PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	709,104,300.00	677,998,102.00	94.62			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN	199,742,100.00	188,996,600.00	94,64	100 LOKUS	100 LOKUS	100,00
					SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN						
				2	PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	224,766,700.00	205,984,002.00	91.64	3 ORANG	3 ORANG	100,00
				3	PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	183,594,300.00	183,594,300.00	100.00	21 PERPUSTAKAAN	21 PERPUSTAKAAN	100,00
				4	PEMILIHAN DUTA BACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	101,001,200.00	99,423,200.00	98.44			
				II	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	115.767.850	101.328.950	87,53			
					PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	94,466,700.00	89,166,228.00	94.39			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN, DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO	94,466,700.00	89,166,228.00	94.39	115 ORANG	115 ORANG	100,00
	KEARSIPAN					450.974.990	440.495.997	97,68			
				I	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	153.264.090	151.437.470	98,81	98,81	100	98.81
					PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	60,077,050.00	54,732,090.00	91.10			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						

				1	PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS	60,077,050.00	54,732,090.00	91.10	180 berkas	180 berkas	100,00
					PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	150,442,300.00	149,185,100.00	100,00			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS	150,442,300.00	149,185,100.00	99.16	200 arsip	200 arsip	100,00
				II	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	297.710.900	289.058.527	97,09			
					PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	52,013,200.00	51,755,040.00	99.50			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	PELAKSANAAN PEMUSNAHAN ARSIP YANG	52,013,200.00	51,755,040.00	99.50	50 berkas	50 berkas	100,00
					PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA	50,034,200.00	49,886,040.00	99.70			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	PEMULIHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP AKIBAT BENCANA	50,034,200.00	49,886,040.00	99.70	70 arsip	70 arsip	100,00
					PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG	40,216,600.00	36,584,600.00	90.97 5			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	PENDATAAN, PENYUSUNAN DAFTAR DAN PENILAIAN SERTA PENYERAHAN ATAU PEMUSNAHAN ARSIP BAGI PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	40,216,600.00	36,584,600.00	90.97	1000 arsip	1000 arsip	100,00
					PENCARIAN ARSIP STATIS KABUPATEN/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG	50,339,400.00	49,649,840.00	98.63			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	PENETAPAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR PENCARIAN ARSIP (DPA)	50,339,400.00	49,649,840.00	98.63	300 arsip	300 arsip	100,00

Tabel 3.1.3

Capaian Kinerja Program/Kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

NO	URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%	KELUARAN/ HASIL		
						Rp.	Rp		TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5		8	9		10	11	12
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN								8 KEGIATAN 15 SUB KEGIATAN	8 KEGIATAN 15 SUB KEGIATAN	
		DINAS PERIKANAN									
					PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.280.573.000	4.189.541.880	97,87			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
					1. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN	50.438.200	45.228.200	89,67	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	100,00
					2. PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	4.230.134.800	4.144.313.680	97,97	450 UNIT	450 UNIT	100,00
					PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.644.800	51.474.800	71,85			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
					1 PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL	71.644.800	51.474.800	71,85	25 KELOMPOK	25 KELOMPOK	100,00
					PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL						
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
					1 PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	4.518.189.520	4.416.471.780	97,75	7 KELOMPOK	7 KELOMPOK	100,00
					2 PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	94.564.600	88.643.000	93,74	5 KELOMPOK	5 KELOMPOK	100,00
					3. PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	168.958.000,00	156.909.867,00	92,87	8 KELOMPOK	8 KELOMPOK	100,00
					PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	3.259.920.480	3.117.640.689	95,64			

					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.999.780	48.052.280	96,10	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	100,00
				2	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.689.873.200	2.570.091.909	95,55	50 UNIT	50 UNIT	100,00
				3.	PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	400.047.500	381.586.500	95,39	100 UNIT	100 UNIT	100,00
				4.	PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.000.000	117.910.000	98,26	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
					PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA	481.240.000	423.632.100	88,03			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1.	PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA	481.240.000	423.632.100	88,03	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00
					PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL	25.002.400	21.936.400	87,74			
				1.	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.002.400	21.936.400	87,74	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
					PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	31.798.800,00	31.732.100,00	99,79			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	31.798.800,00	31.732.100,00	99,79	6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	100,00
					PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	428.218.300	309.240.614	72,22			

					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1	PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	144.956.900	129.774.900	89,53	8000 Ton	8000 Ton	100,00
				2.	PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	283.261.400	179.465.714	63,36	25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	100,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.087.700	49.378.600	85,01			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1.	PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERPRESTASI ATAU BERKONTRIBUSI LUAR BIASA SESUAI DENGAN PRESTASI DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN	58.087.700	9.378.600	85,01	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
					PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.000.400	117.385.400	52,88			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN LEMBAGA ADAT	222.000.400	117.385.400	52,88	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
					PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.068.894.800	1.017.214.700	95,17			
					SUB KEGIATANNYA MELIPUTI:						
				1.	PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL	1.068.894.800	1.017.214.700	95,17	28 event	27 event	99%
					PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	100.000.000	68.892.400	68,89			
				1.	PENDAFTARAN OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA	100.000.000	68.892.400	68,89	12 Objek	12 Objek	100%
					PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	3.283.767.800	3.090.831.654	94,12			
				1.	PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	3.283.767.800	3.090.831.654	94,12	6 unit	6 unit	100%
					PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	197.662.000	197.659.000	100,00			
				1.	PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	197.662.000	197.659.000	100,00	1 Pelatihan	1 Pelatihan	100%

					PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	1.561.862.400	1.543.149.109	98,80			
				1.	PENYEDIAAN DATA DAN PENYEBARAN INFORMASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA, BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	43.250.000	43.250.000	100,00	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100%
				2.	PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI	1.518.612.400	1.499.899.109	98,77	3.700.000 ORANG	2.869.651 ORANG	83%
					PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	923.092.950	917.035.452	99,34			
				1.	FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF	718.093.300	712.773.901	99,26	21 KECAMATAN	21 KECAMATAN	100%
				2.	PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PARIWISATA BERBASIS SKKNI	204.999.650	204.261.551	99,64	2 ORANG	2 ORANG	100%
					PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF	549.999.350	549.283.149	99,87			
				1.	PELATIHAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENDAMPINGAN EKONOMI KREATIF	549.999.350	549.283.149	99,87	1 KELOMPOK	1 KELOMPOK	100%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								6 KEGIATAN 10 SUB KEGIATAN	6 KEGIATAN 10 SUB KEGIATAN	
		DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA									
					PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	1.018.708.300	1.000.258.940	98,19			
					SUB KEGIATAN :						
				1.	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	278.847.900	265.445.840	95,19	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100 %
				2.	PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	739.860.400	734.813.100	99,32			
					PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.034.526.982	1.014.986.100	98,11			
					PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN						
				1.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA	243.968.482	240.344.000	98,51	1 KEGIATAN / LAPORAN	1 KEGIATAN / LAPORAN	100 %
				2.	PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B DI KABUPATEN/KOTA	790.558.500	774.642.100	97,99	650 HA	650 HA	100 %

					PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	3.120.873.474	3.102.296.074	99,40			
					SUB KEGIATAN :						
				1.	PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI	1.008.348.474	994.980.374	98,67	21 KECAMATAN	21 KECAMATAN	
				2.	PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	2.112.525.000	2.107.315.700	99,75	KECAMATAN	KECAMATAN	
					PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	300.486.600	282.919.100	94,15			
					SUB KEGIATAN :						
				1.	PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	300.486.600	282.919.100	94,15	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100 %
					PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.771.900	134.033.000	85,50			
					SUB KEGIATAN :						
				1.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN IZIN USAHA PERTANIAN	156.771.900	134.033.000	85,50	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100 %
					PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	1.733.056.800	1.645.155.800	94,93			
					SUB KEGIATAN :						
				1.	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	1.322.797.300	1.244.646.800	94,09	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100 %
				2.	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	410.259.500	400.509.000	97,62	1 KEGIATAN	1 KEGIATAN	100 %
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								11 KEGIATAN 15 SUB KEGIATAN	11 KEGIATAN 15 SUB KEGIATAN	
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN	83.731.300	83.192.947	99,36			
					SUB KEGIATAN :						
				1.	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PEROLEHAN PERIZINAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	83.731.300	83.192.947	99,36	164 PELAKU USAHA	146 PELAKU USAHA	89,02

					PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG	7.336.800	7.336.800	100			
					SUB KEGIATAN :						
				1.	FASILITASI PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG	7.336.800	7.336.800	100,00	21 KECAMATAN	6 KECAMATAN	28,57
					PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	56.654.300	56.094.450	99,01			
					SUB KEGIATAN :						
				1.	PEMERIKSAAN PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA	56.654.300	56.094.450	99,01	5 Pasar	5 Pasar	100,00
					PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	349.963.282	348.773.082	99,66			
					SUB KEGIATAN :						
				1.	PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	20.087.600	20.017.400	99,65	4 Pasar	4 Pasar	100,00
				2.	PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	329.875.682	328.755.682	99,66	4 Pasar Pemda	4 Pasar Pemda	100,00
					MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100.320.500	100.247.75	99,93			
					SUB KEGIATAN :						
				1.	PENGENDALIAN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT	100.320.500	100.247.750	99,93	21 Kecamatan	13 Kecamatan	61,90
					PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	434.788.400	392.044.525	90,17			
					SUB KEGIATAN :						
				1.	PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	87.577.500	85.998.825	98,20	19 Kecamatan	13 Kecamatan	68,42
				2.	PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	347.210.900	306.045.700	88,14	63 Kelurahan/Desa	55 Kelurahan/Desa	87,3

					PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.043.900	19.603.100	97,80			
				1.	PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI	20.043.900	19.603.100	97,80	6 DISTRIBUTOR	6 DISTRIBUTOR	42,86
					PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	217.550.650	210.542.670	96,78			
				1.	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	152.703.800	145.880.900	95,53	700 UTTP	1662 UTTP	237,43
				2.	PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	64.846.850	64.661.770	99,71			
					PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	68.919.200	58.269.200	84,55			
				1.	PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA	68.919.200	58.269.200	84,55	2 EVENT	2 EVENT	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	2.704.284.000	2.621.720.630	96,95			
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		1.	PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASSTER KOMPETENSI	2.150.313.100	2.077.136.530	96,60	174 ORANG	170 ORANG	100
				2.	PENGADAAN SARANA PELATIHAN KERJA KABUPATEN/KOTA	553.970.900	544.584.100	98,31	2 WORKSHOP	2 WORKSHOP	100
					KONSULTANSI PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN KECIL	81.274.000	66.619.475	81,97			
				1.	PELAKSANAAN KONSULTASI PRODUKTIVITAS KEPADA PERUSAHAAN KECIL	81.274.000	66.619.475	81,97	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	100
					PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.383.350	31.023.350	74,97			
				1.	PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	41.383.350	31.023.350	74,97	100 ORANG	98 ORANG	98
					PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	369.427.000	270.924.800	73,34			
				1.	PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL APLIKASI INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	27.823.400	16.883.400	60,68	100 ORANG	692 ORANG	
				2.	PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE	155.889.000	95.491.000	61,26	1 DOKUMEN	1 DOKUMEN	100
				3.	JOB FAIR/BURSA KERJA	185.714.600	158.550.400	85,37	30 ORANG	30 ORANG	100
					PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	297.583.700	292.140.542	98,17			

				1.	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN	97.573.800	92.668.242	94,97	50 PERUSAHAAN	50 PERUSAHAAN	100
				2.	PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA SAMA BAGI PERUSAHAAN	73.202.100	73.090.600	99,85	15 PERUSAHAAN	15 PERUSAHAAN	100
				3.	PENYELENGGARAAN PENDATAAN DAN INFORMASI SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PENGUPAHAN	26.807.800	126.381.700	99,66	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100
					PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.997.959.100	1.884.999.350	94,35			
				1.	PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.338.000	45.768.000	96,68	10 PERKARA	10 PERKARA	100
				2.	PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.858.500	48.441.300	97,16	50 PERKARA	50 PERKARA	100
				3.	PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DAN REKAPITULASI KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI PENGUSAHA, FEDERASI DAN KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH SERTA NON AFILIASI	51.807.400	51.801.950	99,99	15 ASOSIASI & SERIKAT	15 ASOSIASI & SERIKAT	100
				4.	PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.064.300	22.024.400	99,82			100
				5.	PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA	1.826.890.900	1.716.963.700	93,98			100
					PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	855.256.750	814.446.012	95,23			
				1.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	270.720.100	270.398.100	99,88			100
				2.	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	584.536.650	544.047.912	93,07			100

						PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	76.286.000	59.312.500	77,75			
					1.	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	76.286.000	59.312.500	77,75			100
						PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	127.644.400	106.245.007	83,24			
					1.	FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	55.482.400	46.847.400	84,44			100
					2.	DISEMINASI, PUBLIKASI DATA INFORMASI DAN ANALISA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA MELALUI SIINAS	72.162.000	59.397.607	82,31			100

Tabel 3.1.4

Capaian Kinerja Program/Kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

NO	URUSAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN			ANGGARAN	REALISASI		KELUARAN/ HASIL		
							Rp	Rp		%	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
30	SEKRETARIAT DAERAH						35.364.350.750	31.125.990.212	88,02	11 Kegiatan/ 34	11 Kegiatan/ 34 Sub Kegiatan	88,02
		SEKRETARIAT DAERAH										
				I	PENATAAN ORGANISASI		1.512.652.800	900.627.016	59,54			
					SUB KEGIATAN :							
					1	PENGLOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	521.998.800	349.563.485	66,97	100	66,97	66,97
					2	FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	271.370.200	112.746.741	41,55	100	41,55	41,55
					3	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	210.619.300	109.649.540	52,06	100	52,06	52,06
					4	MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	354.517.200	210.978.432	59,51	100	59,51	59,51
					5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	154.147.300	117.688.818	76,35	100	76,35	76,35
				II	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		7.921.818.200	6.634.308.700	83,75			
					SUB KEGIATAN :							
					1	FASILITASI KEPROTOKOLAN	5.653.789.900	4.456.473.600	78,82	100	78,82	78,82
					2	FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	1.008.526.900	967.638.200	95,95	100	95,95	95,95
					3	PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	1.259.501.400	1.210.196.900	96,09	100	96,09	96,09

				I	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	2.775.936.300	2.201.292.850	79,30			
					SUB KEGIATAN :						
				1	PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	396.965.900	253.798.515	63,93	100	63,93	63,93
				2	PENGLOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	1.252.604.800	1.020.204.195	81,45	100	81,45	81,45
				3	FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	1.126.365.600	927.290.140	82,33	100	82,3	82,33
				IV	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.434.576.150	15.332.358.053	93,29			
					SUB KEGIATAN :						
				1	FASILITASI PENGLOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	10.649.008.300	10.111.754.560,00	94,95	100	94,95	94,95
				2	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	3.724.394.550	3.542.840.797	95,13	100	95,13	95,13
				3	PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1.833.607.150	1.504.628.196	82,06	100	82,06	82,06
				4	PENINGKATAN KESADARAN KELUARGA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA	227.566.150	173.134.500	76,08	100	76,08	76,08
				V	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	791.472.000	662.331.694	83,68			
					SUB KEGIATAN :						
				1	FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	208.010.000	178.007.135	85,58	100	85,58	85,58
				2	FASILITASI BANTUAN HUKUM	328.356.900	274.082.792	83,47	100	83,47	83,47
				3	PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGLOLAAN	255.105.100	210.241.767	82,41	100	82,41	82,41
				V	FASILITASI KERJASAMA DAERAH	1.382.974.550	1.198.025.947	86,63			
					SUB KEGIATAN :						
				1	FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	1.000.338.650	954.659.593	95,43	100	95,43	95,43
				2	FASILITASI KERJA SAMA LUAR NEGERI	144.261.200	20.194.809	14,00	100	14,00	14,00
				3	EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	238.374.700	223.171.545	93,62	100	93,62	93,62
				VII	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	960.002.150	949.959.418	98,95			
					SUB KEGIATAN :						
				1	KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI	422.039.200	419.019.724	99,28	100	99,28	99,28
				2	PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	358.779.550	355.434.113	99,07	100	99,07	99,07

					3	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO	179.183.400	175.505.581	97,95	100	97,95	97,95
				VIII	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		813.055.350	750.446.063	92,30			
					SUB KEGIATAN :							
					1	FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	437.176.200	393.192.199	89,94	100	89,94	89,94
					2	PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM	130.732.100	127.768.669	97,73	100	97,73	97,73
					3	PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN	245.147.050	229.485.195	93,61	100	93,61	93,61
				I	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		1.713.976.200	1.554.613.274	90,70			
					SUB KEGIATAN :							
					1	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	708.179.500	617.934.233	87,26	100	87,26	87,26
					2	PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA	684.006.000	673.829.041	98,51	100	98,51	98,51
					3	PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN	321.790.700	262.850.000	81,68	100	81,68	81,68
				X	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM		845.116.650	789.470.684	93,42			
					SUB KEGIATAN :							
					1	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN	525.539.550	491.430.993	93,51	100	93,51	93,51
					2	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN	154.217.600	148.106.739	96,04	100	96,04	96,04
					3	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN	165.359.500	149.932.952	90,67	100	90,67	90,67
				XI	PELAKSANAAN KEWILAYAHAN PERBATASAN		212.770.400	152.556.513	71,70			
					SUB KEGIATAN :							
					1	PENJAGAAN DAN PEMELIHARAAN TANDA BATAS	212.770.400	152.556.513	71,70	100	71,70	71,70

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Masa Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Kampar Telah Menerbitkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 Sebagai Pedoman Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2023-2026 merupakan dokumen transisi yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembangunan daerah selama periode tersebut yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta indikator kinerja yang mendukung perwujudan Visi RPJPD Kabupaten Kampar yaitu menjadikan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025.

Visi dan Misi Berdasarkan RPJPD Kampar, RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau

No	VISI PEMBANGUNAN	MISI PEMBANGUNAN
1	RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPD 2023-2026 "Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025"	1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global. 2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan. 4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional. 5. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan
2	RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 "Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)"	1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya 2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing 4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

3	RPJM Nasional 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"	1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa 6. Penegakan sistim hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya 9. Sinergi pemerintah daerah, dalam kerangka negara kesatuan

Kebijakan strategis yang ditetapkan dalam pembangunan Kabupaten Kampar berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 antara lain:

- Pengimplementasian dan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin system bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tentang global,
- Peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur dalam mengelola asset daerah dan pelayanan masyarakat,
- Pengembangan ekonomi rakyat yang berbasis pedesaan pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, tenaga kerja dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional.
- Pengimplementasian dan Pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan,
- Perwujudan sumberdaya manusia yang sehat, beriman dan bertaqwa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan ke depan, dan taat pada aturan dan norma yang berlaku dengan dukungan sistem pendidikan untuk menuju masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama, bermasyarakat, dan bernegara.

Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Kampar 2023-2026

MISI RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1						
Mewujudkan pembangunan nilai-nilai budaya masyarakat Kampar	Tujuan (1) = Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis	IK = indeks pemajuan budaya yang agamis	Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis	Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan	Peningkatan pelestarian, pengelolaan dan pengembangan serta pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara
			Terciptanya toleransi antar multikultur	Indeks toleransi	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman
Misi 2						
Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat	Tujuan (2) = Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	IK = indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	SAKIP, Opini BPK	Pengembangan manajemen pemerintahan berbasis kinerja	Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM, Indeks SPBE	Penerapan standar pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi	Menerapkan standart pelayanan publik berbasis teknologi informasi
Misi 3						
Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman bertaqwa yang berwawasan kedepan	Tujuan (3.1) = Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing	IK = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Peningkatan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan	Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	Peningkatan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan
	Tujuan (3.2) Mengurangkan tingkat kriminalitas	IK= Tingkat Kriminlaitas	Berkurangnya tingkat kriminalitas	Persentase Pengurangan kriminalitas	Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat	Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat
	Tujuan (3.3) Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan	Ik= Pengamalan Agama	Meningkatkatnya pengamalan agama	Persentase Melek Kitab Suci (Alquran)	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan alquran	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Alquran
			Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasana agama	Persentase Pemanfaatan sarana dan prasana agama	Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama

Misi 4						
Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional, dan internasional	Tujuan (4.1) = Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan	IK = Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Kontribusi PDRB sektor pertanian, industri, pariwisata	Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)
					Peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)
					Peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan
					Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah
					Peningkatan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata
			Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan investasi	Peningkatan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif
					Peningkatan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah
	Tujuan (4.2) Meningkatkan Akses Ketenagakerjaan	IK= Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Menurunnya TPT	Persentase Penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah	Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan
	Tujuan (4.3) Meningkatkan Daya beli masyarakat	IK= Penurunan Tingkat Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penurunan tingkat kemiskinan	Peningkatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah

Misi 5						
Mewujudkan pembangunan kawasan yang seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan	Tujuan (5.1) = Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah	IK=Indek Infrastruktur daerah	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana prasarana yang merata	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana prasarana yang merata
					Pengembangan sistem permukiman secara terpadu	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu
			Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pelayanan transportasi	Pengembangan sistem Transportasi terpadu	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu
	Tujuan (5.2) = Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	IK = IKLH	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Penurunan emisi GRK terhadap baseline	Peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya
					Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan

Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

No	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis dalam sistem kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan Intensitas pemberian pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan Kualitas pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Memantapkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat
2	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan	Meningkatkan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan toleransi dalam kehidupan masyarakat
3	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu	Meningkatkan kompetensi pemuda dalam memajukan teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu
4	Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja	Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset dan pelayanan publik	Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset dan pelayanan publik	Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset dan pelayanan publik
5	Menerapkan standart pelayanan publik berbasis	Meningkatkan Sarana dan Prasana IT untuk pelayanan berbasis IT	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT	Memantapkan kualitas dan Publik pelayanan berbasis IT

6	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan berbasis IT Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan berbasis IT Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa
7	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan berbasis IT	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan berbasis IT	Memantapkan kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan berbasis IT
8	Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat	Meningkatkan pelayanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat	Meningkatkan pelayanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat	Memantapkan pelayanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat
9	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Alquran	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sarana dan prasarana Alquran	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sarana dan prasarana Alquran	Memantapkan kualitas pendidikan Alquran
10	Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan jumlah pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama
11	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu	Meningkatkan kompetensi pemuda dalam memajukan teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu
12	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
13	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
14	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
15	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) untuk pemenuhan kebutuhan lokal
16	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya) sebagai sub sector unggulan

17	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan sebagai sub sector unggulan
18	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah
19	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata berbasis IT	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata Berbasis IT	Meningkatkan dayatarik destinasi, dan kualitas pengelolaan dan promosi pariwisata berbasis IT
20	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif terutama pada sector unggulan	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif pada sector unggulan terutama sector industry pengolahan
21	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah
22	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan terutama berskala mikro, kecil dan menengah.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan terutama berskala mikro, kecil dan menengah.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan terutama berskala mikro, kecil dan menengah.
23	Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan pendapatan RT dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan pendapatan RT dan pengendalian inflasi daerah
24	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana prasarana yang merata	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan dan jembatan sarana prasarana yang merata	Meningkatkan rasio kondisi infrastruktur dan jaringan jalan dan jembatan sarana prasarana yang baik dan merata	Meningkatkan rasio kondisi infrastruktur dan jaringan jalan dan jembatan sarana prasarana yang baik dan merata
25	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu dengan melibatkan stakeholders terkait	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu dengan melibatkan stakeholders terkait
26	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas
27	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu
28	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya
29	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah diperlukan tujuan dan sasaran yang terarah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkualitas harus terkait erat dengan permasalahan daerah yang akan ditangani. Tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJPD tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026, Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kampar disajikan pada Tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

1	Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis	1. Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis 2. Terciptanya toleransi antar multikultur
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3	Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan
4	Mengurangkan tingkat kriminalitas	1. Berkurangnya tingkat kriminalitas
5	Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan	1. Meningkatkan pengamalan agama 2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan
6	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah 2. Meningkatnya investasi daerah
7	Meningkatkan Akses Ketenagakerjaan	1. Menurunnya TPT
8	Meningkatkan Daya beli masyarakat	1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
9	Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah	1. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan 2. Meningkatnya pelayanan transportasi
10	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR

Prioritas Pembangunan daerah tahun 2024 merupakan bagian pertama dalam agenda pelaksanaan perencanaan pembangunan RPD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026. Namun karena adanya perubahan terhadap pemilihan kepala daerah di tahun 2024, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 untuk mempedomani RPJPD dan RPD Kabupaten Kampar, RPJMD Provinsi Riau dan RPJM Nasional. Selain itu terkait juga dengan isu-isu strategis yang terdapat dalam RPD Kabupaten Kampar, RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau. Prioritas pembangunan daerah juga ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun sebelumnya. Selanjutnya pertimbangan lain dalam menetapkan prioritas pembangunan tahun 2024 adalah dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD. Ini merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD, yang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan reses, maka Tema Perubahan tahun 2024 yaitu “Menjadikan Kampar yang Berdaya Saing, Sejahtera,Bermartabat dan Unggul di Provinsi Riau” dengan fokus dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Riau Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

Fokus dan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Dalam RKPD Tahun 2024

1	Daya Saing Daerah	1) Bidang Ekonomi a. Peningkatan dayabeli masyarakat terutama keluarga miskin b. Peningkatan dukungan dan pemberdayaan UMKM; c. Peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan,hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) melalui peningkatan ketersediaan sarana pembenihan dan praktek pertanian terbaik (GAP); d. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi kreatif terutama sector industry (pengelolaan Kawasan industry dan pendalaman struktur industri); e. Peningkatan pendapatan daerah melauai optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah f. Pemberdayaan BUMD dalam pengelolaan pengembangan ekonomi daerah. g. Peningkatan Sinergitas dan koordinasi seluruh stakeholder untuk peningkatan pembangunan ekonomi;

		2) Bidang Infrastruktur a. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di desa tertinggal di Kabupaten Kampar; b. Meningkatkan penataan kota terutama pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau; c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah sumber ekonomi potensial. d. Pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi (sektor pertanian, industri dan lainnya)
2	Kesejahteraan	1) Bidang Pendidikan a. Peningkatan Angka Kompetensi Minimum (AKM) untuk SD/SMP b. Peningkatan kualitas pendidikan berkarakter; c. Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan yang layak dengan lokus prioritas pada desa tertinggal untuk pemerataan pembangunan pendidikan; d. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan pendidikan secara tematik yang mengarah pada isu-isu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah; e. Peningkatan kualitas sistem dan pelaksanaan pendidikan pasca Covid-19; f. Peningkatan kualifikasi guru dan penempatan guru-guru terutama pada desa-desa tertinggal dan/atau daerah yang jauh dari perkotaan
		2) Bidang Kesehatan a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan terjangkau oleh masyarakat; b. Peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas dan RSUD Bangkinang; c. Gerakan kampanye masyarakat hidup sehat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; d. Peningkatan asupan gizi bayi dan balita ibu melahirkan dalam rangka mengurangi angka kematian bayi/ Balita dan ibu melahirkan serta mengurangi angka stunting; e. Meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit-penyakit menular.
3	Bermartabat	1) Bidang Sosial a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan secara tematik dengan mengacu pada fokus dan prioritas pembangunan; b. Peningkatan penanganan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial; c. Peningkatan kesempatan kerja melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan UMKM. d. Pengamalan Nilai Keagamaan e. Pelestarian Budaya Melayu
4	Unggul	1) Peningkatan Pelayanan publik 2) Penyelenggaraan Pemerintahan

3.3 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

3.3.1 Rekomendasi DPRD Kabupaten Kampar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor : Kpts.2/DPRD/V/2024 Tanggal 13 Mei 2024 Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

A. PANSUS I BIDANG PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

1) Rekomendasi Urusan Pemerintahan

Secara umum, Pansus I menilai bahwa pelaksanaan tugas dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023- 2026, untuk tahun 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan baik. Sebagaimana dimaklum, sesuai Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 terdapat 16 (enam belas) sasaran yang telah ditetapkan. Mengacu kepada Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023, memiliki 21 (dua puluh satu) indikator sasaran, yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk misi pertama: mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin system bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global;
- b. 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk misi kedua: meningkatkan kemampuan dan manajemen aparatur dalam mengelola asset daerah dan pelayanan masyarakat;
- c. 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk misi ketiga: meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan;

- d. 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk misi keempat: mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agro industri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional; dan
- e. 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang digunakan untuk misi kelima: mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan

Dari LKPJ Tahun 2023 yang disampaikan, terlihat pencapaian indikator kinerja sasaran untuk masing-masing indikator jika dibandingkan antara target dengan realisasi pada indikator sasaran, untuk tahun 2023 sebagian besar mencapai target. Bahkan ada diantaranya yang melebihi target. Walaupun ada juga diantaranya yang tidak tercapai realisasinya sesuai target. Pada kesempatan ini, Pansus I hanya akan memberikan catatan-catatan sebagai rekomendasi dalam urusan pemerintahan terhadap sasaran indikator yang tidak tercapai.

Dari dua indikator kinerja sasaran pada meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, pada misi kedua, terdapat indikator kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tidak mencapai target, walaupun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar memperoleh prediket B dengan nilai 62,55 dari nilai yang ditargetkan adalah BB. Tujuan evaluasi SAKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Walaupun hasil evaluasi menggambarkan bahwa implementasi SAKIP sudah baik terutama di sebagian unit kerja utama, akan tetapi masih memerlukan perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Oleh karenanya, terhadap hal ini Pansus I merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar agar melakukan perbaikan-perbaikan dan berkomitmen yang kuat dalam manajemen kinerja pemerintahan daerah.

Pada indikator kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Target pemerintah daerah untuk tahun 2023 hanya prediket C, dan terealisasi pada prediket B dengan nilai 2,96. Padahal memang sudah saatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi lebih dikedepankan dalam pelayanan pemerintahan. Untuk itu, target prediket Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun berikutnya mesti lebih ditingkatkan. Sebagaimana dimaklumi, bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pemerintahan. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antarpemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Adanya tingkat capaian tidak mencapai target indikator kinerja, juga terlihat pada misi ketiga. Pada bagian sasaran meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan, terdapat dua indikator kinerja yang tidak mencapai target. Yaitu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Target di tahun 2023 untuk rata-rata lama sekolah adalah 9,53 tahun. Dari data yang dipaparkan, bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kampar tahun 2023 adalah 9,4 tahun, yang berarti rata-rata penduduk di Kabupaten Kampar bersekolah selama 9,4 tahun atau setara dengan tamat kelas 9 SMP. Sedangkan realisasi harapan lama sekolah di Kabupaten Kampar pada tahun 2023 adalah 13,6 tahun dari target sebesar 14,02 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I. Harapan lama sekolah yang persentasenya di tahun 2023 mencapai 97,00% ini merupakan lama sekolah dalam hitungan tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak-anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Tidak tercapainya target indikator kinerja juga ditemukan pada misi keempat di bagian sasaran: menurunnya tingkat kemiskinan. Pada indikator kinerja persentase penurunan tingkat kemiskinan yang ditargetkan -3,96% dan tercapai adalah 0,08%. Rata-rata capaian sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dengan nilai 1,25% dengan kategori tidak memuaskan. Kondisi ini menggambarkan bahwa secara umum indikator kinerja tidak mencapai target yang memuaskan. Berkenaan hal ini, Pansus I merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan berbagai program untuk mengatasi dan menekan angka kemiskinan. Berbagai faktor yang menjadi simpul yang menghambat masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinannya mestilah dapat diurai. Kebijakan-kebijakan nyata dalam mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Kampar mestilah dibuat.

Pada misi kelima, juga terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target, yakni pada sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan. Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan persentase kesesuaian pemanfaatan ruang, sebagai indikator kinerja. Dari yang ditargetkan 80,42%, hasil yang tercapai hanya pada angka 76,61%. Artinya, capaian target adalah 95,27%. Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya adalah dikarenakan belum memadainya kompetensi sumber daya manusia, belum terbentuknya kerjasama antar instansi pemerintah dan swasta, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, minimnya data dan informasi terkait tata ruang wilayah, dan terbatasnya forum-forum diskusi sehingga sulit meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang tanah.

Secara umum, dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar, Pansus I DPRD Kampar merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan penguatan-penguatan yang terukur dan dilakukan secara sistematis untuk terelasisasinya target pencapaian indikator kinerja sesuai dengan yang ditargetkan

2) Rekomendasi Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan diantara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dianalisis dari LKPJ Bupati Kampar Tahun 2023, sepertinya untuk perbaikan dan pembenahan urusan pendidikan tidak ada perkembangan yang signifikan. Masalah yang muncul dari tahun ke tahun tetap sama, ditambah dengan permasalahan-permasalahan yang baru. Pada rekomendasi LKPJ tahun 2022 lalu, misalnya DPRD Kampar menyorot permasalahan pendidikan yang kembali muncul di tahun 2022. Permasalahan yang kembali ditemui pada LKPJ tahun 2022 lalu adalah terkait aparatur profesional yang masih kurang, rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik serta sistem manajemen pendidikan dan pengawasan pendidikan yang lemah. Permasalahan pendidikan yang sama, ternyata kembali terlihat pada LKPJ Bupati Kampar Tahun 2023 ini, yaitu: masih kurangnya aparatur yang profesional, masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan, masih lemahnya sistem manajemen dan pengawasan pendidikan, masih terdapatnya anak putus sekolah khususnya tingkat pendidikan menengah.

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor penting dan sangat krusial dalam menentukan kualitas pendidikan yang baik,. Tapi justru, faktor-faktor ini yang tak kunjung terselesaikan dari tahun ke tahun sehingga menjadi permasalahan klasik di bidang pendidikan. Keadaan yang tak kunjung berubah ini tentu mengindikasikan adanya sesuatu yang salah dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Kampar. Selain itu menunjukkan adanya kealpaan dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan program-program di bidang Pendidikan. Kondisi ini lagi-lagi menunjukkan jika solusi penyelesaian masalah tidak dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karenanya kita mestilah mengarusutamakan perwujudan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Kampar. Kita mestilah mempersiapkan generasi-generasi terbaik untuk kejayaan Kampar di masa depan. Selesaikan seluruh permasalahan di bidang Pendidikan dengan solusi-solusi yang sangat memungkinkan untuk penyelesaiannya.

Permasalahan pendidikan lainnya di Kabupaten Kampar sebagaimana diungkapkan di dalam LKPJ Bupati Kampar Tahun 2023 adalah masih kurangnya inventarisasi peninggalan situs-situs budaya dan belum optimalnya promosi nilai-nilai budaya, serta masih terbatasnya sarana dan prasarana sekolah di setiap jenjang pendidikan dan pendidikan luar biasa. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan perencanaan program dan kegiatan penunjang guna teratasinya permasalahan yang dimaksud.

Selain diperlukannya sarana dan prasarana pendidikan yang sangat layak, Pansus I DPRD Kampar juga merekomendasikan penajaman pendidikan karakter pada seluruh jenjang dan jenis satuan pendidikan di Kabupaten Kampar. Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui pendekatan guru dan siswa secara langsung melalui kegiatan intra-kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler pada setiap jenjang pendidikan. Selain itu Penguatan Pendidikan Karakter juga dapat dilaksanakan melalui pendekatan budaya. Pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kurikulum terutama kurikulum bermuatan lokal sebagai kewenangan pemerintah daerah. Dalam tatanan beragama dan budayanya, masyarakat Kampar sebenarnya mempunyai pondasi karakter yang sangat baik. Sayangnya, karakter-karakter jati diri nan luhur itu sudah malai tergerus seiring zaman.

Oleh karenanya, mengedepankan pendidikan karakter merupakan suatu keharusan mutlak dalam membangun karakter generasi Kampar. Pendidikan karakter merupakan usaha menanamkan pembiasaan kebiasaan yang baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai luhur untuk kepribadiannya. Disisi lain, banyak pihak berpendapat bahwa hasil pendidikan terutama yang menyangkut moral dan akhlak sangat memprihatinkan. Pemerintah daerah sejatinya memastikan bahwa Pendidikan karakter selalu diimplementasikan di sekolah dalam penguatan karakter dengan lima nilai utama (integritas, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong) haruslah tercermin dalam perilaku warga sekolah.

Sebagaimana dimaklumi, dengan ciri khas kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah, menjadikan di antara alasan sehingga pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan kearifan masing-masing daerah. Kearifan lokal dan keunikan budaya yang dimiliki setiap daerah memungkinkan daerah mengembangkan kurikulum bermuatan lokal bagi sekolah-sekolah di daerahnya. Untuk itu, kurikulum muatan lokal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten (untuk tingkat SD sampai SMP) tidaklah sebatas pengetahuan berkenaan adat, kesenian, kuliner tradisional, tradisi, dan budaya masyarakat Kabupaten Kampar. Tapi penyusunan kurikulum bermuatan lokal itu lebih mengarahkan siswa untuk menamalkan keluhuran karakter negerinya sebagai bagian dari karakter pribadinya. Pendidikan berbasis karakter tentu saja mengedepankan pembentukan generasi yang berilmu dan berakhlak mulia.

Pansus I DPRD Kampar juga merekomendasikan untuk dilakukannya kerja sama dan koordinasi antarsektor dalam pengelolaan pendidikan di Kabupaten Kampar. Hal ini sangat penting dilakukan dalam penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila (PPP). Pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama, yaitu: (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia; (2) berkebinekaan global; (3) bergotong royong; (4) mandiri; (5) bernalar kritis; dan (6) kreatif. Kerja sama dan koordinasi antarsektor juga sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, sekaligus tentunya termasuk dalam penuntasan tiga dosa pendidikan berupa perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

3) Rekomendasi Urusan Kesehatan

Mendapatkan pelayanan kesehatan, merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Sebagai bagian dari hak konstitusional, maka memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari bentuk jaminan terhadap hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Kesehatan sebagaimana didefinisikan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Sedangkan upaya kesehatan diartikan sebagai segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan negara. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan, yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta nasional. Dalam tataran pemerintahan, urusan kesehatan merupakan diantara urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu pelayanan publik untuk

memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sebagai urusan pemerintahan wajib, maka ia wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

Di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar, organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurus urusan kesehatan adalah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah daerah. Melihat perjanjian kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023, ada dua cakupan yang menjadi sasaran strategis, yakni meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan menurunkan angka kematian dan kesakitan. Perjanjian kerja tersebut tentunya terimplementasi dalam kegiatan Dinas Kesehatan dan RSUD Bangkinang pada tahun 2023. Terdapat 9 (sembilan) permasalahan menurut LKPJ di bidang kesehatan, yaitu: (1) pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil; (2) pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin; (3) pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir; (4) pengelolaan pelayanan kesehatan Balita; (5) pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut; (6) pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi; (7) pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; (8) pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; dan (9) pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.

Berbagai solusi yang terencana dan terukur tentu perlu dilakukan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul. Mulai dari pencatatan, penyuluhan, edukasi, sosialisasi, advokasi layanan kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan, koordi lintas sektor terkait, dan dukungan anggaran.

Sudah masanya pula, penyelenggaraan upaya kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital untuk telekesehatan dan telemedisin. Bahkan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya terhadap peningkatan status gizi pun, dapat diperoleh melalui layanan Telekesehatan. Untuk difahami, telekesehatan merupakan pemberian dan fasilitasi layanan kesehatan,

termasuk kesehatan masyarakat, layanan informasi kesehatan, dan layanan mandiri, melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Sedangkan telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital. Bentuk pelayanan kesehatan melalui telemedisin, antara lain, berupa asuhan medis/klinis dan/ atau layanan konsultasi kesehatan. Menurut peraturan perundangundangan, fasilitas pelayanan kesehatan dapat secara mandiri dapat menyelenggarakan pelayanan telemedisin atau bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Sebagai bagian dari optimalisasi penyelenggaraan upaya kesehatan, Pansus I DPRD Kampar memberikan rekomendasi pemanfaatan telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital dalam penyelenggaraan upaya kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

Pada urusan kesehatan, diantara kondisi yang mesti diwaspadai adalah wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB). Wabah Penyakit Menular yang atau Wabah adalah meningkatnya kejadian luar biasa penyakit menular yang ditandai dengan jumlah kasus dan/ atau kematian meningkat dan menyebar secara cepat dalam skala luas. Sedangkan kejadian luar biasa adalah meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitas akibat penyakit dan masalah Kesehatan yang bermalna secara epidemiologis di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Kemunculan wabah dan KLB lazimnya tidak terprediksi. Oleh karenanya perlu adanya serangkaian kegiatan sebagai sikap tanggap menghadapi kemungkinan terjadinya wabah. Kewaspadaan wabah merupakan serangkaian kegiatan sebagai sikap tanggap menghadapi kemungkinan terjadinya wabah. Untuk melindungi masyarakat dari KLB dan wabah.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan kewaspadaan KLB atau wabah, penanggulangan KLB atau wabah, dan pasca-KLB atau wabah. Berkenaan dengan hal ini, Pansus I DPRD Kampar merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Kampar menyusun program pencegahan dan penanggulangan dalam hal kejadian penyakit menular dan penyakit tidak menular tertentu yang menjadi permasalahan kesehatan masyarakat dengan

mempedomani pada kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Program penanggulangan penyakit menular dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu tersebut harus didukung dengan pengelolaan yang meliputi penetapan target dan strategi penanggulangan dan penyediaan sumber daya yang diperlukan. Karena memang, selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau wabah, penanggulangan KLB atau wabah, dan pasca-KLB atau wabah

4) Rekomendasi untuk Mitra

Pansus I Selanjutnya, Pansus I DPRD Kampar dengan ringkas memberikan rekomendasi terhadap objek mitra Pansus I sesuai pembahasan yang dilakukan, yaitu:

a. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

1. Masih banyak kepala sekolah dibawah naungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang belum definitive. Untuk itu direkomendasikan untuk segera mendefinitifkan kepala sekolah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Berkenaan pembayaran honor intensif guru Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) dan guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) hampir setiap tahun terjadi permasalahan. Pada tahun 2024 kembali terulang. Pansus I DPRD Kampar meminta agar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar segera melakukan pembayaran. Kalau Disdikpora tidak mampu mengelolanya, Pansus I DPRD Kampar merekomendasi agar pengelolaannya dilakukan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.
3. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan "tiga dosa pendidikan" yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

4. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk memastikan berlangsungnya pengarusutamaan penguatan pendidikan karakter di seluruh satuan pendidikan dalam ruang lingkup kewenangannya.
5. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk melakukan optimalisasi dalam mewujudkan siswa-siswa berprestasi, pemuda berprestasi dan olahraga yang berprestasi.

b. Dinas Kesehatan

1. Sangat diperlukan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Optimalisasi ini termasuk dengan memfungsikan beberapa Puskesmas yang telah selesai dibangun dan sudah dapat untuk difungsikan. Dinas Kesehatan direkomendasikan untuk memfungsikan Puskesmas-Puskesmas yang sudah dibangun tersebut, terutama Puskesmas Kuntu yang juga sudah tersedia alat kesehatannya.
2. Dinas Kesehatan direkomendasikan untuk menyosialisasikan program Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan Jaminan Kesehatan Kampar Melaju (JKKM) kepada masyarakat serta memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama yang kurang mampu, dalam pengurusannya.
3. Perlu dilakukan penguatan pengadvokasian terhadap pemerintah desa secara terpadu dan berkesinambungan sebagai bagian upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pedesaan di Kabupaten Kampar.

c. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang

1. Walaupun pada tahun 2023 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang meraih akreditasi tingkat paripurna dengan rating bintang lima sesuai Standar Akreditasi Kemenkes (Starkes) yang diberikan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Indonesia (LARSI) yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, namun RSUD Bangkinang mesti terus membuat berbagai inovasi dan terobosan-terobosan dalam hal pelayanan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Diantara inovasi yang dapat dilakukan adalah telemedisin, yakni pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.
2. Pansus I DPRD Kampar merekomendasikan pihak RSUD Bangkinang untuk memfungsikan Gedung baru RSUD Bangkinang yang telah selesai pembangunannya.

d. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pemerintah Kabupaten Kampar dipandang perlu memberikan dukungan penganggaran yang cukup serta pemenuhan kebutuhan personel, sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar guna menunjang kegiatan-kegiatan operasional Satpol PP Kabupaten Kampar. Termasuk dengan pengadaan kendaraan operasional patroli personel Satpol PP untuk digunakan berpatroli di tiga jalur utama. Yaitu, masingmasing satu unit kendaraan operasional untuk setiap jalur, yaitu jalur Rantau Kampar Kiri, jalur Tengah (Tambang), dan jalur Tapung.
2. Satpol PP agar melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam upaya menciptakan kondisi daerah yang tenteram dan tertib guna

tercegahnya gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kampar.

3. Satpol PP agar bersikap responsif terhadap informasi dan temuan dalam bentuk apapun termasuk dan tidak terbatas pada keramaian, kegiatan hiburan, dan penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

e. Dinas Sosial

1. Dinas Sosial direkomendasikan untuk melakukan pendataan dan/atau pembaharuan data terhadap Masyarakat kurang mampu.
2. Direkomendasikan untuk memberikan bantuan (sagu hati) kepada Masyarakat yang tertimpa musibah, terutama musibah kebakaran. Selama ini, Masyarakat korban kebakaran hanya mendapatkan bantuan ala kadar berupa tenda dan bahan makan cepat saji. Ke depannya, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Sosial, setidaknya dapat memberikan bantuan minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu rumah yang terbakar.

f. DPPKBP3A Kabupaten Kampar

1. DPPKBP3A Kabupaten Kampar agar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama lintas sektoral secara berkesinambungan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakantindakan dan/atau perilaku termasuk yang berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hak-hak anak di Kabupaten Kampar, diantaranya dan tidak terbatas pada eksploitasi anak, tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, objek eksploitasi seksual terhadap anak, human trafficking, serta tindakan dan/atau perilaku pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Perlu disiapkan rumah aman, rumah singgah, serta pengadaan kendaraan operasional sebagai penunjang pelaksanaan program/kegiatan berkenaan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil_ Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk segera dilakukan penyelesaian gedung kantor Disdukcapil.
2. Sebagai ujung tombak dalam administrasi data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar mesti memberikan pelayanan terbaik, mudah dan cepat kepada masyarakat. Dinas ini selayaknya melakukan berbagai inovasi dan terobosan dalam pelayanan publik. Diantaranya dengan membangun sistem aplikasi online untuk berbagai layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Dengan dukungan pelayanan aplikasi online, tentunya akan lebih efektif dan efisien bagi Masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga pindah datang, surat keterangan pindah penduduk, kartu identitas anak (KIA), kartu keluarga (KK), dan KTP-el. Dengan aplikasi online Masyarakat juga akan lebih efektif dan efisien dalam memperoleh administrasi berkenaan catatan sipil seperti akta perkawinan, akta kelahiran, akta perceraian, dan akta kematian.
3. Untuk membantu melayani administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Kampar, Disdukcapil direkomendasikan untuk memperbanyak perekaman di setiap kecamatan. Perekaman juga dapat dilakukan secara mobile menggunakan kendaraan khusus untuk perekaman dengan mendatangi sarana publik, misalnya sekolah dan lain sebagainya.
4. Disdukcapil perlu melakukan inovasi dalam percepatan data kependudukan berkenaan kelahiran dan kematian, sehingga masyarakat sudah dapat mempunyai akta kelahiran dan akta kematian dalam waktu relatif singkat sejak terjadinya peristiwa kelahiran atau kematian. Khusus berkenaan akta kematian, percepatan penerbitan akta kematian dapat dilakukan dengan membangun suatu sistem pelaporan dari pemerintahan desa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, menggunakan aplikasi teknologi informasi digital.

Percepatan pencatatan angka kelahiran dan angka kematian, tentu akan berdampak positif dalam percepatan pembaharuan (update) data kependudukan pada kartu keluarga sebagai bagian dari administrasi kependudukan.

5. Kepala Daerah untuk segera membentuk UPT Dukcapil di Tingkat Kecamatan.
6. Kepala Daerah diharapkan untuk mengadakan sarana prasarana digital alat perekaman yang tersebar di kecamatan-kecamatan secara bertahap sehingga pelayanan dukcapil semakin dekat dengan masyarakat.

h. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk tidak lagi terjadi keterlambatan pencairan dana desa dan dana lainnya yang harus disalurkan ke desa.

i. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

1. Sebagai lumbung dan sentra informasi pemerintah daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sepatutnya mempunyai kecukupan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mumpuni.
2. Perlunya diinventarisir kembali peralatan penunjang berkenaan komunikasi, informasi dan persandian di Diskominfo Kabupaten Kampar.

j. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1. Secara umum, tujuan kepariwisataan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, direkomendasikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kampar untuk menggali potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Kampar dalam tiga daya tarik wisata yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan. Hal tersebut diiringi dengan penyusunan program kepariwisataan yang memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata di Kabupaten Kampar.

2. Disparbud Kabupaten Kampar memberikan pembinaan melekat sektor kepariwisataan kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai bagian dari upaya menumbuhkembangkan kepariwisataan dan menciptakan sumber daya manusia yang handal bidang kepariwisataan.
3. Menumbuhkembangkan desa wisata di alam pedesaan yang mengintegrasikan antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
4. Disparbud Kabupaten Kampar tetap harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap objek wisata yang pengelolaannya di luar pengelolaan Disparbud Kabupaten Kampar.
5. Disparbud Kabupaten Kampar menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah sebagai dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya. Yang dimaksud dengan kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya Masyarakat.

k. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar.
2. Mengoptimalkan permbudayaan kegemaran membaca yang dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat yang difasilitasi melalui buku murah dan berkualitas. Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. Sedangkan pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu. Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Kampar, optimalisasi pembudayaan gemar membaca dapat difasilitasi dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk mendorong tumbuhnya serta memberikan pembinaan terhadap taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca di Kabupaten Kampar.
4. Dipandang perlu untuk melakukan digitalisasi arsip, baik terhadap arsip statis maupun arsip dinamis. Alih media arsip konvensional yang dikonversikan ke dalam bentuk digital merupakan diantara upaya pemeliharaan dan penyelamatan arsip yang dilakukan dalam pengelolaan arsip di era digitalisasi.

I. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

1. Seiring dengan beratnya beban tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar dalam mengurus administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kampar, maka selayaknya pula BKPSDM Kabupaten Kampar diberikan gedung yang lebih representatif.
2. Lemahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur menjadi permasalahan yang terjadi pada banyak organisasi perangkat daerah. Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi permasalahan di BKPSDM Kabupaten Kampar. Untuk itu, BKPSDM sangat perlu menyusun program/kegiatan dalam upaya mengatasi permasalahan kualitas SDM aparatur. Dalam hal ini, BKPSDM perlu membangun koordinasi dan kerjasama yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas SDM aparatur sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerinthan daerah.

m. Inspektorat

1. Inspektorat Kabupaten Kampar memiliki peran penting dalam perwujudan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kampar. Oleh karenanya, sangat diperlukan peningkatan fungsi pembinaan dan pengawasan internal dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar, dan mengalokasikan anggaran yang mencukupi sesuai dengan ketentuan untuk pelaksanaan pendukung urusan pengawasan dengan penambahan personil Sumber Daya Manusia (Auditor) yang terampil melalui usulan formasi CPNS dan PPPK.
2. Dengan luasan lokasi pengawasan pada 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan se-Kabupaten Kampar, dipandang perlu untuk peningkatan dan/atau pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kampar, guna terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai tingkat pemerintah desa hingga pemerintah kabupaten.
3. Untuk optimalnya hasil pengawasan, diperlukan peningkatan kuantitas dan/atau kualitas aparatur guna kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan dengan mendapatkan pendidikan dan pelatihan pengawasan.
4. Perlunya diberikan bangunan kantor yang lebih representatif bagi Inspektorat Kabupaten Kampar sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat yang lebih baik.

n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar sangat perlu diberikan gedung perkantoran yang lebih baik, karena gedung yang digunakan saat ini dinilai sudah tidak representatif.

B. PANSUS II BIDANG KEUANGAN, PAJAK DAN INFRASTRUKTUR

1) Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

1.1. Pendapatan Daerah

Sebagaimana dijelaskan dalam LKPj Bupati Kampar Tahun Anggaran 2023 diketahui bahwa arah kebijakan Pendapatan Daerah pada APBD Perubahan Tahun 2023 yaitu:

- a. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi dengan tetap berpihak pada kebijakan dengan meminimalkan beban masyarakat, tidak menghambat iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melaksanakan 10 (sepuluh) kebijakan;
- b. Memaksimalkan perolehan pendapatan transfer dengan melaksanakan 8 (delapan) kebijakan;
- c. Mengoptimalkan perolehan lain-lain pendapatan yang sah melalui kebijakan: Melakukan koordinasi dengan pemerintah/instansi terkait dalam rangka peningkatan penerimaan alokasi pendapatan Hibah.

Estimasi penerimaan daerah pada APBD Perubahan Kabupaten Kampar Tahun 2023 mengalami peningkatan dari target APBD Murni tahun 2023 yaitu dari Rp2.525.387.965.574,- menjadi Rp2.683.478.121.715,-. Terjadi penambahan sebesar Rp158.090.156.141. Perbandingan target penerimaan daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana sebelum perubahan sebesar Rp278.735/827.642,- menjadi Rp277.186.807.367,- atau berkurang sekitar 1%. Pendapatan transfer yang mana sebelum perubahan sebesar Rp2.244.552.137.932,- menjadi Rp2.404.191.314.348,- atau meningkat sebesar 7%.

Permasalahan utama perubahan pendapatan daerah diantaranya terjadi karena potensi sumber PAD yang sangat terbatas dan belum optimalnya pengembangan strategi serta pemetaan potensi PAD, masih belum optimalnya pendataan pemungutan seluruh potensi objek pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan, masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya dan masih belum maksimalnya peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Menyikapi data yang kami baca dari LKPj tersebut, kami mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk dapat melakukan terobosan-terobosan yang lebih baik lagi dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah. Diperlukan ide-ide kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, meskipun tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan pembinaan usaha masyarakat dan peluang investasi di Kabupaten Kampar. Sebab ke depan, kita tentunya tidak selalu hanya bersandar pada pendapatan transfer dalam bentuk pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah saja.

1.2. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian target dengan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM. Kebijakan yang terkait dengan belanja daerah pada tahun 2023 antara lain;

- a. Pengalokasian belanja untuk menampung perubahan APBD pada pelaksanaan APBD Tahun 2023 yang dilakukan melalui pergeseran mendahului perubahan APBD Tahun 2023 sebanyak dua kali;
- b. Pengelokasian belanja untuk dukungan pelaksanaan Pemilukada Tahun 2024 berupa hibah belanja sebesar 40% dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang disepakati untuk KPU Kabupaten Kampar, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kampar;
- c. Pengelokasian anggaran untuk pemenuhan Universal Health Coverge (UHC) Kabupaten Kampar Tahun 2023;
- d. Pengalokasian anggaran belanja untuk kegiatan yang belum cukup anggaran prioritasnya;
- e. Rasionalisasi pergeseran belanja pada kegiatan yang tidak dilaksanakan atau belum prioritas;

f. Pengelokasian anggaran untuk penyesuaian belanja yang terjadi karena perubahan SILPA.

Pada perubahan belanja daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 diketahui bahwa belanja operasi bertambah sebesar Rp56.035.271.341,-, yang mana kelompok belanja operasi ini digunakan untuk membiayai belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah hingga bantuan sosial. Belanja modal secara total bertambah sebesar Rp102.606.665.000,- , yang mana belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja tak terduga berkurang sebesar Rp551.780.2000. Belanja tak terduga tahun anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Permasalahan belanja daerah pada APBD 2023 adalah terbatasnya pendapatan yang bersumber dari PAD dan terjadinya pengurangan dana perimbangan yakni dana bagi hasil pajak/sumber daya alam yang sangat signifikan disebabkan oleh pemotongan lebih bayar oleh pemerintah terhadap dana bagi hasil sektor minyak bumi, sedangkan kebutuhan belanja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kemudian, ditemukan adanya kesalahan dalam penulisan/input kode rekening sehingga perlu adanya revisi/pergeseran kode dalam rangka penyesuaian rekening yang berakibat pada pelaksanaan program dan kegiatan tertunda sampai ditetapkannya Perda Perubahan APBD. Menyikapi hal tersebut, pansus II mengingatkan agar permasalahan yang terjadi karena faktor kesalahan input kode tidak lagi menjadi masalah klasik dari tahun ke tahun. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bekerja secara cermat dan berhati-hati sehingga kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Mengenai terbatasnya PAD, kami

kembali menyarankan agar pemerintah dapat melakukan upaya-upaya brilliant dalam peningkatan PAD. Sebab banyak kita lihat daerah di Indonesia yang menjadikan PAD sebagai primadona pendapatan daerah sehingga mampu berkontribusi besar dalam belanja daerah. Kabupaten Kampar merupakan daerah yang kaya dan potensial, kami yakin bahwa kita dapat mengoptimalkan PAD dengan potensi yang kita miliki.

2) PAJAK

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajakdaerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Adapun retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha itu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta.

Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Sedangkan retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Termasuk dalam golongan retribusi ini yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. Sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023, antara lain adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Target pendapatan pada tahun 2023 sebesar Rp.2.805.811.127.562,- dan realisasinya mencapai 97%. Realisasi ini meningkat dibandingkan dari tahun 2022.

Berdasarkan uraian tentang pendapatan daerah, Pansus II informasi yang lebih akurat tentang upaya OPD terkait mengatasi permasalahan yang masih bertumpu pada pajak daerah. Perlunya sosialisasi yang berkelanjutan oleh OPD terkait untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak daerah. Kegigihan para petugas di OPD terkait sangat diperlukan dalam hal ini.

3) INFRASTRUKTUR

Kabupaten Kampar sebagai salah satu Kabupaten tertua di Riau, yang semestinya berperan penting dalam mendukung pencapaian Indonesia Emas Tahun 2045. Salah satu indikator dari kemajuan suatu daerah adalah pembangunan infrastruktur yang memadai. Visi Indonesia maju membutuhkan adanya lompatan besar dalam merancang strategi pembangunan nasional, utamanya untuk memastikan terjadinya akselerasi pencapaian Indonesia maju dengan GDP ke-5 terbesar pada 2045. Bila mencermati berbagai capaian yang telah diraih oleh bangsa Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini, sesungguhnya kita telah memiliki modal awal untuk menuju Indonesia maju, indikatornya antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil diatas 5%, menurunnya angka pengangguran dan jumlah masyarakat miskin, rendahnya tingkat ketimpangan berdasarkan indeks Gini Ratio serta bonus demografi yang dimiliki Indonesia.

Indonesia telah memiliki pondasi yang kokoh untuk mencapai citacita Indonesia maju tersebut, sebagai buah dari masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam 5 tahun terakhir, kita dapat menyaksikan berbagai pembangunan infrastruktur yang sudah mulai dirasakan manfaatnya dalam mendorong bergerakanya ekonomi regional. Pembangunan infrastruktur secara massif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia ini digagas guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur agar dapat dapat menjadi lompatan bagi Indonesia untuk menuju negara maju, sekaligus dapat lepas dari perangkap sebagai negara berkembang saja atau "middle income trap".

Urgensi keberlanjutan pembangunan infrastruktur semakin dirasakan ditengah meningkat tajamnya persaingan ekonomi antar kawasan, karena dengan membangun infrastruktur sejatinya adalah membangun masa depan sebuah peradaban, karena dapat berperan sebagai stimulus bergerakanya beragam aktivitas ekonomi. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, dapat tercipta konektivitas yang kuat antar wilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di

Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai negara maju.

Selanjut jika kita perhatikan agenda strategis menyongsong Pertemuan G20, Kelompok kerja infrastruktur atau Infrastructure Working Group (IWG) yang secara spesifik membahas mengenai agenda prioritas terkait infrastruktur.. Negara anggota G-20 dan organisasi internasional telah mencapai kesepakatan dan berkomitmen untuk mengupayakan revitalisasi investasi infrastruktur dengan cara yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau, terutama melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta untuk mendukung investasi publik dan lembaga keuangan internasional. Mengembangkan kebijakan untuk memobilisasi investasi infrastruktur inklusif untuk meningkatkan inklusi sosial dan mengatasi kesenjangan antar daerah. Dalam agenda infrastruktur, terdapat empat agenda utama. Keempat agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan dengan mendorong partisipasi sektor swasta
2. Menekankan peran infrastruktur dalam mendorong inklusi sosial dan mengurangi kesenjangan antar daerah
3. Meningkatkan investasi infrastruktur digital dan penggunaan teknologi dalam infrastruktur
4. Mendorong infrastruktur transformatif pasca COVID-19.

Selain itu perlu juga kita cermati infrastruktur digital dan investasi teknologi dalam infrastruktur yang ditujukan untuk mempersempit kesenjangan digital. Hal ini dianggap penting, karena infrastruktur digital mampu menjembatani kesenjangan penyediaan layanan yang signifikan, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan keuangan.

Pansus II yakin bahwa kita semua memiliki harapan yang sama, yakni dana yang cukup besar pada APBD Kabupaten Kampar 2023 diharapkan tidak hanya sekedar proses pendapatan dan belanja semata. Namun penggunaan dana yang besar tersebut memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan peningkatan berbagai aspek lainnya yang berpihak pada kepentingan

daerah dan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan di Tahun 2023 tentunya memiliki dinamika tersendiri di Kabupaten Kampar, mengingat kita mengalami pergantian Penjabat kepala daerah lebih dari satu kali. Namun kami yakin bahwa hal itu tentu tidaklah memudahkan semangat dan tekad untuk tetap melaksanakan pembangunan sebagaimana yang telah direncanakan.

Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Efendi dalam suatu kesempatan pidato ilmiahnya menyampaikan bahwa Kualitas SDM dan Infrastruktur Kunci Utama Indonesia Emas 2045. Pembangunan SDM dan infrastruktur harus berjalan beriringan. Di titik manapun kemajuan infrastruktur sebuah negara, SDM merupakan kunci pembangunan lebih lanjut. Sementara Pembangunan SDM tanpa infrastruktur juga tidak berarti apa-apa.

Dalam mewujudkan infrastruktur yang tangguh dan kemanfaatan yang berkelanjutan dilakukan sejak penyusunan perencanaan yang membutuhkan berbagai kajian mendalam, seperti analisa daya dukung lingkungan, yang salah satunya bersumber dari data dan informasi geologi. khususnya Geologi Teknik. yang diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi permukaan dan bawah permukaan, yaitu melalui penyajian data dan informasi morfologi dan kemiringan lereng, jenis batuan, daya dukung tanah, jarak terhadap sesar., mikrozonasi, potensi likuifaksi, potensi longsor, potensi banjir, sumberdaya air tanah, serta jarak dari aliran sungai. Pembangunan infrastruktu di daerah kita dilakukan melalui pengarusutamaan infrastruktur tangguh melalui penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria,), penerapan SNI (Standar Nasional Indonesia). Hal-hal tersebut kami sadari sangat tehnikal, namun untuk mengingatkan OPD terkait agar memperhatikan prinsip-prinsip tersebut diatas.

Dalam perjanjian kinerja Dinas PUPR Tahun 2023 setidaknya ada tiga sasaran strategis yakni meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang. Pada tahun 2023, anggaran untuk Dinas PUPR mencapai Rp315.310.395.545,-. Permasalahan yang menjadi kendala Dinas PUPR

dalam menjalankan program antara lain terbatasnya anggaran infrastruktur dibandingkan banyaknya cakupan wilayah kerja, belum lengkapnya data dan informasi tata ruang wilayah, terbatasnya forum-forum diskusi, seminar, workshop tentang pengadaan tanah oleh pemerintah daerah, banyaknya jumlah alat berat yang sudah tidak layak jalan dan kurangnya sumber daya manusia. Menyikapi hal ini Pansus II menyampaikan bahwa Kabupaten Kampar memang merupakan daerah yang sangat luas, yang terdiri dari 21 Kecamatan dengan segala persoalan pembangunan di dalamnya. Kondisi anggaran kita memang tidak sepenuhnya mampu menyerap aspirasi masyarakat, namun tentunya kita semua dapat melaksanakannya dengan memperhatikan hal-hal yang prioritas. Mengenai persoalan tata ruang, diperlukan adanya langkah-langkah strategis oleh dinas terkait yang dapat dibahas bersama sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut.

Pada Tahun 2023. Dinas Perkim memiliki tiga sasaran strategis dan enam program. Permasalahan yang dihadapi pada bidang urusan ini antara lain terbatasnya dana bedah rumah, masih banyaknya pemukiman kumuh yang belum terjangkau. Pansus II mengetahui bahwa Dinas Perkim telah menyusun solusi untuk menyelesaikan permasalahan, sebagaimana juga dilakukan oleh OPD lainnya. Namun disarankan Dinas ini dapat menyusun solusi yang lebih konkrit dan detail sehingga dapat meyakinkan kita semua bahwa permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cara yang tepat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kampar masih perlu ditingkatkan. Koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak perlu ditingkatkan, karena permasalahan infrastruktur yang ada tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah daerah semata.

Perlu juga diperhatikan bersama, apakah pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh OPD lain dan Infrastruktur yang dibangun melalui dana desa apakah Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki mekanisme pengendalian dan pengawasan sehingga terintegrasi dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar. Seandainya

hal ini tidak dilakukan maka alokasi dana yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur tidak akan memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan kepada kemajuan Kabupaten Kampar itu sendiri.

Oleh karena itu, terkait dengan capaian bidang infrastruktur yang belum tuntas, kami meminta informasi dan penjelasan yang lebih lanjut. Meskipun kami saat ini sudah berada di pengujung masa pengabdian, namun setidaknya informasi yang dihimpun dapat menjadi masukan pada anggota DPRD Kampar masa bakti berikutnya.

Bertitik tolak dari paparan diatas melalui Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar Pansus II merekomendasikan sebagai berikut :

1. Perlu upaya yang lebih inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan penggalan potensi pajak daerah dan retribusi.
2. Rekapitulasi solusi konkrit beserta lampiran bukti dokumentasi dari upaya OPD dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.
3. Perlu peningkatan koordinasi dan komunikasi antara OPD dan dengan pihak terkait lainnya dalam mendukung terwujudnya sasaran strategis dalam setiap urusan pemerintahan, khususnya infrastuktur.
4. Pada penyusunan ini kami sarankan agar dicantumkan rekapitulasi yang sesuai antara narasi yang dijelaskan pada sub bagian capaian kinerja (yang tercantum pada halaman 79 sampai halaman 179) dengan data pada lampiran yang berisi target dan realisasi (yang tercantum pada halama 180 sampai 282) LKPj ini, sehingga memudahkan pansus dalam melakukan crosscheck.

3.3.2 Tanggapan dan Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Kampar

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rekomendasi DPRD Kabupaten Kampar Terhadap LKPj Bupati Kampar TA. 2023 yang Berkaitan Dengan Rekomendasi Urusan Pendidikan Khususnya yang Berkaitan Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Seluruh Peserta Didik di Kabupaten Kampar disetiap Jenjang (SD dan SMP) melalui Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Budaya Melayu Riau (BMR) Kabupaten Kampar yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.

A. Dasar Hukum Mulok BMR Kabupaten Kampar

1. Dasar Hukum Utama :
 - a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau ;
 - b. Peraturan Gubernur Riau Nomor : Kpts.7429/X/2023 tentang Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau pada Pendidikan Menengah di Provinsi Riau.
 - c. Peraturan Bupati Kampar Nomor 16 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kab. Kampar ;
2. Dasar Hukum Penunjang :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

B. Pembahasan / Analisis

Seperti yang sudah diketahui, pembelajaran Muatan Lokal Budaya bertujuan untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual di daerahnya; dan melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Penyelenggaraan pendidikan muatan lokal ini berbasis keunggulan lokal yang

bertujuan untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi, sosial dan budaya. Kabupaten Kampar melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sudah melaksanakan rancangan kegiatan yang mengarah pada tujuan tersebut.

Dimulai sejak tahun 2023, rangkaian kegiatan untuk pengembangan kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Kampar telah dilakukan, yaitu antara lain:

1. Pembuatan Kurikulum Muatan Lokal Kabupaten Kampar – Tahun 2023;
2. Penerbitan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kabupaten Kampar – Awal Tahun 2024;
3. Pembuatan Buku Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau Kabupaten Kampar Pegangan Siswa – Pertengahan Tahun 2024;
4. Pembuatan Buku Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau Kabupaten Kampar Pegangan Siswa – Akhir Tahun 2024, dan;
5. Pembuatan Modul Ajar Muatan Lokal Budaya Melayu Riau Kabupaten Kampar – Perencanaan Tahun 2025.

Kurikulum Muatan lokal Budaya Melayu Riau Kabupaten Kampar ini dikembangkan atas prinsip : kesesuaian dengan perkembangan peserta didik; keutuhan kompetensi; fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan kebermanfaatan untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global. Muatan lokal Budaya Melayu Riau terdiri atas nilai-nilai asas jatidiri, alam dan kearifan ekologis Melayu, bahasa (lisan dan tulisan) dan kesantunan, adat dan adab Melayu, sejarah Melayu, pakaian, kesenian Melayu, makanan, permainan rakyat, perubatan Melayu, teknologi Orang Melayu, ekonomi dan mata pencarian Melayu dan pemimpin dalam Budaya Melayu. Dengan mempelajari hal-hal tersebut dan penyesuaian cara adat budaya melayu mengajar dan mensosialisasikan kepada anak cucu melalui tutur kata dan perilaku sehari-hari baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat serta sekolah, diharapkan nilai-nilai yang tertuang dalam “Tunjuk Ajar Melayu” dapat diwujudkan dalam bertutur kata, cara berpakaian, dan adat pergaulan karena sangat sesuai untuk mendukung penguatan karakter yang

tercermin dalam Profil Pelajar Pancasila. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat melayu untuk mengimplementasikan integritas dengan cara Adat Budaya Melayu. Salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Kampar meningkatkan kembali pemahaman nilai Budaya Melayu Riau ini adalah dengan memberikan legalitas pembelajaran Budaya Melayu Riau. Rangkaian perangkat untuk melegalkan pembelajaran ini telah disusun, untuk dapat digunakan dan dipelajari oleh tenaga pendidik di wilayah kabupaten Kampar.

Kurikulum Muatan Lokal Budaya Melayu Riau Kabupaten Kampar ini sudah menerima masukan yang dihimpun oleh Lembaga Adat Melayu Riau dari berbagai pertemuan dan diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*), antara lain akademisi dari universitas-universitas yang ada di Riau, yaitu Universitas Riau, UIN SUSKA, BRIN, Prodi Pendidikan Budaya Melayu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning, MKKS, MGMP Budaya Melayu Riau, para praktisi, seniman, dan budayawan Riau. LAM Riau juga sudah mengundang Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan Riset dan Pendidikan Tinggi untuk mereview kurikulum mulok ini. Hal ini juga diteruskan sampai ke penyelesaian pembuatan Buku Ajar Muatan Lokal Budaya Melayu Riau Kabupaten Kampar baik Buku Siswa maupun Buku Pegangan Guru, yang memberikan penguatan lebih kepada Kabupaten Kampar bahwa perangkat ini sudah mumpuni untuk digunakan dipembelajaran tingkat satuan pendidikan.

Rangkaian kegiatan pengembangan kurikulum ini telah pun sampai pada titik akhir ditahun 2025, yaitu Pembuatan Modul Ajar Muatan Lokal Budaya Melayu Riau Kabupaten Kampar yang sedianya akan dilaksanakan pada triwulan kedua tahun 2025. Dengan lengkapnya perangkat ajar yang dimiliki Kabupaten Kampar, proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik di sekolah akan lebih terarah dan lebih mudah diimplementasikan, sehingga diharapkan pembelajaran dapat berhasil menggiring Pendidikan Kabupaten Kampar mencapai cita-cita membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak mulia.

BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

1. KUANTITAS PENDIDIK

Secara kuantitas kebutuhan guru ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar pada Tahun 2025 sebanyak 8399 Orang. Pada Tahun 2021 terdapat penambahan Guru melalui seleksi PPPK sebanyak 256 Orang, tahun 2024 penambahan Guru dari formasi PPPK sebanyak 3398 Orang dan terakhir pada Tahun 2024 terdapat formasi untuk Guru sebanyak 716 Orang, sehingga secara kuantitas sejak Tahun 2021 sampai Tahun 2025 sudah terdapat penambahan kuantitas Guru sebanyak 4370 Orang.

2. KUALITAS PENDIDIK

Kualitas Pendidik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar sejak Tahun 2021 sudah terdapat peningkatan dengan dilaksanakannya kegiatan yang menunjang program peningkatan kualitas pendidik sebagai berikut :

NO	TAHUN ANGGARAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH DANA	KETERANGAN	JENJANG
1	2021	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	564.012.288	Kegiatan CAKEP	SD
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2021	388.820.372	Video Pembelajaran Realisasi Rp. 179.211.122	SMP
		Penyiapan Dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2022	269.001.608	TOT Rp.50.467.490	
				MGMP Rp.148.223.968	
2	2022	1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	171.259.620	Pelatihan Pembuatan Vidio Pembelajaran (KKG)	SD
		Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2022	399.720.372	Video Pembelajaran Rp.190.111.122	SMP
3	2023	1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	431.914.400	Pelatihan Gasing (KKG)	SD
		1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	65.970.800	Sosialisasi Pemetaan	
		1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	43.899.000	tdk terlaksana	
		Penyiapan Dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2023	588.952.250	MGMP Rp.270.560.750	SMP
				TOT RP.269.107.820	
4	2024	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.528.055.300	Pelatihan Inklusi Rp.183.092.000,-	SD

				PMM Kepsek/Pengawas Rp.183.402.000,-	
				Peningkatan Kompetensi Kepsek Rp.334.379.100,-	
				Dewan Pendidikan Rp. 92.600.000,- (tdk terlaksana)	
				PPG PAI Rp.627.000.000,-	
		1.01.02.2.01.0041 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	567.482.700	PMM Guru Rp. 171.259.300,-	
				Pelatihan Gasing (KKG) Rp.396.223.400,-	
		1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75.999.100	Sosialisasi Pemetaan GTK	
		1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	74.999.900	tdk terlaksana	
		1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.004.305.600	Diklat Pustaka Rp.215.244.000,-	
				Diklat Laboratorium Rp.213.521.400,-	
				Pembekalan Gur PPPK Rp.1.013.226.300	
				Dana Hibah IGTKI Kab Kampar Rp.150.000.000,	
				Dana Hibah PGRI Kab Kampar Rp.250.000.000,	
		Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 2024	670.669.300	Diklat Pustaka Rp.178.029.000	SMP
				Manajemen Kepala Sekolah Rp.229.856.700	
				Pelatihan Guru BK Rp.231.622.600	
		Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 2024	562.009.800	TOT Mapel Matematika Rp.212.467.000	
				TOT Mapel Seni Budaya Rp.209.327.600	
				Manajemen Korwil Rp.146.562.100	

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Menanggapi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor : Kpts.2/DPRD/V/2024 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar T.A 2023. Bersama ini dapat disampaikan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar selaku koordinator penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus berupaya mengoptimalkan penerimaan PAD Kabupaten Kampar melalui berbagai kegiatan optimalisasi PAD atau inovasi sebagai berikut:

- 1) Telah membentuk lima (5) UPTD Pengelolaan Pajak Daerah melalui Peraturan Bupati Kampar Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembentukan UPTD Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Hal ini untuk memudahkan wajib pajak dalam mengurus dan membayar pajak daerah, serta memudahkan Bapenda untuk menjangkau objek pajak guna melakukan kegiatan Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, serta menggali sumber- sumber potensi PAD baru di wilayah Kabupaten Kampar.
- 2) Tahun 2025 Bapenda Kampar akan menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada SPPT PBB-P2 sesuai aturan yang berlaku, hal ini untuk menyesuaikan nilai tanah berdasarkan nilai ekonomis suatu wilayah, dimana akan berdampak pada peningkatan penerimaan PBB-P2.
- 3) Digitalisasi pengelolaan pajak daerah, dimana saat ini wajib pajak telah diberikan opsi untuk melakukan pengurusan pajak daerah secara online, demikian juga dengan pembayaran sudah diberikan opsi untuk dapat melakukan pembayaran secara digital maupun langsung ke bank persepsi (BRKS).
- 4) Melakukan uji petik ke lokasi usaha wajib pajak sesuai aturan yang berlaku, dengan melakukan himbauan/ sosialisasi serta penempelan stiker bagi wajib pajak yang tidak taat pajak.
- 5) Melakukan kegiatan operasi penertiban Bersama UPT Samsat Bapenda Provinsi Riau untuk merazia kendaraan plat Non BM agar dimutasi menjadi BM dengan kode F (Kampar).

- 6) Melakukan kegiatan Bersama PT.PLN untuk menginventarisir wilayah Gray Area (Wilayah perbatasan antara Kampar dengan Pekanbaru, Pelalawan, Rokan Hulu, Kuansing dan 50 Kota) untuk optimalisasi penerimaan tagihan listrik agar masuk ke Kasda Kampar.
- 7) Bersinergi dengan OPD Penghasil PAD dengan membentuk Tim SATGAS Percepatan PAD untuk mengoptimalkan Penerimaan PAD Kabupaten Kampar

DINAS SOSIAL

1. Dinas Sosial Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk melakukan pendataan dan/atau pembaharuan data terhadap Masyarakat Kurang Mampu.

Penjelasan/Jawaban :

Dalam rangka pembaharuan data yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap masyarakat kurang mampu sudah sesuai dengan arahan Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial Republik Indonesia bahwa setiap bulan terhitung tanggal 15 s/d 25 usulan yang masuk dari setiap Desa/Kelurahan dengan melakukan Musyawarah Desa /Musyawarah Kelurahan (Musdes/Muskel) ditambah dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) akan kita approve melalui SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation) dan diteruskan ke Pusdatin Kemensos. Usulan tersebut berupa usulan untuk masuk ke DTKS, Usulan Bansos PKH,BPNT/Sembako,PBI-JKN dan menggraduasi masyarakat yang sudah mampu.

2. Direkomendasikan untuk memberikan bantuan (sagu hati) kepada masyarakat yang tertimpa musibah, terutama musibah kebakaran. Selama ini, Masyarakat korban kebakaran hanya mendapatkan bantuan ala kadar berupa tenda dan bahan makan cepat saji. Ke depannya, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Sosial, setidaknya dapat memberikan bantuan minimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu rumah yang terbakar.

Penjelasan/Jawaban :

Kami telah melakukan upaya untuk mengusulkan anggaran khusus untuk masyarakat yang terdampak bencana melalui usulan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) namun belum terealisasi, berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, beberapa tahun terakhir ini Dinas Sosial Kabupaten Kampar hanya menyalurkan bantuan yang diberikan pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui pemerintah daerah Provinsi Riau (Dinas Sosial Provinsi Riau). Jika anggaran tersedia Dinas Sosial Kabupaten Kampar siap untuk menyalurkan bantuan bencana kepada korban melalui rekening yang bersangkutan, berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Pasal 27 yang dinilai melalui Tim Pengendalian, Pemantauan, dan Pelaksanaan Terhadap Bencana Alam dan Bencana Sosial (TPPPBABS). Untuk kedepannya pemberian bantuan bencana berpedoman kepada Rancangan Peraturan Bupati Kampar Nomor Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

1. Pemerintah Kabupaten Kampar dipandang perlu memberikan dukungan penganggaran yang cukup serta pemenuhan kebutuhan personel, sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar guna menunjang kegiatan-kegiatan operasional Satpol PP Kabupaten Kampar. Termasuk dengan pengadaan kendaraan operasional patroli personel Satpol PP untuk digunakan berpatroli di tiga jalur utama. Yaitu, masing-masing satu unit kendaraan operasional untuk setiap jalur, yaitu jalur Rantau Kampar Kiri, jalur Tengah (Tambang), dan jalur Tapung.

Tanggapan :

- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar terkait Sarana dan Prasarana benar adanya kami membutuhkan mobil patroli untuk 3 wilayah diantaranya jalur Rantau Kampar Kiri, jalur Tengah (Tambang), dan jalur Tapung karna di wilayah tersebut tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum sering terjadi sehingga anggota Sat Pol PP Kab. Kampar yang di tugaskan di Kecamatan dan di Desa tersebut kurang Optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat.
 - Selain kebutuhan Mobil Patroli Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar juga membutuhkan Mobil Box untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Marching Band yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja agar Alat-alat marching Band tidak rusak saat mengangkat atau memindahkan di setiap event atau Upacara.
 - Kebutuhan untuk Pemeliharaan dan Pergantian Alat Marching Band pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar yang mana alat – alat banyak yang sudah tua dan tidak maksimal untuk di gunakan di setiap event dan Upacara.
 - Satuan Polisi Pamong Praja juga membutuhkan dukungan Anggaran untuk Pelatihan Kesamaptaan dan Peningkatan Kompetensi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar agar dapat menciptakan Anggota Sat Pol PP Kab. Kampar yang handal dan Profesional dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi.
2. Satpol PP agar melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dalam upaya menciptakan kondisi daerah yang tenteram dan tertib guna tercegahnya gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kampar.

Tanggapan :

- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar selama ini sudah melakukan koordinasi dan Kerjasama lintas sektoral dengan TNI, Polri serta Dinas terkait seperti Patroli Sinergitas dan Operasi Tim Yustisi dalam Penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar juga melakukan Perjanjian Kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah perbatasan seperti Perjanjian Kerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertujuan untuk menjalin kerja sama dan mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di wilayah Perbatasan Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Satpol PP agar bersikap responsif terhadap informasi dan temuan dalam bentuk apapun termasuk dan tidak terbatas pada keramaian, kegiatan hiburan, dan penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Tanggapan :

- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sudah membuat Layanan Aduan Masyarakat seperti Call Center dan media sosial agar dapat merespon dengan cepat Laporan Aduan Masyarakat terkait Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta melakukan Patroli Rutin 24 Jam untuk menindak lanjuti Laporan Masyarakat atau pelanggaran yang di temui langsung oleh tim Patroli yang mengganggu Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Satuan Polisi Pamong Praja juga membuat Inovasi Daerah yaitu Pol PP Desa yang menugaskan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kampar di desa di wilayah Kabupaten Kampar bertujuan untuk merespon langsung dan menindak lanjuti laporan Masyarakat terkait gangguan Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah seperti kegiatan hiburan atau penyakit Masyarakat serta Pol PP Desa memberikan Informasi yang valid karna Anggota terjun dan melihat langsung kejadian atau pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan atau Desa

DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

a. bidang perpustakaan

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia kepastakaan dan kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar.

Tanggapan

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang terbesar di Propinsi Riau yakni seluas 11.298.28 KM2, dengan jumlah penduduknya sebanyak 860.379 jiwa. Mempunyai 21 Kecamatan dan 250 Kelurahan / Desa.

Untuk jumlah sebanyak itu tidak dapat semuanya terjangkau oleh Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar, karena jumlah Pustawakan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar hanya terdiri dari 7 orang Pustakawan (3 orang pustakawan melalui impasing dan 4 orang pustakawan yang penyetaraan /Sub Koordinator).

Sesuai dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional, dinyatakan Bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar masih sangat membutuhkan tambahan tenaga Pustakawan sehingga tujuan akhir meningkatkan Literasi dan Kesejahteraan Masyarakat Kampar bisa tercapai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar juga masih perlu memberikan pembekalan kepada para Pustakawan berupa Pelatihan atau bimbingan teknis guna untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada.

2. Mengoptimalkan pembudayaan kegemaran membaca yang dilakukan melalui keluarga, satuan Pendidikan dan Masyarakat yang difasilitasi melalui buku murah dan berkualitas. Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan Pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. Sedangkan pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan ditempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah dan bermutu. Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar,

optimalisasi pembudayaan gemar membaca dapat difasilitasi dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Tanggapan

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar telah memberikan fasilitasi kepada para peserta didik untuk membuat kegiatan dan belajar di Perpustakaan, antara lain memberikan layanan mendongeng dan bertutur bagi para murid Taman Kanak-kanak dan memberikan layanan belajar computer dasar bagi pelajar SD / MI.
- Pembudayaan Kegemaran membaca bagi Masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar telah mempunyai 2 (dua) buah Pojok Baca Digital (POCADI) yang merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan juga mempunyai 3 (tiga) buah mobil Perpustakaan Keliling yang juga merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebanyak 1 unit. Dalam Upaya peningkatan kegemaran membaca Masyarakat, kami sudah melaksanakan berbagai inovasi dalam Upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga minat baca dan indeks Pembangunan literasi Masyarakat meningkat tiap tahun nya. Adapun inovasinya antara lain Gerakan Literasi untuk kesejahteraan Kampar Maju (Geliat Kamu), One village one library (satu desa satu perpustakaan), Gelis (Gerakan Literasi Sekolah), Gesa Pena (Gerakan seribu penulis Kampar), Gerbangku (Gerakan menyumbang buku) Porat I Sakti Kampar (aplikasi buku digital /ebook yang terintegrasi dengan medsos) dispersip dan terafiliasi dengan perpustakaan sekolah, desa dan perguruan tinggi).
- Kabupaten Kampar pada tahun 2024 telah mendapatkan bantuan bahan bacaan bermutu dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebanyak 37.000 eksemplar bahan bacaan yang tersebar di 34 Perpustakaan Desa dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar masih belum bisa memberikan sarana dan prasarana yang lengkap dikarenakan masih minimnya anggaran yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Kampar, salah satu contohnya, masih belum memiliki ruang baca anak yang layak sehingga anak-anak yang datang ke perpustakaan masih sangat enggan. Dan juga minimnya jumlah SDM yang ditempatkan pada dinas perpustakaan tersebut.

3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk mendorong tumbuhnya serta memberikan pembinaan terhadap Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca untuk menunjang kebudayaan gemar membaca di Kabupaten Kampar.

Tanggapan.

Saat ini Kabupaten Kampar telah memiliki 1.179 Perpustakaan, baik Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Taman Bacaan Masyarakat. Dengan jumlah perpustakaan sebanyak ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar masih belum bisa memberikan pembinaan dan pemantauan dengan baik kepada semua Perpustakaan tersebut dikarenakan keterbatasan jumlah personal, SDM serjana perpustakaan dan anggaran yang tersedia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kampar masih sangat terbatas. Untuk itu kami menyarankan agar dapat menambah personil pegawai ASN pustakawan yg berkualifikasi S1 ilmu perpustakaan. Akan tetapi secara umum Kabupaten Kampar masi menjadi urutan IPLM tertinggi dan TGM menduduki urutan 2 di propinsi Riau berdasarkan survey perpustakaan Nasional.

b. bidang kearsipan

Dengan adanya digitalisasi arsip memberikan banyak manfaat terhadap arsip dinamis maupun arsip statis, diantaranya :

- 1) Terobosan digitalisasi yang telah dilaksanakan oleh bidang kearsipan didalam arsip dinamis surat menyurat dengan telah memakai aplikasi SRIKANDI(sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi). Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan

tata Kelola pemerintahan berbasis elektronik. Berdasarkan pada peraturan pemerintahan dalam negeri nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan telah di sahkannya Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2024. Aplikasi SRIKANDI ini juga telah dipergunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kampar, sehingga mempermudah dalam membuat naskah dan proses pengiriman keluar, menerima serta menjadwalkan naskah yang telah diterima sehingga dapat mendisposisikan naskah yang diterima. Penggunaan aplikasi ini mewujudkan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kearsipan yang terpadu.

- 2) Penerapan digitalisasi dalam arsip statis merupakan pemindahan arsip konvensional (kertas) kedalam media elektronik dengan melakukan alih media arsip dari manual ke digital. hal ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi, mempercepat akses, memudahkan pengambilan keputusan sekaligus mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang rentan terhadap kerusakan. Adapun manfaat dari digitalisasi ini antara lain :
 - a. Menghemat biaya : menghilangkan biaya penyimpanan fisik, percetakan, pengiriman serta pengelolaan dokumen secara manual.
 - b. Menjaga kerahasiaan arsip
 - c. Menjaga kelestarian, melindungi arsip dari kerusakan akibat bencana alam, serangga, air, sinar matahari, jamur dan kutu

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Tanggapan:

- 1) Terkait Rekomendasi inovasi pemberian dan fasilitas layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital, hal ini RSUD Bangkinang sedang merencanakan penyempurnaan Web Site dan Media Sosial, namun hal ini perlu dukungan terhadap anggaran belanja promosi kesehatan agar dapat mengaplikasikan rencana yang telah di buat agar dapat mewujudkannya.
- 2) Terkait Rekomendasi Pansus I DPRD Kampar Terkait memfungsikan sesegera mungkin Gedung Baru RSUD Bangkinang yang telah di bangun, hal

ini RSUD Bangkinang pada pertengahan tahun 2025 ini siap mengfungsikan Gedung Instalasi Rawat Inap Kelas III RSUD Bangkinang, namun hal ini perlu dukungan terhadap anggaran belanja mubiler untuk melengkapi pelayanan pada Gedung Instalasi Rawat Inap Kelas III agar dapat beroperasi dan melayani masyarakat.

DINAS KESEHATAN

- 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk memfungsikan puskesmas-puskesmas yang sudah dibangun, terutama puskesmas Kuntu yang sudah tersedia alat kesehatannya.

Tanggapan

Puskesmas Kuntu merupakan pengembangan dari Puskemas Lipat kain yang berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri. Pengembangan ini dilakukan atas dasar mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2023 akhir, gedung puskesmas selesai dibangun, selanjutnya persiapan tahapan penambahan Unit Pelayanan Teknis (UPT), pembuatan izin operasional dan registrasi Puskesmas di Kementerian Kesehatan. Saat ini progres Puskesmas Kuntu sudah memasuki tahap izin operasional, Insyaallah di Bulan April 2025 Puskesmas sudah dapat beroperasi untuk memberikan layanan kesehatan.

- 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar direkomendasikan untuk mensosialisasikan Program Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan jaminan Kesehatan Kampar melaju (JKKM) kepada masyarakat serta memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama yang kurang mampu dalam pengurusannya.

Tanggapan :

Dinas sudah melakukan sosialisasi Program Universal Health Coverage (UHC) melalui baliho dan poster di setiap puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu), dan untuk mendapatkan layanan Program Universal Health Coverage (UHC) tersebut dengan syarat:

- Memiliki KTP dan KK Kampar
- Masyarakat kampar yang belum memiliki Jaminan Kesehatan;
- Peserta BPJS mandiri yang menunggak akibat tidak mampu membayar tagihan;
- Bersedia dirawat inap di kelas 3.

Masyarakat akan didaftarkan pada Program Universal Health Coverage (UHC) apabila pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit dan Dokter Puskesmas selanjutnya PIC Puskesmas akan mengusulkan Universal Health Coverage (UHC) ke Dinas Kesehatan dan PIC Dinas Kesehatan akan mendaftarkan pasien tersebut ke BPJS. Untuk pasien dirawat di Rumah Sakit karena emergency, PIC Rumah Sakit yang akan mengusulkan Universal Health Coverage (UHC) ke Dinas Kesehatan dan PIC Dinas Kesehatan yang selanjutnya mendaftarkan ke BPJS pasien tersebut sampai aktif.

- 3) Perlu dilakukan penguatan pengadvokasian terhadap Pemerintah Desa secara terpadu dan berkesinambungan sebagai bagian upaya memelihara derajat kesehatan masyarakat pedesaan di Kabupaten Kampar.

Tanggapan

Dinas Kesehatan baik secara langsung, maupun melalui UPT Puskesmas telah melakukan advokasi terkait program kesehatan baik dalam pelayanan kesehatan rutin yang bersifat upaya promotif dan preventif, maupun program Prioritas Nasional seperti pencegahan, pengendalian dan penanggulangan stunting.

**DINAS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPKBP3A)**

Tanggapan :

1. DPPKBP3A sudah menjalin kerjasama dengan OPD terkait dalam hal eksplotasi anak, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan sebagainya dengan cara membentuk PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), Satgas PKDRT (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) dan pembentukan Forum Puspa. Pembentukan ini dilakukan setelah diberikan sosialisasi.

Sosialisasi ini bekerjasama dengan Dinas PMD terkait dengan dana desa. Kegiatan ini baru terbentuk di 63 desa, karena keterbatasan anggaran, maka dilakukan kerjasama dengan menggunakan Dana Desa. Untuk penanganan dan penyelesaian kasus bersama UPT pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Untuk rumah aman dan rumah singgah belum ada.

Untuk penanganan kasus dan penyelesaian dibutuhkan mobil operasional. mobil operasional adalah mobil perlindungan, hanya karena wilayah Kabupaten Kampar luas dan ada wilayah yg sulit dijangkau yg tidak bisa dilewati oleh mobil perlindungan, diperlukan mobil operasional yg double garden.

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tanggapan :

Terhadap rekomendasi pansus II Bidang Keuangan, terkait Belanja Daerah, disampaikan bahwa terhadap permasalahan yang terjadi karena kesalahan faktor input kode rekening belanja akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD. Permasalahan kesalahan input, selain memang terjadi akibat sumber daya manusia yang belum memahami sepenuhnya terhadap peraturan penganggaran dan perubahannya, juga disebabkan oleh proses waktu untuk input rencana anggaran dan pembahasannya tidak mencukupi atau terlalu singkat. Untuk itu hal ini akan menjadi perhatian nantinya dalam penyusunan anggaran belanja.

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Prinsip-prinsip tugas pembantuan adalah:

- 1) Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan desa dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah pusat atau yang memberikan tugas pembantuan.
- 2) Penyelenggaraan tugas pembantuan dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN. Sehingga tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- 3) Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari APBD dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 4) Tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang berlaku.

- 5) Pemerintah daerah memberitahukan adanya tugas pembantuan kepada DPRD dan pemerintah desa memberitahukannya kepada badan perwakilan desa.
- 6) Pemerintah daerah dan desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas pembantuan kepada departemen/lembaga pemerintah non departemen yang menugaskannya.
- 7) Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN. Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran penerimaan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi APBN.
- 8) Dalam hal terdapat saldo anggaran pelaksanaan tugas pembantuan, maka saldo tersebut disetor ke kas negara.
- 9) Semua kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menggambarkan bahwa Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, pada ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, selanjutnya pada ayat (2) Pemerintah provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi dan ayat (3) Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan APBD I dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

4.1.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kampar tidak menerima Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi Riau maupun dari Pemerintah.

4.1.2 Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Dalam percepatan pembangunan hingga ke tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Kampar juga memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Desa berupa Belanja bantuan Keuangan yang untuk penggunaan sebagai berikut :

1. Dana Desa

- 1) Dana Desa pasal 3 PP Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dalam APBN, memanfaatkan bahwa Pemerintah menganggarkan Dana desa secara Nasional dalam APBN setiap Tahun.
- 2) Tujuan pengalokasian Dana Desa (DD)
Tujuan Pengalokasian Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan, dengan prioritas Penggunaan untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Program Pemulihan ekonomi, berupa perlindungan Sosial dan Penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25%.
 - b. Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3%.
 - c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%
 - d. Program sektor prioritas lainnya.
- 3) Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024, dimana *Alokasi Dana Desa (ADD)* di Kabupaten Kampar berjumlah **Rp. 173.960.073.100,-** (*Seratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah*) dan *Dana Desa (DD)* sebesar **Rp. 234.396.785.000,-** (*Dua ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus*

sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang telah disalurkan **100%** dialokasikan untuk 242 Desa se Kabupaten Kampar.

Perhitungan Dana Desa dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

Pagu Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut :

- a. 55% (Lima puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (Sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 10% (Sepuluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dimaksudkan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :

- a. Peningkatan Kualitas Hidup
- b. Peningkatan kesejahteraan
- c. Penanggulangan kemiskinan
- d. Peningkatan pelayanan publik

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tanggal 30 Mei 2014 dan keputusan 4 menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Desa tertinggal, imigrasi, menteri keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas) menerangkan bahwa ADD adalah dana yang diberikan Kepada Desa yang berasal dari Daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota (pasal 72 ayat 4 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005), dimana berdasarkan Undang- undang Nomor tersebut pasal 72 ayat 4 “ Desa memperoleh jabatan ADD”. ADD yang diberikan ke Desa merupakan hak Desa yang dapat digunakan oleh Desa unuk memperkuat pembangunan, Pemerintahan dan Operasional Pemerintahan Desa.

Tujuan diberikannya ADD ini adalah untuk memperkuat Kemampuan Keuangan Desa, memperkuat otonomi desa dalam membiayai jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan Urusan Sosial Kemasyarakatan serta untuk mewujudkan kesejahteraan dan demokrasi di Desa. Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun 2024 melalui Peraturan Bupati Kampar Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024, telah membagikan anggaran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada 242 Desa dengan jumlah total berjumlah **Rp. 173.960.073.100,-** (*Seratus tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah*).

Perhitungan Alokasi Dana Desa per Desa di hitung dengan rumusan 60 % dibagi merata dan 40 % dari Anggaran Dana Desa di hitung dengan bobot sebagai berikut :

- a. 55% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 25% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 10% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Manfaat ADD bagi Desa adalah :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Belanja tak terduga.

Dalam memanfaatkan dan menggunakan ADD ini, Pemerintah Desa menggunakan rumus 60% untuk Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan 40% dari ADD di gunakan untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja tak terduga.

Dalam APBDesa setiap tahunnya dilakukan perhitungan 30% Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan 70% dari APBDes digunakan untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja tak terduga. Dalam pengelolaan ADD adalah pada umumnya Pemerintah Desa mengalami perubahan yang signifikan dalam pegelolaan keuangan yaitu menjadi penanggung jawab penuh dan sekaligus pengguna anggaran yang dituangkan dalam APBDesa, dimana salah satu sumbernya adalah ADD, permasalahan lainnya dibidang pengelolaan administrasi baik dalam penyusunan RKA dan menyiapkan SPJ nya, dan pelaksanaan kegiatan dilapangan (Pemberdayaan Masyarakat), serta keterbatasan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten. Kelemahan Perangkat dan Aparatur Pemerintah Desa tersebut mejadi sumber kelemahan administrasi desa. Inilah masalah yang paling sering terjadi sehingga menjadi titik lemah bagi kelancaran pencairan dana maupun pertanggung jawaban Kepala Desa.

Solusi dan langkah yang dilaksanakan adalah melakukan bimbingan teknis Kepada Perangkat Desa (Sekretaris Desa) dan Kaur Desa baik melalui pelatihan dan Konsultasi yang diharapkan ke depannya segala kegiatan masih dapat terlaksana, meskipun dengan anggaran dan ruang gerak yang terbatas baik dari Dinas terkait maupun dari Pemerintahan Desa beserta jajarannya, sehingga monitoring terhadap pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa secara rutin dan berkala tetap terlaksana.

Sedangkan dampak yang dapat dirasakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dengan adanya Program Dana ADD ini adalah secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa lebih berdaya guna dan efektif serta meningkatnya pembangunan infrastruktur Desa

3. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 23 Maret 2024, Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024, DBH Pajak Daerah dengan jumlah ***Rp. 16.747.655.800,-*** (*Enam belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah*), dan sudah disalurkan 100%, sedangkan DBH Retribusi dengan jumlah sebesar ***Rp. 1.076.699.866,-*** (*Satu milyar tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*).

4. BKK Kabupaten Ambulance

Anggaran BKK Ambulance Pada Tahun Anggaran 2023 sebesar ***Rp. 735.000.000,-*** (*Tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah*) yang telah disalurkan sebesar **100%** ke 242 Desa yang tersebar di Kabupaten Kampar, khusus untuk Desa Ludai dan Desa Dua Sepakat, mereka meminta masing-masing dua unit yang berbeda yakni Ambulance Air dan Mobil Ambulance biasa.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar tiap tahun telah melaksanakan Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Barang/jasa khususnya pengadaan Mobil Ambulance Desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk selalu memberikan pemahaman agar aparat desa atau kelurahan semakin memahami proses pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan kendaraan kesehatan atau mobil Ambulance Desa sesuai aturan yang berlaku. Untuk Spesifikasi kendaraan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar berkoordinasi dengan bidang kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Bagian Administrasi Pembangunan, dan PBJ. Hal ini kita

lakukan agar desa-desa yang menganggarkan pengadaan Mobil Ambulance, harus sesuai dengan aturan pengadaan barang yang berlaku yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh Ambulance, seperti Brangkar, Oksigen, Infus, lampu sirene, lampu penerangan dan fasilitas lainnya sesuai SOP.

Daerah yang jauh dari ibukota Kabupaten dan Ibukota Provinsi diharapkan memanfaatkan Ambulance sesuai dengan fungsinya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk transportasi layanan kesehatan masyarakat dan untuk memaksimalkan pemanfaatan transportasi ini dengan selalu berkoodinasi dengan tenaga kesehatan dan Puskesmas terdekat.

5. BKK Provinsi Riau yang bersumber dari APBD

Anggaran BKK Provinsi Riau Pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 45.526.198.000,-** (*Empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) yang telah disalurkan sebesar **100%** kepada 242 (Dua Ratus Empat Puluh Dua), yang di dibagi berdasarkan Juknis yang disampaikan.

REALISASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

No	SUMBER DANA	PAGU	JML Desa	REALISASI PENYALURAN		SISA BLM SALUR	
				JUMLAH	Persentase	Jumlah	Persen tase
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DANA DESA	234.396.785.000	242	234.396.785.000	100%	-	0%
2	ALOKASI DANA DESA	173.960.073.100	242	173.960.073.100	100%	-	0%
3	DBH PAJAK DAERAH	16.747.655.800	242	16.747.655.800	100%	-	0%
4	DBH RETRIBUSI DAERAH	1.076.699.866	242	1.076.699.866	100%	-	0%
5	BKK KABUPATEN INTERPRETASI	-	-	-	100%	-	0%
6	BKK KABUPATEN AMBULANCE	735.000.000	4	735.000.000	100%	-	0%
7	BKK PROVINSI	46.526.198.000	242	46.526.198.000	100%	-	0%
JUMLAH 2024		473.442.411.766		473.442.411.766	100%	-	0%

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan yang dihadapi adalah Pemerintah Kabupaten Kampar belum mampu memenuhi ADD sebesar 10 % dari Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai dengan yang telah di amanahkan oleh Undang-Undang Desa Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam pengelolaan ADD adalah pada umumnya Pemerintah Desa mengalami perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan yaitu menjadi penanggung jawab penuh dan sekaligus pengguna anggaran yang dituangkan dalam APBDesa, dimana salah satu sumbernya adalah ADD, permasalahan lainnya dibidang pengelolaan administrasi baik dalam penyusunan RKA dan menyiapkan SPJ nya, dan pelaksanaan kegiatan dilapangan (Pemberdayaan Masyarakat), serta keterbatasan pengawasan oleh Pemeintah Kabupaten. Kelemahan Perangkat dan Aparatur Pemerintah Desa tersebut mejadi sumber kelemahan administrasi desa. Inilah masalah yang paling sering terjadi sehingga menjadi titik lemah bagi kelancaran pencairan dana maupun pertanggungjawaban Kepala Desa.

Solusi dan langkah yang dilaksanakan adalah melakukan bimbingan teknis Kepala Perangkat Desa (Sekretaris Desa) dan Bendaharawan Desa melaluin pelatihan dan Konsultastif, setra melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemerintahan desa secara rutin dan berkala. Sedangkan dampak yang dapat dirasakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dengan adanya Program Dana ADD ini adalah secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintah Desa lebih berdayaguna dan efektif serta meningkatnya pembangunan infrastruktur Desa.

1. MENERIMA PENGHARGAAN KATEGORI BAIK DALAM PENGISI JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) TAHUN 2023 DARI KOMISI APARATUR SIPIL NEGERA (KASN) PADA TANGGAL 27 FEBRUARI 2024.
2. MENERIMA SERTIFIKAT BEBAS FRAMBUSIA DARI MENTERI KESEHATAN RI SAAT MENGHADIRI ACARA PUNCAK PERINGATAN HARI NEGLECTED TROPICAL DISEASES (NTDS) SE-DUNIA TAHUN 2024 PADA TANGGAL 6 MARET 2024.
3. KABUPATEN KAMPAR RAIH PENGHARGAAN TERBAIK I GERAKAN UNMEED NET DI PROVINSI RIAU TANGGAL 02 APRIL 2024.
4. PJ GUBERNUR RIAU APRESIASI PENCAPAIAN STUNTING KABUPATEN KAMPAR TURUN MENJADI 7,60% TANGGAL 29 APRIL 2024.
5. KABUPATEN KAMPAR SABET PENGHARGAAN TERBAIK I TINGKAT PROVINSI RIAU KATEGORI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2024 TANGGAL 03 MEI 2024.
6. KAMPAR TERIMA OPINI WTP KE 8 KALI BERTURUT-TURUT DARI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI RIAU TANGGAL 22 MEI 2024.
7. KABUPATEN KAMPAR RAIH JUARA 2 DALAM PENILAIAN AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TINGKAT PROVINSI RIAU TAHUN 2024 TANGGAL 31 MEI 2024.
8. DATA INFLASI DI BULAN MEI 2024 DARI BPS, KAB.KAMPAR MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR -0,27% TANGGAL 03 JUNI 2024 DAN INFLASI KAMPAR BULANAN DAN TAHUN KALENDER MENGALAMI PENURUNAN YANG SIGNIFIKAN TANGGAL 04 JUNI 2024.
9. MERESMIKAN MALL ELAYANAN PUBLIK (MPP) KAMPAR TANGGAL 10 JUNI 2024
10. DPRD KAMPAR APRESIASI DELAPAN KALI PEMKAB KAMPAR TERIMA WTP DARI BPK RI TANGGAL 10 JUNI 2024.
11. PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TERIMA DUA PENGHARGAAN DARI KEMENKEU RI TANGGAL 11 JUNI 2024.
12. KABUPATEN KAMPAR MENERIMA PENGHARGAAN DARI BPJS KETENAGAKERJAAN TANGGAL 13 JUNI 2024.
13. MERESMIKAN KANTOR UP3 PLN KUOK TANGGAL 26 JUNI 2024.

14. KABUPATEN KAMPAR RAIH PENGHARGAAN BANGGA KENCANA DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING 2024 TANGGAL 29 JUNI 2024.
15. KABUPATEN KAMPAR TERIMA PENGHARGAAN TERBAIK II KINERJA PELAKSANAAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2023 TANGGAL 19 JULI 2024.
16. MEMBUKA DAN RESMIKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI ANGKATAN 1 TAHUN 2024 PADA TANGGAL 21 AGUSTUS 2024.
17. KABUPATEN KAMPAR RAIH PENGHARGAAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH TANGGAL 7 NOVEMBER 2024.
18. KABUPATEN KAMPAR MENERIMA PENGHARGAAN APRESIASI INSAN KESELAMATAN JALAN DARI MENTERI PERHUBUNGAN TANGGAL 10 NOVEMBER 2024.
19. KABUPATEN KAMPAR TERIMA PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI AWARD 2024 PADA TANGGAL 12 NOVEMBER 2024.
20. KABUPATEN KAMPAR RAIH PENGHARGAAN SHIDAKARYA TANGGAL 20 NOVEMBER 2024.
21. MERESMIKAN KAWASAN INDUSTRI PEPUTRA KAMPAR (KIPK) TANGGAL 23 NOVEMBER 2024.
22. MEMBUKA DAN MERESMIKAN GALERI DAN RUMAH EDUKASI KELOR ARU PADA TANGGAL 25 NOVEMBER 2024.
23. PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TERIMA DIPADANA DAN TKD SECARA DIGITAL PADA TANGGAL 16 DESEMBER 2024
24. PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TERIMA PENGHARGAAN KEPALA DAERAH INSPIRATIF PADA GRAND LAUNCHING PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU PADA TANGGAL 10 JANUARI 2025.
25. PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR PECAHKAN REKOR MURI 1.373 SAJIAN GULAI IKAN SALAI PATIN PADA TANGGAL 02 FEBRUARI 2025.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2024 yang mencakup Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah, Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah, Capaian Tugas Pembantuan dan Penugasan. Dari Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan tersebut, pada laporan ini dapat dilihat hasil capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi masalah. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2024 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya, disamping masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Bupati Kampar kepada DPRD Kabupaten Kampar secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di Tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, Legislatif (DPRD) dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen kepentingan dan masyarakat Kabupaten Kampar yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga

kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Berbagai keberhasilan pembangunan daerah memotivasi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk semakin meningkatkan kinerja pembangunan. Namun demikian, kita juga menyadari bahwa masih ada berbagai kelemahan yang perlu menjadi perhatian dan penyelesaian untuk tahun kedepan. Kelemahan-kelemahan tersebut akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk diperbaiki di masa selanjutnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara maksimal dapat menggambarkan kondisi riil yang sebenarnya, namun demikian melalui Laporan ini dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan program kegiatan dalam tahun 2024 termasuk didalamnya beberapa keberhasilan dan kelemahannya yang dihadapi. Akhirnya, semoga laporan ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Kampar kepada DPRD Kabupaten Kampar dan *stakeholder's* lainnya dan sebagai sumber informasi untuk pengambilan keputusan di masa men datang, terima kasih. Insya Allah kita semua dapat mewujudkan Visi Kabupaten Kampar yaitu “**Kabupaten Kampar yang Agamis, Berbudaya, Maju dan dan Berkelanjutan**”